PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021-2026

Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera, Berkepribadian
Dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 - 2026, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;

b. bahwa ditetapkannya kebijakan di tingkat pusat serta tingkat daerah, berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penyelarasan;

Dipindai dengan CamScanner

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
   e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
   g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

Dipindai dengan CamScanner

i. Bab IX Penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas, Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

(5) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 desember 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
b. terjadi perubahan yang mendasar yaitu mencakup terjadinya perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, mencakup :

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan struktur urusan yang menjadi

Dipindai dengan CamScanner

kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah antara lain :

1. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Kepmendagri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG SELATAN NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER ----------

DAFTAR ISI ---------- i

DAFTAR TABEL ---------- iii

DAFTAR GAMBAR ---------- xii

BAB I PENDAHULUAN ---------- I-1

1.1. Latar Belakang ---------- I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ---------- I-7
1.4. Maksud dan Tujuan ---------- I-9
1.5. Sistematika Penulisan ---------- I-10

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ---------- II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarkaat ---------- II-28
2.3. Aspek Pelayanan Umum ---------- II-43
2.4. Aspek Daya Saing ---------- II-86
2.5. Evaluasi Capaian Kinerja ---------- II-115
2.6. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ----- II-130

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ---------- III-1

3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional ---------- III-1
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah ---------- III-2
3.3. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu ---------- III-3
3.4. Kinerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2021 ---------- III-24
3.5. Kerangka Pendanaan ---------- III-29

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ---------- IV-1

4.1. Permasalahan Pembangunan ---------- IV-1
4.2. Isu Strategis ---------- IV-29

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN ---------- V-1

5.1. Visi ---------- V-1

5.2. Misi ---------- V-3

5.3. Tujuan dan Sasaran ---------- V-6

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH ---------- VI-1

6.1. Strategi Pembangunan Daerah ---------- VI-1

6.2. Arah Kebijakan ---------- VI-3

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah ---------- VI-6

6.4. Strategi Penanggulangan dan Dampak Pandemi Covid 19 --------- VI-12

6.5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan ---------- VI-15

6.6. Strategi Percepatan Penurunan Stunting ---------- VI-16

6.7. Program Pembangunan Daerah ---------- VI-18

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ---------- VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ---------- VIII-1

BAB IX PENUTUP ---------- IX-1

9.1. Pedoman Transisi ---------- IX-1

9.2. Kaidah Pelaksanaan ---------- IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Desa Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021 ----------II-2

Tabel 2.2. Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan ---II-2

Tabel 2.3. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan ----II-4

Tabel 2.4. Kondisi Bentang Alam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan --------II-5

Tabel 2.5. Luas Penggunaan Lahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan ----------II-10

Tabel 2.6. Luas dan Lokasi Budidaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ---II-12

Tabel 2.7. Luas dan Lokasi Kawasan Lindung
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ----------II-14

Tabel 2.8. Jumlah Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Pisang
Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 --------II-17

Tabel 2.9. Rekapitulasi Data Populasi Ternak
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-19

Tabel 2.10. Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ----------II-20

Tabel 2.11. Produksi Perikanan Tangkap
Kab. Bolaang Mongondow selatan 2021 ----------II-22

Tabel 2.12. Potensi Bahan Galian dan Mineral di
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 ----------II-24

Tabel 2.13. Jumlah Desa yang Mengalami Banjir Menurut Kecamatan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2021 ----------II-25

Tabel 2.14. Indikator Kependudukan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-27

Tabel 2.15. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2021 ----------II-27

Tabel 2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)----------II-28

Tabel 2.17. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar
Harga Kostan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) ----------II-29
Tabel 2.18 Distribusi Persentase PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Lapangan
Usaha (Persen) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 --II-30
Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Persen) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-31
Tabel 2.20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 (Persen) ----------II-32
Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021 ----------II-34
Tabel 2.22 Perbandingan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 ----------II-35
Tabel 2.23. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 ---------II-37
Tabel 2.24 Indikator Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021 ----------II-38
Tabel 2.25 Perbandingan Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 (%) ----------II-40
Tabel 2.26 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 ----------II-43
Tabel 2.27 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2021 ---------II-43
Tabel 2.28 Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-47
Tabel 2.29 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-47
Tabel 2.30 Angka Putus Sekolah Dasar Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-48
Tabel 2.31 Angka Kelulusan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-48

Tabel 2.32 Angka Melanjutkan Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-48
Tabel 2.33 Indeks Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-49
Tabel 2.34 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
Kab. Bolang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-50
Tabel 2.35 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-51
Tabel 2.36 Prevalensi Bayi Stunting Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-51
Tabel 2.37 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2016-2021 ----------II-52
Tabel 2.38 Rasio RS, Puskesmas, Pustu Jumlah Penduduk
Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-52
Tabel 2.39 Perkembangan Kondisi Jalan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-53
Tabel 2.40 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2021 --------II-54
Tabel 2.41 Perkembangan Panjang dan Jumlah Jembatan Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-54
Tabel 2.42 Cakupan Pelayanan Persampahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-54
Tabel 2.43 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi
Layak Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2021 ----------II-55
Tabel 2.44 Capaian SPM Bidang Pemukiman dan Perumahan Rakyat
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-56
Tabel 2.45 Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-57

Tabel 2.46 Jumlah PMKS dan PMKS yang Memperoleh Bantuan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-58
Tabel 2.47 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-58
Tabel 2.48 Rasio Penduduk yang Bekerja Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-60
Tabel 2.49 IPG dan IDG Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021-----II-61
Tabel 2.50 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-61
Tabel 2.51 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-62
Tabel 2.52 Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak ----------II-62
Tabel 2.53 Ketersediaan Pangan Utama dan Skor Pola Harapan Pangan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021----------II-63
Tabel 2.54 Luas Lahan Bersertifikat Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-64
Tabel 2.55 Kinerja Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-64
Tabel 2.56 Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab, Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-65
Tabel 2.57 Perkembangan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2021 ----------II-66
Tabel 2.58 PKK, LPM dan Indeks Desa Membangun
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-66
Tabel 2.59 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-67
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-67
Tabel 2.61 Perkembangan Penduduk Pra Sejahtera Menjadi Pra Sejahtera I
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-68

Tabel 2.62 Jumlah Terminal dan Pelabuhan Laut
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-68
Tabel 2.63 Status Website dan Cakupan Jangkauan TIK
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-69
Tabel 2.64 Perkembangan Koperasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-69
Tabel 2.65 Jumlah Wirausaha Baru Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016- 2021 ----------II-70
Tabel 2.66 Pertumbuhan UMKM Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-70
Tabel 2.67 Perkembangan Investasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-70
Tabel 2.68 Perkembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2016-2021 ----------II-71
Tabel 2.69 Penyelenggaraan dan Sarana Seni dan Budaya
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-71
Tabel 2.70 Event Seni dan Budaya Kab. Bolaang Mongondow Selatan ----------II-72
Tabel 2.71 Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-72
Tabel 2.72 Data Statistik Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 --II-73
Tabel 2.73 Perkembangan Perpustakaan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-73
Tabel 2.74 Kearsipan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 -------II-74
Tabel 2.75 Kondisi Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-75
Tabel 2.76 Perkembangan Kunjungan Wisata
di Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-76
Tabel 2.77 Kontribusi Pariwisata terhadap PAD
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-76

Tabel 2.78 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-77
Tabel 2.79 Kinerja Perdagangan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-78
Tabel 2.80 Pertumbuhan Industri Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-79
Tabel 2.81 Pembagian Satuan Kawasan Pengembangan di Rencana
Kawasan Transmigrasi (RKT) Pinolosian ----------II-79
Tabel 2.82 Proyeksi Penduduk Kawasan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019-2034 ----------II-80
Tabel 2.83 Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-81
Tabel 2.84 Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2019 ----------II-81
Tabel 2.85 Jumlah Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda
Tahun 2016-2021 ----------II-82
Tabel 2.86 Dokumen Perencanaan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-83
Tabel 2.87 Perkembangan APBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-84
Tabel 2.88 Administrasi Kepegawaian Kab.Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-84
Tabel 2.89 Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Organisasi
Perangkat Daerah Oleh APIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-85
Tabel 2.90 Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Tahun 2016-2021 ----------II-86
Tabel 2.91 Persentase Ormas Aktif Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-86

Tabel 2.92 Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-87
Tabel 2.93 Ketersediaan Daya Listrik Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ----------II-89
Tabel 2.94 Panjang Jalan yang dilalui Roda 4 (empat) Tahun 2016-2021 ----------II-89
Tabel 2.95 Arus Penumpang Angkutan Umum Kab. Bolaang 2016-2021 ----------II-90
Tabel 2.96 Jumlah Tindak Pidana Kriminalitas
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-91
Tabel 2.97 Jumlah Jenis Perizinan *One Day Service*
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------II-91
Tabel 2.98 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2016-2021 ----------II-92
Tabel 2.99 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016- 2021 ----------II-92
Tabel 2.100 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 (data awal) dan 2022 --------II-115
Tabel 2.101 Capaian Indikator Kinera Utama (IKU) Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 (data awal) dan 2022 --------II-117
Tabel 2.102 Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ---------- II-114
Tabel 2.103 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Semester I Tahun 2022 -------- II-122
Tabel 2.104 Capaian Indikator TPB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
terhadap Target Nasional Perpres 59 Tahun 2017 ---------- II-128
Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------III-7
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------III-10
Tabel 3.3 Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2020 Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 ----------III-11

Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2016-2021 -----III-13

Tabel 3.5 (TC-4) Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ------III-15

Tabel 3.6 Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------III-16

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 2016-2021 (T-C-3) ----------III-20

Tabel 3.8 Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015-2021----------III-23

Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------III-25

Tabel 3.10. (T-C-5) Defisit Riil Anggaran Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2020 ----------III-27

Tabel 3.11 (T-C-6) Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2020 ----------III-27

Tabel 3.12 Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ----------III-28

Tabel 3.13 (T-C-7) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun 2016-2021 ----------III-28

Tabel 3.14 (T-C-8) Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022-2026 ----------III-31

Tabel 3.15 (T-C-9) Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------III-38

Tabel 3.16 (T-C-10) Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------III-39

Tabel 4.1 Perkembangan TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara --------IV-4

Tabel 4.2 PDRB Perkapita atas Dasar harga Berlaku menurut

Kabupaten/Kota (Rupiah) ----------IV-5

Tabel 4.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2021 ----------IV-9

Tabel 4.4. Perbandingan Penduduk Korban Kejahatan se Sulawesi Utara ---------IV-12

Tabel 4.5 Dampak Pandemi COVID-19 pada Pencapaian

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia ----------IV-34

Tabel 4.6 Telaahan RPJMD Daerah Lain ----------IV-45

Tabel 4.7 Strategi, Arah Kebijakan dalam mewujudkan program Prioritas----------IV-47

Tabel 4.8 Isu Strategis terhadap Misi RPJMD Kabupaten Bolaang

Bolaang Mongondow Selatan ----------IV-65

Tabel 5.1 Perumusan Visi Jangka Menengah Pembangunan

Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun Tahun 2021-2026 ----------V-2

Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------V-12

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------VI-1

Tabel 6.2. Tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ----------VI-6

Tabel 6.3. Integrasi program prioritas dan program nomenklatur ----------VI-18

Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------VI-25

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2021-2026 ----------VII-2

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------VII-4

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ----------VIII-2

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ----------VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antar dokumen perencanaan ---------- I-9

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan. --- II-1

Gambar 2.2. Peta Topografi Kab. Bolaang Mongondow Selatan ---------- II-4

Gambar 2.3. Peta Geologi Kab. Bolaang Mongondow Selatan ---------- II-6

Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kab. Bolaang Mongondow Selatan ---------- II-7

Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan ---------- II-8

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kab. Bolaang Mongondow Selatan ---------- II-8

Gambar 2.7. Peta Penggunaan Lahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan ------ II-12

Gambar 2.8. Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2016-2021 ---------- II-15

Gambar 2.9. Luas Panen, Produksi Jagung Tahun 2016-2021 ---------- II-16

Gambar 2.10. Luas Panen, Produksi Kacang Kedelai Tahun 2016-2019 ------- II-16

Gambar 2.12. Peta Rawan Bencana Kab. Bolaang Mongondow Selatan -------- II-26

Gambar 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Selatan,
Prov. Sulawesi Utara Dan Secara Nasional Tahun 2017-2021 ------- II-32

Gambar 2.14 Perbandingan Inflasi Kota Kotamobagu, Manado
dan Nasional Tahun 2016-202 ---------- II-14

Gambar 2.15 IPM Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 ------- II-36

Gambar 2.16 Potret Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021 ---------- II-39

Gambar 2.17 Angka Melek Huruf Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021 ---------- II-40

Gambar 2.18 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2017-2021 ---------- II-41

Gambar 2.19 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2017-2021 ---------- II-42

Gambar 2.20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ---------- II-44

Gambar 2.21 APK SD/Sederajat dan SMP/Sederajat/
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 ---------- II-45

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017- 2021 ---------- II-46

Gambar 2.23 Angka Harapan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ---------- II-50

Gambar 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2016-2021 --- II-59

Gambar 2.25 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2021---------- II-59

Gambar 2.26 Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 (Persen) ---------- II-77

Gambar 2.27 Cakupan Layanan Air Bersih Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 ---------- II-88

Gambar 2.28 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air ---------- II-131

Gambar 2.29 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan ---------- II-132

Gambar 2.30 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Longsor -------- II-133

Gambar 2.31 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Banjir ---------- II-134

Gambar 2.32 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ---------- II-135

Gambar 2.33 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Iklim ---------- II-136

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 ---- III-4

Gambar 3.2 Grafik Proporsi Komponen Pemerimaan Daerah Tahun 2016-2021 (%) ---------- III-5

Gambar 3.3 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan, Tahun 2016-2021 (%) ---------- III-5

Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 (Ribu) - III-8

Gambar 3.5 Grafik Proporsi Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung Periode Tahun 2016-2021 ---------- III-13

Gambar 3.6 Grafik Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Periode Tahun 2016-2021 ---------- III-14

Gambar 3.7 Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Periode Tahun 2016-2021 (Rp) ---------- III-16

Gambar 3.8 Grafik Selisih Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021 (Rp) ---------- III-17

Gambar 3.9 Grafik Rasio SiLPA terhadap Belanja (%) Tahun 2016-2021 ------- III-18

Gambar 3.10 Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%) Tahun 2016-2021 ---------- III-18

Gambar 3.11 Grafik Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2016-2021 (%) ---------- III-25

Gambar 3.12 Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2016-2021 (%) ---------- III-26

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ---------- IV-2

Gambar 4.2 Perkembangan PMKS 2016-2021 ---------- IV-3

Gambar 4.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ---------- IV-5

Gambar 4.4 Urgensi Pembangunan Berketahanan Iklim ---------- IV-11

Gambar 4.5 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Aspek Sosial & Ekonomi Global ---------- IV-30

Gambar 4.6 Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon serta Ketahanan Iklim ---------- IV-38

Gambar 4.7. Visi Misi RPJMD ---------- IV-38

Gambar 4.8 Arah Kebijakan Pengembangaan Wilayah Sulawesi ---------- IV-39

Gambar 5.1. Cascading Pencapaian Misi 1 ---------- V-6

Gambar 5.2. Cascading Pencapaian Misi 2 ---------- V-7

Gambar 5.3. Cascading Pencapaian Misi 3 ---------- V-8

Gambar 5.4. Cascading Pencapaian Misi 4 ---------- V-9

Gambar 5.5. Cascading Pencapaian Misi 5 ---------- V-11

Gambar 6.3. Kluster Pengembangan Bolaang Mongondow Raya ---------- VI-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik H. Iskandar Kamaru, S.Pt dan Deddy Abdul Hamid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71-374/1 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Mendagri nomor: 131.71-294 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut mengacu pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN yang wajib disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Sejalan dengan hal tersebut, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid, telah menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 23 September 2021.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2021, telah terjadi dinamika pembangunan yang mempengaruhi keberlangsungan penerapannya. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional dan daerah baru maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan Perubahan RPJMD, dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 juga memenuhi ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2026 adalah adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah berupa peraturan yang berakaitan langsung dengan perencanaan dan keuangan serta penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verivikasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kunci (IKK) tingkat dampak dan tingkat hasil.

Substansi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 yang juga mengalami perubahan yaitu gambaran umum dan kondisi daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, tujuan, sasaran dan target kinerja, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, IKU Pemerintah daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Perumusan Perubabahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2026 juga menerapkan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, yaitu:

1. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berlaku mutatis dan mutandis. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan dan penyepakatan bersama dengan DPRD tentang rancangan awal, evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentang rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023, RKPD Tahun 2024, 2025 dan 2026, serta perubahannya. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026; dan
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan yang utuh dengan dokumen perencanaan lainnya yang termuat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan juga dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain yang berbatasan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya yang berbatasan.

Disamping berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025 dimana RPJMD saat ini merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD tersebut, penyusunan RPJMD juga mengacu pada pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) pada rentang waktu 5 (lima) tahun, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka menengah (lima tahunan). Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang merupakan cikal bakal lahirnya RAPBD dan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 juga tetap memperhatikan dokumen rencana yang relevan antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026. Isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Suistainable Development Goals* (SDGs), menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Pedoman Pelaksanaan PUG dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Hubungan RPJMD dalam dokumen perencanaan disajikan dalam **Gambar 1.1** di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

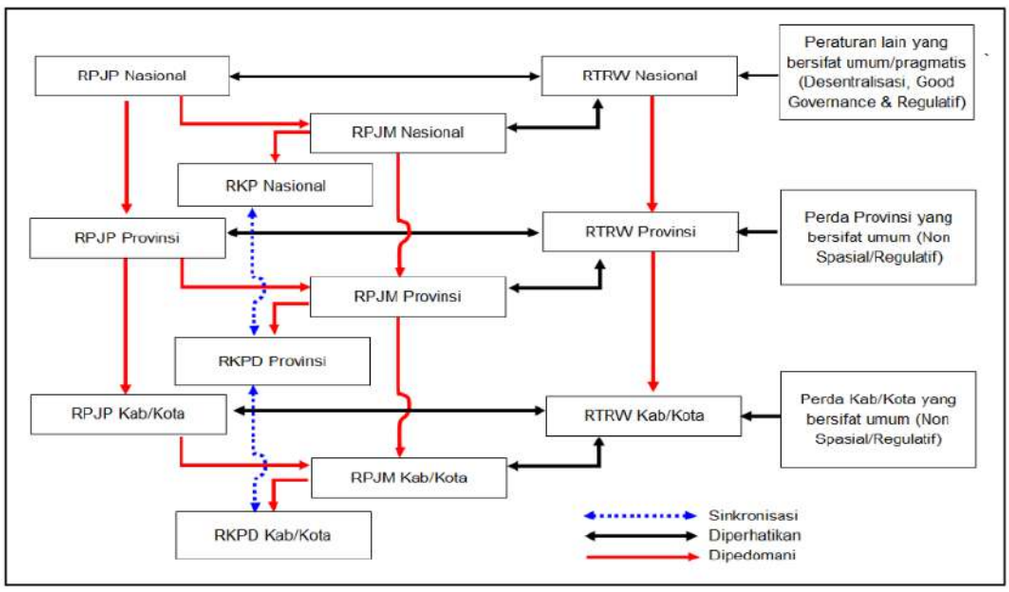

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026 adalah untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dari perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Menetapkan Visi, Misi dan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun;
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan

daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten dan terintegrasi baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, dan RTRW Provinsi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

Bab II. Gambaran Umum

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian indikator kinerja pembangunan daerah aspek kesejahteraan masyarakat.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.4 Aspek Daya Saing

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari upaya menunjukkan daya saing daerah.

2.5 Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pada bagian ini dijelaskan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Indikator Makro, IKU Daerah, SPM, IKK dan SDG's.

2.6 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dijelaskan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan kedepannya.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

3.2 Kondisi Perekonomian Daerah

3.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.3.2 Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pada bagian ini diuraikan mengenai analisis defisit riil, komposisi penutup defisit riil anggaran, dan realisasi Silpa.

3.5 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan- kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama berdasarkan urusan dan kedua adalah rumusan permasalahan pembangunan tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan di tingkat Urusan sebagai pijakan untuk penetapan program prioritas, sedangkan permasalahan pembangunan tingkat daerah menjadi pijakan untuk perumusan isu strategis daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan dan sekaligus mencerminkan eskalasi isu penting di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Isu Strategis Daerah pada saat perumusan RPJMD akan mendukung rumusan Misi kepala daerah terpilih.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disertai dengan pendanannya yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2026.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah. Aturan Peralihan menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perencanaan, sedangkan Kaidah Pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk penggunaan dokumen RPJMD bagi aparatur pemerintah maupun stakeholder pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dibentuk tanggal 21 Juli 2008, berdasarkan UU No.30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini terletak di pesisir pantai bagian Selatan, dengan ibukota Bolaang Uki yang berjarak lebih kurang 255.32 km dari Kota Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah 3.497,46 km^2 terdiri dari wilayah daratan 1.932,30 km^2 dan wilayah laut 1.881,60 km^2, dengan panjang garis pantai 294 km. Wilayah Administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.1**.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan

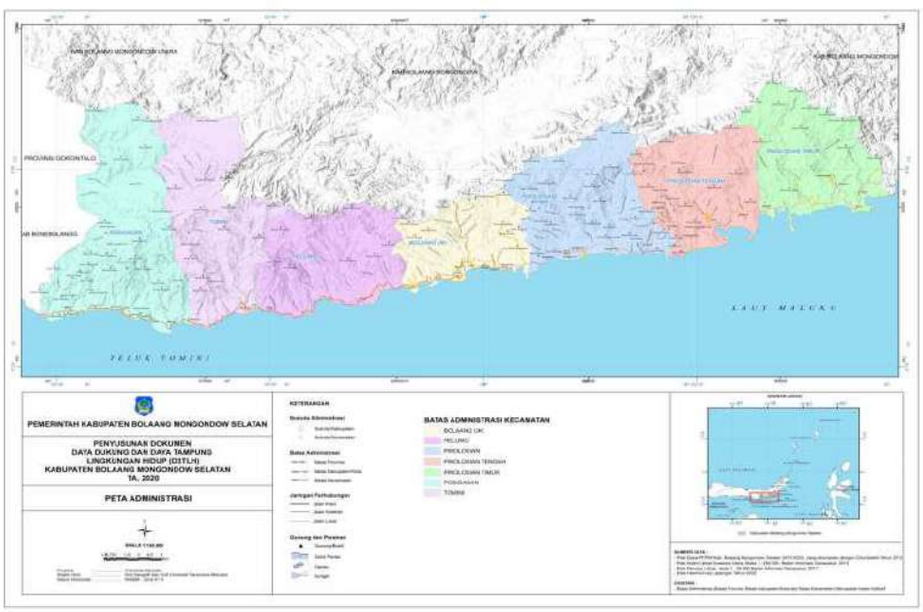

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 7 kecamatan yaitu: Bolaang Uki, Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, Helumo dan Tomini dengan jumlah desa sebanyak 81 desa dan tidak terdapat kelurahan. Kecamatan Tomini merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Posigadan (Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan

Tomini) memiliki 7 Desa dengan luas 193,36 Km² dengan Ibukota berkedudukan di Milangodaa. Rincian jumlah desa menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Jumlah Desa Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Posigadan	16	16	16	16	16
Tomini	7	7	7	7	7
Bolang Uki	17	17	17	17	17
Helumo	11	11	11	11	11
Pinolosian	10	10	10	10	10
Pinolosian Tengah	8	8	8	8	8
Pinolosian Timur	12	12	12	12	12
Bolaang Mongondow Selatan	**81**	**81**	**81**	**81**	**81**

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan Tabel 2.2 Kecamatan Posigadan merupakan wilayah yang paling luas dengan luas wilayah 535,64 km² atau 27,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Helumo dengan luas wilayah 138,22 km² atau 7,15 persen dari luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dilihat dari jumlah desa, Kecamatan Bolaang Uki memiliki jumlah desa yang paling banyak yaitu 17 desa, disusul Kecamatan Posigadan dengan jumlah 16 desa. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase	Jumlah Desa
Posigadan	535,64	27,72	16
Tomini	193,36	10,01	7
Bolaang Uki	255,21	13,21	17
Helumo	138,22	7,15	11
Pinolosian	285,93	14,80	10
Penolosian Tengah	302,07	15,63	8
Penolosian Timur	221,87	11,48	12
Bolaang Mongondow Selatan	**1.932,30**	**100,00**	**81**

Sumber: BPS Kab.Bolaang Mongondow Selatan

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak pada posisi diantara 123^0 28’ 59,2’-124^0 22’ 41,4” Bujur Timur dan 0^0 22’ 54,5”-0^0 27’ 57,4” Lintang Utara. Batas-batas administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Sebelah Timur: Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Sebelah Selatan: Teluk Tomini
- Sebelah Barat: Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

b. Posisi Geostrategis

Dalam perspektif regional, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada posisi strategis, karena berada pada jalur lintas tengah trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut merupakan daerah perlintasan sekaligus *stop over* arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik.

c. Kondisi Kawasan

Wilayah Bolaang Mongondow Selatan sebagian besar berada di pesisir pantai, bahkan semua wilayah kecamatan, mulai dari Kecamatan Posigadan sampai ke Pinolosian Timur, semuanya memiliki garis pantai. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga mempunyai pulau-pulau kecil seperti Pulau Babi, Pulau Pondan Moloben, Pulau Pondan Mointok, Pulau Kelapa dan Pulau Lampu.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki topografi wilayah berupa bukit-bukit, pegunungan, berpantai dan sebagian kecil adalah dataran rendah bergelombang. Bukit-bukit, pantai dan sebagian kecil adalah dataran rendah bergelombang. Gunung Mongaladia dengan ketinggian 1.325 m, seperti yang tersaji dalam peta topografi pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Peta Topografi Kab. Bolaang Mongondow Selatan

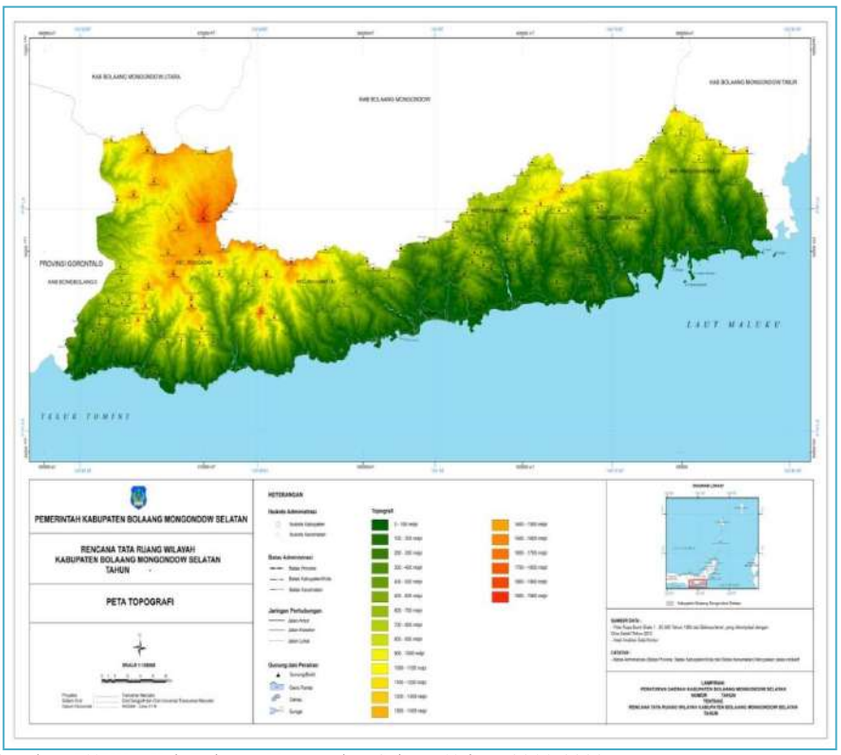

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Paniki dengan ketinggian 1.817 m dan Gunung Sinandaka dengan ketinggian 1.770 m. Dilihat dari ketinggian permukaan laut, Kecamatan Helumo merupakan kecamatan yang berada pada ketinggian 12 m DPL, sedangkan daerah yang lebih rendah adalah Kecamatan Tomini dengan ketinggian 3 m DPL. Ketinggian wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) disajikan dalam **Tabel 2.3** di bawah ini.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Posigadan	Momalia	5
2	Tomini	Milangodaa	3
3	Bolaang Uki	Molibagu	5
4	Helumo	Duminanga	12
5	Pinolosian	Pinolosian	5
6	Penolosian Tengah	Adow	7
7	Penolosian Timur	Dumagin	5

Sumber: BPS Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020

2.1.1.4. Geologi

Aktivitas geologi yang telah berlangsung selama berjuta-juta tahun lalu di wilayah Bolaang Mongondow Selatan menghasilkan berbagai jenis batuan mulai dari batuan sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik

dengan umur yang sangat beragam. Keseluruhan batuan tersebut sampai saat ini telah mengalami proses pengangkatan, pelipatan dan pensesaran yang membangun struktur geologi dan geologi batuan. Formasi geologi yang mendominasi wilayah adalah batuan gunung api (Oligo Miocene volcanic dan Poly Pleistocene volcanics, Tmv) dan batuan terobosan diorit (Tertiary Intrusive), serta sedimen aluvial (Quarternary Alluvium). Batuan gunung api pada umumnya tersebar di sebagian besar wilayah. Bolaang Mongondow Selatan mempunyai 14 satuan lahan yang terdiri dari empat yaitu Grup Aluvial, Marin, Fluvio-Marin dan Volkan.

Kondisi ini membentuk bentang alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, terdiri dari: Dataran marin berpasir bermaterial aluvium, Dataran struktural lipatan berombak bergelombang bermaterial batuan, sedimen non karbonat, Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik, Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar, Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat dan Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar. Kondisi bentang alam disajikan dalam **Tabel 2.4.**

Tabel 2.4
Kondisi Bentang Alam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kecamatan	Bentang Alam	Luas (ha)	Persen (%)
Bolaang Uki	Dataran marin berpasir bermaterial alluvium	243,382	0,136
	Dataran struktural lipatan berombak, bergelombang, bermaterial batuan sedimen non karbonat	481,547	0,268
	Dataran vulkanik kipas bermaterial pirolastik	2.208,111	1,231
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	12.012,318	6,697
	Perbukitan sulosional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	1.625,985	0,907
	Jumlah	16.571,788	9,239
Helumo	Dataran vulkanin kipas bermaterial piroklastik	589,331	0,329
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	23.127,777	12,895
	Jumlah	23.717,777	13,233
Pinolosian	Dataran marin berpasir bermaterial aluvilium	303,909	0,169
	Dataran vulkanis kipas bermaterial pirolastik	2.531,704	1,412
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	23.850,174	13,297
	Jumlah	26.685,787	14,878
Pinolosian Tengah	Dataran vulkanis kipas bermaterial pirolastik	886,024	0,494
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	21.215,729	11,829

	Jumlah	22.101,753	12,322
Pinolosian Timur	Dataran vulkanis kipas bermaterial pirolastik	1.648,246	0,919
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	21.648,246	12,070
	Jumlah	23.296,293	12,988
Posigadan	Dataran struktural lipatan berombak, bergelombang, bermaterial batuan sedimen non karbonat	80,072	0,045
	Dataran vulkanik kipas bermaterial pirolastik	1.231,342	0,687
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	31.897,493	17,784
	Perbukitan sulosional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	237,888	0,133
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	3.714,509	2,071
	Jumlah	37.161,304	20,719
Tomini	Dataran vulkanik kipas bermaterial pirolastik	799,066	0,446
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	29.027,912	16,184
JUMLAH		29.826,977	16,630
TOTAL		**179.361,010**	**100,000**

Sumber: DDDTLH, DLH 2021

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kondisi Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan digambarkan dalam **Gambar 2.3.**

Gambar 2.3
Peta Geologi Kab. Bolaang Mongondow Selatan

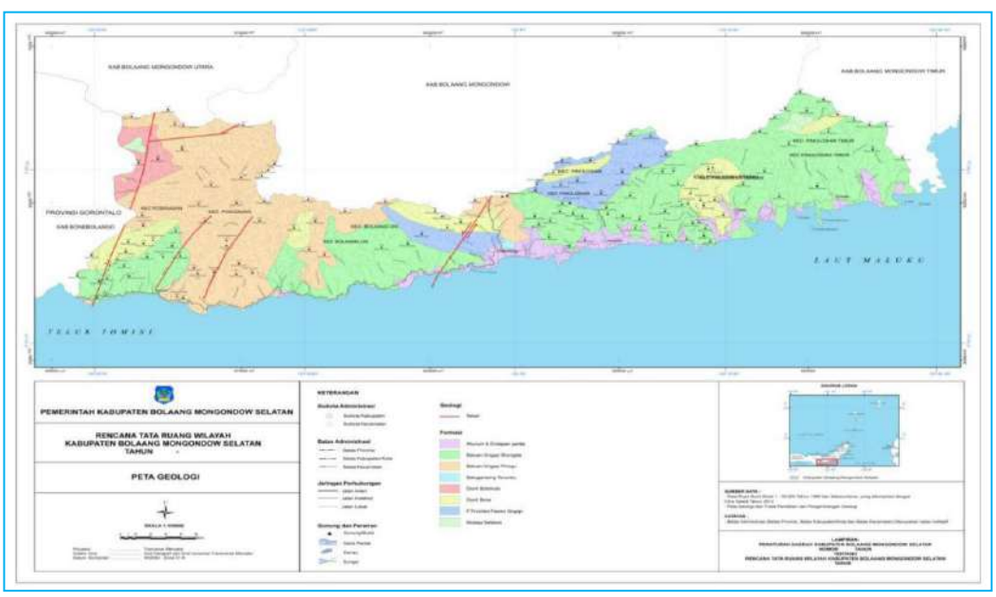

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

2.1.1.5 Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat besar, terutama oleh adanya aliran sungai utama dengan tingkat evapotranspirasi cukup tinggi dengan rata-rata tahunan 4,6 mm/hari dan hampir konstan sepanjang tahun. Evapotranspirasi maksimum terjadi pada bulan Oktober-November sebesar 5,3 mm/hari yang minimum pada bulan Juni yang mencapai 3,7 mm/hari. Peta hidrologi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.4**.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kab. Bolaang Mongondow Selatan

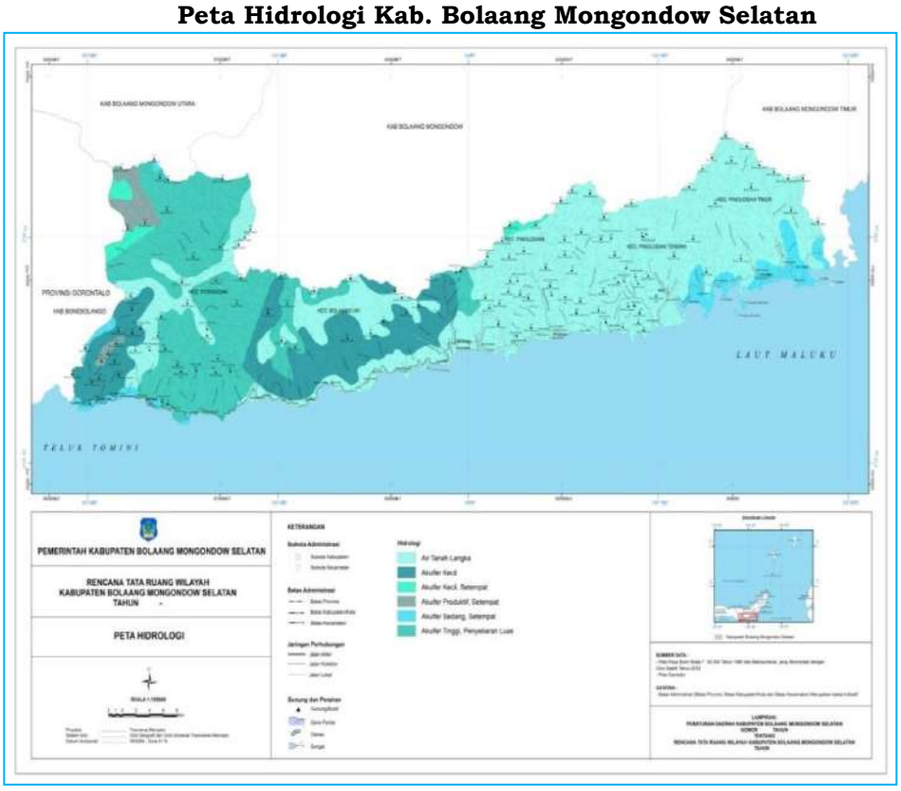

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai sumber pengairan/irigasi persawahan dan sebagai sarana MCK dan usaha perikanan. Sementara itu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu DAS Pinolosian dan DAS Milangodaa. Nama-nama sungai yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut:

1. Sungai Milangodaa panjang dengan 19 km
2. Sungai Potule dengan panjang 12,1 km
3. Sungai Moyosiboi dengan panjang 11,2 km
4. Sungai Sonduk dengan panjang 11,2 km dan
5. Sungai Salongo dengan panjang 9,1 km

Gambar 2.5

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kab. Bolaang Mongondow Selatan

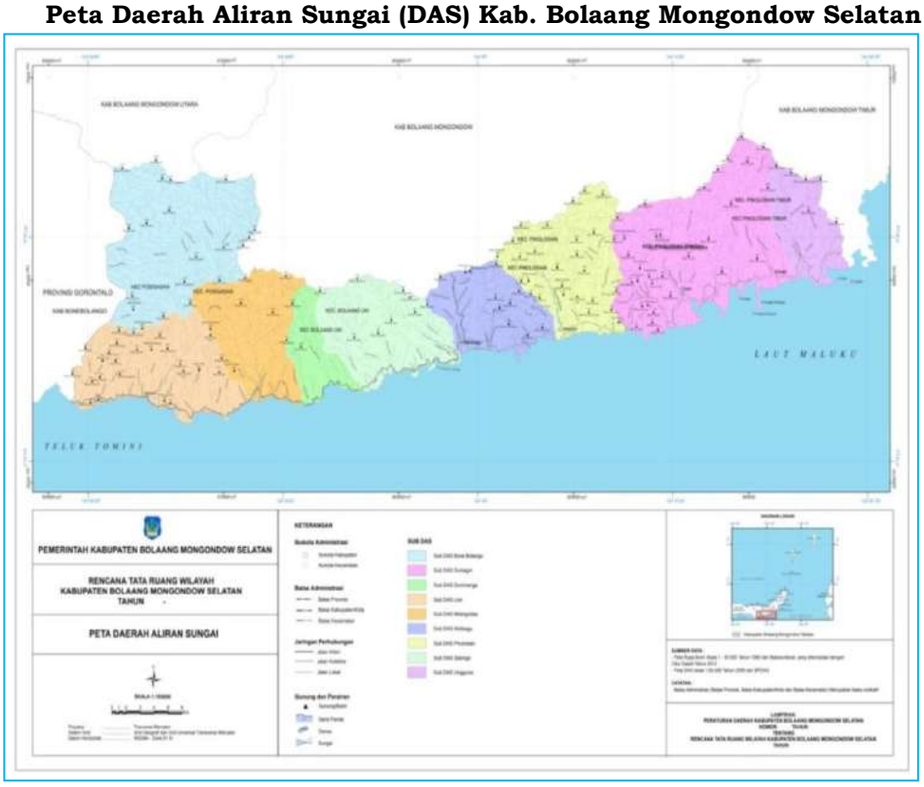

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

2.1.1.6 Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya di Indonesia, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk ke dalam tipe hujan C2. Tipe hujan C2 adalah wilayah dengan jumlah bulan basah (BB) 5 bulan dan bulan kering (BK) 2 bulan. Bulan basah (BB) adalah bulan dengan curah hujan rataan > 200 mm/bulan, bulan lembab (BL) adalah bulan dengan curah hujan rataan antara 200-100 mm/bulan, dan bulan kering (BK) memiliki rataan curah hujan < 100 mm/bulan. Suhu udara bulanan berkisar antara 26,6^{o}C-28,0^{o}C dengan suhu rata-rata 25,9^{o}C (Gambar 2.6). Suhu terendah terjadi pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan November dan Desember.

Tahun 2020, intensitas hujan tidak setinggi tahun sebelumnya. Tercatat curah hujan tertinggi adalahi bulan juni yang mencapai 518,0 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Desember yang hanya mencapai februari 4 mm. Hal ini juga sejalan dengan jumlah hari hujan, dimana hari hujan tertinggi terjadi di bulan juni dan yang terendah di februari. Sedang suhu udara berkiar antara 18° C – 31°C. Peta curah hujan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.6.**

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kab. Bolaang Mongondow Selatan

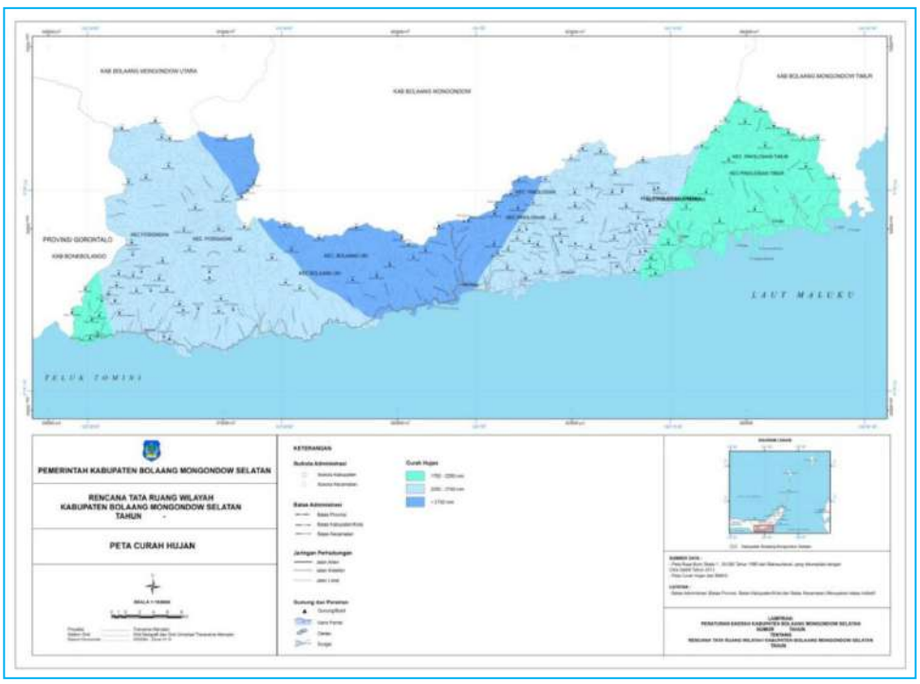

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

Kelembaban udara tertinggi di wilayah penelitian terjadi pada bulan Juli, yaitu sebesar 93%, dan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Oktoberyaitu sebesar 85%. Penyinaran matahari dinyatakan dalam perbandingan antara lama penyinaran matahari yang terukur dengan cara teoritis atau dalam persen (%). Maksimum penyinaran terjadi pada bulan November (56%) dan minimum pada bulan Januari (39%). Kecepatan angin beragam dari waktu ke waktudengan kisaran 1,55 – 3,75 m/detik dan arah angin umumnya dari Barat.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Tutupan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selata memiliki penggunaan lahan yang bervariatif, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun. Luas kawasan penggunaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.5** di bawah ini.

Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Uki	Hutan Bakau/Mangrove	55,015	0,031
	Hutan Rimba	9.084,380	5,065
	Pasir/Bukit Pasir Darat	36,943	0,021
	Perkebunan/Kebun	2.543,569	1,418
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	127,554	0,071
	Sawah	483,607	0,270
	Semak Belukar	754,796	0,421
	Sungai	49,655	0,028
	Tanah Kosong/Gundul	31,603	0,018
	Tegalan/Ladang	3.404,666	1,898
	Jumlah	16.571,788	9,239
Helumo	Danau/Situ	1,147	0,001
	Hutan Bakau/Mangrove	17,888	0,010
	Hutan Rimba	18.359,799	10,236
	Pasir/Bukit Pasir Darat	7,960	0,004
	Perkebunan/Kebun	1.918,240	1,069
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	70,461	0,039
	Sawah	102,995	0,057
	Semak Belukar	466,251	0,260
	Sungai	28,471	0,016
	Tanah Kosong/Gundul	4,085	0,002
	Tegalan/Ladang	2.739,811	1,528
	Jumlah	23.717,108	13,223
Pinolosian	Hutan Rimba	21.052,815	13,223
	Pasir/Bukit Pasir Darat	46,439	11,738
	Perkebunan/Kebun	2.005,859	1,118
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	83,814	0,047
	Sawah	356,940	0,199
	Semak Belukar	1.719,658	0,959
	Sungai	10,287	0,006
	Tanah Kosong/Gundul	34,283	0,019
	Tegalan/Ladang	1.375,693	0,767
	Jumlah	26.685,787	14,878
Pinolosian Tengah	Hutan Bakau/Mangrove	133,558	0,074
	Hutan Rimba	17.469,594	9,740
	Perkebunan/Kebun	1.140,530	0,636
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	81,858	0,046
	Sawah	341,974	0,191
	Semak Belukar	2.252,089	1,256
	Sungai	31.598	0,018

Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tanah Kosong/Gundul	57,014	0,032
	Tegalan/Ladang	593,538	0,331
	Jumlah	2.2101,753	12,322
Pinolosian TImur	Hutan Bakau/Mangrove	108,770	0,061
	Hutan Rimba	15.151,335	8,447
	Pasir/Bukit Pasir Darat	7,446	0,004
	Perkebunan/Kebun	2.307,208	1,286
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	68,079	0,038
	Sawah	258,738	0,144
	Semak Belukar	2.060,296	1,149
	Sungai	29,516	0,016
	Tanah Kosong/Gundul	4,796	0,003
	Tegalan/Ladang	3.300,110	1,840
	Jumlah	23.296,293	12,988
Posigadan	Hutan Rimba	28.845,574	16,082
	Pasir/Bukit Pasir Darat	9,079	0,005
	Perkebunan/Kebun	2.310,075	1,288
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	99,390	0,055
	Semak Belukar	586,247	0,327
	Sungai	53,313	0,030
	Tegalan/Ladang	5.257,626	2,931
	Jumlah	37.161,304	20,719
Tomini	Hutan Rimba	26.598,614	14,830
	Pasir/Bukit Pasir Darat	22,577	0,013
	Perkebunan/Kebun	1.041,519	0,581
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	70,152	0,039
	Semak Belukar	249,498	0,139
	Sungai	77,070	0,043
	Tegalan/Ladang	1767,547	0,985
	Jumlah	29.826,977	16,630
TOTAL		179.361,010	100,000

Sumber: DDDTLH, DLH 2021

Penggunaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya disajikan dalam **Gambar 2.7.**

Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan

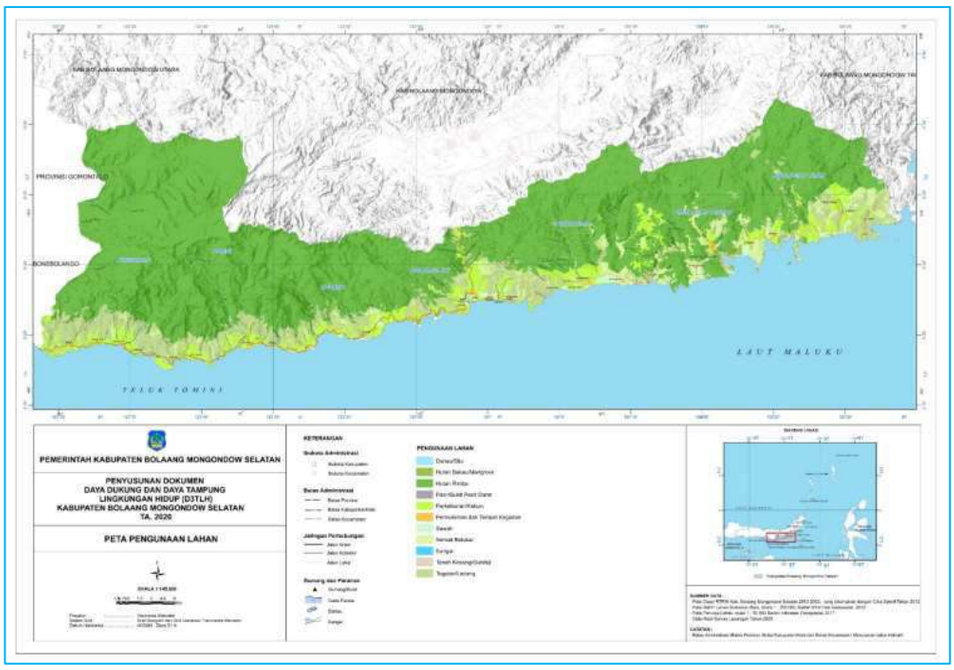

Sumber: DDDTLH Kab.Bolaang Mongondow Selatan

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya sebagaimana termuat dalam RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033 terdiri dari: Kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan peruntukan lainnya. Pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagian besar digunakan bagi tanaman jagung dan padi sawah. Peruntukan kawasan ini terdapat di Kecamatan Posigadan, Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Tengah, dan Kecamatan Pinolosian Timur. Luas dan Lokasi Kawasan Budidaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.6.**

Tabel 2.6
Luas dan Lokasi Budidaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas dan Lokasi
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kecamatan Posigadan, Bolaang Uki, Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur dengan luasan kurang lebih 33.062,74 Ha
		hutan produksi tetap di Kecamatan Posigadan, Bolaang Uki, Pinolosian,

No	Penggunaan Lahan	Luas dan Lokasi
(1)	(2)	(3)
		Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur dengan luasan kurang lebih 22.818,91 Ha
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 18.933 Ha.
3	Kawasan peruntukan Pertanian	Kecamatan Posigadan, Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Tengah, dan Kecamatan Pinolosian Timur
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap 5 wilayah kecamatan yang terdapat di pesisir, yaitu Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Posigadan, serta 3 buah pulau kecil. b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kecamatan Bolaang Uki.
5	Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Mineral logam terdapat di Kecamatan Pinolosian Timur, Pinolosian Tengah, Bolaang Uki, dan Posigadan. b. Kawasan peruntukan pertambangan bebatuan terdapat di Desa Nunuk, Molibagu, Pangia, Bakida, Motolohu, Tolutu, Sinandaka, Milangodaa. c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam Sungai Asam Desa Adow dan Adow Selatan sampai dengan Kawasan Teluk Tomini yang menjadi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6	Kawasan Peruntukan Industri	a. Industri sedang dengan luas lebih 4,47 ha terletak Pinolosian. b. Industri rumah tangga terdapat Pinolosian. c. Industri besar di Pinolosian luasan kurang lebih 16,37 Ha
7	Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Pariwisata budaya terdapat di Makam Raja Bolaang Uki, Hassan Iskandar Van Gobel, Makam Bagaya dan Monumen Bersejarah di Molibagu. b. Pariwisata Bahari (Pantai) terdapat di Pantai Dami berpasir putih, Pantai Modisi di Kecamatan Pinolosian, dan Pantai Biniha di Kecamatan Bolaang Uki. c. Pariwisata alam, wisata hutan mangrove di Pelabuhan Alam Torosik di Desa Torosik, Kecamatan Kecamatan Pinolosian Tengah dan Air Terjun Botuliodu di Kecamatan Posigadan; d. Pariwisata buatan terdapat di lokasi-lokasi pariwisata alam dan wisata pantai/bahari di wilayah Kabupaten Bolaang mongondow Selatan.

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan hutang lindung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, kawasan budidaya; dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Posigadan, Bolaang Uki, Pinolosian, Pinolosian Tengah, dan Pinolosian Timur. Kawasan suaka alam, dan cagar budaya terdiri atas Kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut; kawasan pantai berhutan lindung bakau, kawasan taman nasional; dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan pantai berhutan lindung bakau terdiri atas Kawasan Pantai Berhutan Bakau Alam terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas 1.200 Ha dan Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Desa Dudepo, Duminanga, Tabilaa, Pangia dan Motolohu (Kecamatan Bolaang Uki), Desa Torosik dan Deaga (Kecamatan Pinolosian Tengah) dan Desa Matandoi (Kecamatan Pinolosian Timur). Luas kawasan lindung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.7** berikut ini.

Tabel 2.7
Luas dan Lokasi Kawasan Lindung Kab. Bolaang Mongondow Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas dan Lokasi
1	Kawasan sekitar mata air	Kawasan hutan lindung, hutan produksi dan taman nasional
2	Kawasan sempadan sungai	Sungai Milangodaa, Sungai Katulidan, Sungai Potule, Sungai Moyosiboi, Sungai Sonduk, dan Sungai Salongo
3	Kawasan Sempadan Pantai	294 km di wilayah pesisir
4	Kawasan Suaka Alam	33.722,53 Ha
5	Kawasan Suaka Alam Laut	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Desa Modisi (Kecamatan Pinolosian), Kawasan Terumbu Karang Pulau Putri Raja dan Kawasan Botuliodu
6	Kawasan Pantai Berhutan Lindung Bakau	1.200 Ha
7	Kawasan Taman Nasional	Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan 35.423 Ha
8	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Makam Raja Hasan van Gobel di Molibagu, Raja Bolaang Uki terdapat di Molibagu, Monumen bersejarah terdapat di Molibagu

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dapat diidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 menyebutkan bahwa rencana pola ruang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.2.1 Potensi Pertanian

Potensi Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari pertanian tanaman pangan, pertanian holtikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan, pertanian holtikultura, perkebunan dengan jenis komoditi Kelapa, Cengkeh, Karet, Pala, Kopi dan Singkong, terdapat di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Posigadan; dan kawasan perkebunan komoditi Kakao, terdapat di Kecamatan Posigadan dan Kecamatan Pinolosian Timur.

Produksi pertanian tanaman pangan terbesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah produksi tanaman padi. Produksi padi tahun 2021 adalah sebanyak 11.283 ton padi sawah dan 2.335 ton padi ladang dengan total keseluruhan produksi padi 13.618. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan ke depan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman, alih fungsi komoditas dari pertanian tanaman pangan ke pertanian hortikultura karena faktor keuntungan yang diperoleh petani hortikultura dirasa lebih besar daripada pertanian tanaman pangan, serta sarana penunjang seperti irigasi yang sedang mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Luas Panen dan Produksi Padi disajikan dalam Gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 2.8
Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2016-2021

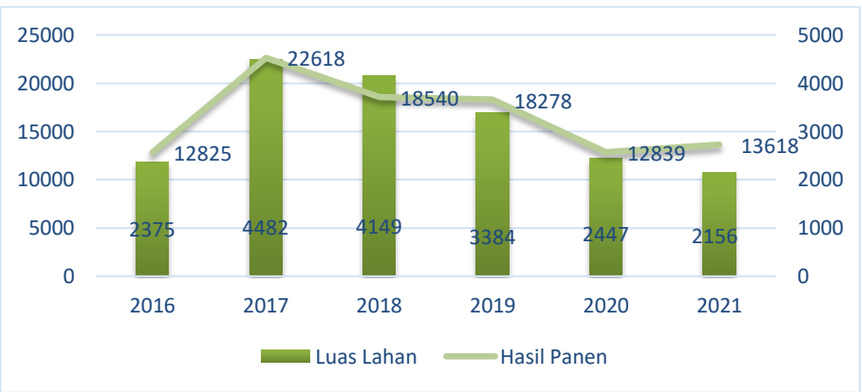

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/KPTS/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana disebutkan bahwa komoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupa padi, kedelai dan Jagung. Data Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat produksi jagung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 luas panen jagung sebesar 3.120 ha dengan produksi sebesar 13.662 ton. Produksi jagung tahun 2016-2021 disajikan dalam **Gambar 2.9** di bawah ini.

Gambar 2.9
Luas Panen, Produksi Jagung Tahun 2016-2021

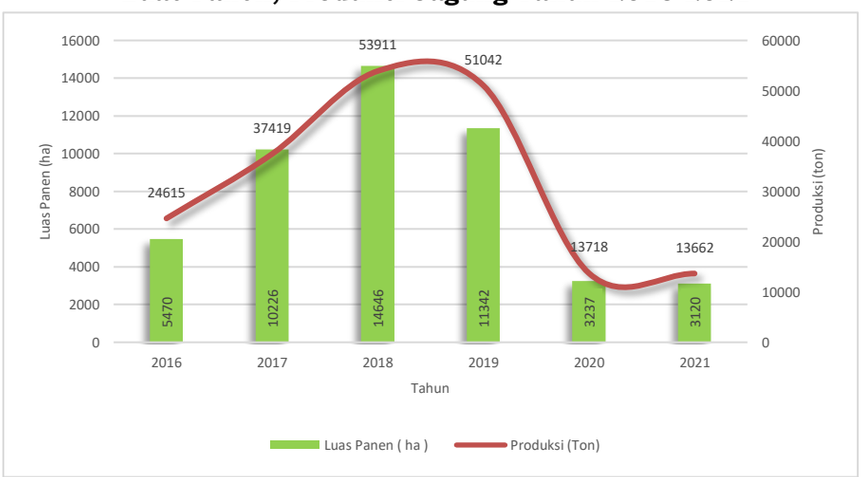

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

Sementara produksi kacang kedelai mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2016-2019 bahkan tahun 2020-2021 tidak ada penanaman untuk komoditi ini. Fluktuasi harga kacang sangat mempengaruhi dalam pemilihan komoditi pertanian. Tahun 2020 harga kacang kedelai ini mengalami penurunan sangat drastis yang mengakibatkan petani berpindah ke komoditi lainnya seperti cabe dan jenis tanaman hortikultura lainnya. Produksi kacang kedelai tahun 2016-2021 selengkapnya disajikan dalam **Gambar 2.10** di bawah ini.

Gambar 2.10
Luas Panen, Produksi Kacang Kedelai Tahun 2016-2019

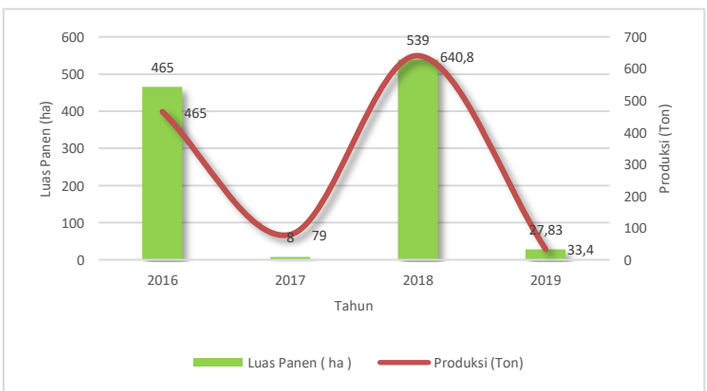

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2020

Selain jagung dan kacang kedelai, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memiliki potensi dari tanaman cabe rawit. Tanaman sayuran cabai rawit merupakan tanaman yang ditanam wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, namun secara kuantitas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan produksivitas hanya berada diurutan ke-delapan dari seluruh komoditas sayur dan buah semusim yang ditanam di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020. Pada tahun 2021 produksi cabe rawit mencapai 13,65 ton seperti disajikan dalam **Gambar 2.11.**

Gambar 2.11
Persentase Produksi Cabe Rawit Tahun 2020

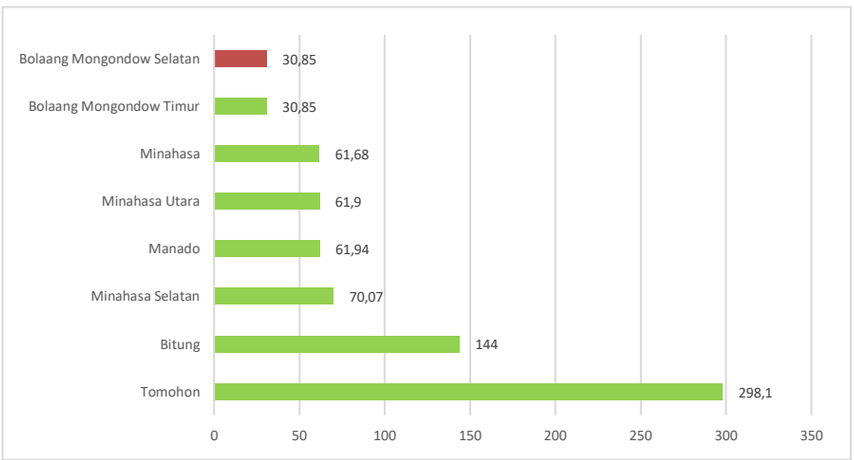

Sumber: Statistik Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Sejalan dengan besarnya peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serapan tenaga kerja di sektor pertanian merupakan yang tertinggi dibanding sektor lainnya. Pekerjaan besar bagi pemerintah maupun masyarakat supaya subsektor tanaman hortikultura mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan salah satunya dengan pengendalian inflasi yang bersumber dari harga komoditas tanaman hortikultura seperti cabai rawit. Potensi tanaman hortikultura lainnya tanaman lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ada pada tanaman pisang. Tercatat produktivitas pisang pada tahun 2019 sebesar 0,11 ku/rumpun dengan produksi 379 kuintal. Pada tahun 2021 produksi pisang sebanyak 101.640 kg, luas produktivitas, dan produksi pisang di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota tahun 2019 dapat dilihat dalam **Tabel 2.8.**

Tabel 2.8
Jumlah Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Pisang
Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Tanaman Menghasilkan (Rumpun)	Produktivitas (Ku/Rumpun)	Produksi (Kuintal)
Bolaang Mongondow	47291	0,76	35925
Minahasa	20753	0,74	152905
Kepulauan Sangihe	27312	0,85	23295
Kepulauan Talaud	40211	1,33	53446
Minahasa Selatan	77052	1.01	77971
Minahasa Utara	127795	0,26	32654
Bolaang Mongondow Utara	5757	0,17	974
Kepulauan Sitaro	7012	0,76	5361
Minahasa Tenggara	37744	1,20	45237
Bolaang Mongondow Selatan	**4120**	**0,05**	**205**
Bolaang Mongondow Timur	13332	0,27	3594
Kota Manado	8580	1,64	14076
Bitung	12620	0,42	5285
Kota Tomohon	7589	0,38	2871
Kota Kotamobagu	10580	0,26	2700
Sulawesi Utara	634748	0,72	456498

Sumber: Statistik Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

2.1.2.2 Peternakan

Pengembangan wilayah untuk kawasan peternakan berdasarkan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri kawasan peruntukan peternakan besar tersebar di setiap kecamatan dengan jenis ternak sapi dan kerbau. Kawasan peruntukan peternakan sedang terdiri atas peternakan kambing yang terdapat tersebar di setiap kecamatan dan peternakan babi yang terdapat di Kecamatan Pinolisian Timur. Sedangkan peternakan unggas yang tersebar di setiap kecamatan dengan jenis peternakan ayam dan itik.

Saat ini, populasi ternak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didominasi oleh jenis ternak besar seperti sapi potong, kambing dan babi. Sementara untuk jenis unggas dan terdiri dari ayam buras dan ayam pedaging. Rekapitulasi data populasi ternak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9
Rekapitulasi Data Populasi Ternak Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Jenis Ternak	Jumlah Populasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi potong	5.442	5.541	5.763	5.021	5.243	5.270
Kambing	4.267	4.582	4.857	5.057	5.128	5.154
Babi	619	681	763	854	921	863
Ayam buras	58.539	58.839	60.016	62.416	62.506	62.819
Ayam petelur	2.000	2.000	1.500	-	-	
Ayam pedaging	2.750	3.000	3.000	3.915	3.669	3.687
Itik	1.360	1.416	1.473	2.822	3.020	3.027
Itik manila	4.252	4.417	4.795	5.131	5.490	5.517
Anjing	2.985	3.015	3.045	3.371	3.427	3.445

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2021

2.1.2.3 Potensi Pariwisata

Potensi wisata alam maupun bahari di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan begitu besar. Pengembangan potensi pariwisata terdiri dari Pariwisata budaya terdapat di Makam Raja Bolaang Uki, Hassan Iskandar Van Gobel, Makam Bagaya dan Monumen Bersejarah di Molibagu. Pariwisata Bahari (Pantai) terdapat di Pantai Dami berpasir putih, Pantai Modisi di Kecamatan Pinolosian, dan Pantai Biniha di Kecamatan Bolaang Uki. Pariwisata alam, wisata hutan mangrove di Pelabuhan Alam Torosik di Desa Torosik, Kecamatan Kecamatan Pinolosian Tengah dan Air Terjun Botuliodu di Kecamatan Posigadan; Pariwisata buatan terdapat di lokasi-lokasi pariwisata alam dan wisata pantai/bahari di wilayah Kabupaten Bolaang mongondow Selatan.

Dari data yang dirilis Badan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (BP3M) Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan ada 9 tempat wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bisa diperhitungkan ditingkat nasional maupun internasional. Tempat wisata tersebut antara lain berada di Kecamatan Bolaang Uki, berupa Tempat Wisata Tanjung Panango, Wisata Alam Binolantungan, Wisata Pelabuhan Alam Dudepo, Wisata Alam Pemandangan Batu karat. Tidak hanya di Kecamatan Bolaang Uki saja, kecamatan Pinolosian, juga memiliki beberapa tempat wisata yang unik, antara lain wisata alam Dami, Torosik, penangkaran burung Maleo, wisata bahari Pulau Lampu, wisata pantai Taman Hiu. Sementara di Kecamatan Posigadan, ada wisata alam Goa Paniki Lion potensi wisata yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu dimaksimalkan, dengan adanya investasi serta perbaikan infrastruktur di tempat wisata yang ada. Semua tempat wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat berpotensi di tingkat internasional, ini sangat

baik jika ada yang berinvestasi mengembangkan tempat-tempat wisata tersebut serta ada perhatian dari pemerintah untuk melengkapi infrastrukturnya. **Tabel 2.10** berikut ini disajikan objek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.10
Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tempat	Nama Objek	Jarak	Keterangan
Kecamatan Bolaang Uki	Makan Raja Hasan Van Gobel	1 km	Objek Wisata Budaya
	Pantai Boulevard Sondana	1 km	Objek Wisata Kuliner
	Tanjung Panjango	3 km	Objek Wisata Mangrove
	Pantai Solango Timur		Objek Wisata Kuliner
	Pantai Ponii	6 km	Objek Wisata Pantai
	Taman Laut Sondana	1 km	Objek Wisata Taman Laut
	Taman Laut Pinolontungan	6 km	Objek Wisata Taman Laut
	Pantai Biniha Timur	9 km	Objek Wisata Pantai
	Taman Laut Saputa	12 km	Objek Wisata Taman Laut
	Taman Laut Motolohu	15 km	Objek Wisata Pantai
	Arman Lounge	9 km	Objek Wisata Religi
	Istana Raja Bolaang Uki	1 km	Objek Wisata Budaya
Kecamatan Helumo	Tracking Mangrove Transpatoa	23 km	Objek Wisata Alam
	Pemandian Soputa	27 km	Objek Wisata Alam
Kecamatan Posigadan	Pantai Ponii	65 km	Objek Wisata Pantai
Kacamatan Pinolosian	Pantai Modisi	6 km	Objek Wisata Pantai
	Taman Laut Puteri Bangsawan	6 km	Objek Wisata Pantai
	Makan Aulia	9 km	Objek Wisata Budaya
	Pantai Pinolosian Selatan	10 km	Objek Wisata Pantai
	Pantai Dami	14 km	Objek Wisata Pantai
	Pantai Lungkap	15 km	Objek Wisata Pantai
	Tanjung Binerean	40 km	Objek Wisata Alam
Kecamatan Pinolosian Tengah	Pelabuhan Alam Torosik	54 km	Objek Wisata Alam
Kecamatan Tomini	Air Terjun Botuliodu	45 km	Objek Wisata Alam
Kecamatan Pinolosian Timur	Air Terjun Pidung	80 km	Objek Wisata Alam

Sumber: Disparbud Prov.Sulut (Belum ditetapkan oleh Perda)

Pengembangan kawasan wisata juga harus didukung oleh sarana pendukung, seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Selama tahun 2020, terjadi perubahan jumlah restoran/rumah makan, namun tidak pada jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 11 hanya terdapat di Kecamatan Bolaang Uki, sedangkan rumah makan/restoran sebanyak 36 tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kecuali Kecamatan Tomini.

2.1.2.4 Potensi Perikanan

Sebagai kabupaten yang secara geografis terletak di wilayah pesisir Teluk Tomini dengan panjang garis pantai 290 km memiliki potensi besar di sub sektor perikanan. Salah satunya Kecamatan Pinolosian Timur terdapat 9 desa dimana hampir semuanya memiliki wilayah pesisir. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, potensi perikanan diarahkan untuk perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat 5 wilayah kecamatan yang terdapat di pesisir, yaitu Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Posigadan, serta 3 buah pulau kecil. Sedangkan Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kecamatan Bolaang Uki. Selain wilayah pesisir, potensi penangkapan ikan di sungai terdapat sebesar 16 ha, potensi budidaya di kolam sebesar 30 ha, sawah/mina padi sebesar 50 ha, tambak 900 ha dan laut sebesar 1.700 ha. Di Kecamatan Pinolosian Tengah terdapat 5 desa dan hampir semua desa-desa tersebut memiliki wilayah pesisir.

Berdasarkan data Dinas Perikanan tahun 2022, jumlah nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1.255. Kelompok nelayan terdiri dari kelompok nelayan tangkap 185 kelompok dan budidaya sebesar 147 kelompok namum yang aktif hanya 80 kelompok. Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam memanfaat potensi perikanan untuk kesejahteraan nelayan melalui bantuan seperti alat tangkap, perahu, mesin dan peralatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bahkan telah menyediakan asuransi nelayan, sebanyak 1.225 orang telah menerima asuransi nelayan tahun 2022. Asuransi nelayan adalah asuransi yang diperuntukkan khusus seseorang yang berprofesi sebagai nelayan. Asuransi ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bagian dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Hal ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam guna meningkatkan kualitas hidup manusia, tak terkecuali nelayan di seluruh Indonesia. Kesejahteraan nelayan tercermin dari peningkatan jumlah produksi baik perikanan tangkap maupun budidaya. Produksi dan jenis tangkapan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2021 disajiak dalam **Tabel 2.11.**

Tabel 2.11
Produksi Perikanan Tangkap Kab. Bolaang Mongondow selatan 2021

Jenis Tangkapan	Nilai Produksi (Rp)	Prod 2021 (Kg)	Prod 2021 (ton)
Baronang (Siganus vulpinus)	23,512,500	1,425	1
Bawal Hitam (Parastromateus niger)	10,355,100,000	295,860	296
Belanak (Valamugil seheli)	40,510,000	4,051	4
Biji Nangka Karang (Parupeneus indicus)	77,877,000	8,653	9
Cakalang (Katsuwonus pelamis)	15,372,586,575	2,595,113	2,595
Cendro (Lestrolepis japonica)	108,130,000	10,813	11
Cumi-cumi (Loligo chinensis)	3,236,970,000	215,798	216
Ekor Kuning (Paracaesio kusakarii)	4,309,690,000	123,134	123
Julung-julung (Hemiramphus far)	2,172,510,000	120,695	121
Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	17,412,570,000	386,946	387
Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	10,023,480,000	250,587	251
Kapas-kapas (Pentaprion longimanus)	36,192,000	2,784	3
Kembung (Rastrelliger faughni)	639,010,000	63,901	64
Kepiting (Carpilius maculatus)	362,810,000	10,366	10
Kerapu Batik (Epinephelus polyphekadion)	9,317,815,000	143,351	143
Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	14,681,370,000	266,934	267
Kerapu Macan (Epinephelus maculatus)	10,873,020,000	181,217	181
Kerapu Merah (Cephalopholis igarashiensis)	8,435,070,000	187,446	187
Kerong-kerong (Helotes sexlineatus)	138,620,000	13,862	14
Kurisi (Pentapodus trivittatus)	2,103,800,000	105,190	105
Kuwe (Carangoides armatus)	9,652,400,000	241,310	241
Kuwe Malam (Carangoides praeustus)	472,745,000	13,507	14
Layang (Decapterus maruadsi)	234,766,700	2,519,972	2,520
Layang Anggur (Decapterus kurroides)	339,447,500	19,397	19
Layang Biru (Decapterus macarellus)	263,445,000	15,054	15
Layang Lidi; Layar Deles (Decapterus macrosoma)	779,852,500	44,563	45
Layur (Trichiurus lepturus)	49,050,000	4,905	5

Jenis Tangkapan	Nilai Produksi (Rp)	Prod 2021 (Kg)	Prod 2021 (ton)
Lemadang (Coryphaena hippurus)	1,077,270,000	71,818	72
Lemuru (Sardinella lemuru)	84,420,000	4,221	4
Lencam (Lethrinus xanthochilus)	10,043,580,000	334,786	335
Lobster (Panulirus argus)	366,675,000	4,889	5
Lolosi Papan (Caesio cuning)	1,869,162,500	149,533	150
Nike (Sicyopterus lagocephalus)	650,337,500	52,027	52
Pinjalo (Pinjalo pinjalo)	6,008,250,000	160,220	160
Selar Bulat (Alepes djedaba)	196,713,200	9,757	10
Selar Hijau (Atule mate)	1,529,753,900	1,312,571	1,313
Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	2,960,883,800	282,490	282
Serinding Tembakau (Priacanthus macracanthus)	290,437,500	23,235	23
Sunglir (Elagatis bipinnulata)	963,380,000	48,169	48
Swanggi (Priacanthus tayenus)	1,475,540,000	147,554	148
Tembang (Sardinella gibbosa)	553,670,000	55,367	55
Tenggiri (Scomberomorus commerson)	4,055,490,000	135,183	135
Teri Nasi (Encrasicholina devisi)	3,204,705,000	91,563	92
Tetengkek (Megalaspis cordyla)	128,887,500	10,311	10
Tongkol (Auxis thazard)	11,550,000,000	924,000	924
Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol)	4,645,422,970	442,656	443
Tongkol Komo (Euthynnus affinis)	2,623,235,525	407,868	408
Tongkol Lisong (Auxis rochei)	502,563,600	370,989	371
Tuna Mata Besar (Thunnus obesus)	5,980,100,000	170,860	171
Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	58,092,178,150	1,189,993	1,190
TOTAL		14,246,894	14,247

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.1.2.5 Potensi Pertambangan

Pengembangan potensi pertambangan diarahkan untuk pertambangan mineral logam, pertambangan mineral logam bebatuan dan mineral non logam. Mineral logam terdapat di Kecamatan Pinolosian Timur, Pinolosian Tengah, Bolaang Uki, dan Posigadan. Kawasan peruntukan pertambangan bebatuan terdapat di Desa Nunuk, Molibagu, Pangia, Bakida, Motolohu, Tolutu, Sinandaka, Milangodaa. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam Sungai Asam Desa Adow dan Adow Selatan sampai dengan Kawasan Teluk Tomini yang menjadi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saat ini, potensi dan peluang investasi pertambangan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dititikberatkan pada emas, tembaga, pasir besi, toseki dan andesit. Diharapkan ekplorasi daerah pertambangan ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pengawasan dan menertibkan galian C yang melanggar RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Potensi sumber daya mineral di Kabupaten ini disajikan pada **Tabel 2.12.**

Tabel 2.12
Potensi Bahan Galian dan Mineral di Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Bahan Galian	Kacamatan	Bahan Galian
Bolaang Uki	- Pasir Besi - Sirtu Sungai - Andesit - Mineral Pembawa Logam - Toseki - Kaolin - Trass	Pinolosian Tengah	- Pasir Besi - Andesit - Mineral Pembawa Logam - Trass Sirtu Sungai
Posigadan	- Pasir Besi - Sirtu Sungai - Mineral Pembawa Logam	Pinolosian Timur	- Mineral Pembawa Logam - Andesit - Trass - Sirtu Sungai - Pasir Besi
Pinolosian	- Pasir Besi - Andesit - Sirtu Sungai - Mineral Pembawa Logam		

Sumber: LKJIP Kab.Bolaang Mongondow Selatan 2020

2.1.3 Wilayah Rawan bencana

Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2016-2021 tercatat sebesar 149,6 poin dengan kategori masuk potensi tinggi rawan bencana. Berikut ini potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

   Gerakan tanah adalah perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke arah bawah dan keluar lereng. Secara umum, faktor pendorong yang dapat menyebabkan terjadinya longsor adalah curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, lapisan tanah yang kurang padat dan tebal, jenis batuan (litologi) terjadinya pengikisan tanah atau erosi. Kegiatan pemotongan lereng bukit karena pembuatan jalan di daerah berlereng curam dan/atau kegiatan lain sering menjadi penyebab terjadinya longsor. Lokasi rencana kawasan rawan gerakan tanah/longsor di wilayah perencanaan tersebar di sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi bagian Selatan, jalur jalan yang menghubungkan Molibagu dengan Dumoga dan jalur jalan yang menghubungkan Adow dan Matali Baru.

2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang /Abrasi

Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 Km/jam. Jika terjadi gelombang pasang di laut akan menyebabkan terkikisnya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi.

Kawasan rawan banjir berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan/banjir dapat dikategorikan dalam tiga kategori: (a) Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia; (b) Banjir yang disebabkan oleh meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai; dan (c) Banjir akibat kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul dan bangunan pengendali banjir. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri atas Kawasan rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, dan kawasan rawan tsunami. **Tabel 2.13** di bawah ini menunjukkan desa yang mengalami bencana banjir sepanjang tahun 2011-2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.13
Jumlah Desa yang Mengalami Banjir Menurut Kecamatan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2021

Kecamatan	Banjir					
	2011	2014	2018	2019	2020	2021
Posigadan	11	19	6	0	11	1
Tomini	0	0	3	0	3	0
Bolaang Uki	6	7	6	0	16	1
Helumo	0	0	5	0	6	0
Pinolosian	7	7	9	0	8	1
Penolosian Tengah	3	7	8	0	6	5
Penolosian Timur	8	11	12	0	11	6
Total	**35**	**51**	**49**	**0**	**61**	**14**

Sumber: BPBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2020

3. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 tahun 2008 adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah untuk melindungi manusia dan kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tergolong daerah dengan tingkat ancaman “tinggi”

terhadap gempa Bumi (Peta Indeks Ancaman Gempa Bumi di Indonesia, BNPB, 2010).

b. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif kawasan sempadan sesar adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sesar. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria: sepadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Menurut Peta Geologi oleh Apandi, 1977, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki struktur sesar berarah Timur Laut – Barat Daya yang memanjang dari sekitar Tanjung Dodepo-Gunung Mogonipa dan sesar geser berarah Barat Laut-Tenggara, memanjang dari daerah sekitar Mataindo-Dumoga. Sebagian struktur sesar ini melewati kawasan hutan namun pada bagian tertentu, struktur sesar ini diprakirakan berada di kawasan permukiman.

c. Kawasan Rawan Tsunami

Tsunami merupakan dampak turunan dari gempa bumi yang diikuti pematahan/dislokasi lantai laut/samudera yang menimbulkan pergerakan merusak segala hasil gelombang tsunami, menuju kearah darat. Gerak gelombang tersebut akan budidaya manusia di laut dan daratan pantai yang dapat terjangkau oleh gelombang tsunami tersebut. Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Sulawesi Utara (BNPB, 2010), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk dalam tingkat Risiko "Sedang" terhadap tsunami. Peta rawan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.12** di bawah ini.

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Kab. Bolaang Mongondow Selatan

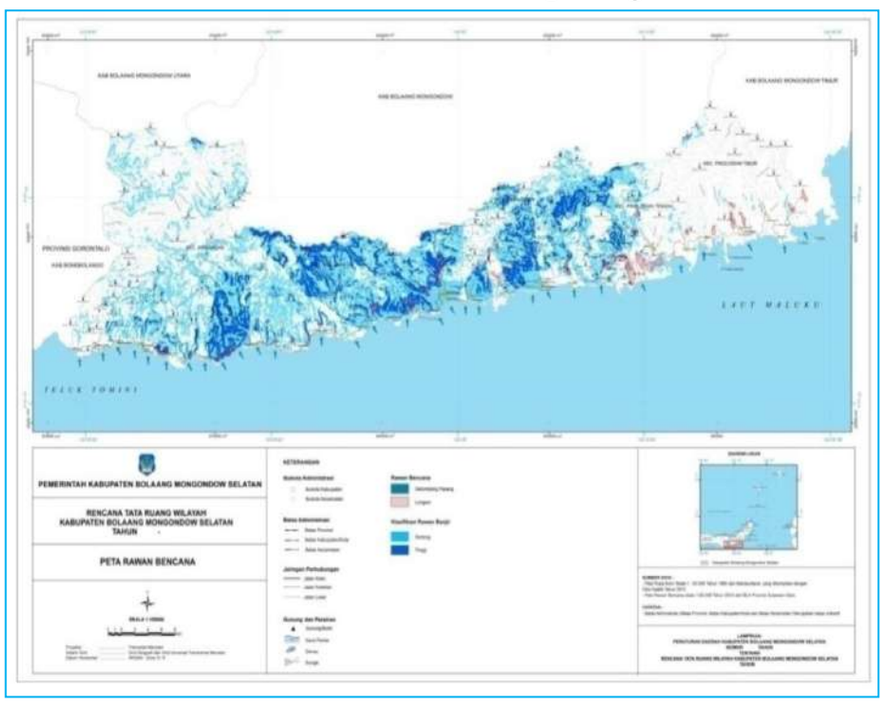

Sumber: RTRW Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033

2.1.4 Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Jumlah penduduk tahun 2021 tercatat sebayak 70.529 jiwa (proyeksi BPS 2021) dengan pertumbuhan sebesar 1,06%. Dilihat dari proporsi berdasarkan jenis kelamin, secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melebihi jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari sex ratio sebesar 109 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Selengkapnya dirinci dalam indikator kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016-2021 dalam **Tabel 2.14** berikut ini:

Tabel 2.14
Indikator Kependudukan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (ribu Jiwa)	6.320	6.417	6.513	7.353	69.791	70.529
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,58	1,66	1,49	1,922	1,98	1,06
Kepadatan penduduk (jiwa/km²)	32,71	33,21	33,70	37,02	36,12	36,50
Sex Ratio	109,43	110,21	109,12	108,46	108,70	109

Sumber: Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2021, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.14 diatas, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, tahun 2021 kepadatan penduduk mencapai 36,50 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terdapat Kecamatan Bolaang Uki sebesar 70,20 orang/km2 dan terendah di Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar 20,98 orang/km2. Kepadatan jumlah penduduk dengan luas wilayah akan secara simultan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu kebijakan terhadap pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian untuk ditangani, karena akan menjadi beban serius bagi pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan disajikan dalam **Tabel 2.15.**

Tabel 2.15
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk			Kepadatan Penduduk (orang/Km²)
	Km²	% Terhadap Luas Kab	Jumlah	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	
Posigadan	535,64	27,72	14.727	20,88	1,27	27,49
Tomini	193,36	10,01	6.120	8,68	1,27	31,65
Bolang Uki	255,21	13,21	17.917	25,40	1,28	70,20
Helumo	138,22	7,15	7.022	9,96	1,28	50,80

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk			Kepadatan Penduduk (orang/Km²)
	Km²	% Terhadap Luas Kab	Jumlah	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	
Pinolosian	285,93	14,80	10.768	15,27	0,69	37,66
Pinolosian Tengah	302,07	15,63	6.338	8,99	1.05	20,98
Pinolosian Timur	221,87	11,48	7.637	10,83	0,28	34,42
Bolaang Mongondow Selatan	**100**	**100**	**70.529**	**100**	**1,06**	**36,50**

Sumber: Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Dinamika perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya terlihat dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). PDRB ADHB merupakan nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk dapat melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) mengalami peningkatan Tahun 2017-2021. Tahun 2021 nilai PDRB ADHB sebesar 2.296.396 atau meningkat sebesar 3,74 persen dibandingkan tahun 2020. Nilai dan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2021 disajikan dalam **Tabel 2.16**

Tabel 2.16
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	669.243	717.151	796.315	834.552	875.89
B. Pertambangan dan Penggalian	107.039	113.535	124.166	140.683	15.80
C. Industri Pengolahan	12.219	13.299	13.659	14.743	16.90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.567	0.574	0.616	0.685	0.73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.706	6.048	6.080	6.484	6.77
F. Konstruksi	229.506	282.027	314.001	307.221	346.61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.251	159.700	173.961	178.075	192.50
H. Transportasi dan Pergudangan	52.878	56.256	62.720	58.845	61.76
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.813	6.306	6.540	66.136	6.55
J. Informasi dan Komunikasi	2.134	2.387	2.601	2.797	2.94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.779	8.326	8.641	9.149	10.04

Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
L. Real Estate	60.940	65.721	71.374	71.360	73.87
M,N.Jasa Perusahaan	0.226	0.258	0.273	0.276	0.30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	208.257	230.748	239.958	240.559	249.48
P. Jasa Pendidikan	156.547	171.682	190.173	202.289	212.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.242	55.189	59.534	65.487	72.94
R, S, T, U. Jasa lainnya	9.983	11.397	13.294	13.395	14.33
Produk Domestik Regional Bruto	**1.727. 329**	**1.900. 606**	**2.083. 908**	**2.153. 238**	**2.296. 396**

Sumber: PDRB Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2020

Sedangkan berdasarkan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Kostan (ADHK) Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) juga bergerak positif. Tahun 2021 PDRB ADHK mencapai 1.386.962 milyar rupiah atau naik sebesar 3,74 persen dari tahun 2021. Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2017-2021 disajikan dalam **Tabel 2.17**

Tabel 2.17
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Kostan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	451.70	472.36	507.70	517.64	527.29
B. Pertambangan dan Penggalian	77.20	80.95	86.25	87.38	92.36
C. Industri Pengolahan	8.15	8.61	8.65	8.99	9.65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.53	0.53	0.56	0.61	0.65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.34	4.48	4.48	4.75	4.90
F. Konstruksi	161.14	180.80	193.54	185.76	200.92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.26	112.56	120.10	119.54	123.61
H. Transportasi dan Pergudangan	31.18	33.01	35.47	33.10	33.68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.37	4.64	4.76	4.50	4.77
J. Informasi dan Komunikasi	1.53	1.62	1.70	1.90	1.96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.06	6.21	6.31	6.65	6.92
L. Real Estate	34.57	36.69	38.50	38.23	38.70
M,N.Jasa Perusahaan	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	139.23	148.06	150.02	148.52	153.82
P. Jasa Pendidikan	98.92	107.35	116.23	121.04	125.05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.48	42.86	45.27	49.44	53.36
R, S, T, U. Jasa lainnya	7.13	7.91	8.87	8.74	9.15
Produk Domestik Regional Bruto	**1171.96**	**1248.80**	**1328.57**	**1336.97**	**1386.962**

Untuk mendukung usaha pertanian, pemerintah Kaupaten Bolaang Mongondow Selatan menyediakan asuransi untuk petani, tahun 2022 sebanyak 6.000 petani telah menerima asuransi.

Pada tahun 2021, lapangan usaha yang mendominasi Bolaang Mongondow Selatan adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,14 persen. Langan usaha lain yang juga mendomiasi saat ini adalah lapangan usaha kontruksi sebesar 15,09 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 10.86 persen, jasa pendidikan dan perdagangan besar dan eceran. Lapangan usaha kontruksi cenderung mengalami peningkatan sebesar 15,09 persen karena pembangunan baik dari pemerintah dan swasta yang terus berjalan hingga saat ini serta bertambahnya pertokoan di Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan pertumbuhan sektor PDRB yang paling lambat bahkan tidak mengalami pergerakan sepajang tahun 2019-2021 adalah lapangan usaha jasa perusahaan dan Informasi dan komunikasi. Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2017-2021 disajikan dalam **Tabel 2.18.**

Tabel 2.18
Distribusi Persentase PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,76	37,74	38,21	38,76	38,14
B, Pertambangan dan Penggalian	6,2	5,97	5,96	6,53	6,61
C, Industri Pengolahan	0,71	0,7	0,66	0,68	0,74
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,33	0,03	0,03
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,32	0,29	0,30	0,29
F, Konstruksi	13,28	14,84	15,07	14,29	15,09
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,64	8,4	8,35	8,27	8,38
H, Transportasi dan Pergudangan	3,06	2,96	3,01	2,73	2,69
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,31	0,28	0,29
J, Informasi dan Komunikasi	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,45	0,44	0,41	0,42	0,44
L, Real Estate	3,53	3,46	3,43	3,31	3,22
M,N,Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,05	12,14	11,52	11,17	10,86
P, Jasa Pendidikan	9,06	9,03	9,13	9,39	9,27
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,85	2,9	2,86	3,04	3,18
R, S, T, U, Jasa lainnya	0,58	0,6	0,64	0,62	0,62
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab.BolaangMongondow Selatan

Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 (*y-on-y*) tumbuh positif, yaitu sebesar 3,74 persen, meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,63 persen. Terjadinya percepatan ini disebabkan

mulai pulihnya perekonomian setelah pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS Bolaang Mongondow Selatan tahun 2022 terdapat delapan kategori lapangan usaha yang tumbuh positif diantaranya yaitu Kontruksi, Industri pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Pertambangan dan pengggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa lainnya, Sektor jasa lainya. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan guna meredam ancaman resesi yang semakin nyata, diharapkan tidak akan mengalami perlambatan lebih dalam. Perlu usaha ekstra dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan perekonomian terus bertumbuh di masa pasca pandemi. Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) tahun 2017-2021 disajikan dalam **Tabel 2.19.**

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,76	4,69	7,48	1,96	1,87
B, Pertambangan dan Penggalian	7,08	4,85	6,55	1,31	5,70
C, Industri Pengolahan	7,51	5,56	0,51	3,98	7,25
D, Pengadaan Listrik dan Gas	2,19	0,93	6,09	7,60	6,73
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,57	3,05	0,09	6,12	3.02
F, Konstruksi	8,72	12,2	7,32	-4,02	9,16
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,63	5,92	6,70	-0,46	3,40
H, Transportasi dan Pergudangan	3,77	5,85	7,46	-6,67	1,73
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	6,26	2,49	-5,48	6,03
J, Informasi dan Komunikasi	5,28	6,01	4,76	11,95	3,09
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	15,51	2,53	1,83	5,45	3,95
L, Real Estate	5,76	6,13	4,93	-0,70	1,23
M,N, Jasa Perusahaan	7,38	7,37	5,65	-1,00	2,47
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,52	6,34	1,32	-1,00	3,57
P, Jasa Pendidikan	5,14	8,53	8,26	4,14	3,31
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,64	8,58	5,61	9,21	7,95
R, S, T, U, Jasa lainnya	7,46	10,9	12,16	-1,44	4,63
PDRB	6,25	6,6	6,43	0,63	3,74
PDRB TANPA MIGAS	6,25	6,6	6,43	0,63	3,74

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dari data series dalam lima tahun ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di bawah

pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara dan pertumbuahan ekonomi secara nasional. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan secara Nasional disajikan dalam **Gambar 2.13** berikut:

Gambar 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara Dan Secara Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Sedangkan dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tumbuh sebesar 0,06 persen Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota ditampilkan dalam **Tabel 2.20** berikut ini:

Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	LPE Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	0,39	0,44	0,47	0,06	0,24
Minahasa	0,80	0,80	0,76	-0,14	0,46
Kepulauan Sangihe	0,19	0,19	0,18	0,02	0,20
Kepulauan Talaud	0,09	0,09	0,08	0,01	0,06
Minahasa Selatan	0,45	0,42	0,41	-0,05	0,34
Minahasa Utara	0,68	0,67	0,66	-0,06	0,62
Bolaang Mongondow Utara	0,12	0,12	0,12	0,01	0,07
Kepulauan Sitaro	0,12	0,12	0,12	0,02	0,08
Minahasa Tenggara	0,26	0,24	0,24	-0,03	0,17
Bolaang Mongondow Selatan	0,09	0,10	0,09	0,01	0,06
Bolaang Mongondow Timur	0,12	0,11	0,10	0,00	0,06

Kabupaten/Kota	LPE Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Manado	1,91	1,88	1,72	-0,89	1,43
Bitung	0,79	0,76	0,51	0,17	0,59
Kota Tomohon	0,30	0,21	0,24	-0,01	0,07
Kota Kotamobagu	0,18	0,18	0,16	0,01	0,11
Sulawesi Utara	6,31	6,00	5,65	-0,99	4,16
Nasional					

Sumber: BPS Sulut 2022

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menjaga stabilitas moneter, Inflasi mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Angka inflasi mengindikasikan kenaikan harga barang dan jasa dari periode sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi penurunan harga barang dan jasa dari periode sebelumnya dikatakan sebagai deflasi. Kenaikan harga yang tinggi dapat berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa tersebut. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari pergerakan harga adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terbaca dari pergerakan laju inflasi tahunan di Kota Kotamubagu yang biasanya dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat. Adanya libur perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru biasanya akan mempengaruhi pergerakan inflasi. Pergerakan inflasi juga akan dipengaruhi harga komponen per kelompok, kelompok yang paling *volatile* adalah bahan makanan. Pergerakan harga kelompok makanan mempengaruhi pola pergerakan inflasi yang fluktuatif, inflasi terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 2,65. Kondisi ini secara umum menggambarkan bahwa tingkat stabilitas harga tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020.

Perbandingan inflasi di Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Nasional disajikan pada **Gambar 2.14** di bawah ini:

Gambar 2.14
Perbandingan Inflasi Kota Kotamobagu, Manado dan Nasional Tahun 2016-2021

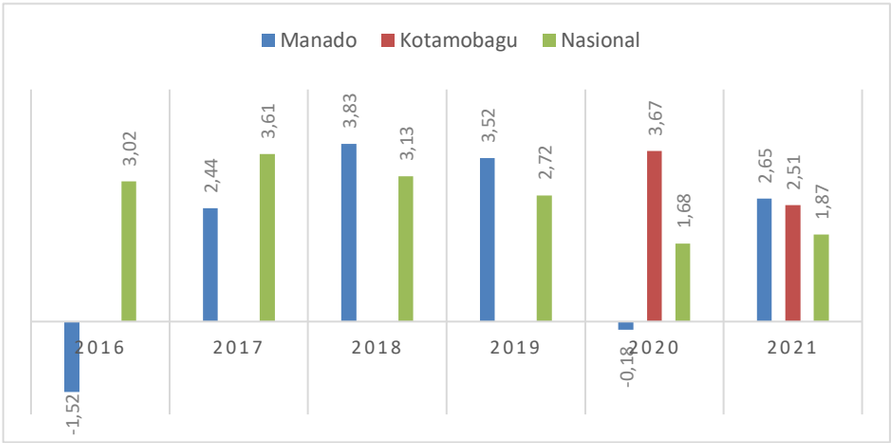

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Indonesia

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih masuk kategori berpendapat menengah ke bawah, PDRB per kapita ADHB tahun 2021 tercatat sebesar 32,56 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp, 32,56 juta rupiah selama tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar 2,29% dibandingkan tahun 2020 yang ttumbuh negatif sebesar 4,94%.

PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bolaang Mongondow Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara "riil" juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,5 sampai 1,4 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas. PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dirangkum dalam **Tabel 2.21.**

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	1.727.329	1.900.896	2.083.870	2.153.238	2.296.396
ADHK	1.172.959	1.249.404	1.329.640	1.336.974	1.386.962
PDRB Per Kapita (Juta Ribu Rupiah)					
ADHB	26,92	29,18	31,71	30,95	32,56

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
ADHK 2010	18,26	19,18	20,22	19,22	19,66
Pertumbuhan Per Kapita ADHK (Persen)	4,63	5,03	5,42	-4,94	2,29
Jumlah penduduk (000 org)	64,17	65,13	65,71	69,57	70,53
Pertumbuhan ekonomi	6,14	6,60	6,43	0,63	3,74

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

2.2.1.4 Indeks Gini

Suatu wilayah dikatakan mempunyai ketimpangan yang tinggi jika indeks gini melebihi angka 0,5 poin. Indeks gini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5 poin. Pada tahun 2020 indeks gini kabupaten ini berada angka 0,330 dan mengalami penuruan sebesar 0,01 poin pada tahun 2021. Jika dilihat dari data series pola pergerakan indeks gini sampai 2021 bergerak positif, ini artinya dari tahun ke tahun terlihat bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan semakin merata.

Dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, tidak terlihat ketimpagan yang mencolok, rata-rata berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan diperlukan. Masalah ketimpangan perlu menjadi fokus utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk diharapkan diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk secara utuh mengingat ancaman resesi ada di depan mata. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Selawesi Utara dan secara nasional disajikan pada **Tabel 2.22**

Tabel 2.22
Perbandingan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	0,350	0,320	0,300	0,310	0,360
Minahasa	0,350	0,400	0,350	0,320	0,387
Kepulauan Sangihe	0,340	0,370	0,340	0,320	0,340
Kepulauan Talaud	0,350	0,350	0,380	0,370	0,328
Minahasa Selatan	0,400	0,400	0,400	0,350	0,366
Minahasa Utara	0,400	0,370	0,390	0,370	0,363
Bolaang Mongondow Utara	0,380	0,380	0,340	0,390	0,328

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Sitaro	0,350	0,340	0,300	0,340	0,344
Minahasa Tenggara	0,350	0,330	0,380	0,360	0,357
Bolaang Mongondow Selatan	**0,330**	**0,360**	**0,340**	**0,330**	**0,329**
Bolaang Mongondow Timur	0,340	0,320	0,350	0,340	0,370
Kota Manado	0,390	0,400	0,360	0,360	0,346
Bitung	0,380	0,340	0,330	0,350	0,324
Kota Tomohon	0,380	0,350	0,310	0,360	0,354
Kota Kotamobagu	0,410	0,390	0,330	0,320	0,346
Sulawesi Utara	**0,390**	**0,390**	**0,370**	**0,370**	**0,365**
Nasional	**0,390**	**0,390**	**0,380**	**0,390**	**0,381**

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan Selatan, BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS, 2022

2.2.1.5 Pemerataan versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, merujuk perkembangan per kapita Bolaang Mongondow Selatan selama periode waktu 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Meskipun demikian, PDRB per kapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 32,56 juta rupiah pada tahun 2021. Angka ini cukup tinggi namun jika diukur dalam US$, PDRB per kapita masih termasuk kategori Kabupaten berpendapatan menengah ke bawah (pendapatan per kapita antara US$4125-US$12746). Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan yang mempertimbangkan laju inflasi pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 5 tahun terakhir relative lebih lambat yaitu sebesar 4-6 persen dan terkoreksi pada angka 3,74 persen respon terhadap pandemi COVID-19. Berdasarkan data statistik yang ada, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 18,36 Persen. Kondisi tersebut masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan angka IPM Bolaang Mongondow Selatan tiap tahun mengalami peningkatan selama 2017-2021. Dengan metode perhitungan baru, IPM Bolaang Mongondow Selatan naik 0,42 poin dari tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 65,42 poin pada tahun 2021. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) kisaran angka IPM tersebut menunjukkan kemajuan yang dicapai tergolong sedang (kisaran 60-70).

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditampilkan dalam **Gambar 2.15** berikut ini:

Gambar 2.15
IPM Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

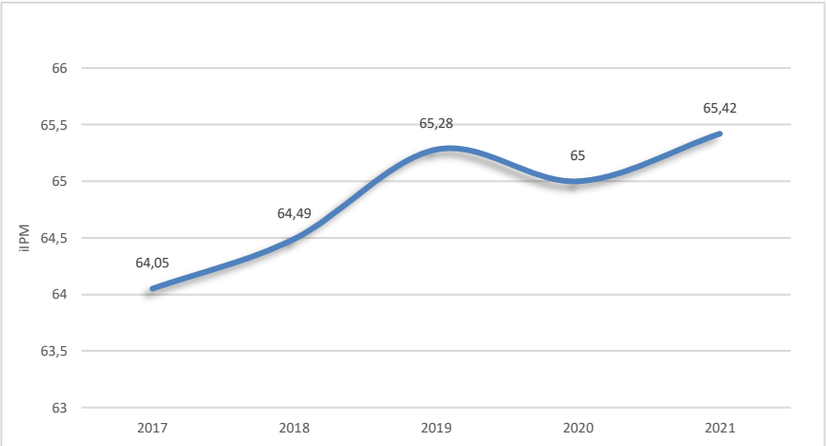

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Nilai IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2017 sampai dengan 2019 secara gradual mengalami peningkatan menjadi 65,28 poin, namum tahun 2020 turun sebesar 0,28. Pelambatan 0,20 dipicu respon terhadap pandemi yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi semakin meningkatnya komponen pengeluaran masyarakat pada tahun 2021.

Jika dibandingkan Angka IPM Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di peringkat 15 dari 15 Kabupaten/Kota. Hal ini diharapkan menjadi prioritas pemerintah di masa mendatang, agar pembangunan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia melalui berbagai pembangunan yang bertujuan utnuk meningkatkan standar hidup masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam **Tabel 2.23.**

Tabel 2.23
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	IPM Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	66,08	66,91	67,82	67,89	68,16
Minahasa	74,59	74,97	75,47	75,29	75,73
Kepulauan Sangihe	69,14	69,67	70,53	70,73	71,07
Kepulauan Talaud	67,74	68,32	68,97	69,40	69,83
Minahasa Selatan	70,05	70,86	71,68	72,11	72,32
Minahasa Utara	72,2	73,05	73,95	73,90	74,11

Kabupaten/Kota	IPM Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow Utara	65,6	66,32	66,91	66,99	67,39
Kepulauan Sitaro	66,03	66,75	67,48	67,64	68,05
Minahasa Tenggara	68,91	69,66	70,47	70,51	71,06
Bolaang Mongondow Selatan	**64,05**	**64,49**	**65,28**	**65,00**	**65,42**
Bolaang Mongondow Timur	64,73	65,21	66,08	65,99	66,55
Kota Manado	78,05	78,41	79,12	78,93	79,20
Bitung	72,94	73,27	74,20	74,10	74,20
Kota Tomohon	75,34	75,78	76,67	76,69	76,86
Kota Kotamobagu	72	72,55	73,22	72,97	73,47
Sulawesi Utara	**71,66**	**72,20**	**72,99**	**72,93**	**73,30**
Nasional	**70,81**	**71,39**	**71,92**	**71,94**	**72,29**

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan, BPS Provinsi Sulawesi Utara, BPS Indonesia

2.2.1.7 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama periode 2017-2021 bergerak fluktuatif. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 9,05 ribu jiwa turun menjadi 8,63 ribu jiwa pada tahun 2021. Secara persentase, jumlah penduduk miskin turun dari 14,16 persen tahun 2017 menjadi 12,85 persen dari seluruh penduduk Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,08 persen. Perkembangan kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.24** di bawah ini:

Tabel 2.24

Indikator Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

Indikator Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	9,05	8,82	8,74	8,53	8,63
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,16	13,54	13,27	12,77	12,85
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,11	1,55	1,33	1,65	1,47
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,52	0,32	0,19	0,33	0,28
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	288.862	295.875	316.305	327.648	345.819

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Dilihat Tabel diatas dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dalam lima tahun cenderung mengalami penurunan. Tercatat tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 1,47 dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,65 atau

turun sebesar 0,18. Penurunan nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sementara untuk Indeks Keparahan (P2) juga menunjukkan penurunan yang artinya kesenjangan (gap) diantara masyarakat Bolaang Mongondow Selatan semakin menurun yaitu sebesar 0,28 dan distribusi pengeluaran dan kemampuan daya beli masyarakat semakin membaik.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada tahun 2021 tercatat sebesar 55,02 persen. Oleh karena itu pemerintah diharapkan serius untuk lebih menitikberatkan sektor pertanian dan pedesaan sebagai poros kebijakan pembangunan. Lewat strategi tersebut, akan tercipta akselerasi pengentasan warga dari kemiskinan. Potret perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.16** berikut ini.

Gambar 2.16
Potret Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

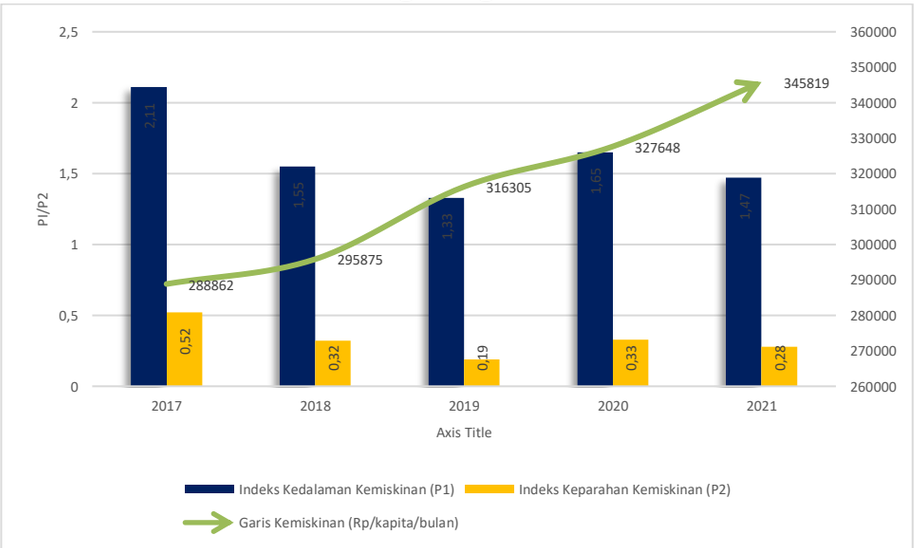

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh gap atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Semakin kecil indikator tersebut menandakan bahwa

program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil, Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih jauh di atas angka persentase penduduk miskin se-Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang mongondow Selatan masih berada di peringkat ke 15 dari 15 kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini diharapkan pengentasan kemiskinan harus menjadi fokus prioritas pembangunan melalui program yang mampu menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Perbandingan tingkat kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2017-2021 disajikan dalam **Tabel 2.25.**

Tabel 2.25
Perbandingan Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 (%)

Kabupaten/Kota	Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	8,02	7,67	7,47	7,27	7,58
Minahasa	7,9	7,3	7,18	7,30	7,67
Kepulauan Sangihe	11,8	11,82	11,15	11,14	11,02
Kepulauan Talaud	9,77	9,5	9,86	9,49	9,00
Minahasa Selatan	9,78	9,34	9,26	9,14	9,37
Minahasa Utara	7,46	6,99	6,93	7,00	7,11
Bolaang Mongondow Utara	8,89	8,64	8,45	8,41	8,03
Kepulauan Sitaro	10,33	9,87	9,56	8,94	8,94
Minahasa Tenggara	14,08	13,29	12,78	12,30	12,47
Bolaang Mongondow Selatan	**14,16**	**13,54**	**13,27**	**12,77**	**12,85**
Bolaang Mongondow Timur	6,2	6,03	6,1	5,88	6,10
Kota Manado	5,46	5,38	5,51	5,86	6,19
Bitung	6,62	6,67	6,49	6,41	6,43
Kota Tomohon	6,47	5,95	5,62	5,60	5,69
Kota Kotamobagu	5,9	5,96	5,71	5,42	5,74
Sulawesi Utara	8,1	7,8	7,66	7,62	7,77

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Berdasarkan Gambar 2.17 di bawah ini, masih menyisakan 0,33 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berusia 15-59 tahun masih buta aksara. Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2021 tercatat sebesar 99,67 persen. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang dengan meningkatkan program pendidikan non formal (Paket A/B/C) atau pendidikan kesetaraan dapat mendorong terwujudnya tuntas melek huruf (AMH) bagi

penduduk berusia 15-59 tahun dan tercapainya rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.17.**

Gambar 2.17
Angka Melek Huruf Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

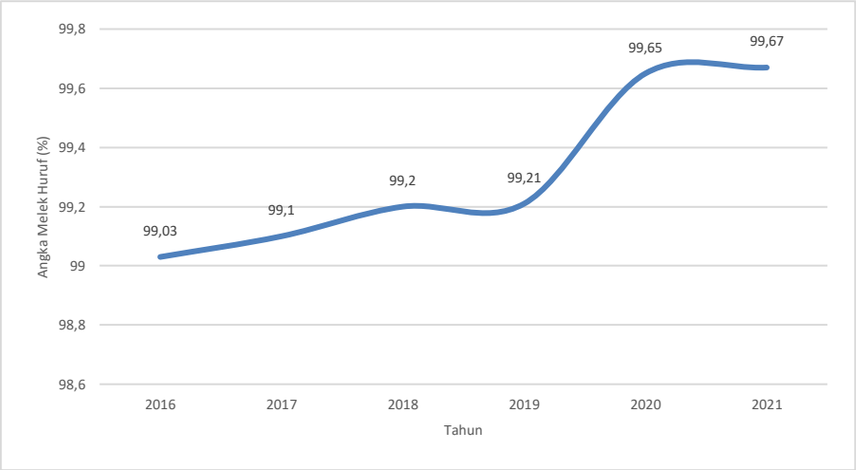

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka tahun 2022

2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator *Expected Years of Schooling* (EYS) atau Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang, HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun.

Dari tahun 2017 hingga 2021 angka HLS terus meningkat, Angka HLS tahun 2021 adalah 11,86 tahun yang berarti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun ke atas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sekitar 12 tahun atau setara dengan pendidikan sampai dengan diploma satu. Secara keseluruhan capaian yang dihasilkan mengalami peningkatan, namun hal tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat masih adanya anak putus sekolah dan fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal seperti internet, komputer, serta laboratorium sekolah. Perkembangan angka HLS tahun 2016- 2021 ditampilkan melalui **Gambar 2.18.**

Gambar 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2017-2021

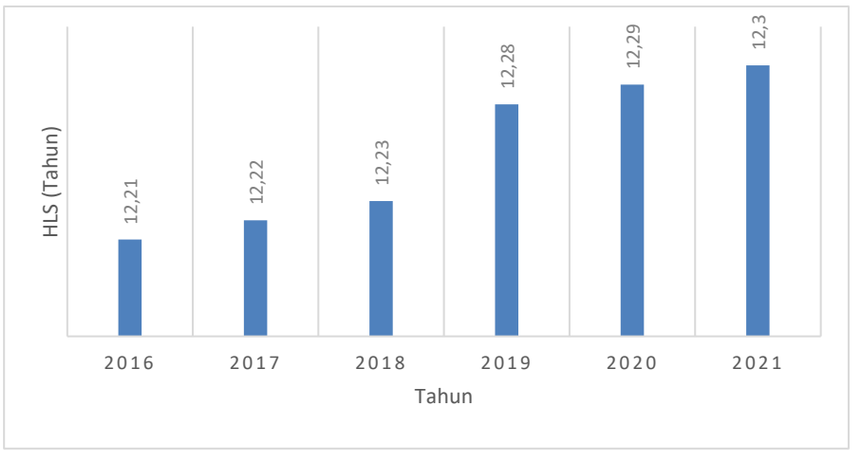

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 tercatat rata-rata lama sekolah sebesar 7,12 tahun, naik 0,25 pada tahun 2021 menjadi 8,15 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Bolaang Mongondow Selatan masih belum tamat SLTP atas rata-rata penduduk tamat Sekolah Dasar (SD). Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2017-2021 disajikan dalam **Gambar 2.19,**

Gambar 2.19
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2017-2021

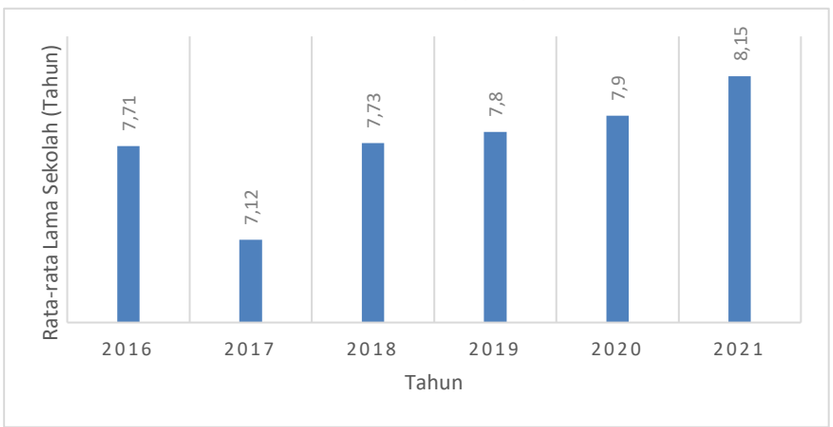

Sumber: Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara,2022

Jika dilihat perbandingan berdasarkan Kabupaten/Kota, Kota Manado merupakan wilayah di Sulawesi Utara yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2021 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebesar 7,57 tahun. Perbandingan rata-rata lama sekolah per Kabupaten/Kota dapat disajikan dalam **Tabel 2.26.**

Tabel 2.26
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	7,38	7,59	7,77	7,93	8,03
Minahasa	9,55	9,56	9,58	9,59	9,73
Kepulauan Sangihe	7,89	7,90	8,04	8,29	8,34
Kepulauan Talaud	8,93	9,00	9,25	9,51	9,72
Minahasa Selatan	8,72	8,84	8,85	9,08	9,09
Minahasa Utara	9,32	9,61	9,93	9,99	10,00
Bolaang Mongondow Utara	7,85	8,11	8,12	8,40	8,41
Kepulauan Sitaro	8,56	8,57	8,75	8,97	9,03
Minahasa Tenggara	8,51	8,82	8,87	8,88	9,11
Bolaang Mongondow Selatan	**7,72**	**7,73**	**7,80**	**7,90**	**8,15**
Bolaang Mongondow Timur	7,53	7,57	7,59	7,83	7,93
Kota Manado	11,03	11,04	11,26	11,27	11,42
Bitung	9,64	9,65	9,87	9,88	9,89
Kota Tomohon	10,24	10,25	10,48	10,73	10,74
Kota Kotamobagu	9,98	10,24	10,09	10,10	10,31
Sulawesi Utara	**9,14**	**9,24**	**9,43**	**9,49**	**9,62**

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2022

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan festival seni dan budaya di Bolaang Mongondow Selatan terdapat sarana untuk penyelenggaraan berbagai acara atau event seni dan budaya. Pada tahun 2020 penyelenggaraan event seni dan budaya hanya dilaksanakan 1 event seni budaya. Hal ini disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, Perkembangan penyelenggaraan dan sarana seni dan budaya dan olahraga tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.27.**

Tabel 2.27
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2021

Indikator	**2016**	2017	2018	2019	2020	2021
Event Seni dan Budaya (unit)	1	1	1	1	1	1
Jumlah Sarana Olahraga	49	49	49	49	49	49

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2016-2021 sebanyak 49 berupa lapangan olahraga yang terdiri 7 lapangan sepak bola sebanyak, 1 lapangan basket sebanyak, 28 volley ball, 7 lapanagan bulu tangkis dan 6 lapangan footsal.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan Pemerintah yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tingkat Partisipasi Sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat Partisipasi Sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 7-12 tahun sebesar 90,39 persen pada tahun 2021. Angka menunjukkan bahwa sebanyak 9,61 persen anak usia 7-12 seharusnya sudah bersekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD). Sementara untuk kelompok anak usia 13-15 tahun yang sebesar 96,39 persen. Dengan kata lain masih ada 3,61 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. Hal ini diindikasikan banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Perkembangan APS menurut usia Sekolah 2016- 2021 disajikan melalui **Gambar 2.20** berikut:

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

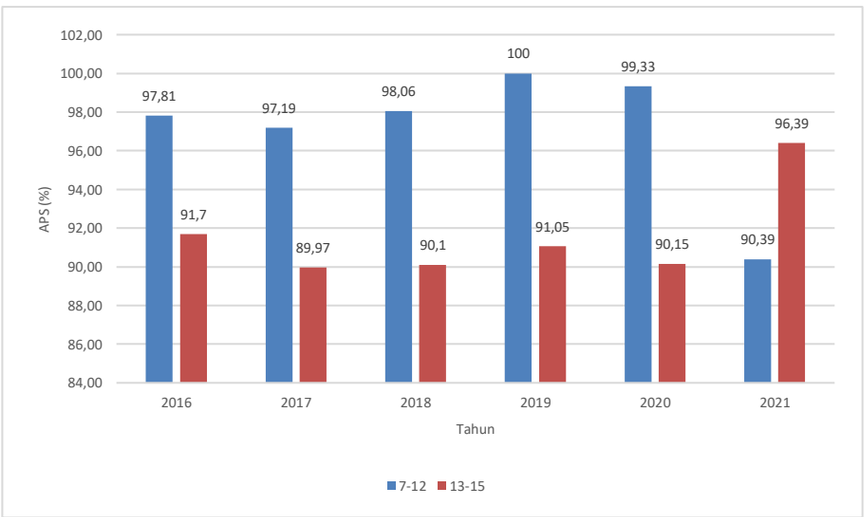

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat

pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa.

Dari Gambar 2.21 di bawah menunjukkan nilai APK sepanjang tahun 2017 sampai 2021 cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2021 APK untuk jenjang SD/sederajat sebesar 110,85 persen turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misalnya anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Selain itu, bisa juga disebabkan ole adanya siswa di luar wilayah Bolaang Mongondow Selatan yang bersekolah di wilayah tersebut ataupun siswa penduduk wilayah tersebut yang sekolah di wilayah lain.

Sementara APK untuk jenjang SMP/MTs/sederajat naik menjadi 85,33 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 87,12 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa 12, 88 persen pada jenjang ini banyak siswa yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Perkembangan APK SD/Sederajat dan SMP/Sederajat seperti ditampilkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.21
APK SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

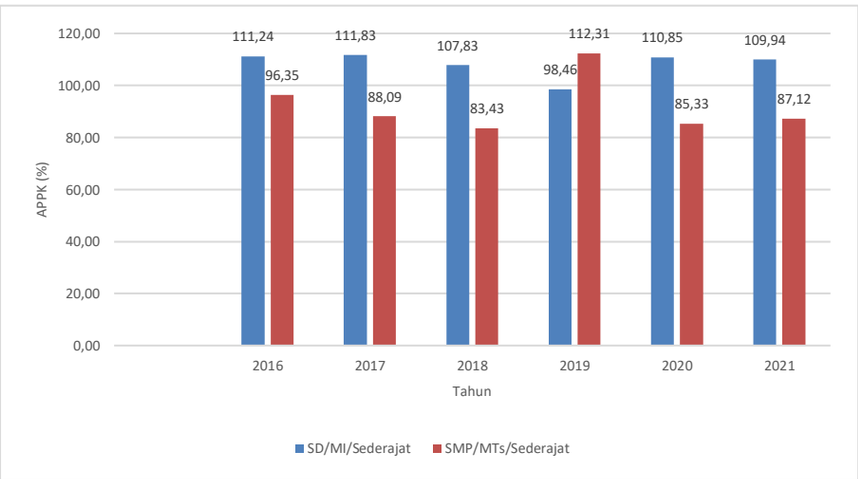

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2022

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Perkembangan APM pada jenjang SD/Sederajat selama periode 2017-2021 mengalami fluktuatif dengan rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan APM tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2021 APM SD/Sederajat di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 98,19 persen, artinya hampir sebanyak 1,81 persen anak usia 7-12 tahun belum bersekolah pada jenjang SD/Sederajat. Demikian juga untuk anak usia 13-15 tahun sebesar 75,87 persen artinya sebanyak 24,13 persen belum duduk di jenjang SMP/sederajat. Rendahnya APM SD/sederajat dan SMP/Sederajat disebabkan banyak siswa yang sekolah di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya pada usia 13-15 tahun. Perkembangan APM tahun 2017-2021 disajikan pada **Gambar 2.22.**

Gambar 2.22
Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017- 2021

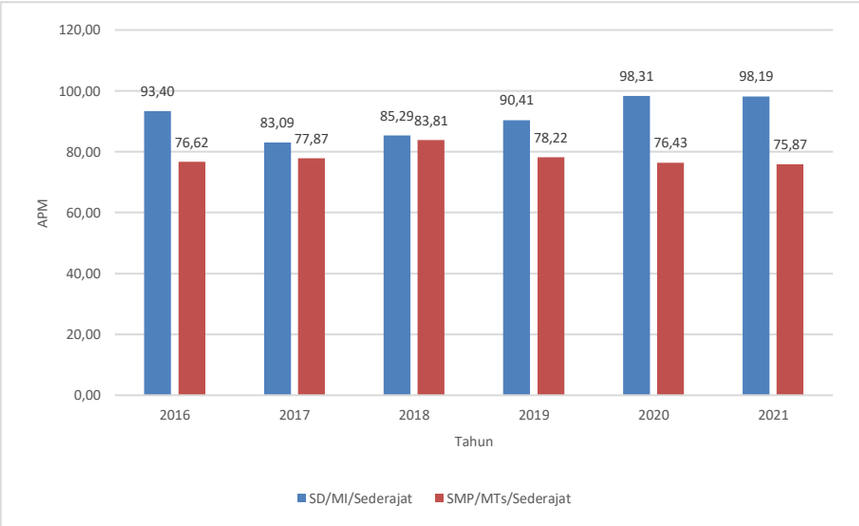

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2022

d. Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada. Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.27** di bawah ini:

Tabel 2.28
Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Sekolah Sekolah Dasar/(SD/MI)	1:79	1:75	1:70	1:67	1:104	1:112
Ketersediaan Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1:157	I: 197	1:139	1:152	1:162	1:160

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

e. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru terhadap murid sekolah dasar dan menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.29** di bawah ini:

Tabel 2.29
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah, Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio guru terhadap murid Sekolah Dasar/(SD/MI)	1:16	1:16	1:6	1:6	1:9	1:13
Rasio guru terhadap murid Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1:11	1:12	1:7	1:7	1:8	1:11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mongondow Selatan, 2021

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 0,22 persen sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 0,33 persen. Indikasi masih terjadinya anak putus sekolah disebabkan faktor internal dan eksternal. Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah baik berupa kemalasan anak putus sekolah, hobi bermain anak putus sekolah, rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak putus sekolah baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah, ataupun lingkungan yang kurang mendukung seperti jarak rumah dengan sekolah yang jauh. Berikut **Tabel 2.30** adalah Angka Putus Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.30
Angka Putus Sekolah Dasar Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Dasar (SD/MI) (Persen)	0,05	0,05	0,34	0,72	0,22	0,20
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) (Persen)	0,36	0,27	1,09	0,59	0,33	0,20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Berdasarkan Tabel 2.30 di bawah ini angka kelulusan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI sebesar 99,26 persen. Ini artinya masih ada murid yang tidak lulus pada tahun 2021 yaitu sebanyak siswa 0,74 persen. Hal ini juga terjadi pada angka kelulusan di jenjang Sekolah Menengah Pertama/MTS sebesar 99,80 persen. Angka Kelulusan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.31** di bawah ini:

Tabel 2.31
Angka Kelulusan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Dasar (SD/MI) (Persen)	99,67	100	99,63	99,42	99,78	99,26
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) (Persen)	98,61	99,14	99,31	98,89	99,67	98,80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

h. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.32** di bawah ini:

Tabel 2.32
Angka Melanjutkan Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Dasar (SD/MI) (Persen) ke Jenjang SMP/MTS (Persen)	102,64	95,20	100,16	85,87	90,50	90.50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Berdasarkan Tabel 2.31 di atas untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) siswa 90,50 persen melanjutkan pendidikan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) pada tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, artinya masih ada 0,50 persen lulusan SD/MI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTS. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar di masa mendatang.

i. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah aspek pengetahuan dalam faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dari angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar 8,15 artinya penduduk usia 25 tahun ke atas Bolaang Mongondow Selatan rata-rata memiliki tingkat pendidikan kelas 2 SMP, sedangkan angka harapan lama sekolah Bolaang Mongondow Selatan yang masuk sekolah formal memiliki kesempatan untuk bersekolah sampai dengan tingkat D-I dari data tersebut Indeks Pendidikan Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar 61,33. Perbandingan Indeks Pendidikan disajikan dalam **Tabel 2.33** di bawah ini:

Tabel 2.33
Indeks Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow Selatan	59,56	59,61	59,67	59,74	60,47	61,33
Sulawesi Utara	64,12	64,71	65,63	66,02	67,33	
Nasional	60,99	61,83	62,69	63,09	64,32	

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

2.3.1.2 Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2021 ini mencapai 64,49 tahun. Ini berarti bahwa, bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2021 akan dapat hidup sekitar 65 tahun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 64,45 tahun.

Peningkatan AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatnya perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, kondisi kesehatan lingkungan yang semakin membaik serta meningkatnya kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Peningkatan AHH dari tahun ke tahun menjadi indikasi

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditampilkan dalam **Gambar 2.23**.

Gambar 2.23
Angka Harapan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

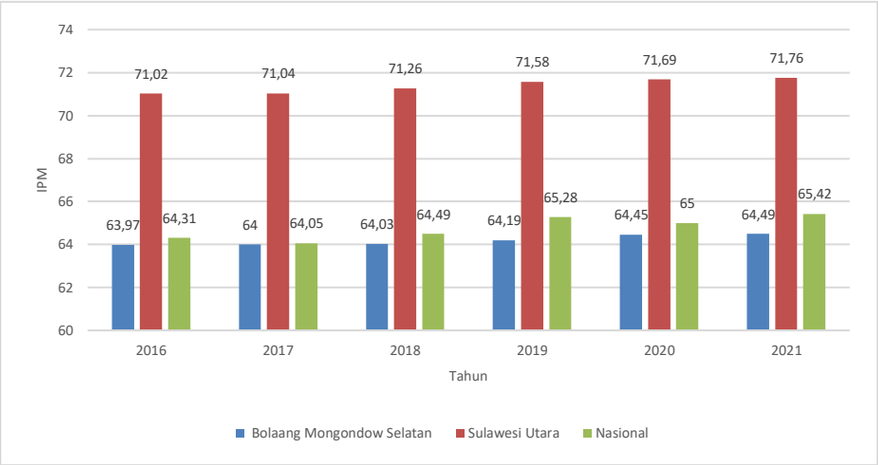

Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2022

b. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi mengalami perkembangan fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020. Namum pada tahun 2021 terjadi penurunan AKB dengan jumlah kematian sebanyak 12 bayi dari total 1.024 Kelahiran atau sebesar 11,72 / 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan AKI jumlah kasus 3 kematian dari 1.024 kelahiran atau 293/100.000 kelahiran hidup. Per september 2022 ditemukan 2 kasus kematian ibu sedangkan kasus kematian bayi sebanyak 8 kasus. Kondisi AKI dan AKB menjadi tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar terhadap kesehatan ibu dan anak. Perkembangan kasus kematian ibu dan bayi disajikan melalui pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2.34
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
AKI	2	3	2	6	293/ /100.000 (3 kasus)
AKB	n/a	5	7	8	11,72/ 1.000 (12 kasus)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

c. Balita Gizi Buruk dan Prevalensi *Stunting*

Balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan

menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Kasus gizi buruk masih terjadi tahun 2016 sampai 2019 dengan jumlah kasus masing-masing 1 kasus. Kasus gizi buruk pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, tahun 2021 terjadi lonjakan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan 21 balita, Perkembangan Balita gizi buruk disajikan pada **Tabel 2.35**

Tabel 2.35
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163	0,02
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100 (1 Balita)	100 (1 Balita)	100 (1 Balita)	100 (1 Balita)	100 (4 Balita)	100 (3 balita)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

Kasus *stunting* dalam 2 tahun terakhir ini terdapat penurunan signifikan terhadap prevalensi *stunting*. Tahun 2022 terhitung prevalensi *stunting* turun sebesar 7,97 persen dari 14,47 persen tahun 2020 menjadi 6,50 persen. Penurunan ini membawa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh 3 penghargaan diantaranya (1) Peringkat II, Penghargaan ppenurunan stunting tahun 2022 se-Sulut, (2) juara 2 kategori capaian total pelayanan tingkat provinsi pada kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor, (3) *Best Performance* pada pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2022 Berikut ini disajikan Prevalensi *Stunting* Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 pada T**abel 2.36**

Tabel 2.36
Prevalensi Bayi Stunting Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	Prevalensi *Stunting* (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Riskesda	-		33,8	-	-	
PSG	-	51	-	-	-	
SSGBI	-		-	71	-	
ePPGBM	-		-	15,66	14,78	6,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu aktif

di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2021 sebanyak 81 posyandu, yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jika dibandingkan dengan per 100 balita sepanjang tahun 2016-2021 posyandu melayani 1,12 per 100 balita. Perkembangan posyandu aktif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.37** di bawah ini.

Tabel 2.37
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu Per Satuan Balita	1,12 per 100 balita	1,12 per 100 balita	1,12 per 100 balita	1,12 per 100 balita	1,12 per 100 balita	1,12 per 100 balita

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

e. Rasio RS, Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya semakin penting perannya untuk penanggulangan COVID-19. Peran Puskesmas perlu diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun di sisi lain. Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung. Jumlah puskesmas yang terdata sejak tahun 2021 sebanyak 8 unit, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk terakhir (2022) sebesar 72.000 jiwa (Dukcapil, 2022) maka rasio puskesmas melayani jumlah penduduk sebesar 0,122. Hal ini bermakna bahwa 1 puskesmas melayani 9.000 penduduk pada tahun 2022. Sementara puskesmas pembantu per 10.000 penduduk sepanjang tahun 2016-2021 sebesar 23/10.000. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu per jumlah penduduk 2016-2021disajikan dari **Tabel 2.38** berikut ini:

Tabel 2.38
Rasio RS, Puskesmas, Pustu Jumlah Penduduk Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Puskesmas per 10.000 Jumlah Penduduk	13/ 10.000	13/ 10.000	13/ 10.000	13/ 10.000	8/ 10.000	8/ 10.000
Rasio Pustu per 10.000	23/ 10.000	23/ 10.000	23/ 10.000	23/ 10.000	23/ 10.000	23/ 10.000
Rasio RS per jumlah Pddk	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39

Sumber: Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Total panjang jalan yang menghubungkan seluruh wilayah di Bolaang Mongondow Selatan pada 2021 adalah 765,59 km. Jika dilihat menurut jenis jalannya, sepanjang 575 km adalah jalan kabupaten, sedangkan jalan negara dan provinsi masing-masing sepanjang 182,99 km dan 7,6 km. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu penghubung Sulawesi Utara dengan provinsi lain melalui jalur darat, sehingga kualitas jalan harus benar diperhatikan oleh pemerintah. Total panjang jalan kabupaten yang mencapai 575 km dengan rincian 45,16 persen jalan dengan kondisi baik, 0,49 persen jalan dengan kondisi sedang, 28,42 persen rusak ringan dan 26,08 persen rusak berat. Perbaikan kondisi jalan perlu dilakukan, terutama jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 26,08 persen pada tahun 2021. Peningkatan kondisi jalan sepanjang tahun 2016-2021 mengalami perkembangan positif, tahun 2021 terlihat penurunan kondisi jalan dalam kondisi rusak berat dibandingkan tahun 2020. Perkembangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.39**

Tabel 2.39
Perkembangan Kondisi Jalan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021

Tahun	Kondisi Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak berat
2016	23,94	5,50	32,09	38,46
2017	30,76	5,33	32,09	37,72
2018	34,98	5,28	26,65	33,09
2019	42,26	4,42	26,89	33,39
2020	40,55	1,70	27,73	30,02
2021	45,16	0,49	28,42	26,08

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam Angka Tahun 2022

b. Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Kondisi saluranirigasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam 6 tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2021 luas irigasi Kabupaten tercatat sebesar 4.769 ha dengan luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 57 persen atau 3.254 ha. Penurunan luas irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 disebabkan adanya bencana alam banjir pada tahun 2020-2021. Perkembangan luas irigasi dalam kondisi baik disajikan dalam **Tabel 2.40** di bawah ini.

Tabel 2.40
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persen)	86,36	85	85	76	44	68,23
Jumlah Sungai					72	72

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

c. Jembatan

Infrastruktur jembatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, sepanjang tahun 2016-2021 terbangun 49 jembatan dengan total panjang 424,40 meter. Perkembangan panjang jembatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.41** berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Panjang dan Jumlah Jembatan Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perkembangan Panjang Jembatan (m)	374,40	374,40	374,40	394,40	424,40	424,40
Jumlah Jembatan	45	45	45	47	49	49

Sumber: DPUPR Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

d. Cakupan Pelayanan Persampahan

Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per hari adalah sebesar 7.975,25 m^3 dari jumlah tersebut yang ditangani oleh pemerintah daerah adalah sebesar 5.662,43 m^3. Penanganan sampah di kabupaten ini tahun 2021 sebesar 71 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Cakupan pelayanan persampahan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.42.**

Tabel 2.42
Cakupan Pelayanan Persampahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penanganan Sampah (Persen)	24,75	85	85	85	85	71
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (Persen)	52,28	217,38	224,60	102	110	140

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

e. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi adalah jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2016-2021 turun signifikan dari 31,01 persen tahun 2016 menjadi 45,90 persen pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan adanya bencana banjir menyebabkan adanya kerusakan jaringan penampungan dan saluran pembuangan. Namun jika dibandingkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara terlihat bahwa rumah tangga bersanitasi berada pada peringkat ke 15 setelah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seperti disajikan pada **Tabel 2.43.**

Tabel 2.43
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	60,11	64,07	63,50	63,01	70,25	71,07
Minahasa	67,21	69,55	83,34	79,21	88,03	81,09
Kepulauan Sangihe	77,73	71,14	74,72	77,94	78,65	84,22
Kepulauan Talaud	80,47	62,00	83,04	88,36	86,99	86,09
Minahasa Selatan	77,64	67,78	71,55	64,39	82,58	78,43
Minahasa Utara	74,68	73,10	72,65	73,48	86,05	88,49
Bolaang Mongondow Utara	54,76	54,09	52,49	52,08	69,25	71,39
Kepulauan Sitaro	70,89	79,30	89,13	82,39	90,09	93,60
Minahasa Tenggara	80,45	74,02	75,09	73,52	83,64	78,56
Bolaang Mongondow Selatan	**31,01**	**30,88**	**49,87**	**53,23**	**55,16**	**45,90**
Bolaang Mongondow Timur	60,05	52,33	55,79	48,12	56,65	56,06
Kota Manado	88,66	84,60	84,16	88,72	86,82	87,31
Bitung	90,89	85,07	89,75	86,33	89,05	89,33
Kota Tomohon	97,31	92,01	89,43	95,52	95,19	95,19
Kota Kotamobagu	64,33	57,43	54,66	60,98	71,37	71,19
Sulawesi Utara	75,27	71,93	76,06	75,80	82,29	81,85

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka Tahun 2022, PerkimTan 2022

2.3.1.4 Perumahan dan Pemukiman

a. Rumah Layak Huni

Pada tahun 2021, sebagian besar rumah tangga di Bolaang Mongondow Selatan sudah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, yaitu sekitar 91,45 persen. Sisanya menempati bangunan kontrak/sewa dan bebas sewa masing-masing sekitar 8,55 persen. Sebagian besar rumah tangga mendiami

bangunan dengan luas lantai lebih dari sama dengan 10 m^2 sebesar 71,75 persen. Dengan kata lain, sebagian besar bagunan tempat tinggal rumah tangga di Bolaang Mongondow Selatan telah memenuhi standar rumah layak huni menurut WHO, yaitu 10 meter persegi per kapita.

Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bergerak fluktuatif sepanjang tahun 2016-2021. Pada tahun 2021 ketersediaan rumah layak huni mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Jumlah rumah tinggal tahun 2021 sebanyak 19.621unit dari jumlah tersebut sebanyak 14.261 unit rumah layak huni atau sebesar 72,68%. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2021. Dengan demikian bahwa masih terdapat 28,68 persen menjadi fokus pemerintah dalam menuntaskan ketersediaan layak huni masyarakat. Data Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada **Tabel 2.44**

Tabel 2.44
Capaian SPM Bidang Pemukiman dan Perumahan Rakyat
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Urusan Bidang Pemukiman dan Perumahan Rakyat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (Persen)	85,77	86,16	87,60	86,32	86,78	72,68
Lingkungan Pemukiman Kumuh (Persen)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	19,17
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Di Dukung oleh PSU (Persen)	-	44,73	33,2	47,01	48,95	80,83
Ruang Terbuka Hijau (Ha) Terhadap Luas Wilayah (Persen)	101,14	44	44,11	44,66	44,66	49,45

Sumber: LPPD 2016 s/d 2021, Disperkimtan 2022

Saat ini, listrik yang digunakan oleh penduduk Bolaang Mongondow Selatan sebagian besar adalah listrik PLN. Tahun 2020 jumlah pelanggan listrik PLN terus bertambah seiring meningkatnya jumlah pelanggan listrik PLN diikuti juga meningkatnya produksi listrik sebesar 8.051.987 KwH dengan jumlah pelanggan 12.998.

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Jumlah linmas per Jumlah Penduduk

Jumlah limnas pada tahun 2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 tercatat 476 orang yang di dominasi oleh non PNS sebanyaj 472 dan PNS 4 orang yang tersebar masing-masing 2 orang per dusun.

b. Ketaatan Terhadap Perda

Ketaatan terhadap Perda pada tahun 2021 sebesar 98%, pada tahun 2021 terdapat 2 Perda yang ditegakkan yaitu Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda Tentang Ketertiban Umum.

c. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2016-2021 belum mengalami perubahan, tahun 2021 IRB berada di angka 149,60 yang berarti bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada tingkat resiko tinggi terkena bencana. Kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat disajikan dalam **Tabel 2.45** berikut ini.

Tabel 2.45
Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Linmas (Orang)	NA	NA	526	526	476	476
Jumlah Penduduk	63,207	64,171	65,127	71,533	69,791	70.529
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	NA	NA	526: 7.353	526: 7.353	476: 69.791	476: 72.025
Ketaatan Terhadap Perda	100	100	100	100	100	100
Indeks Resiko Bencana (IRB)	149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	149,60

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2016 s/d 2021, Satpol PP 2022

2.3.1.5 Sosial

a. Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021 PMKS yang menerima bantuan sebesar 74,51 persen, ini artinya dari 12.695 PMKS masih ada 25,49 persen belum memperoleh bantuan. Peningkatan signifikan jumlah PMKS sebesar 76 persen dibandingkan tahun 2020 akan berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada tahun 2021. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di masa mendatang untuk fokus mengurangi jumlah PMKS hal ini juga ditambah kenaikan harga BBM melalui pemberian bantuan sosial. Disamping itu juga bantuan-bantuan terhadap PMKS harus dievaluasi secara berkesinambungan. Jumlah PMKS yang

mendapat bantuan sosial. Jumlah penduduk yang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disajikan dalam **Tabel 2.46**.

Tabel 2.46
Jumlah PMKS dan PMKS yang Memperoleh Bantuan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka PMKS	18.279	19.664	34.894	9.338	15.323	12695
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (Persen)	10,55	13,08	91,03	95	61,66	74,51
PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya,	100	32,22	44,44	66,67	61,66	45

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016s/d2021, Dinas Sosial, 2022

b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan tahun 2021 telah mencapai 95,57 persen. Meskipun belum mencapai 100 persen, dalam 5 tahun ini kepemilikin JKN bergerak positif seperti disajikan dalam **Tabel 2.47** di bawah ini.

Tabel 2.47
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peserta Jaminan kesehatan nasional (JKN)	50,65	54,43	97,00	99,51	95,80	95,97

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan TPAK pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun TPAK

cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah disebabkan usia ini masuk pada masa purnabakti (pensiun). Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2016-2021 disajikan dalam **Gambar 2.24** berikut ini:

Gambar 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2016-2021

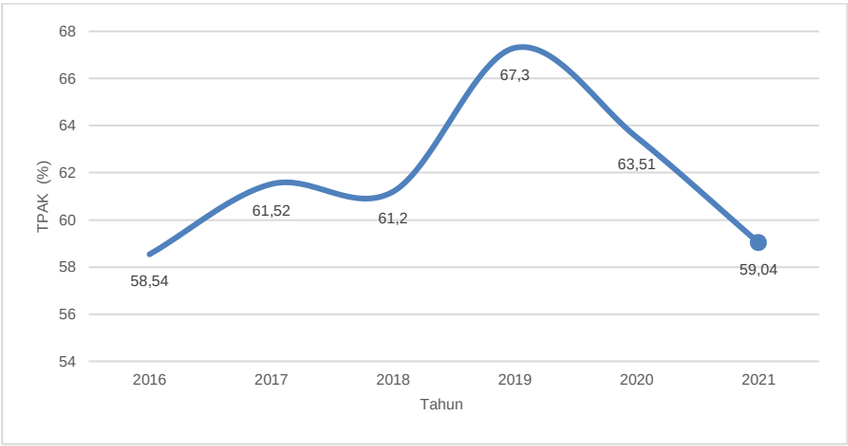

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan grambar di atas terlihat TPAK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bergerak fluktuatif tahun 2021 mengalami penurunan 4,47 persen dibandingkan tahun 2020. Namun secara agregat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja cenderung meningkat tahun 2016-2021.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cenderung menunjukkan perkembangan trend positif selama periode 2016-2021. Kondisi TPT tahun 2016 berada pada angka 6,78 persen dan tahun 2021 menjadi 4,46 persen. Dalam enam tahun (2016-2021) terakhir ini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mampu menurunkan TPT sebanyak 2,18 persen, seperti ditampilkan dalam grafik pada **Gambar 2.25**

Gambar 2.25
Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2021

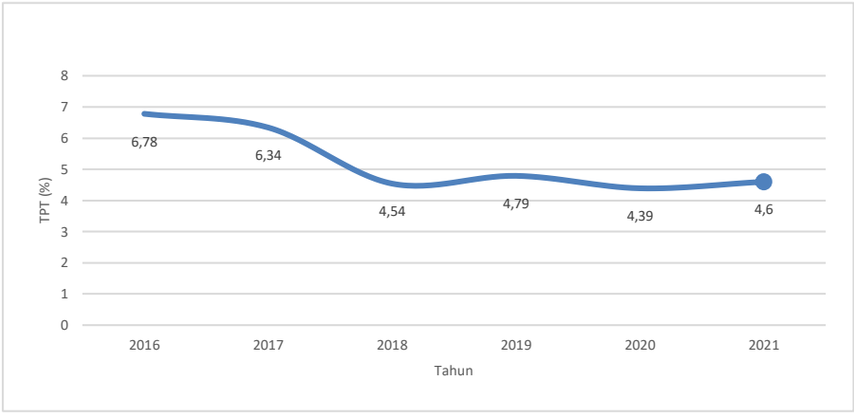

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat peningkatan TPT dibandingkan tahun 2020, tahun 2021 terjadi kenaikan TPT sebesar 0,21 persen. Hal ini sejalan dengan menurunnya TPAK pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

c. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Indikator pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan banyaknya pencari kerja yang memperoleh pekerjaan. Pencari kerja yang terdata di bidang ketenagakerjaan secara umum ditempatkan sesuai dengan ketersediaan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tahun 2021 rasio penduduk yang berkerja sebesar 95,40 persen Perkembangan rasio penduduk berkerja disajikan dalam **Tabel 2.48**

Tabel 2.48
Rasio Penduduk yang Bekerja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh (Persen)	96,54	96,54	98,82	98,87	98,91	100
Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persen)	70,59	100	100	100	100	4
Rasio Penduduk yang bekerja	94,76	93,92	95,24	94,96	86,72	95,40

Sumber: BPS Kab Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari Indeks Pemberdayaan Gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta. Berdasarkan LKJIP tahun 2021, tercatat Indeks Pemberdayaan Gender sebesar

71,51%. Angka ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.49
IPG dan IDG Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender	78,34	79,39	92,91	79,7	80,09
Indeks Pemberdayaan Gender	-	-	67,98	68,16	71,51

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2017-2021

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diwakili dengan persentase Aparatur Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan data tahun 2016 sampai tahun 2021 diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2016 sebesar 57,78 persen meningkat menjadi 60,32 persen pada tahun 2021. Sementara perempuan yang mewakili suara perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar 25 persen. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.50** di bawah ini:

Tabel 2.50
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perempuan Di Lembaga Pemerintah	1,017	995	966	1,081	1,081	1,141
Jumlah Perempuan Di DPRD	4	4	4	4	6	5
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	57,78	58,29	58,40	59,39	59,39	60,32
Persentase Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	20	20	20	20	20	25

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan,2022

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan data statistik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan selama tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 Tahun 2021 tercatat angkatan kerja perempuan sebesar 47,13 persen naik sebesar 6,93 persen dari 40,20 persen tahun 2020. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.51** berikut ini:

Tabel 2.51
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Persen)	37,50	34,53	24,66	40,20	47,13

Sumber: Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 s/d 2022

c. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Tabel 2.52
Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak	10	10	3	11	16
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan	0	0	6	4	14
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas KBPPPA Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.2.3 Pangan

a. Regulasi Kebijakan Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk peraturan bupati dan keputusan bupati diantaranya:

1. Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2012 Pembentukan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Tingkat Kecamatan;
3. Perbup Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun tercermin dari meningkatnya ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Untuk ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2021 ketersediaan pangan utama sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 seperti ditampilkan dalam **Tabel 2.53** berikut ini:

Tabel 2.53
Ketersediaan Pangan Utama dan Skor Pola Harapan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Pangan Utama (Ton/Tahun)	677,07	873,05	1,033	1,329	1000	12.183
Skor Pola Harapan Pangan Utama	95	79,4	82	72,04	83,9	74

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022, Dinas Pertanian Kab.Bolaang Mongondow Selatan 2022

c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila di konsumsi dapat memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama.

Berdasarkan Tabel 2.52 di atas Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam waktu kurun waktu mengalami fluktuatif, tahun 2020 PPH berada di 83,9 persen, naik dibandingkan tahun 2019. Namun ketersedian ini turun pada tahun 2021 menjadi 74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah baik dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan keseimbangan gizi. Meskipun skor PPH ketersediaan memiliki tren yang fluktuatif, namun ada beberapa masalah yang harus menjadi perhatian seperti kurang optimalnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang disebabkan karena petani sebagai pelaku usaha sering kali dihadapkan pada realita rendahnya minat konsumen lokal terhadap produk olahan atau produk premium pertanian dengan label harga di atas rata-rata, sedangkan jaringan pemasaran untuk menjangkau konsumen luar kota masih kurang optimal.

2.3.2.4 Pertanahan

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik

pertanahan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanahan adalah dalam pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah, serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten. Pada tahun 2021 persentase luas lahan yang bersertifikat mengalami peningkatan sebesar 0,25 dibandingkan tahun 2020. Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bolaang Mongondow selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.54**

Tabel 2.54
Luas Lahan Bersertifikat Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (Persen)	68,54	69,25	69,25	69,25	69,25	69.5
Penyelesaian Kasus Tanah Negara (Persen)	0	0	0	0	0	0
Penyelesaian Izin Lokasi (Persen)	0	0	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 20162/d2021, Dinas Perkimtan Tahun 2022

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan yang masih asri serta hutan yang masih luas, tidak adanya pencemaran udara yang berlebihan serta sumber-sumber air yang masih terjaga, Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2016-2021 bergerak fluktuatif. Tercatat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar 79 atau masuk kategori baik. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan indek kualitas udara atau masuk dalam kategori unggul. Kinerja urusan lingkungan hidup di Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.55** di bawah ini.

Tabel 2.55
Kinerja Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	83,8	82,8	79,17	78,48	79,00
Indeks Kualitas Lahan	-	100,8	100,81	91,28	86,84	85,92
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	50,00	50,00	50,00	58,33	61,66
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	94,93	91,58	92,2	92,67	93,04
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	24,75	85	85	85	85	71

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penegakan Hukum Lingkungan (Persen)	100	100	100	100	100	100

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

2.3.2.6 Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan di sektor lain bidang politik, sektor ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan dan pembangunan sektor lain. Pada tahun 2021 99,57 persen penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan KTP sedangkan kepemilikan akta kelahiran sebesar 96 persen. **Tabel 2.56** berikut ini adalah statistik Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021.

Tabel 2.56
Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Persen)	80,23	93,94	94,96	97,95	99,79	99,57
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	18,86	42,35	43,72	96,73	97,30	96
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	ada	Ada	ada	ada	ada	ada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan data Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2021, rata-rata status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun sebesar 0,70 (Desa Berkembang atau Desa Madya) yang terdiri dari 49 Desa Maju, 31 Desa Berkembang, 1 Desa Mandiri. Tahun 2020 IDM mengalami peningkatan seiring keluarnya desa sangat tertinggal dari 81 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Perkembangan Indeks Desa Menbangun tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel di Bawah ini.

Tabel 2.57
Perkembangan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Desa Membangun	1,033	0,61158	0,6517	0,6830	0.70

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

b. PKK dan LPM Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Jumlah PKK/LPM yang aktif dalam 3 tahun terakhir ini jumlahnya stagnan. PKK dan LPM di di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebar disetiap Desa.

c. Bumdes Aktif

Jumlah BUMDES Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu dengan bertambahnya 1 BUMDES. Tahun 2022 mengalami peningkatan dari 33 Bumdes menjadi 42 Bumdes, artinya terjadi peningkatan sebanyak 9 Bumdes. Perkembangan PKK/LPM dan BUMdes Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
PKK, LPM dan Indeks Desa Membangun Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PKK Aktif	6.132	6.132	89	89	89	81
Jumlah LPM Aktif	81	81	81	81	81	81
Jumlah Bumdes Aktif	47	47	47	49	32	33

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021, Dinas PMD Kab Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan registrasi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 70.529 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 pada tahun 2020-2021. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 738 jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk (jiwa) selengkapnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada **Tabel 2.59** berikut ini:

Tabel 2.59
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LPP 2020-2021
Posigadan	17.698	18.136	18.576	14.993	14.543	14727	1,27
Tomini	*	*	*	6.067	6.043	6120	1,27
Bolang Uki	20.226	20.577	20.928	6.910	17.690	17917	1,28
Helumo	5.525	5.642	5.758	17.728	6.933	7022	1,28
Pinolosian	8.523	8.542	8.557	11.229	10.694	10768	0,69
Pinolosian Tengah	4.983	4.969	4.998	6.488	6.272	6338	1,05
Pinolosian Timur	6.297	6.305	6.310	8.118	7.616	7637	0,28
Bolaang Mongondow Selatan	**63.207**	**64.171**	**65.127**	**71.533**	**69.791**	**70.529**	**1,06**

Sumber: BPS Kab Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

b. Cakupan Peserta KB Aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB aktif di Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016 sampai tahun 2021 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Tahun 2021 terjadi penambahan signifikan KB aktif sebesar 4.220 dibandingkan dengan tahun 2020. Semetara rasio akseptor KB naik signifikan 12744:57164 pada tahun 2021.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pasangan Usia Subur	12.062	14.562	11.288	11.405	12.744	11.278
KB Aktif	9.083	11.853	8.011	1.878	2.227	6.447
KB Baru	558	1.853	9.872	8981	8.952	4.828
Rasio Akseptor KB	10944 : 14751	7825 : 13006	8011 : 11288	8981 : 12791	8952 : 12744	12744 : 57164

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Kab. Bolaang Mongonfdow Selatan ,2022

c. Penduduk Pra Sejahtera

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah terus berkurangnya jumlah keluarga dan penduduk miskin baik dalam hitungan kuantitas maupun prosentase. Perkembangan penduduk pra sejahtera mengalami penurunan selama tahun 2016-2021. Atas dasar itu, realita membuktikan bahwa program-program pembangunan yang digalakkan oleh Pemda Bolaang Mongondow Selatan boleh dibilang cukup berhasil. Tahun 2021 tercatat jumlah Penduduk Pra Sejahtera Menjadi Pra Sejahtera I Kab.

Bolaang Mongondow Selatan turun menjadi 1.812 jiwa di bandingkan tahun 2020 seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Perkembangan Penduduk Pra Sejahtera Menjadi Pra Sejahtera I Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Pra Sejahtera menjadi Sejahtera 1	6.989	6.689	4.240	3.938	3.013	1.812

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA 2022

2.3.2.9 Perhubungan

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, rasio konektivitas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diukur dari angkutan jalan (IK1) dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (IK2) diperoleh sebesar 30,43, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 30,45 persen pada tahun 2021. Sementara jumlah terminal dan terminal laut tidak mengalami perkembangan tahun 2016-2021.Kondisi urusan perhubungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.62** berikut:

Tabel 2.62
Jumlah Terminal dan Pelabuhan Laut Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal	1	1	1	1	1	1
Jumlah Pelabuhan Laut	1	1	1	1	1	1
Persentase Sarana dan Prasana dan Fasilitas LLLAJ Yang Layak dan Memenuhi Standar	39,69	43,81	43,98	44,84	53,38	53,40
Persentase Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Persen)	NA	11,67	21,16	8,39	7,16	7,10
Rasio Konektivitas (poin)	NA	NA	NA	30,43	30,45	30,43

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Kabupaten ini memiliki media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik berupa website kabupaten yaitu **www.bolselkab.go.id**. Pada tahun 2021 semua perangkat daerah yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak

sementara layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebanyak 109 dengan didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara dilihat dari cakupan jangkauan TIK tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Untuk status website dan perkembangan cakupan jangkauan TIK disajikan pada **Tabel 2.63** di bawah ini.

Tabel 2.63
Status Website dan Cakupan Jangkauan TIK Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Cakupan Jangkauan TIK (Persen)	NA	40,74	50,62	65,43	74,07	65,43

Sumber: LPPD Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 s/d 2021

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sasaran revitalisasi koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar. Berdasarkan Tabel 2.62 di bawah ini sepanjang tahun 2016-2021 jumlah koperasi aktif berjalan turun signifikan dari 40 persen tersisa 14,43 persen dari 97 koperasi pada tahun 2021. Perkembangan koperasi aktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.64** berikut:

Tabel 2.64
Perkembangan Koperasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	26	25	28	6	16	14
Jumlah Koperasi Sehat	35	25	28	8	3	3
Jumlah Koperasi	54	62	65	91	96	97
Persentase Koperasi Aktif	40	40	43	6,1	16,66	14,43
Persentase Koperasi Sehat (persen)	48,19	40,32	43,08	8,79	3,13	3,09

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2020, Dinas Koperasi UMKM, Transmigrasi dan TK, 2022

b. Pencetakan Wirausaha Baru

Pencetakan wirausaha baru berupa industri kecil dan menengah merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. Berdasarkan Tabel 2.63 di bawah ini pencetakan

wirausaha baru tercatat melalui penambahan Industri kecil dan menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penambahan industri kecil dan menengah yang bergerak di industri, sandang, kerajinan, dan logam. Tahun 2021 jumlah wirausaha baru stagnan tahun 2020 sampai tahun 2021. Hal ini menjadi peluang yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi usaha menengah yang mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal. Jumlah wirausaha baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 ditampilkan dalam **Tabel 2.65** di bawah ini:

Tabel 2.65
Jumlah Wirausaha Baru Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016- 2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Wirausaha Baru	266	294	241	148	513	319

Sumber: Dinas PTSP, OSS

c. Pertumbuhan UMKM

Berdasarkan data dari *Online Single Submission (OSS)* dari Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2016-2021 rata-rata peningkatan UMKM di Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar 50%, dan dapat disajikan dalam **Tabel 2.66** di bawah ini:

Tabel 2.66
Pertumbuhan UMKM Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UMKM	266	294	241	148	513	319

Sumber: Dinas PM, PTSP, OSS

2.3.2.12 Penanaman Modal

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu tercatat jumlah PMDN sebanyak 523 proyek PMDN dengan nilai investasi Rp 81.213.567.000. Dilihat dari pertumbuhan investa, investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tumbuh sebesar 0,6 persen pada tahun 2021. Perkembangan investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.67** berikut ini:

Tabel 2.67
Perkembangan Investasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Proyek PMDN	16	17	12	8	238	523
Nilai Investasi (Rp)	29.088. 991.053	7.613. 700.000	25.000. 000.000	30.000. 000.000	35.000. 000.000	81.213. 567.000

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pengembangan atlet yang sangat didukung oleh pemerintah daerah, dengan pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga serta renovasi sarana dan prasarana olahraga jumlah prestasi atlet daerah berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga berjumlah 7 kali yang terdiri cabang olahraga tenis meja (1), Sepak Bola (1), Selam (1), Panjat Tebing (1), Silat (2) dan Futsal (1). Pada tahun 2021 Kab. Bolaang Mongondow Selatan memperoleh perunggu dan perak pada tingkat provinsi dengan sepak bola. Perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.68** di bawah ini.

Tabel 2.68
Perkembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peringkat Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi Dan Nasional	0	0	9	3	0	2

Sumber: LKJIP Kab. Bolang Mongondow Selatan Tahun 2021

2.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai saat masih belum memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017. PPKD adalah data yang berisi inventarisasi obyek pemajuan kebudayaan.

a. Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan festival seni dan budaya di Bolaang Mongondow Selatan terdapat sarana untuk penyelenggaraan berbagai acara atau event seni dan budaya. Pada tahun 2020 penyelenggaraan acara dan event seni dan budaya hanya dilaksanakan 1 event seni budaya. Hal ini disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam mengurangi penyebaran pandemi COVID 19. Perkembangan penyelenggaraan dan saran seni dan budaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.69**

Tabel 2.69
Penyelenggaraan dan Sarana Seni dan Budaya Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Acara dan Event Sen dan Budaya	8	16	11	26	1	1
Sarana Penyelenggaraan Acara dan Event Seni dan Budaya (unit)	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Bolaang Mongonfdow Selatan 2022

Sepanjang tahun 2016-2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan event-event promosi pariwisata di dalam daerah. Data event-

event yang telah dilaksanakan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.70** berikut ini.

Tabel 2.70
Event Seni dan Budaya Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Nama Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
Festival Torlangka	Desa Nunuka Raya Kec. Tomini
Festival Tulude	Desa Dumagin
Festival Teluk Tomini	Desa Sondana
Gebyar Tradisi Ketupat	Desa Momalia kec. Posigadan
Pemilihan Bagi dan Boba	Desa Soguo
Festival Posko Ramdahan	7 Kecamatan
Festival Paskah	Desa Tabilaa panjango
Pelaksanaan Budaya Mandi Safar	Desa Nunuka Raya
Festival Tombilatohe	7 Kecamatan
Sport Tourism	Desa Sondana
Festival Paka-Paka Ombak	Sondana

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Bolaang Mongonfdow Selatan, 2022

b. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari Makan Raja Bolango, Bangunan Bolaang Uki, Bekas Tapak Kaki Botuliodu. Berikut adalah perkembangan situs peninggalan dan kawasan cagar budaya dalam **Tabel 2.71** berikut ini:

Tabel 2.71
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	3	3	3	3	3	3

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021

2.3.2.15 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten” Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan, seperti disajikan dalam **Tabel 2.72** berikut:

Tabel 2.72
Data Statistik Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapelitbangda Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

2.3.2.16 Perpustakaan

a. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat sebanyak 108 perpustakaan.

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2015 sebanyak 1.298 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 menjadi 61.684 orang dan tahun 2019 pengunjung ke perpustakaan sebanyak 6.772 pengunjung dan tahun 2020 menurun 3.473 atau hampir 50 persen, hal ini sebagai dampak Pandemic COVID-19 yang meluas pada awal tahun 2020. Setelah memasuki *pasca pandemi* kunjungan perpustakaan mengalami kenaikan sebesar 25,77 persen (4.679 pengunjung).

c. Koleksi Buku yang tersedia

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016 sebanyak 1.411 koleksi, pada tahun 2021 meningkat menjadi 7.972 koleksi atau sebesar 6,27 persen. Perkembangan perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 seperti terlihat dalam **Tabel 2.73**

Tabel 2.73
Perkembangan Perpustakaan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perpustakaan Sekolah	108	108	108	108	108	108
Jumlah Pengunjung	2.011	28.246	61.684	6.772	3.473	4.679
Koleksi Buku	1.411	2.011	2.501	2.720	7.472	7.972

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 s/d 2019, Dinas Perpustakaan Tahun 2021

2.3.2.17 Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Perengkat daerah yang telah memenuhi standar baku kearsipan sampai saat masih belum tersedia, masih dalam proses penyusunan 4 pilar kearsipan diataranya tata naskah dinas, Klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan arsip dalam bentuk Perda dan Pergub. Perkembangan kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.74**

Tabel 2.74
Kearsipan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang memenuhi standar baku kearsipan	0	0	0	0	0	0
Jumlah Arsiparis	0	0	0	0	0	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2022

2.3.2.18 Persandian

Berkaitan dengan bidang persandian tidak lepas juga dari kaitannya dengan keamanan informasi karena setelah penataan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi. Saat ini berkenaan tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 yang dihitung melalui jumlah nilai per area keamanan informasi sebesar 196/jumlah area nilai 5 diperoleh hasil 36,57 persen.

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

a. Konsumsi Ikan Per Kapita

Peningkatan konsumsi ikan akan berimplikasi terhadap permintaan ikan, oleh karena itu produksi ikan perlu menjadi perhatian. Tantangan utama yang dihadapi ialah bagaimana kemampuan menyediakan ikan sebagai sumber protein bagi konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri pengolahan dalam kondisi sumber daya ikan yang semakin terbatas, masih maraknya kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, tidak diatur, dan melanggar hukum (IUU Fishing), belum adanya kepastian spasial bagi usaha perikanan. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat di Bolaang Mongondow

Selatan masih relative rendah sebesar 19,50 kg/per kapita/tahun, jika dibandingkan dengan standar World Health Organization (WHO) yaitu 36 kg/kapita/tahun

b. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 15.348 ton turun menjadi 14.247 ton pada tahun 2021. Jenis alat tangkap di Bolaang Mongondow Selatan didominasi berupa pancing, jaring dan pukat dan alat lainnya. Sedangkan produksi perikanan budidaya menjadi 43,65 ton pada tahun 2020 meningkat dari 43,65 ton tahun 2021.

c. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2017 mengalami kinerja fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan bina kelompok yang sangat singnifikan menjadi 54,44 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,54 persen. Kondisi perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.75**

Tabel 2.75
Kondisi Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.073,6	2.598,0	4.008,59	13.528	15.348	14.247
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	98,01	106,80	3.825	41.82	42.08	43,65
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	8,85	8,13	7,3	7.5	6,54	54,44
Konsumsi Ikan Per kapita (Kg/Per kapita/tahun)	29,08	3,99	5,65	19,47	21,53	19,50

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

2.3.3.2 Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Aktivitas pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditandai dengan kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tahun 2021, jumlah wisatawan domestik meningkat dari 2.037 wisatawan pada tahun 2020, menjadi 19.487. Wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan dari 0 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 25 orang pada tahun 2021. Peningkatan jumlah wisatawan domestik ini dipengaruhi adanya pelonggaran

aktivitas ke luar rumah akibat semakin menurunnya penyebaran virus corona-19 pada tahun 2021. Perkembangan wisatawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.76**

Tabel 2.76
Perkembangan Kunjungan Wisata di Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wisatawan Mancanegara	188	91	189	191	0	25
Wisatawan Domestik	14.337	17.000	23.708	23.950	2.037	19.487
Jumlah Hotel/Penginapan	9	11	11	11	11	11

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022, Dinas Pariwisata 2022

b. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkembangan kontribusi PAD dari pariwisata sepanjang tahun 2016-2021 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan trend fluktuatif. Tercatat tahun 2016 PAD dari sub sektor pariwisata sebesar 15,393.600 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.260.000. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata sebagai dampak pelonggaran aktivitas masyarakat ke luar rumah. Kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.77**.

Tabel 2.77
Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (Rp)	15.393.600	7.231.500	4.767.000	6.779.000	3.250.000	4.260.000

Sumber: Dinas Pariwisata Kab Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

2.3.3.3 Pertanian

a. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Bolaang Mongondow Selatan dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata sekitar 38,14 persen perekonomian disumbang oleh lapangan usaha ini. Kondisi geografis Bolaang Mongondow Selatan yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan menjadikan lapangan usaha ini sebagai sumber mata pencaharian terbesar masyarakat.

Sektor ini merupakan sektor yang tetap mampu tumbuh di tengah Kejadian Luar Biasa Pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan pada produk hasil pertanian. Relatif *resilient*-nya sektor pertanian ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi diangka positif Kabupaten ini ditengah krisis global yang melanda seluruh dunia tahun 2021. Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan ditampilkan dalam **Gambar 2.26** di bawah ini,

Gambar 2.26
Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kab.Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 (Persen)

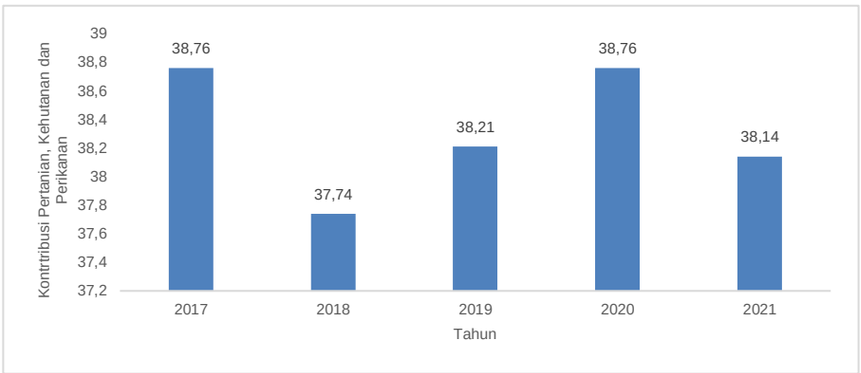

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2022

b. Luas Panen, Produksi Tanaman Pangan

Luas panen padi sawah dan padi ladang di Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 menurun 2.447 ha dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan produksi sebesar 12.839 ton dan mengalami penurunan tahun 2021 menjadi 2.156ha dengan produksi 11.306,56 ton. Tanaman palawija dengan luas panen terluas adalah jagung, seluas 3.120 hektar, selanjutnya adalah luas panen kedelai pada tahun 2018. Pada tahun 2021 luas panen tanaman jagung mengalami penurunan sangat sinifikan dari13.718 ton menurun sebanyak 25 ton. Perkembangan luas panen produksi pada dan makanan pangan lainnya disajikan dalam **Tabel 2.78**

Tabel 2.78
Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Padi						
Luas Panen (ha)	2.375	4.482	4.149	3.384	2.447	2.156
Produksi (Ton)		22.618	18.540	18.278	12.839	11.283
Jagung						
Luas Panen (ha)	5.470	10.226	14.646	11.342	3.237	3.120
Produksi (Ton)	12.825	37.419	53.911	51.042	13.718	13.662
Kedelai						
Luas Panen (ha)	465	8	539	27,83	-	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi (Ton)	465	79	640,8	33,40	-	-
Kacang Tanah						
Luas Panen (ha)	98	36	38	16,5	36	13
Produksi (Ton)	196		36	33	36	6
Kacang Hijau						
Luas Panen (ha)	26	5	5	3,3	5	-
Produksi (Ton)	31,2	-	6	4	6	-
Ubi Kayu						
Luas Panen (ha)	59	6	7	1,89	2	-
Produksi (Ton)	2.360	79	79	75	79	-
Ubi jalar						
Luas Panen (ha)	25	4	3	0,8	3	-
Produksi (Ton)	1.000	31	30	31	30	-

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

2.3.3.4 Perdagangan

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, penguatan perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan penting serta strategis yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, perluasan lapangan kerja melalui penciptaan dan pengembangan lapangan berusaha, memberikan informasi yang transparan guna menunjang kelancaran kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri yang kuat dan berdaya saing.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian tahun 2021, jumlah pasar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 18 pasar yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam 5 tahun ini kontribusi sektor ini bergerak lambat tahun 2017 kontribisinya memberikan 8,54 persen dan turun sampai tahun 2021 menjadi 8.38 persen. Kinerja perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016 -2021 selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.79**

Tabel 2.79
Kinerja Perdagangan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	5,78	8,54	8,61	8,35	8,27	8,38
Jumlah Pasar Tradisional Mampu Memenuhi Kebutuhan Pokok	3 pasar dari 24 pasar	3 pasar dari 24 pasar	4 pasar dari 24 pasar	4 pasar dari 18 pasar	18 Pasar dari 18 pasar	18 Pasar dari 18 pasar

Sumber: Dinas Perindustrian 2022, Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2022

2.3.3.5 Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab atas usaha tersebut. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam emapat tahun terakhir ini mengalami penurunan, tercatat tahun 2016 jumlah industri tumbuh sebesar 19,14 persen, sampai tahun 2018 pertumbuhan industri menjadi 14,92 persen dan secara signifikan turun menjadi 5,5 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terlihat IKM tumbuh menjadi 9,33 persen atau naik sekitar 3,83 persen. Sementara kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 0,74 persen. Pertumbuhan IKM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016-2019 disajikan dalam **Tabel 2.80**

Tabel 2.80
Pertumbuhan Industri Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan IKM (Persen)	19,14	18,13	17,54	15,67	5,50	9,33
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (Persen)	0,70	0,68	0,71	0,66	0,68	0,74

Sumber: Dinas Perindustrian Tahun 2022, Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka 2022

2.3.3.6 Transmigrasi

Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan rincian tata ruang yaitu rencana tata Ruang Kawasan Perdesaan atau dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai (mengacu) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembagian Satuan Kawasan Pengembangan di Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Pinolosian selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.81**

Tabel 2.81
Pembagian Satuan Kawasan Pengembangan di Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Pinolosian

Wilayah Pengembangan	Pusat Pelayanan	Cakupan Wilayah Pelayanan	Luas (Ha)
KPB	Adow	Semua Kawasan RKT	1.814,1
SKP A	Motandoi	Lunkap, Motandoi, Motodoi Utara, Satuan Pemukiman Baru	6.259,5
SKP B	Motandoi	Motandai, Motandai Selatan, Tobayangan, Tobayangan Selatan	6.238,4
SKP C	Dumagin	Dumagin A, Dumagin B, Pidung, Dayaow, Ooggunoi Selatan, Modisi, Posilagon, Perjuangan, Iligon	8.116,5

Wilayah Pengembangan	Pusat Pelayanan	Cakupan Wilayah Pelayanan	Luas (Ha)
RKT	Perkotaan		22.428

Sumber: Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Tahun 2018

Sedangkan proyeksi penduduk kawasan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Tahun 2019-2034 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.82** sebagai berikut:

Tabel 2.82
Proyeksi Penduduk Kawasan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019-2034

Desa	SP	Jumlah Penduduk			
		2019	2024	2029	2034
Lungkap	SP A1	879	957	1.041	1.132
Mataido Utara	SP A2	897	976	1.062	1.155
Mataindo	SP A2	607	660	718	782
Torosik	SP K1	789	858	934	1.016
Adow	SP K3	1.324	1.441	1.567	1.705
Adow Selatan	SP K3	1.157	1.259	1.370	1.490
Deaga	SP K2	596	649	706	768
Tobayangan	SP B1	1.018	1.108	1.205	1.311
Tobangan Selatan	SP B2	521	566	616	670
Matandoi	SP B3	909	989	1.076	1.170
Mataindo Selatan	SP B3	773	841	915	996
Dumagin B	SP C1	917	998	1.086	1.181
Dumagin A	SP C1	1.113	1.211	1.317	1.433
Dayow	SP C2	528	574	625	680
Pidung	SP C2	572	623	677	737
Onggunoi	SP C3	630	685	746	811
Onggunoi Selatan	SP C3	592	644	701	763
Modisi	SP C4	580	631	686	746
Posilagon	SP C4	652	710	772	840
Illigon	SP C5	406	442	481	523
Perjuangan	SP C5	371	404	439	478

Sumber: Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Tahun 2018

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKPJ Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2.83** di bawah ini.

Tabel 2.83
Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	C	C	B	B	B	B

Sumber: LKjIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Berita Acara tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 diperoleh skor 36.536 dengan status tinggi. Tahun 2018 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada diurutan ke 80 secara nasional, dan peringkat pertama di Sulawesi Utara, dan berada diurutan teratas untuk regional Provinsi Sulawesi Utara. peringkat, skor dan status kinerja LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016-2019 disajikan pada **Tabel 2.84**

Tabel 2.84
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD	Peringkat 185, skor 3,0121 Status Sangat Tinggi	Peringkat 80, skor 3,0644 Status Sangat Tinggi	3,2508 Status Sangat Tinggi	3.6536 Status Tinggi

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongonfdow Selatan 2021

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Sekretariat Dewan disajikan dalam **Tabel 2.85** sebagai berikut:

Tabel 2.85
Jumlah Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ranperda	5	5	3	5	7	9
Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi PERDA	13	7	0	1	6	9

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2021

2.3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.5.1 Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedia Dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perkada

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah tersedia atau ada dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025.

b. Tersedia Dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perkada

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah tersedia atau ada dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan penjabaran dari agenda pembangunan kepala daerah pada saat kampanye.

c. Tersedia Dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah tersedia atau ada, RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2022. Perkembangan dokumen perencanaan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.86** di bawah ini.

Tabel 2.86
Dokumen Perencanaan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen RKPD yang ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Penjabaran RPJMD dalam RKPD	100	100	100	100	100	100
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya Dokumen Pembangunan Ekonomi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya Dokumen Pembangunan Sosial Budaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapelitbangda Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.5.2 Keuangan

Dalam rangka perbaikan dan penataan terhadap pengelolaan keuangan daerah baik melalui peningkatan kompetensi pengelola keuangannya maupun perbaikan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah yaitu SIMDA yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan, keakuratan, kecepatan, serta pelayanan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Perkembangan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Tabel 2.87** di bawah ini:

Tabel 2.87
Perkembangan APBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APBD	627.759.083.489,70	599.363.710,83	591.049.611,00	589.100.221,27	593.218.349,611	630.807.449.647
Realisasi PAD	18.191.944.707,70	23.707.801.602,75	17.840.935.776	18.049.669.248	19.006.000.000	12.926.448,40

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021, LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi penerimaan daerah Bolaang Mongondow Selatan dikelompokkan atas 3, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain yang Sah. Pada 2020, penerimaan daerah masih mengandalkan penerimaan dari dana perimbangan. Tahun 2021, pendapatan daerah mencapai Rp Rp.618.544.953.635 yang bersumber dari pendapan transfer mencapai 95,85 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 2,02 persen. Sisanya sebesar 2,05 persen berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang dikelompokkan atas dua, yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Realisasi pengeluaran daerah di 2021 mencapai Rp 565.546.802.191. Pengeluaran terbesar adalah belanja langsung yang mencapai Rp 264.283.625.635 atau sekitar 53,27 persen. Sedangkan belanja tidak langsung mencapai Rp 301.263.176.556 atau sekitar 46,73 persen.

2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan senantiasa melakukan pembinaan dan penegakan disiplin kepada aparatur, untuk itu secara rutin dilakukan beberapa kegiatan guna meningkatkan disiplin PNS, antara lain penghargaan PNS berprestasi, tindakan bagi PNS yang indisipliner, monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan disiplin PNS. Berdasarkan LPPD 2020 telah tersedia layanan informasi kepegawaian diantaranya (1) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, (2) SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, (3) Sistem Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Aplikasi Anjab/ABK). Berikut data capaian kegiatan pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selengkapnya ditampilkan dalam **Tabel 2.88** di bawah ini:

Tabel 2.88
Administrasi Kepegawaian Kab.Bolaang Mongondow Selatan, Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kemampuan Teknis Kepegawaian (persen)	27,50	36,73	30,05	42,80	47,86	51,53

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian	belum ada	ada	ada	ada	Ada	ada
Ratio PNS Terhadap Penduduk (Persen)	2,36	2,49	2,34	2,55	2,66	2,63
Penempatan PNS Dalam Jabatan Yang Sesuai Dengan Kompetensinya (Persen)	18,18	18,16	11,43	9,17	9,17	9,45

Sumber: LPPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 s/d 2021, BKPSDM Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan sepanjang tahun 2016-2021 masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsinya. Sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam meletakkan dasar kebijakan daerah. Saat ini dalam rangka peningkatan kinerja kelitbangan, Bapelitbangda telah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi diantarannya universitas San Ratulangi, Pusat Inovasi Universitas Negeri Gorontalo dan STMIK Ichan Gorontalo.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindak lanjut (B). Data tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada **Tabel 2.89** berikut ini.

Tabel 2.89
Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Oleh APIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun	R	S	DP	B	%S	%DP	%B
Persentase Tindak Lanjut Temuan (Organisasi Perangkat Daerah Oleh APIP Inspektorat)	2016	349	287	62	62	82,23	17,77	17,77
	2017	421	355	66	66	84,32	15,68	15,68
	2018	477	388	89	89	86,80	13,20	13,20
	2019	499	438	61	61	86,18	12,22	12,12
	2020	521	458	63	63	87,91	12,09	12,09
	2021	554	485	69	69	87,55	12,45	12,45

Sumber: Inspektorat Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.3.7 Unsur Kewilayahan

2.3.7.1 Kecamatan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan urusan otonomi daerah Serta melaksanakan tugas atributif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama oleh tersedianya sumber daya aparatur yang memadai secara kuantitas dan kualitas, serta adanya sasaran / prasarana dan fasilitas pendukung yang tersedia secara memadai. **Tabel 2.90** di bawah ini merupakan kinerja penyelenggara kecamatan periode 2016-2021.

Tabel 2.90
Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terkait pelayanan kecamatan	60	60	70	70	80	84,2
Persentase jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok	60	70	80	90	100	62
Persentase desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja	60	60	70	70	80	93

Sumber: Kecamatan Kab. Bolaang Mongonfdow Selatan, 2022

2.3.8 Urusan Pemerintahan Umum

2.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Ormas yang aktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 sebanyak 18 ormas yag terdaftar dan 60 persen masih aktif. Upaya pemerintah dalam merangkul ormas dan LSM dan OKP dilakukan pembinaan politik lainnya. Persentase ormas aktif disajikan dalam **Tabel 2.91**

Tabel 2.91
Persentase Ormas Aktif Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ormas Terdaftar	5	5	30	30	30	30
Jumlah Ormas Aktif	5	5	18	60	18	18
Persentase Ormas Aktif	100	100	60	60	60	60

Sumber: Kesbangpol Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.4 ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemanpuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2016-2021 selengkapnya disajikan dalam **Tabel 2.92** di bawah ini.

Tabel 2.92
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan (Rp)						Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Makanan	387.398	405.568,08	406.279,28	424.580,53	439728	446.634	59,88	61,93	55,20	51,87	55,02	55,85
Non Makanan	259577	249273,01	329.762,74	394.020,18	359519	353011	40,12	38,07	44,80	48,13	44,98	44,42
Total	646.975	654.841,08	736.042,03	818.600,71	799247	799645	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Angka 2022

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 646.695 terus meningkat sehingga mencapai sebesar Rp. 818.600,71 tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.799.247. Tahun 2021 kembali naik meskipun tidak signifikan menjadi Rp. 799.645.

Persentase pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kurun waktu 5 tahun juga memiliki tren capaian yang fluktuatif dengan capaian tahun 2016 sebesar 59,88 kemudian capaian tersebut menurun menjadi 55,58 di tahun 2021.

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kurun waktu 5 tahun juga memiliki tren capaian yang fluktuatif dengan capaian tahun 2016 sebesar 40,12 kemudian capaian tersebut menurun menjadi 44.42 di tahun 2021.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Rumah tangga pengguna air minum bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meningkat, tahun 2019 pengguna air minum bersih mencapai 76,25 persen dan turun tahun 2020 menjadi 60,19 persen tahun 2021. Turunnya layanan air bersih pada tahun 2021 ini perlu mendapat perhatian prioritas pemerintah mengingat masih 39,81 persen penduduk belum mampu mengakses air minum bersih untuk kebutuhan anggota keluarga. Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan dalam **Gambar 2.27** berikut:

Gambar 2.27
Cakupan Layanan Air Bersih Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2021

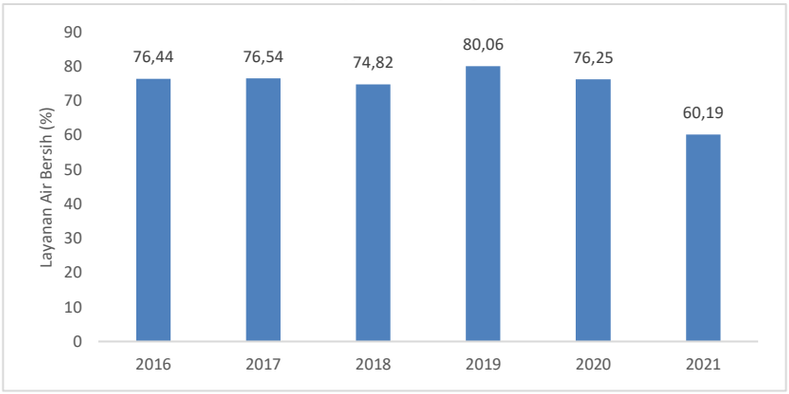

Sumber: LKJIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

2.4.2.2 Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan listrik dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang sangat dibutuhkan belakangan ini. Berbagai peralatan bisa digunakan jika tersedianya daya listrik yang cukup. Hingga saat ini, listrik yang digunakan oleh penduduk Bolaang Mongondow Selatan sebagian besar adalah listrik PLN. Tahun 2021, pelanggan listrik PLN sudah mencapai 12.988 dengan produksi listrik 8.051.987 KWh. Ketersediaan Listrik Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2015-2019 disajikan dalam **Tabel 2.93** di bawah ini.

Tabel 2.93
Ketersediaan Daya Listrik Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daya Terpasang (KW)	2480	2840	4090	4090	4090	3900
Produksi Listrik (KWh)	5.571.973	5.108.421	15.020.916	20.513.091	20.513.091	8.051.987
Pelanggan	11224	11651	12039	12998	12998	12998
Persentase rumah Tangga Pengguna Listrik	95,45	99,71	99,36	99,37	99,37	99,37

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kab.Bolaang Mongondow Selatan 2016 s/d 2021

2.4.2.3 Panjang Jalan yang dilalui Kendaraan Roda Empat

Total panjang jalan yang menghubungkan seluruh wilayah di Bolaang Mongondow Selatan pada 2020 adalah 575 km. Jika dilihat menurut jenis permukaan jalannya, sepanjang 237,72 km adalah jalan beraspal, 176,56 km adalah jalan berkerikil, dan 160,71 km adalah jalan tanah. Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu penghubung Sulawesi Utara dengan provinsi lain melalui jalur darat, sehingga kualitas jalan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

Tabel 2.94
Panjang Jalan yang dilalui Roda 4 (empat) Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Nasional	283,28	283,28	283,28	283,28	283,28	283,28
Jalan Kabupaten	575	575	575	575	575	575
Jalan Provinsi	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka Tahun 2016 s/d 2022

2.4.2.4 Arus Penumpang Angkatan Umum

Perkembangan arus penumpang angkutan umum mengalami pergerakan fluktuatif sepanjang tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan masih minimnya jumlah sarana angkutan umun di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Perkembangan arus akuntan umum tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.95**.

Tabel 2.95
Arus Penumpang Angkutan Umum Kab. Bolaang 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arus penumpang angkutan umum	177.381	170.810	203.655	203.615	183.254	186.920

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Selatan,2022

2.4.2.5 Luas Wilayah produktif

Wilayah produktif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Luas wilayah produktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat sebesar 2.069 ha dari seluruh wilayah budidaya sebesar 62.874,72 ha. Berdasarkan kondisi ini rasio luas wilayah produktif sebesar 0,03.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dalam tahun 2021 sebanyak 245 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 80,41 persen, sementara per januari-september tahun 2022 sebanyak 191 kasus dengan jenis kejahatan didominasi oleh penganiayaan. Jumlah tindak pidana kriminalitas dan

penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan di **Tabel 2.96**

Tabel 2.96
Jumlah Tindak Pidana Kriminalitas Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana kriminalitas	96,68	99,51	NA	50,6	70	80,41
Angka kriminalitas	NA	300	282	185	182	245 Kasus (340,16 / 100.000

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Bolaang Mongondow Selatan,2022

2.4.3.2 Perizinan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerapkan pelayanan *One day service* terhadap layanan perizinan tanpa dipungut biaya. Dengan layanan ini status hukum pengusaha kecil dan menengah mampu ditingkatkan, sehingga dipercaya untuk mencari kredit bank. Tahun 2021 tercatat jenis periizinan dengan proses *one day service* sebanyak 8 izin paralel, yaitu 1) Sertifikat standar, 2) Nomor Induk Berusaha, 3) Izin Dokter 4) Izin Bidan, 50 Izin perawat, 6) Izin PAUD 7) Izin Apotoker, 8) Izin Asisten Apotoker sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.97**

Tabel 2.97
Jumlah Jenis Perizinan *One Day Service* Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah jenis perizinan dengan proses *one day service* (Izin Paralel)	4	4	4	2	4	8

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022

2.4.3.3 Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Tidak ada kejadian demo Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2016-2021.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercermin dari angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2016-2021 perkembangan SDM lulusan perguruan tinggi mengalami peningkatan, tercatat tahun 2020 jumlah lulusan perguruan tinggi

yang berkerja menjadi 2810 dari 2716 tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan semakin membaik. Perkembangan angkatan kerja dari menurut pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 2.96**

Tabel 2.98
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lulusan Perguruan Tinggi	1593	1593	1688	2716	2810	3.087

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Angka Tahun 2016-2022

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga disajikan pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya.

Perkembangan rasio ketergantungan sepanjang 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio ketergantungan total sebesar 55,57 persen yang berarti setiap 100 orang berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan beban sekitar 56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang tidak produktif lagi (65+ tahun).

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada **Tabel 2.99** di bawah.

Tabel 2.99
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016- 2021

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**															
I	**FOKUS KESEJAHTERAAN PEMERATAAN EKONOMI**															
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	5,96	6,14	6,14	625	6,25	6,30	6,6	6,40	6,43	6,50	0,63	6,60	3,64	Belum Mencapai Target
2	Tingkat Daya Beli	Ribu-Juta Rp	690,342	700-900	646,975	900-1100	654,841	1100-1300	736,042	1300-1600	9,229,000	1600-1800	NA	1800-1900	NA	
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	63,72	63,92	63,92	64,05	64,05	64,15	64,49	64,30	65,28	64,45	65,00	64.60	65,42	Mencapai Target
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,17	15,00	14,85	14,16	14,16	13,57	13,54	12,93	13,27	12,47	12,77	11,79	12,85	Belum Mencapai Tarrget
5	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,329	0,32	0.329	Mencapai Target
II	**FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL**															
2.1	**PENDIDIKAN**															
1	Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak Buta Aksara	Persen	99,84	100	99,03	100	99,1	100	99,2	100	95,21	100	99,65	100	99,67	Belum Mencapai Target
2	Angka Rata-Rata Sekolah SD/MI/ Paket A SMP/MTS/ Paket B	Tahun	7,7	6 3	7,71	6 3	7,72	6 3	7,73	6 3	7,80	6 3	7,80	6 3	8,15	Belum Mencapai Tarrget
3	APM SD/MI/Paket A	Persen	95,8	83,74	93,4	83,09	95,32	87	85,29	90	90,41	97	85,59	99	98,19	Belum Mencapai Target
4	APM SMP/MTS/Paket B	Persen	79,53	76	63,33	84	77,87	86	83,81	89	78,22	97	48,43	99	75,87	Belum Mencapai Target
5	APK SD/MI/Paket A	Persen	114,29	92	114,55	95	113,24	97	111,83	98	107,83	98	94,84	99	109,94	Mencapai Tarrget
1	APK SMP/MTS/Paket B	Persen	79,53	98	96,35	70	73,17	75	77,08	80	75,5	97	85,20	99	87,12	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
2	APS SD/MI/Paket A	Persen	97,81	92,30	97,10	93,14	97,19	94,67	98,06	96,01	100,00	95,05	92,68	95,05	90,39	Belum Mencapai Target
3	APS SMP/MTS/Paket B	Persen	91,70	87,45	91,3	88,16	89,97	88,50	90,1	89,00	91,05	90,00	72,54	90,00	96,39	Mencapai Tarrget
2.2	**KESEHATAN**															
1	Angka Kematian Balita per 1000	Balita	2 0,1/1000	20,1/1000	6/1000	20,1/1000	0/1000	10/1000	0/1000	10/1000	1/1000	10/1000	9/1000	10/1000	20 /1.000	Belum Mencapai Target
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi	6,76/1000	6,76/1000	4,37/1000	6,76/1000	3,79/1000	5,7/1000	4,63/1000	5,7/1000	6,27/1000	2,5/1000	6,83/1000	2,5/1000	11,72 /1.000 (5 kematian bayi)	Belum Mencapai Target
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,97	72,03	64	72,04	64,03	72,05	64,49	72,07	64,45	72,08	88,34	72,08	64,49 thn	Belum Mencapai Target
4	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,06	0,02	0,2%	Mencapai Target
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	1,17	1,17	0,0163	1,17	0,0163	1,17	0,0163	1,17	0,0163	1,17	0,07	1.17	0,2%	Mencapai Target
6	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100 (1 Balita)	100	100 (1 Balita)	100	100 (1 Balita)	100	100 (1 Balita)	100	100 (4 Balita)	100	100 (13 balita)	Belum Mencapai Target
2.3	**KEMISKINAN**															
1	Penduduk di Bawah Garis kemiskinan	Persen	15,17	14,85	14,85	14,16	14,16	13,57	13,60	12,93	13,27	12,47	12,77	11,79	12,85	Belum Mencapai Target
2	Penduduk di Atas Garis kemiskinan	Persen	84,83	85,83-86,83	85,15	86,62-87,63	85,84	87,54-88,43	84,40	88,45-89,33	86,73	89,34-90,23	87,23	90,24-91,14	87.15	Mencapai Tarret
2.4	**KETENAGAKERJAAN**															
1	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	85,57	91,29-93,25	94,76	93,25-93,50	93,92	93,26-93,50	95,24	93,50-94,00	94,96	93,50-94,00	86,72	94,00-94,50	95,40	Belum Mencapai Target
III	**FOKUS SENI DAN BUDAYA DAN OLAHRAGA**															

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Jumlah Seni-Budaya Bolsel Yang Tampil Di Forum Provinsi Dan Nasional	Seni dan Budaya	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	0	Mencapai Target
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Unit	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	Belum Mencapai Target
3	Prestasi Olah Raga Di Tingkat Provinsi Dan Nasional	Olah Raga	3	3	2	4	4	5	7	6	0	7	0	8	2	Belum Mencapai Target
4	Jumlah Gedung Olahraga/GOR	Unit	7	7	0	7	0	7	5	7	5	7	5	8	0	Belum Mencapai Target
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**															
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.1	**PENDIDIKAN**															
	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)															
1	APK PAUD	Persen	70,25	75	72,83	80	84,68	85	84,33	90	68,69	92	46,45	95	60,10	Belum Mencapai Target
	PENDIDIKAN DASAR															
1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI	Persen	70,25	85,32	1:79,11	86,60	1:75	87,89	1:70	89,21	1:67	90,55	1:104	94	1:112	Belum Mencapai Tarrget
2	Rasio guru: Murid Per Kelas Rata-Rata: a. SD/MI b. SMP,MTs	Persen	 15,51 17,86	 17,89 21,90	 16,55 11,01	 20,50 23,54	 16,3 12,39	 25,00 25,88	 6,54 7,06	 30,50 29,12	 6,54 7,06	 40,50 35,77	 1:9 1:8	50,5037	1:13 1:11	Belum Mencapai Target
3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	Persen	70,25	68,45	1:1571	74,14	1 : 197	80,29	1:139	86,95	1 : 152	94,17	1:162	96	1:160	Belum Mencapai Target
4	Angka Melanjutkan (AM) dari: SD/MI ke SMP/MTs	Persen	94,11	95,15	102,64	94,45	95,20	95,06	100,16	97,32	85,87	98,47	90,50	99	90,50	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan a. SD/MI b. SMP/MTs	Persen	 98,42 96,22	 97 97	 99,67 98,61	 98 98	 100 100	 100 100	 99,63 99,31	 100 100	 99,42 98,89	 100 100	 66,51 36,23	 100 100	 96,31 92,56	Belum Mencapai Target
6	Angka Kelulusan	Persen														
	a. SD/MI		97	98	99,67	100	100	100	99,63	100	99,42	100	99,78	100	99,73	Belum Mencapai Target
	b. SMP/MTs		98	99	98,61	100	100	100	99,31	100	98,89	100	99,67	100	98,80	Belum Mencapai Target
7	Angka Putus Sekolah	Persen														
	a. SD/MI		27	27	0,05	23	0,05	22	0,34	21	0,72	20	0,22	19	0,2	Mencapai Target
	b. SMP/MTs		41	41	0,36	37	0,27	33	1,09	29	0,59	26	0,33	24	0,2	Mencapai Target
8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	35	60	75,53	87	85,12	90	79,81	95	86,00	97	86,00	97	85,57	Belum Mencapai Target
1.2	**KESEHATAN**															
	Sarana Kesehatan															
1	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas	0	2	0	4	0	6	2	8	4	8	5	8	6	Belum Mencapai Target
2	Rasio Puskesmas Per 100,000 Penduduk	Rasio	0,128	13/100,000	0,126	13/100,000	0,124	13/100,000	0,122	13/100,000	0,122	13/100,000	8/100,000	13/100.000	9/100.000 pnddk	Belum Mencapai Target
3	Rasio Puskesmas Pembantu Per 10,000 Penduduk	Rasio	23/10000	3/10,000	23/10000	4/10,000	23/10000	4/10,000	23/10000	5/10,000	23/10000	5/10,000	23/10,000	5/10.000 pnddk	23/10.000 pnddk	Belum Mencapai Target
4	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Puskesmas	0	2	2	4	2	6	8	8	8	8	8	8	8	Mencapai Target
5	Rumah Sakit Terakreditasi	RS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	Mencapai Target
6	Jumlah Rs Dengan Pelayanan Kesehatan Jiwa	RS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
7	Rsu Kabupaten Kelas C Yang Memiliki 7 Dokter Spesialis	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Belum Mencapai Target
8	Jumlah Posyandu Per Satuan Balita	Per 100 balita	76	1,12	84/6233	1,12	86/6549	1,12	86/6125	1,12	86/6042	1,12	86/5769	1.12 per 100 balita	86/5394	Belum Mencapai Target
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,3	1,07	1,39/100.000 pnddk	Belum Mencapai Target
10	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	10	74	14	86	90,1	100	65,43	100	72,7	65,43	72,7	100	0	Belum Mencapai Target
	Tenaga Kesehatan															
1	Rasio dokter per 40/100,000 Penduduk	Rasio	32/100,000	32/100,000	12/100,000	25/100,000	11/100,000	25/100,000	17/100,000	25/100,000	17/100,000	25/100,000	10/100,000	25/10.000	20/10.000	Belum Mencapai Target
2	Rasio dokter spesialis 6/100,000	Rasio	5/100,000	6/100,000	6/100,000	6/100,000	6/100,000	5/100,000	6/100,000	5/100,000	4/100,000	6/100,000	6/100,000	6/100.000	8/100.000	Mencapai Target
3	Ratio Tenaga Kesehatan Masyarakat 40/100,000	Rasio	37/100,000	38/100,000	209	38/100,000	299	39/100,000	323	40/100,000	292	40/100,000	301/100,000	40/100.000	347/100.000	Mencapai Target
	Pelayanan Kesehatan															
1	Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (PN)	Persen	66,6	75	94,8	85	76,3	90	72,0	95	89,03	95	70,44	95	63% (897/1424)	Belum Mencapai Target
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (PK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100%	100%	100% (265 kasus maternal)	Mencapai Target
3	Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED	Puskesmas	2	2	2	3	0	3	0	4	0	5	0	5	0	Belum Mencapai Target
4	Persentase Kunjungan Bayi	Persen	83,99	84	83,94 (814/970)	85	90,99 (899/988)	85	90,93 (1103/1213	85	89,03 (1006/113	85	97% (1410/1457)	85%	100% (1057/1057)	Mencapai Target
5	Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI	Persen	70,37	90	60,49 (49 desa dari 81)	90	72,84 (59/81)	90	71,60 (58/81)	90	88,89 (72/81)	90	39 desa (38,12%)	90	44,4% (36/81)	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
6	Pelayanan kesahatan pras USILA dan USILA (60 keatas)	Persen	50	54	n,a	7,15 (281/ 3929)	60,74	61	36 (1200/33 31	68	79 (3112/3 939	70	48,14 (5422/1 1,263	70	99,02% (6057/6 117)	Mencapai Target
7	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran	orang	0	0	3	0	2	0	3	0	2 (177)	0	6 kasus	0	3 kasus (290/10 0.000 KH)	Belum Mencapai Target
	Kesehatan Lingkungan															
1	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas	Persen	44,56	68	76,44	75	76,54	80	74,82	85	80,06	90	76,25	90	60,19 %	Belum Mencapai Target
2	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	65	69	78,96 (49,808 /63207)	70	82 (52,620/ 64,171)	75	88 (57,311 /65127)	80	90 (64379/ 71533)	85	86,3% (61920/ 71748)	85	72,15% (14.228 /19.719)	Belum Mencapai Target
	Angka Kesakitan															
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi /AKB Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	6,76/100 0	6,76 /100 0	4,9 / 1,000	6,67/ 1000	3,33/ 1,000	5,7/1 000	6,34/10 00	2,5/10 00	6,46/10 00	2,5/ 1000	6,83/10 00	2,5/10 00	2,89/1. 000KH (5/1035)	Belum Mencapai Target
2	Angka Kesakitan Penderita DBD < 6,77/100,000 Penduduk (*Incidence Rate*)	Persen	1	3	10	3	2	3	18	32,5/100 0	13	3	24	32,5/1 000	36,1/10 0.000 pnddk (26 kasus DBD)	Belum Mencapai Target
3	*Case Fatality Rate* (CFR) Kematian DBD	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Mencapai Target
4	Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk (Annual Paracite Inciden)	Kasus	1/1000	1/10 00	23	1/100 0	1	1/10 00	0	1/1000	0	1/10 00	0	0	0	Mencapai Target
5	Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA Positif) Yang Disembuhkan (Keberhasilan Pengobatan) Sebesar 95%	Persen	95	95	94	95	92	95	95	95	100	95	98	95	97,4% (113/11 6)	Mencapai Target
6	Prevalensi Kasus HIV (Berdasarkan Populasi Dewasa	Kasus	1,6/1000 00	1	1,5/10 0000	1	Tidak Ada Kasus	1	Tidak ada Kasus	1	Tidak ada Kasus	1	0	1	0	Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
7	Presentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) , Minimal 50% Sekolah	Persen	2	50	0	75	26,67 (8/30)	80	30,1 (10/33)	95	42,4 (14/33)	100	54,5 (18/33)	100	67% (22/33)	Belum Mencapai Target
8	Presentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi Di Terminal Utama	Persen	0	10	0	20	0	30	0	40	0	50	0	50	0	Belum Mencapai Target
9	Persentase Penduduk 15 Th Keatas Mengetahui Pengetahuan Tentang HIV & AIDS	Persen	100	100	77,3	100	73,7	100	76	100	77,02	100	74,28	100	79,4%	Belum Mencapai Target
10	Jumlah Orang Yang Berumur 15 Th Atau Lebih Yang Menerima Konseling Dan Testing HIV	Orang	0	0	48573	0	51215	0	53250	0	55100	0	0	0	0	Mencapai Target
11	Persentase Bayi 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	0	90	71,1	90	93,62	90	99,45	90	90,6	90	78,05	90	66,3% (913/1378)	Belum Mencapai Target
12	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi Relatif Sebesar 25%	Persen	0	10	0	10	30,10	10	97,25	10	35,54	15	86,7	15	99,8% (4152/4160)	Belum Mencapai Target
	Pelayanan Kesehatan Rujukan															
1	Angka Penemuan Kasus Malaria 1/1000 Penduduk (Annual Paracite Incidence)	Rasio	1/1000	80	23	82	1	86	0	90	0	90	0	0	0	Mencapai Target
2	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan sarana Kesehatan (RS) Di Kabupaten/Kota	Persen	0	0	100	0	100	1	100	2	100	3	100	3	100	Mencapai Target
	Ketersediaan Obat															
1	Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar	(Rp/Kapita)	13000	22000	14,217	22000	28,743	22000	30,126	22000	22,503	22000	26,964	22000	66,48	Mencapai Target
2	Persentase ketersediaan obat dan vaksin 100%	Persen	100	100	91,76	100	84,43	100	79,22	100	76,96	100	96%	100	96	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
	Akses dan Mutu Kesehatan:															
1	Peserta Jaminan kesehatan nasional (JKN) (BPS Kesehatan)	Persen	85	86	50,65	90	54,43	92	97	95%	99,51	95	95	95	93 (66.970 /72.02)	Mencapai Target
2	Persentase Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur Rumah Sakit BOR (Bed Occupancy Rate)	Persen	10,94	30	6,56	60	8,31	65	13,92	70%	16,00	75	15	80	9,1	Belum Mencapai Target
3	Angka Kematian Bersih/NDR (Net Deat Rate) dan angka kematian kasar/GDR (Gross Dead Rate)	/1000 penderita	25	≤ 25	0,58	≤ 25	1,09	≤ 25	0,87	≤ 25	4	≤ 25	5	≤ 25	19,3%	Mencapai Target
4	Rata-rata Tempat Tidur Tidak Terisi ke Kondisi Terisi Berikutnya/TOI (Turn Over Interval)	hari	8	8	33,18	3	22,86	3	15,15	3	13	3	16	3	28,8	Mencapai Target
5	Rata-Rata Lama Perawatan Pasien ALOS (Average Length Of Stay)	hari	2,33	2	2,33	6	2,07	6	2,45	6	2	6	2	6	1,9	Mencapai Target
6	Frekuensi Pemanfaatan Tempat Tidur Rumah Sakit BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi	40 kali	40	10,24	40 Kali	14,64	40 Kali	20,74	40 Kali	24	40	20	40	11,5	Belum Mencapai Target
7	Persentase Perawat/Bidan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi	Persen	25	35	80 (124 nakes)	55	83 (158 nakes)	65	87(158 nakes)	75%	90 (198 nakes	85%	91,6 (228 nakes)	95%	95% (248/271)100	Mencapai Target
1.3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1	Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	21,50% (41250,25/80100)	51,50	39,57	63,27	44,22	69,16	48,88	74,05	53,53	80,93	53,53	86.81	86.81	Mencapai Target
2	Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kab Sehingga Tidak Terjadi Genangan (Lebih Dari 30 Cm Selama 2 Jam) Dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun	Persen	21,50% (41250,25/80100)	63,27	21,32	69,16	24,74	74,05	28,16	80,93	31,58	86,81	31,58	86.81	31,58	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
3	Panjang Saluran Drainase/Gorong- Gorong	Meter	41,25	41,25	46,314,91	41,25	51,029,58	41,25	55,744,25	41,25	60,458,91	41,25	60,458,91	41,25	60,458,91	Mencapai Target
4	Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota	Persen	30,48	42,16	15,76	40,18	9,17	40,18	16,33	40,18	24,62	40,18	35,50	100	45,9	Belum Mencapai Target
5	Normalisasi Sungai	Sungai	2	4	4	2	6	3	2	2	1	2	0	2	17	Mencapai Target
6	Rasio Jaringan Irigasi (Total Luas Sawah Yang Dialiri Air Irigasi 1376 Ha)	m/ha	2,420	3,025	11,223	3,630	2,061	4,235	2191	4,846	165	5,446	7,099	6.051	6.051	Mencapai Target
7	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	m/ha	2,420	3,025	86,36	3,630	98,09	4,235	98,09	4,846	95,38	5,446	7,099	6.051	2.755	Mencapai Target
8	Persentase Sawah Yang Memiliki Jaringan Irigasi Tersier Dan Irigasi Pedesaan	Persen	31,63	39,54	NA	47,45	NA	55,36	NA	63,27	79,09	71,18	79,09	79,09	79,09	Mencapai Target
9	Wilayah Yang Memiliki Akses Jalan Kabupaten	Km	349,9	22	349,9	21	575	27	575	22	575	19	575	31	575	Mencapai Target
9	Rasio Jalan Yang Dilalui Roda 4	Km	349,9	22	575	21	575	27	575	22	575	19	575	31	259,697	Mencapai Target
10	Panjang Jembatan Yang Terbangun	Meter	67	260	374,40	321,62	374,40	383,22	374,40	444,84	22	506,45	21	568.06	1567	Mencapai Target
11	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Km	89,10	89,10	173,25	35	173,25	37	191,86	38	228,38	39	242,34	42	259,69	Mencapai Target
12	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	74	74	146,9	13	173,3	15	191,9	16	242,95	19	254	22	254,897	Mencapai Target
13	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa Dalam Kondisi Mantap	m	5	5	146,9	8,2	173,3	9,8	191,9	11	242,9	15	254	17	259,697	Mencapai Target
14	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di kabupaten (Pos Jaga)	pos	1 pos	1 pos	1 pos	2 pos	2 pos	2 pos	2 pos	2 pos	2 pos	2 pos	Na	2 pos	10 pos	Mencapai Target
15	Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)	jam	5	5 jam	< 5 jam	4 jam	15 menit	4 jam	15 menit	3 jam	15 menit	2 jam	15 mnt	2 jam	14 mnt	Mencapai Target
16	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	Persen	9,09	9,09	0	2,3	0	32	0	36	100	49	Na	55	55	Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
17	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Di Atas 3000 – 5000 Liter Pada WMK	Mobil	1	-	1	1	0	2	1	2	0	2	1	2	2	Mencapai Target
18	Presentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ibu Kota Dan Pemerintahan	Persen	104,59	0,01	101,14	0,053	44	0,096	44,11	0,139	44,66	0,182	44,66	0.224	44,66	Mencapai Target
19	Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
1.4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**															
1	Rumah Tangga Penggunaan Air Bersih Dengan Sistem Perpipaan	Persen	51,57 (7218/13 949)	67,31	76,44	79,35	76,54	89,68	74,83	100	80,06	100	76,25	84,60	60,19	Belum Mencapai Target
2	Presentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	37,19 (5188/13 949)	41,50	30,01	46,23	30,88	51,39	49,87	56,98	53,23	34,62	56,16	69.45	45,90	Belum Mencapai Target
1.5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**															
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	Rasio	0,04	70 : 72,655	70 : 71,000	100 : 72,655	88 : 71000	120 : 72,655	88 : 71000	120 : 72,283	88 : 71000	120 : 72283	88 : 72,283	120; 72,283	89; 72,283	Belum Mencapai Target
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum	Persen	98	-		-		99		-	77,77	-	-	99	99	Mencapai Target
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
4	Tingkat Penanganan Terhadap Pelanggaran PERDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	Belum Mencapai Target
5	Jumlah Ormas/LSM Yang Terdaftar	Ormas	5	5	5	5	5	5	30	5	30	5	30	5	30	Mencapai Target
6	Indeks Demokrasi	Persen	79,4	78	76,34	78	75,76	78	77,77	78	77,77	78	78	78	78	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
8	Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Kasus	3	3	0	3	0	5	0	5	60	5	24	5	29	Mencapai Target
9	Persentase Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
VI	**SOSIAL**															
1	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana pelayanan kegiatan sosial	Persen	-	-	-	50	-	60	-	70	-	80	-	80	-	Mencapai Target
2	80 % PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,83 (530/4893)	17,76	10,55	21,99	13,08	27,75	91,03	33,91	95	47,48	61,66	61,66	95,97	Mencapai Target
3	80% PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya,	Persen	0,83 (530/4893)	16,75	100	32,22	13,08	44,44	91,03	55,66	95	66,67	61,66	77,78	45	Belum Mencapai Target
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.1	**TENAGA KERJA**															
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,72 (2014)	6,78	6,78	6,78	6,34	6,34	4,54	6,00	4,79	5,60	4,39	5,20	4,6	Belum Mencapai Target
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	79,11 (2014)	80,5	58,54	81,7	61,52	82,5	61,2	83,7	67,3	84,5	63,51	85	59,04	Belum Mencapai Target
3	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (SPM)	Persen	52,92 (22 orang)	52,92	-	54,05	68,18	55,56	45,45	58,95	-	60	-	62	0	Belum Mencapai Target
4	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (SPM)	Persen	72,73	74	-	75	-	86	-	87	-	88	0	89	0	Belum Mencapai Target
5	Tingkat Keselamatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	0	0	0	50	0	50	0	70	0	80	0	80	0	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
6	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	0	100	100	0	100	0	100	100	100	100	100	Mencapai Target
1.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	30,70	24,5	n,a	30,5	37,50	34	34,53	37,5	24,66	39	40,20	39	47,13	Mencapai Target
2	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	Persen	57,09	54,95	57,78	55	58,29	55,6	58,40	55,6	59,39	56,0	59,39	56,0	60,32	Mencapai Target
3	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	NA	0	0	2	15	2	11	2	0	26	100	2	10	Mencapai Target
4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target
1.3	**PANGAN**															
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	384,14	15	677,07	15	873,05	15	1,033	15	1,329	15	1000	20	12.183	Mencapai Target
2	Penguatan cadangan pangan	ton	5	20	-	50	20,00	65	20,00	65	5	80	-	100	5	Belum Mencapai Target
3	Desa Swasembada Pangan	Desa	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Belum Mencapai Target
4	Regulasi Ketahanan pangan	Perda	1 perbup	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	5	Mencapai Target
5	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	88,89	81,4	95	83,4	79,4	85	82	87,4	72,04	89,4	83,9	91,4	74	Belum Mencapai Target
1.4	**PERTANAHAN**															
1	Persentase Luas Tanah Bersertifikat	Persen	o	10	68,54	25	69,25	30	69,25	35	69,25	40	69,25	45	69,5	Mencapai Target
	LINGKUNGAN HIDUP															
1	Persentase Penanganan Sampah	Persen	49,21	60	24,75	70	85	80	85	90	85	100	85	100	71	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
2	Penegakan Hukum Lingkungan	Persen	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal,	Persen	100 (3 PT)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
4	Persentase Pengelolaan Air Limbah	Persen	0	40	50,72	90	-	100	-	100	24,64	100	35	100	NA	Belum Mencapai Target
5	Persentase Sumber Mata Air Yang Terkonsentrasi Melalui Penghijauan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
6	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Peringkat	NA	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	NA	baik	NA	baik	NA	Mencapai Target
1.5	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
1	Kepemilikan e-KTP	orang	72,655	73,527	50710	74,409	60283	76,206	861844	77,120	70066	77,120	70066	77.120	99,57	Mencapai Target
2	Rasio Bayi Ber Akte Lahir	Persen	0,060	0,070	18,86	0,080	42,35	0,090	43,72	0,010	96	0,110	96,95	0,120	67,5	Mencapai Target
3	Rasio Penduduk Ber KK	Persen	98%	98	91,17	98	96,44	98	96,46	98	96,94	98	100	98	100	Mencapai Target
4	Rasio Penduduk Yang Menerapkan e-KTP	Persen	60,54	58,95	80,23	58,14	93,94	57,98	94,96	58,32	97,95	59,10	99,70	60,26	99,57	Mencapai Target
5	Rasio Penduduk berakta Nikah	Persen	0,90	90%	1,16	90	1,25	90	1,43	90	2,29	90	4,55	90	4,76	Belum Mencapai Target
6	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Persen	0	0,59	NA	29,63	NA	21,83	NA	41,33	100	3,31	100	3.31	100	Mencapai Target
1.7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															
1	PKK Tingkat Desa yang aktif	Desa	0	0	6,132	41	6,132	-	89	40	89	81	81	81	81	Mencapai Target
2	Posyandu Aktif	Posyandu	0	0	84	30	86	0	81	30	81	81	81	21	81	Mencapai Target
3	LPM Aktif	LPM	0	0	81	21	81	15	81	15	81	15	81	15	81	Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
4	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyaraka	Persen	0	0	47	0	47	0	47	0	0	80	0	100	0	Belum Mencapai Target
5	Jumlah Bumdes yang Aktif	Bumdes	47	-	47	15	15	10	10	10	49	9	32	9	33	Mencapai Target
1.8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**															
1	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I	orang	6989	6989	6989	6689	6655	6389	4240	6089	3938	5789	3013	5489	10.812	Mencapai Target
2	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak/ KK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Mencapai Target
3	Rasio Akseptor KB	Rasio	10,944 : 71,283	10,944: 71,283	10944: 14751	11,158: 72,955	7825: 13006	11,269: 73,255	8011: 11288	11,381: 73,555	8981: 12791	11,494 : 73,855	8,952: 12,744	11.494 : 73.855	12744:57164	Belum Mencapai Target
4	Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Orang	8,711	520	9,083	460	11,853	390	8011	310	1,878	230	2227	140	11.278	Mencapai Target
1.9	**PERHUBUNGAN**															
1	Presentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat	Persen	0,028	0,07	0,007	1	0,011	1	0,010	1	0,011	1,5	0,013	1,5	0,017	Belum Mencapai Target
2	Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan Perjumlah Penduduk	Unit Kdran	-	-	-	1,006	-	1,306	-	1,306	-	1,406	0	1,456	-	Belum Mencapai Target
3	Jumlah Izin KIR angkutan Umum	Unit Kdran	273	321	423	371	509	421	651	461	19	501	0	501	742	Mencapai Target
4	Persentase sarana dan prasarana dan fasilitas LLLAJ yang layak dan memenuhi standar	Persen	41,22	8,91	39,69	14,5%	43,81	28,22	43,98	45,55	44,84	67,82	53,38	100	53,40	Belum Mencapai Target
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit/ Unit	60	60	25	60	25	60	25	30	25	30	25	30	30	Mencapai Target
6	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum:															
	JBB s/d 2,5 ton	Unit	224	250	371	270	453	290	591	310	606	330	42	350	-	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
	JBB 2,5 s/d 5 ton	Unit	49	60	52	80	55	100	58	120	60	140	2	160	-	Belum Mencapai Target
	JBB 5,1 s/d 8 ton	Unit	-	5	-	7	1	9	1	12	1	14	1	20	-	Belum Mencapai Target
	8 Sheet s/d 14 sheet	unit	8	15		20		25	1	30	1	35	1	40	-	Belum Mencapai Target
	Jumlah terminal bus	Terminal bus	-	-	1	1	1	2	1	3	1	-	1		1	Mencapai Target
	Jumlah Halte/Shelter	Halte/Shelter	-	-	-	3	-	2	-	1	-	1	-	1	1	Belum Mencapai Target
7	Jumlah pelabuhan laut	Pelabuhan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		3	Mencapai Target
1.10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	Jaringan	17	-	-	1	44	3	45	7	49	1	1	1	1	Mencapai Target
2	Jumlah Surat Kabar Local/Nasional	Surat kabar	4	2	-	13	-	0	-	0	42	0	50	0	13	Mencapai Target
3	Persentase Layanan Aplikasi *e-Government*	SI	0	0	2	4	3	5	5	5	5	5	3	6	54	Mencapai Target
4	Website Milik Pemerintah Daerah	Website	-	-	2	2	14	29	19	3	20	-	1	-	37	Mencapai Target
5	Jumlah Tabloid Pemda	Tabloid	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	57	Mencapai Target
6	Jenis Media Luar Ruang	Jenis	-	-	-	-	-	6	3	-	2	-	6	-	44	Mencapai Target
7	Jumlah Kelompok KIM Yang Terbentuk	Kelompok	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	0	1	1	Mencapai Target
8	Jumlah Station Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Station	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	0	Mencapai Target
1.11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH (KUKM)**															

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Persentase koperasi aktif	Persen	43,40	40	18,13	40	17,54	73,92	43	79,72	6,3	80,3	16,66	100	14,43	Belum Mencapai Target
2	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	84,14	25	n/a	27	111	32	43	39	18	104	54	53	22	Belum Mencapai Target
3	Jumlah Wirausaha Baru Bidang UMKM	orang	80	110	266	120	294	130	241	140	148	1438	513	165	319	Sudah Mencapai Target
1.12	**PENANAMAN MODAL**															
1	Nilai Investasi	Miliar Rp	2,125,572,384,427	5 Milyar	2,,513,048,586,906	5 Milyar	741,813,894,440	5 Milyar	148,809,334,839	5 Milyar	466,106,456,780	5 Milyar	35,000.000.000	5 m	81.213.567.000	Mencapai Target
2	Jumlah PERDA Pendukung Iklim Investasi Yang Dihasilkan	Izin	1 Perda	26	1 Perda	27	1 Perda	28	1 Perda	28	1 Perda	28	1	28	0	Belum mencapai Target
3	Jumlah PMDN dan PMDA	PMDN	13	2	16	2	17	3	12	4	8	4	238	5	523	Mencapai Target
1.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**															
1	Prestasi olah raga di tingkat Provinsi dan Nasional	Olah raga	3	3	2	4	6	5	7	6	5	7	0	8	2	Belum mencapai Target
2	Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	Persen	0	0	0	0	0,09	1	0	1	0	1	0	1	0	Belum mencapai Target
3	Jumlah Organisasi pemuda	Organisasi	3	4	5	5	10	6	14	7	16	8	8	8	8	mencapai Target
4	Jumlah lapangan olahraga: Lapangan	Persen	0,0011	0,001	-	0,001	1,58	0,001	1,58	0,001	1,58	0,001	1,58	0,001	49	Belum mencapai Target
1.14	**STATISTIK**															
1	Kabupaten dalam angka	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	6	Ada	Ada	Ada	ada	ada	Mencapai Target
2	Buku PDRB	Buku	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	1	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Mencapai Target
1.15	**KEBUDAYAAN**															

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	0	1	0	1	0	1	1	0,001	1	1	1	1	1	Mencapai Target
2	Persentase Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Benda /situs	3	2	3	2	3	3	3	6	3	3	3	3	3	Mencapai Target
3	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	4	4 kali	6	4 kali	8	4 kali	10	1	10	4 kali	1 kali	4	1	Belum mencapai Target
4	Jumlah Pameran/Expo	Kegiatan	1	3	5	3	7	3	4	7	3	3	3	3	0	Mencapai Target
1.16	**PERPUSTAKAAN**															
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	650	715	2,011	787	28,246	866	61,684	6	1,532	1053	3473	1053	4.679	mencapai Target
2	Jumlah koleksi buku di perpustakaan	Buku	2008	2200	1,411	2420	2,011	2662	2,501	2662	2,720	3220	7472	3220	7.972	Mencapai Target
1.17	**KEARSIPAN**															
1	Persentase SKPD Yang Menerapkan Standarisasi Pengelolaan Arsip Sesuai Ketentuan	Persen	2,94	5	0	8	0	15	0	20	0	25	0	25	0	Belum mencapai Target
2	Pesentase Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persen	-	16	0	10	0	30	0	40	0	50	0	50	0	Belum mencapai Target
3	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	-	4	0	5	0	6	0	7	0	9	12	9	2	Belum Mencapai Target
	URUSAN PILIHAN															
1.1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
1	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	NA	3,39	29,08	3,41	3,99	3,42	5,65	3,61	19,47	3,62	21,53	3,63	19,50	mencapai Target
2	Produksi Perikanan Tangkap	ton	5,462,9	8,500	2,073,6	9000	2,598,0	9,250	4,008,59	9,300	41,825	9,500	15,348	9,750	14.247	Mencapai Target
3	Produksi Budidaya	ton	56,6	80	98,01	172	106,80	172	3,825	172	41,82	173	42,06	177	43	Belum mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	0,75	8,85	5,33	8,13	8,5	7,52	7,3	6,99	7,5	6,54	13,38	6,17	54,44	Mencapai Target
5	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	36,94	8	36,70	8,5	37,14	8,7	38,69	9	40,18	9,2	NA	9,5	Na	Mencapai Target
6	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	ton	NA	NA	2,073,6	100	2,598,0	100	4,008,59	100	13,528,95	100	15,390	100	Na	Mencapai Target
1.2	**PARIWISATA**															
1	Kunjungan Wisata	orang	17,918	18,500	12,419	19,500	17,091	20,000	23,987	22,000	23,950	24,000	2,037	26.000	19.512	Belum mencapai Target
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0	5	0	5,5	0	6	0	6,5	0	7	0	7,5	0	Belum Mencapai Target
3	Jumlah Sarana Rekreasi Dan Pariwisata Di Dikelola Secara Profesional	Persen	3	1	3	1	3	1	5	1	8	1	8	1	8	Mencapai Target
1.3	**PERTANIAN**															
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	39,51	38,01	38,81	38,15	39,74	38,27	37,73	38,48	38,21	38,69	38,75	38,74	38,14	Belum mencapai Target
2	Produktivitas Padi Ton/Ha	Ton/ha	5,32	5,5	5,32	5,8	5,29	6,0	5,47	6,2	5,50	6,5	5,4	6,8	5,2	Belum mencapai Target
3	Produktivitas Jagung Ton/Ha	Ton/Ha	2,30	4,5	35	5,0	3,62	5,7	3,68	6,3	3,54	7,0	4,3	7,5	4,3	Belum mencapai Target
4	Produktivitas Kedelai Ton/Ha	Ton/ Ha	1,2	1,3	0,01	1,4	1,25	1,5	1,19	1,6	0,11	1,7	0	1,8	0	Belum mencapai Target
5	Pendapatan Petani	juta	NA	2,7	2,7	3,0	2,7	3,5	3,2	4	3,6	4,5	3,6	5	3,73	Mencapai Target
6	Pertumbuhan Populasi Ternak	ekor	5442	5,195	5442	5,390	5541	5,599	5715	5,712	5712	5,812	5,243	5,812	5,270	Belum mencapai Target
7	Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	ekor	NA	3,422	4,267	3593	5263	3716	8570	3845	3845	3,935	6,049	4.068	5,154	Mencapai Target
8	Pertumbuhan Populasi Unggs	ekor	70,974	52,995	58539	55,675	70675	59,222	128479	63,379	59465	67,652	12,179	67,652	75,050	Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
9	Pertumbuhan Produksi telur	kg	653	567	540	595	653	624	13125	655	655	687	0	721	0	Belum mencapai Target
10	Persentase Kenaikan Produksi Perkebunan	Persen	NA	30	9,64	50	0,19	70	0,12	100	0,01	100	227,34	100	1,02	Mencapai Target
11	Produksi Hasil Perkebunan	Kg	17086	5000	16025,3	5000	13439,93	5000	11973,64	5000	12076,26	5000	NA	5000	11,610	Mencapai Target
12	Cakupan bina kelompok tani	Orang	150/415,00	150	519	300	637	466	671	500	783	568	783	825	813	Belum Mencapai Target
1.4	**PERDAGANGAN**															
1	Jumlah Pasar tradisional mampu memenuhi kebutuhan pokok	Pasar	3	6	3	10	3	14	4	18	4	18	18	24	18	Belum Mencapai Target
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	9,06	9,39	5,78	9,72	5,63	10,5	5,92	10,38	6,70	-0,46	8,27	11	8,38	Belum Mencapai Target
1.5	**PERINDUSTRIAN**															
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	0,72	1,05	2,04	1,38	7,51	1,71	5,56	2,04	0,51	3,98	5,50	2,37	0,74	Mencapai Target
2	Pertumbuhan IKM	Persen	84,14	90	19,13	100	18,13	100	17,54	100	15,67	5,80	0,68	100	9,33	Belum mencapai Target
1.6	**TRANSMIGRASI**															
1	Jumlah Kerja Sama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	MOU	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	Mencapai Target
2	Jumlah Lokasi Pemukiman Transmigrasi	Lokasi	0	0	0	1	0	-	0	1	0	-	-	1	1	Mencapai Target
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
1.1	**SEKRETARIAT DAERAH**															
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bolsel	Peringkat	C	C	C	C	C	C	B	C	B	CC	B	BB	B	Belum Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
2	Pendapatan Retribusi Daerah	Persen	112,14	100	67,67	102,50	89,56	103	81,69	103,20	56, 02	103	NA	103.000		
3	Nilai dan Pemeringkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat	257	3	185	3	80	3	3,0121	2	3.6536	2	On progress	1	On progress	Belum mencapai Target
4	Penegasan Batas Antar Desa	Desa	N/A	N/A	-	10	-	10	-	10	-	10	NA	10		Belum mencapai Target
1.2	**SEKRETARIAT DPRD**															
1	Jumlah Ranperda menjadi Perda	Ranperda	20	9	13	5	7	3	0	5	1	5	6	5	9	mencapai Target
	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
1	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang Yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	80	90	67,94	93	21,79	95	12,75	97	12,75	98	100	100		Mencapai Target
2	Tersediaanya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Mencapai Target
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan oleh Perda	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Mencapai Target
4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Dokumen	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Mencapai Target
	KEUANGAN															
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	skala	NA	,51-3,25	73	2,51-3,25	82,54	2,51-3,25	74,40	2,51-3,25	80	2,51-3,25	84,80	2,51-3,25	80,85	Mencapai Target
2	Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Mencapai Target
3	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli daerah (PAD)	Persen	98,91	70,73	0,014	105,14	0,025	105,36	0,021	105,08	0,002	104,03	0,032	10.65	0.032	Belum mencapai Target
4	Cakupan wilayah informasi pembangunan	Persen	0	0,59	100%	29,63	100	21,83	100	41,33	100	3,31	100	3,31	100	Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
	1, SIMDA Keuangan 2, SIMDA BMD (Barang Milik Daerah)															
	KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
1	Meningkatnya Kemampuan Teknis Kepegawaian	Persen	3,94	100	27,50	100%	36,73	100	30,05	100	42,86	100	47,86	100	51,53	Belum mencapai Target
2	Terwujudnya penempatan PNS dalam Jabatan yang sesuai dengan Kompetensinya	Kasus	80,55	100	18,18	100%	18,16	100	11,43	100%	9,17	100	9,17	100	9,45	Belum mencapai Target
3	PENGAWASAN															
4	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	-	83,23	82,23	84,23	84,32	86,80	86,80	86,80	86,18	86,80	87,91	-	87,55	Belum mencapai Target
5	Jumlah Temuan BPK	Kasus	-	349	349	421	421	447	477	447	499	447	521	-	554	Belum mencapai Target
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMDA															
	INPEKTORAT DAERAH															
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	persen	100	100	82,23	100%	84,32	100	86,80	100	86,17	100	86,17	100	87,55	Belum mencapai Target
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**															
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	persen	41,54	42,00	44,32	42,50	40,12	43,00	38,07	43,50	44,80	44,00	44,98	-	44,42	Belum Mencapai Target
2	Nilai PDRB:															
	Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)	Juta Rp	981,75	983,56	1,103,236	989,99	1,172,209		1,249,404	1,121, 23	1,329,640	1,131, 23	1,336,97	-	1386.962	Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	AWAL PERENCANAAN 2015	Target dan Capaian Kinerja												Keterangan
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
	Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)		1,252,92		1,576,872		1,727,721		1,900,896		2,083,870		2,153,24	-	2.296.396	Mencapai Target
	PERTANIAN															
1	Nilai Tukar Petani	Persen	96,47	106,10	96,21	106,42	92,93	106,72	95,18	106,92	94,33	107,10	94,33	107,10	-	Mencapai Target
IV	**FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR**															
	PERHUBUNGAN:															
1	Panjang Jalan yang dilalui kendaraan roda 4															Mencapai Target
	- Jalan Nasional	Km	-		283,28		283,28		283,28		283,28		283,28		283,28	
	- Jalan Kabupaten	Km	-		575		575		575		575		575		575	
	- Jalan Provinsi	Km	-		7,63		7,63		7,63		7,63		7,63		7,63	
2	Arus penumpang angkutan umum	Penumpang	370,800	370,800	177,381	390,600	170,810	450,700	203,655	470,100	203,615	490,900	183,254	490,900		Belum mencapai Target
	PENATAAN RUANG															
1	Ketaatan terhadap tata ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
2	Penurunan Jumlah kejadian banjir	Kejadian Banjir	3	2	2	2	1	2	2	2	-	1		1	14	Belum mencapai Target
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI															
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit Jaringan	17	1	-	1	-	1	44	1	45	1	1	1	1	Mencapai Target
V	**FOKUS IKLIM BERINVESTASI**															
1	Jumlah Demo	demo	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mencapai Target
2	Jumlah jenis perizinan dengan proses dengan *one day service*	Izin (Paralel)	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	8	Mencapai Target
3	Penerimaan PAD	Rupiah	11,155,520,106,000	1,600,000,000	9,083,490	670,500,000	588,294,266	737,550,000	591,049,611	811,305,000	589,100,221	892,435,500	593,218,349,6	892.435.500	12.926.448,40	Mencapai Target
VI	**SUMBER DAYA MANUSIA**															
1	Rasio Ketergantungan	Persen	56,66	56	55,36	56%	56,04	53	55,18	51	55,7	49	Na	47	Na	Mencapai Target

2.5 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

2.5.1. Capaian Indikator Makro dan IKU Daerah

Indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggambarkan kemajuan pembangunan daerah jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi indeks pembangunan manusia, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan.

Tabel 2.100

Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	2022 *)		Tingkat Capaian
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,42	65,27 – 66,19	65.90	100%
2	Persentase Penduduk Miskin	%	12,85	12,30-11,37	11,92	100%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,60	4,16 - 3,74	**Belum ada Data**	n/a
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,74	3,50 - 5,61	**Belum ada Data**	n/a
5	Indeks Gini	Poin	0,329	0,33-0,32	**Belum ada Data**	n/a

Sebagaian Capaian indikator makro Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2022 belum dapat diukur, hal ini disebabkan dikarenakan rilis dari Badan Pusat Statistik dilakukan pada akhir tahun berkenan (tahun n) maupun sampai dengan 3 bulan setelah tahun berakhir (n+1). Adapun penjelasan dari masing-masing capaian 2021 (data dasar) dan 2022 (capaian) indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas hidup manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami kemajuan di (0,48) tahun 2022 (65,90) dibanding tahun 2021

(65.42) setelah sebelumnya mengalami peningkatan (0,42) disbanding tahun 2020 (65.00).

Sejak tahun 2011 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada status “Sedang”, dan saat ini menempati peringkat ke-15 dari 15 kab/kota se Sulawesi Utara.

2. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 11,92% atau sekitar 8.585 jiwa dari 72.025 jiwa penduduk Bolaang Mongondow Selatan, angka ini juga mengalami penurunan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara yakni sebesar 0,93% dibanding tahun 2021 hal ini menunjukan bahwa keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.

   Angka kemiskinan ini terus menurun dari tahun 2016 (14,85%) dan masih juga berada diurutan 15 dari 15 Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.
3. Dalam setahun terakhir (2021) angka pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 0,21 dibanding tahun sebelumnya (2020) menjadi 4,60% angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,06%.
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 sebesar 3,74%, tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,63% dimana pandemi covid 19 melanda.
5. Gambaran ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diwakili oleh indeks gini. Berdasarkan rilis terakhir (data tahun 2021) Badan Pusat Statistik indeks gini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di angka 0,329

Selain capaian indikator kinerja makro kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berikut ini juga disajikan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi IKU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dari 35 Indikator Kinerja Utama baru 8 yang sudah diketahui hasilnya, selain itu data belum tersedia. Perubahan data capaian 2021 sebagai data awal yang sebelumnya masih menggunakan data awal 2020 membuat adanya ketidaktepatan dalam penentuan target yang akan berpengaruh pada pencapaian indikator kinerja utama. Selain itu hasil penjenjangna kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 tahun 2021 serta pendampingan oleh Pihak Kementrian PAN RB dalam Peningkatan akuntabilitas kinerja menunjukan bahwa penetapan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum memenuhi unsur SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time Bound).

Lebih rinci mengenai data awal, target dan realisasi capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.101

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 (data awal) dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	2022		Tingkat Capaian
				Target	Realisasi	
Terciptanya toleransi beragama	Indeks Toleransi	Poin	n/a	80,05	**2,3***	
Stabilnya politik dan meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Rasa Aman	Poin	n/a	0,55	**Tidak ada Data**	
	Indeks Risiko Bencana	Poin	149,60	150	**Belum ada Data**	
	Indeks Demokrasi	Poin	n/a	77,21	**Tidak Ada Data**	
Meningkatnya semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Gotong Royong	Poin	n/a	0,60	**3,0***	
Terbangunnya Infrastruktur penunjang perekonomian Daerah	Rasio Konektivitas	Poin	30,43	30,45	**Belum ada Data**	
	Indeks Aksesbilitias Jalan	Poin	20	20	**Belum ada Data**	
	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Poin	n/a	2,0	**Belum ada Data**	
Meningkatnya penyediaan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	73,32	88,40	**Belum ada Data**	
	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	60,19	84,50	**52,38 ***	**61,99%**
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	45,90	56	**42,7 ***	**76,25%**
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase desa berkembang menjadi maju	Persen	50	55	**Belum ada Data**	
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,60	4,16 - 3,74	**Belum ada Rilis BPS**	
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	76,62	82,50	**Belum ada data**	
Meningkatnya kemandirian PMKS	PMKS Mandiri	Persen	n/a	30	**Belum ada Data**	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan	Persen	38,14	38,69	**Belum ada Rilis BPS**	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	2022		Tingkat Capaian
				Target	Realisasi	
	Dan Perkebunan Dalam PDRB					
	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0	11,30	**Belum ada Rilis BPS**	
	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Persen	0,74	0,82	**Belum ada Rilis BPS**	
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	8,38	8,31	**Belum ada Rilis BPS**	
	Persentase Pertumbuhan UKM Terhadap UMKM	Persen	0	26,50	**Belum ada Data**	
Meningkatnya realisasi PMDN	Pertumbuhan Investasi	Persen	326	5	**Belum ada Data**	
Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Poin	Cemar Ringan	60,00	**Belum ada Data**	
	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,04	93,00	**Belum ada Data**	
	Indeks Kualitas Lahan	Poin	85,92	87,00	**Belum ada Data**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan kualitas layanan publik	Nilai SAKIP	Peringkat	B	BB	**B**	
	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	**Belum ada Data**	
	Nilai LPPD	Poin/Peringkat	-	3,41 Tinggi	**Belum ada Data**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peringkat	88,90	85	**85,24 *)**	**100,28**
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	66,26	51,33	**61,39**	**119,60**
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	64,49	64,75	**64,74**	
	Prevalensi *Stunting*	Persen	14,41	8,50	6,50	130,76
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	80,09	95,5	**Belum ada Rilis BPS**	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	71,50	71,5	**Belum ada Rilis BPS**	
	Kabupaten Layak Anak	Peringkat	n/a	Inisiasi	**Belum ada Data**	
Pelestarian budaya dan karakter melalui prestasi pemuda dalam pembangunan	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Poin	n/a	57,50	**Tidak ada Data**	

Adanya ketidaktepatan dalam penentuan target

*) Data bersifat sementara

2.5.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara, Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentnag Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerapkan keenam SPM tersebut, Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada **Tabel 2.102**

Tabel 2.102
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

Indikator	Capaian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *)
Bidang Urusan Pendidikan						
Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar					86,42	92,14
Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah					86,61	
Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD				46,54	81,54	89,60
Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan				0,79	3,74	3,73
Bidang Urusan Kesehatan						
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan			100	79,24	95,62	53,6
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			89	94,16	86,00	50,1
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan			90	94,16	99,23	54,0

Indikator		Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *)
Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			84,18	91,26	100,00	78
Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan			95	37,64	69,30	39,1
Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan			37,80	37,50	81,37	24,8
Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan			75	40,53	99,02	72,3
Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan			31	86,73	99,81	40,6
Persentase Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan Kesehatan			63	100	99,59	52,2
Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan			80	78,79	100	54,2
Persentase Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan Kesehatan			100	65,43	99,90	37,5
Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan Kesehatan			100	98,46	100	54,6
Bidang Urusan Pekerjaan Umum						
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	76,54	74,82	80,06	76,25	60,19	52,38
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	30,88	49,87	53,23	56,12	45,90	42,7
Bidang Urusan Perumahan Rakyat						
Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				0	100	Belum ada Data
Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				65,00	0	Belum ada Data

Indikator		Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *)
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			100	100	100	Belum ada Data
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			100	100	100	Belum ada Data
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100	100	100	Belum ada Data
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100	99,98	100	Belum ada Data
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			100	100	100	Belum ada Data
Bidang Urusan Sosial						
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	-	-	-	Belum ada Data
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	-	-	-	Belum ada Data
Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	-	-	-	Belum ada Data
Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	-	-	-	Belum ada Data
Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	100	-	Belum ada Data

***) capaian semester 1 2022**

2.5.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan semester I tahun 2022, hampir seluruh indikator belum terpenuhi, sebagaiamana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.103

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Semester I Tahun 2022

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama (%)	%	48,43	96,39	100	96,39	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (%)	%	85,59	90,39	100	90,39	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	%	46,45	89,28	100	89,28	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	%	0,79	3,73	100	3,73	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	%	79.24	95,62	100	53,6%	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	%	94,16	8	100	50,1%	
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	%	94,16	99,23	100	54%	
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	%	91,26	100	100	78%	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	37,64	69,30	100	39,1%	
6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 tahun s/d 59 tahun) sesuai standar (%)	%	37,50	81,37	100	24,8%	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar (%)	%	40,53	99,02	100	72,3%	
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	86,73	99,81	100	40,6%	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	100	99,59	100	52,2%	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	54,2%	
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	%	100	99,9	100	37,5%	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	%	100	78	100	54,6%	
13	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (jumlah penduduk)	Rasio	2,05	2,21	2,08	2,21%	
14	Persentase rumah sakit tingkat kabupaten yang terakreditasi (%)	%	100	0	100	0%	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	%	44,19	45,16	100	45,16	
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (%)	%	100	100	100	100	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	%	100	68,23	100	100	
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindung terhadap seluruh kabupaten (%)	%	84,73	60,19	100	88,45	
5	Rasio rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	%	86,26	45,90	100	82,92	
6	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten (%)	%	100	100	100	100	
7	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	100	100	100	100	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan kontruksi (%)	%	100	100	100	100	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	%	0	100	100	0	
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota (%)	%	0	0	73	100	
3	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	%	13,11	17,37	15	17,64	
4	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	%	100	100	100	80	
5	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (%)	%	13,22	25,44	11,60	3999 unit	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	%	100	100	100	100	
2	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan (%)	%	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	69.330	69.008	69.330	110	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	69.330	72,05	69.330	-	Kegiatan Belum Dilaksanakan
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	9.368	8.710	9.500	-	Kegiatan Belum Dilaksanakan
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (*respon time*) penanganan kebakaran	Menit	15 menit	14 menit	15 menit	14 menit	

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	%	100	0	100	0	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	%	100	100	100	100	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
1	Persentase TK bersertifikat Kompetensi (%)	%	10,86	24,27	11		
2	Tingkat Produktivitas TK (%)	%	50,07	12,58	51		
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100		
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	100	8,70	100		
2.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,16	0,03	0,17		
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan. Termasuk TPPO (per jumlah penduduk)	Rasio	2,90	0,06	3		
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	43,36	100		
2.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG PANGAN**						
1	Persentase ketersediaan pangan (tersediannya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan (%)	%	92,31	136,42	93	136,42	
2.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	%	100	100	100	100	
~~2~~	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat (%)	%	100	100	100	69,50	
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	%	100	100	100	100	
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	%	60,71	82,45	61	-	
2.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,48	79,68	79,00	-	
2	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah Kabupaten (%)		85	71	86	41,3	

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (%)	%	0	0	0	0	
2.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1	Perekaman KTP elektronik (%)	%	99,69	100	100	64,62	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	%	21,85	41,43	75	39,61	
3	Kepemilikan akta kelahiran (%)	%	94,08	99,48	96	93,17	
4	Persentase OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (OPD)	%	57,58	18,18	65	18,18	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	%	72,73	100	100	100	
2	Persentase peningkatan desa status mandiri (%)	%	50	11,54	55	0,074	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,3	1,8	2,3	2,24	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence MCPR) (%)	%	70,24	56,99	75	56,99	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet ned) (%)	%	17,47	19,99	16	35,05	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						
1	Ratio kinerja di jalan kabupaten (smp/jam)	Ratio	0,0453	0.0453 smp/jam	0,050	0,0323 smp/jam	
2	Ratio Konektivitas Kabupaten (poin)	Ratio	30.43	30,43	30.45	30,43	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet oleh Dinas Kominfo (%)	%	47	63,64	55	66,11	
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online (%)	%	50	100	55	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (%)	%	100	100	100	100	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
1	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	%	43,75	7,22	50	0	
2	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	%	50	100	60	14	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
1	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	%	0,60	152,60	5	0,41	

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	%	33,82	30,95	34	23,52	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	%	58,46	54,04	59	37,85	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Kali	0	0	0	0	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan (%)	%	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	%	100	100	100	100	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	%	36,57	36,56	36,60	36,60	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
1	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	%	100	100	100	100	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
1	Indeks Nilai Kegemaran Membaca	Indeks	51,87	49,31	55,00	49,31	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,68	18,00	15,68	11,44	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (%)	%	75	75	75	75	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (dokumen)	%	0,67	0,67	0,67	0,67	
III	**URUSAN PEMERINTAH PILIHAN**						
3.01	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	15.348	14.247	20.000	873	
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	42,06	42.08	43,65	17	
3.02	**PARIWISATA**						
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (harga berlaku)	%	11,29	11,36	11,30	-	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,02	16,13	0,03	0,228	Dihitung hanya dari Objek wisata
3	Tingkat hunian akomodasi (%)	%	100	100	100	96,8	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	%	0	-52,83	0,1	-92	

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)		0	882.21	5	57,92	
3.03	**PERTANIAN**						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	5,40	5,24	5,41	5,41	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	%	0	0		0	
3.04	**PERDAGANGAN**						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	%	54,05	53,68	55	55	
3	Persentase alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah (%)	%	4,80	18,99	10	10	
3.05	**INDUSTRI**						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Provinsi (%)	%	5,81	10,37	6	6	
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan instansi terkait	%	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan izin perluasan Industri Kecil dan Industri Menengah yang di keluarkan oleh instansi terkait (%)	%	100	0	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Kabupaten (%)	%	0	0	0	0	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	%	0	0	0	0	
IV	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**						
4.01	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**						
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan guru tenaga Kesehatan	%	13,72	19,28	13,72		
2	Rasio PAD	%	0,76	0,56	0,8		
3	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Predi-kat	level 3	Level 2	level 3	-	
4	Peningkatan kapasitas aparat pengawas Intern pemerintah	Predi-kat	level 3	Level 3	level 3	-	
5	Rasio belanja urusan pemerintah umum (dikurang transfer expenditurs)	%	55,64	68,14	55,65	-	
6	Opini Laporan Keuangan	Predi-kat	WTP (7 KALI)	WTP	WTP (8 KALI)	-	
4.02	**PENGADAAN**						
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	%	98,18	100	98,19	97	
2	Persentase jumlah total proyeksi kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kewartal pertama (%)	%	0	0	0	0	

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target	Capaian	Ket
			2020	2021	2022	2022*	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	%	84,47	98,75	84,48	83	
4.03	**KEPEGAWAIAN**						
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82,86	30,39	82,87	82,49	
2	Rasio pegawai fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,81	30,07	7,82	0,46	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan (%)	%	39,71	13,57	39,72	0,10	
4.04	**MANAJEMEN KEUANGAN**						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap total APBD (%)	%	0,93	10,35	0,93		
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAS dalam APBD (%)	%	0,02	7,67	0,02		
3	Manajemen aset (%)	%	4	-	4		
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	%	0,06	16,62	0,06		
4.05	**PARTISIPASI PUBLIK**						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	90,54	88,74	100	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	

- Angka sementara

2.5.4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDG's)

Untuk melakukan analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data terhadap indikator kewenangan kabupaten yang berjumlah 220 indikator, yang dibagi ke dalam 4 pilar pembangunan, yaitu :

1. Pilar Pembangunan Sosial;
2. Pilar Pembangunan Ekonomi;
3. Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Capaian terhadap 220 indikator TPB dapat dilihat dalam Tabel 2.100 berikut ini:

Tabel 2.104
Capaian Indikator TPB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap Target Nasional Perpres 59 Tahun 2017

NO, TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Tidak ada Kegatan	Tidak ada Data	Total Indikator
PILAR SOSIAL						
1	Tanpa Kemiskinan	6	7	16	1	24

NO, TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Tidak ada Kegatan	Tidak ada Data	Total Indikator
2	Tanpa Kelaparan	6	1	0	5	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10	6	18	0	34
4	Pendidikan Berkuaitas	6	5	1	1	13
5	Kesetaraan Gender	1	2	11	0	14
PILAR EKONOMI						
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	2	10	3	18
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	2	0	2
8	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1	2	8	8	19
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	1	10	0	13
10	Berkurangannya Kesenjangan	2	0	7	2	11
PILAR LINGKUNGAN		7	7	7	7	35
11	Kota dan Pemukiman yang Berkualtias	0	0	12	1	13
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	0	0	3	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	0	0	0	0
14	Ekosistem Lautan	0	0	0	3	3
16	Ekosistem Daratan	0	0	4	4	8
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh	2	1	7	11	21
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	0	2	4	10	16
Jumlah Indikator		39	29	52	100	220
		SST	**SBT**	**TTC**	**TBC**	
Persentase		18%	13%	24,63%	48%	100%

Sumber: KLHS P-RPJMD 2021-2026

Penelaahan lebih mendalam didukung dengan data terkini mengenai TPB yang diterapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada dokumen KLHS Perubahan RPJMD sudah memuat juga substansi mengenai TPB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.6 KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

2.6.1 Daya Dukung Penyedia Air

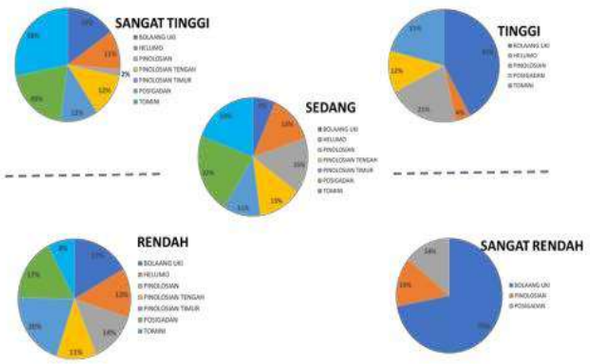

Jasa Lingkungan/ Ekosistem penyedia air berkaitan dengan kemampuan wilayah di dalam menyediakan air yang dipergunakan untuk kegiatan masyarakat atau pemerintah, Kemampuan tersebut ada kaitannya dengan tutupan vegetasi, bentang lahan dan juga jenis tanah yang ada, Setiap kecamatan memiliki daya dukung yang berbeda mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi.

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa layanan penyedia air di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dominan berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan luas sebesar 58,98% dan kelas berpotensi Rendah (rendah – tinggi), Kemampuan komponen ekosistem untuk penyediaan air di delineasi kawasan didominasi oleh kategori SEDANG.

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan air sangat tinggi terdapat di Kecamatan Tomini sebesar 28%, Kecamatan Posigadan 20% dan Kecamatan Bolaang Uki sebesar 15%, Penyediaan air tinggi terdapat di Kecamatan Bolaang Uki sebesar 42%, Kecamatan Pinolosian dan Kecamatan Tomini sebesar 21%, Jasa penyediaan air sedang terdapat di wilayah Kecamatan Posigadan sebeasr 22%, Kecamatan Tomini sebesar 19% dan Kecamatan Helumo sebesar 13%.

Penyediaan air rendah terdapat di Kecamatan Posigasan dan Kecamatan Bolaang Uki 17%, Kecamatan Pinolosian sebesar 14% dan Kecamatan Pinolosian Timur sebesar 2%, Penyediaan air sangat rendah di Kecamatan Bolaang Uki sebesar 72% dan Kecamatan Pinolosian 14%, Kecamatan Posigadan sebeasr 14%, Kecamatan yang memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Kecamatan Tomini dengan luas sebesar 16,630%, Kecamatan yang memberikan kontribusi wilayah paling luas dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi Sedang adalah Kecamatan Posigadan dengan luas sebesar 20,719% dan Kecamatan Tomini dengan luas sebesar 16,630%, Sedangkan Kecamatan yang memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) sebagian berada di Kecamatan Bolaang Uki dengan luas sebesar 9,239% dan di Kecamatan Pinolosian dengan luas sebesar 14,878% dari total luas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana disajikan dalam **Gambar 2.28**

Gambar 2.28
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air

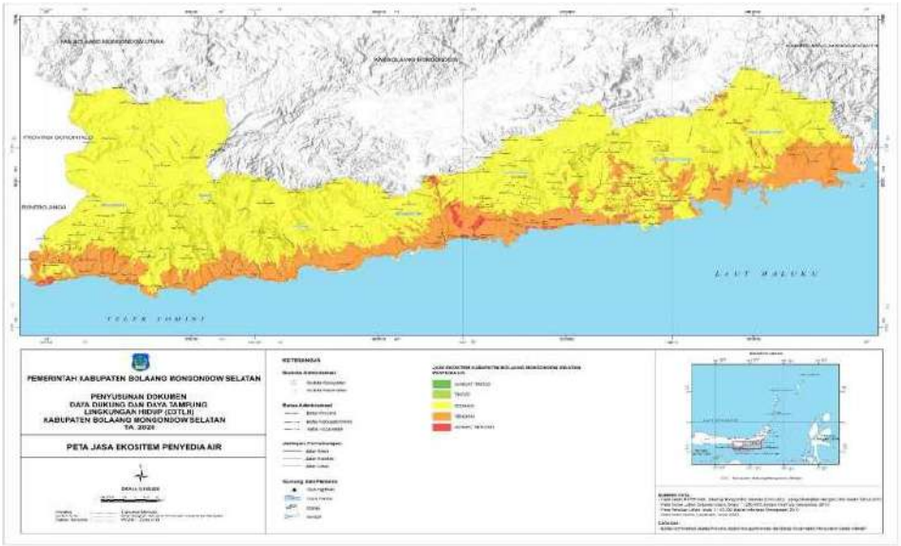

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

2.6.2 Daya Dukung Penyedia Pangan

Peta Jasa Ekosistem dibawah ini memperlihatkan bahwa kemampuan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dominan TINGGI dengan luasan sekitar 92,72%, Kelas berpotensi sedang dalam memberikan layanan penyedia pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 5,527 % serta untuk kelas berpotensi rendah (sangat rendah – rendah) memiliki luas sebesar 0,93 % dari total luas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

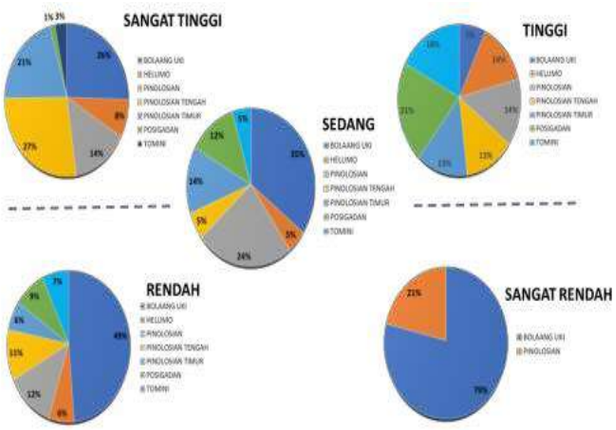

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagian besar berada pada jenis bentang lahan pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar dengan luas sebesar 71,25% dari total luas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi (tinggi – sangat tinggi) juga dipengaruhi oleh vegetasi alami hutan pamah monsun malar hijau yaitu vegetasi dengan komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada lahan kering pamah pada wilayah yang beriklim monsun dengan karakteristik hutan-hutan yang selalu hijau atau malar hijau meskipun pada musim kemarau yang kering dengan luas sebesar 42,67% dari total luas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seperti disajikan dalam **Gambar 2.29**.

Gambar 2.29
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

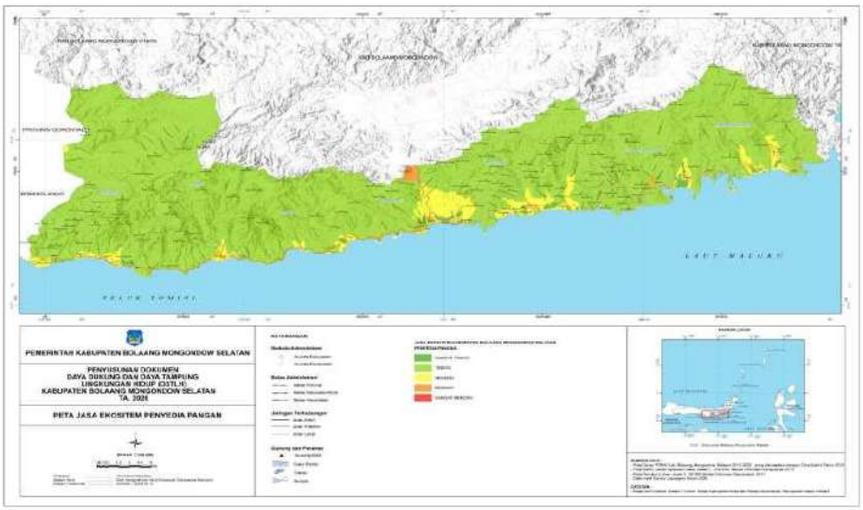

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Tingginya tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat dipengaruhi oleh bentuk penggunaan lahan yang terdapat diwilayah tersebut Kecamatan yang memiliki wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan kategori kelas berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) meliputi Kecamatan Pinolosian Tengah 27% dengan luas sebesar 12,322%, Kecamatan Bolaang Uki 26% dengan luas 9,239% Kecamatan Pinolosian Timur 21% dengan luas sebesar 12,988%.

Masa yang akan datang, layanan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat ditentukan oleh peran penggunaan lahan yang diterapkan, khususnya terhadap penggunaan lahan yang berpotensi dalam memproduksi hasil pangan, Diharapkan dalam perencanaan pembangunan ke depannya, khususnya di sektor pertanian agar lebih mempertimbangkan karateristik bentang lahan agar lahan-lahan yang secara struktur dan sifatnya sangat baik untuk mendukung produksi pangan bisa dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi,

2.6.3 Daya Dukung Pengatur Mitigasi Bencana Longsor

Kemampuan komponen ekosistem mitigasi tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didominasi oleh kategori TINGGI, Dominasi ini memperlihatkan adanya kemampuan untuk mencegah terjadinya tanah longsor, Tanah longsor adalah salah satu bencana yang

didahului oleh intensitas hujan yang tinggi dan gempa bumi, Potensi terjadinya tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan rendah karena mempunyai jasa ekosistem vegetasi dan kerapatan yang tinggi, Dominasi tinggi berada di kawasan Hulu atau di kawasan perbukitan/pegunungan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Tindakan yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan bencana tanah longsor, Perlu dicermati bahwa di kawasan pemukiman dan persawahan pada umumnya komponen ekosistemnya sedang, Kondisi ini bisa menjadi rendah apabila kondisi alam dan vegetasi di hulu tidak terjaga dengan baik, Mitigasi yang tepat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor seperti ditampilkan dalam **Gambar 2.30.**

Gambar 2.30
Peta Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Longsor

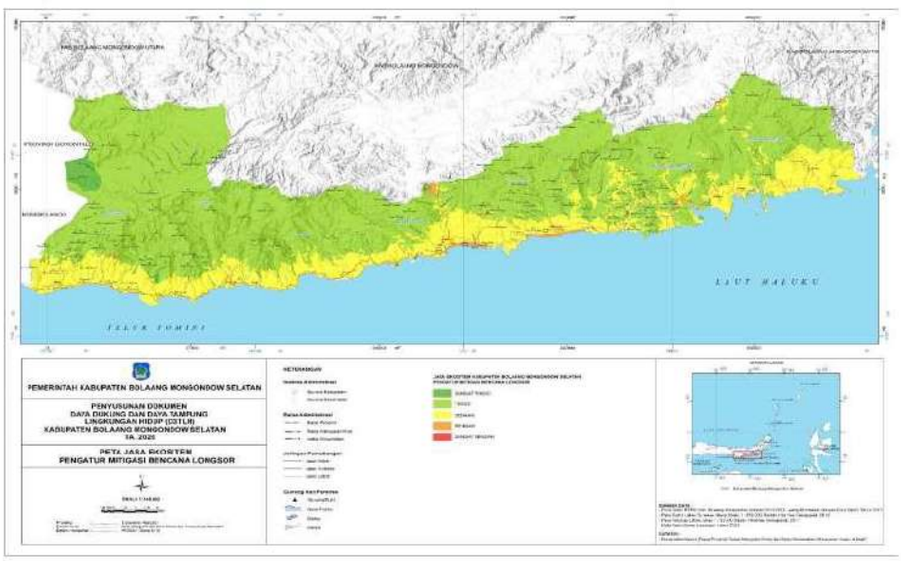

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

2.6.4 Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Kecamatan Posigadan adalah kecamatan yang memiliki kemampuan ekosistem terbesar terkait mitigasi banjir, Kemampuan tersebut terkait dengan kemampuan tanah untuk menyerap sebanyak mungkin air yang ada di permukaan, Tanah tidak jenuh menghadapi air permukaan, Kecamatan Bolaang Uki memiliki spektrum yang rentangnya cukup besar mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, Ada tempat tempat di wilayah kecamatan tersebut mengalami kejenuhan untuk dapat menyerap air untuk masuk ke dalam tanah walaupun secara umum kemampuan kecamatan secara utuh masihlah sangat tinggi, Kemampuan komponen ekosistem mitigasi banjir di Kab. Bolaang Mongondow Selatan didominasi oleh kategori SANGAT TINGGI, Dominasi ini memperlihatkan adanya kemampuan lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir, Bencana banjir tetap berpotensi terjadi melihat daya tampung daerah pesisir yang rendah,

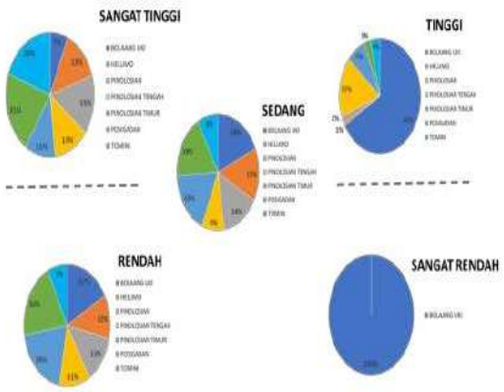

Perilaku yang tidak benar dengan melakukan penggundulan di daerah perbukitan menjadi salah satu penyebab yang bisa mendatangkan bencana banjir karena kemampuan tanah untuk menyerap air di kawasan pesisir rendah, Perlu dicermati bahwa di kawasan pemukiman dan persawahan komponen ekosistemnya dominasi rendah,

Kondisi ini bisa sangat rawan terjadinya banjir, Banjir suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, topografi yang rendah dari badan air, daya tampung air permukaan yang rendah dan terganggunya atau hilangnya daerah tangkapan air, Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga daerah tangkapan air dihulu, normalisasi saluran/sungai serta menjaga vegetasi agar air hujan yang turun dapat infiltrasi ke dlm tanah Mitigasi yang tepat perlu dilakukan untukmencegah terjadinya banjir seperti disajiakan dalam **Gambar 2.31**

Gambar 2.31

Peta Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

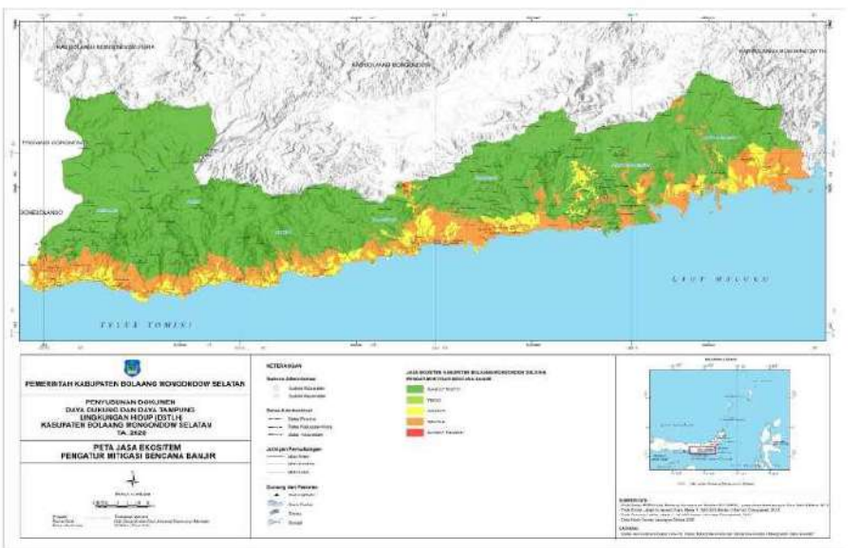

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

2.6.5 Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

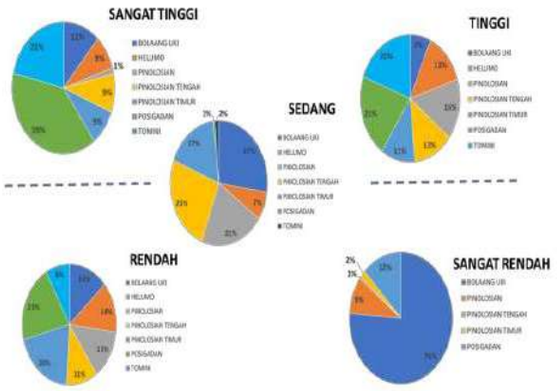

Kecamatan Posigadan dan Kecamatan Tomini memiliki kemampuan ekosistem yang cukup besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di wilayahnya, Kemampuan komponen ekosistem mitigasi KARHUTLA di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didominasi oleh kategori TINGGI.

Bencana KARHUTLA tetap berpotensi terjadi dikaitkan dengan perilaku, Perilaku yang tidak benar dengan melakukan pembakaran di daerah perbukitan pada saat pembukaan lahan baru menjadi salah satu penyebab yang bisa mendatangkan bencana KARHUTLA, Mitigasi yang tepat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya KARHUTLA seperti disajikan dalam **Gambar 2.32.**

Gambar 2.32
Peta Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

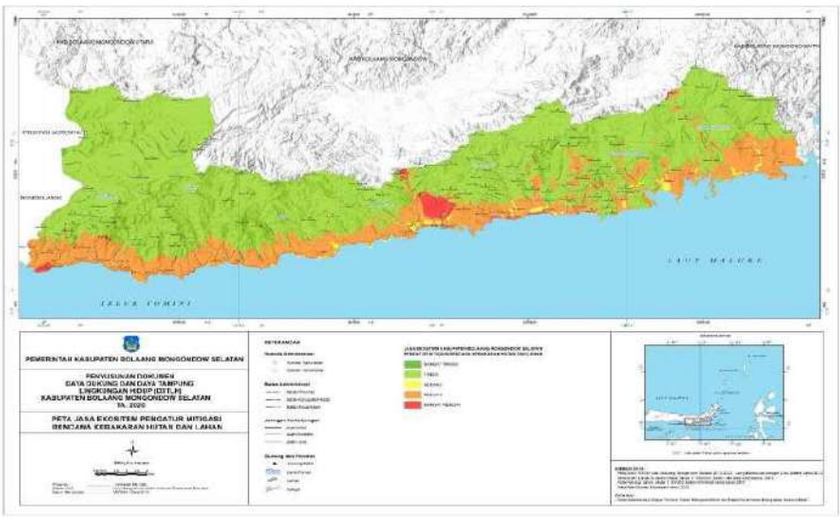

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

2.6.6 Daya Dukung Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Ada 2 kecamatan yaitu Posigadan dan Tomini yang kemampuan ekosistem wilayahnya sedikit lebih rendah dari kecamatan lainnya, Selain kedua kecamatan tersebut kemampuan ekosistem terkait dengan pengaturan iklim di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangatlah tinggi.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa setiap wilayah di masing masing kecamatan memiliki kemampuan komponen ekosistem yang bervariatif terkait dengan pengaturan iklim, Kemampuan komponen ekosistem untuk Iklim di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didominasi oleh kategori SANGAT TINGGI, Dominasi ini memperlihatkan adanya kemampuan untuk mendukung terjaganya kondisi iklim lokal, Terjaganya kondisi iklim local besar peranannya dalam pengaturan daya tampung lingkungan, Perlu dilakukan pengawasan agar kondisi vegetasi masih tetap terjaga Iklim mikro sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal suatu wilayah seperti siklus hidrologi dan vegetasi yang ada seperti disajikan dalam **Gambar 2.33.**

Gambar 2.33
Peta Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

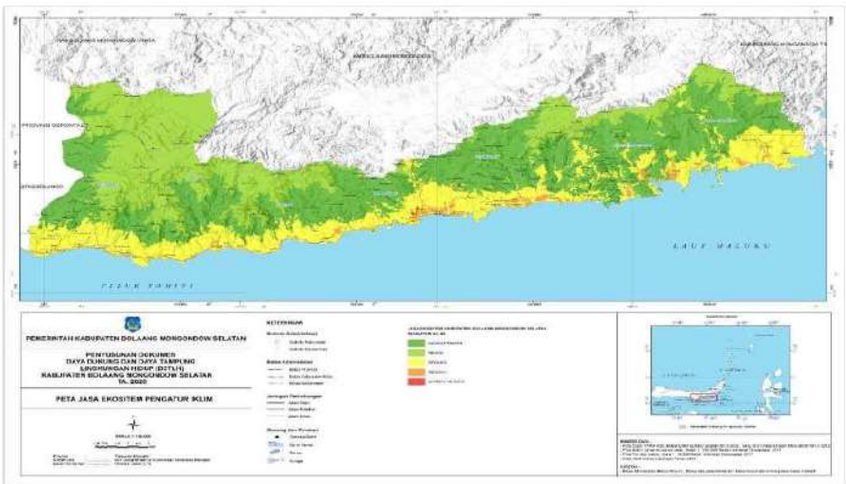

Sumber: DDDTLH Kab. Bolaang Mongondow Selatan

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Dalam laporan *Global Economic Prospects* edisi Juni 2022, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 menjadi 2,9% dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,1%. Bank Dunia menilai invasi Rusia ke Ukraina memperparah perlambatan ekonomi global, yang notabene belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Perekonomian dunia kini diprediksi memasuki periode pertumbuhan lemah yang berkepanjangan seiring meningkatnya laju inflasi. IMF juga memprediksi inflasi negara maju tahun 2022 akan naik hingga 6,6 persen dan negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dikoreksi cukup dalam (revisi ke bawah secara signifikan dan broad-based), termasuk di negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Eropa. Proyeksi inflasi direvisi ke atas akibat kenaikan harga energi dan pangan serta *supply-demand mismatch* yang persisten.

Resiko perekonomian saat ini yang bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global. Inflasi global melonjak akibat supply *disruption* karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina, yang disertai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Namun BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tercatat tetap impresif dengan pertumbuhan 5,44 persen secara tahunan dan kinerja eksternal Indonesia tetap kuat.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2022 mecapai Rp 4.919,9 Trilliun dan atas harga kontan mencapai Rp 2.923,7 Trilliun. Pertumbuhan ekonomi terus menguat meskipun dengan inflasi dalam tren meningkat, namun inflasi ini tetap terkendali. Kinerja perekonomian domestik Indonesia menguat, walaupun tetap perlu langkah antisipasi dan mitigasi.

Ditengah-tengah gejolak volatilitas harga komoditas global tersebut, kinerja sektor eksternal Indonesia masih cukup kuat. Kinerja ekspor dan impor masih tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global. Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia

yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kondisi ini diharapkan akan terus membaiki 5 (lima) tahun kedepa.

Terkait dengan Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, IMF menegaskan undang-undang ini sangat membantu mengurangi hambatan bagi investasi penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Untuk itu standar tata kelola yang berkualitas tinggi di pengaturan regulasi saat mengimplementasikan UU ini harus dipertahankan.

3.2 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 (*y-on-y*) tumbuh positif, yaitu sebesar 3,74 persen, meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,63 persen. Terjadinya percepatan ini disebabkan mulai pulihnya perekonomian setelah pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS Bolaang Mongondow Selatan tahun 2022, lapangan usaha yang mendominasi Bolaang Mongondow Selatan adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,14 persen. Langan usaha lain yang juga mendomiasi saat ini adalah lapangan usaha kontruksi sebesar 15,09 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 10.86 persen, jasa pendidikan dan perdagangan besar dan eceran. Lapangan usaha kontruksi cenderung mengalami peningkatan sebesar 15,09 persen karena pembangunan baik dari pemerintah dan swasta yang terus berjalan hingga saat ini serta bertambahnya pertokoan di Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan pertumbuhan sektor PDRB yang paling lambat bahkan tidak mengalami pergerakan sepajang tahun 2019-2021 adalah lapangan usaha jasa perusahaan dan Informasi dan komunikasi.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan Tahun 2017-2021. Tahun 2021 nilai PDRB ADHB sebesar 2.296.396 milyar rupiah Sedangkan berdasarkan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Kostan (ADHK) Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) juga bergerak positif. Tahun 2021 PDRB ADHK mencapai 1.386.962 milyar rupiah.

3.3. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis kinerja keuangan masa lalu terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2021

Data realisasi keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBD tahun 2016-2021 dan dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2016 sampai dengan 2021 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai berikut:

3.3.1.1 **Perkembangan Pendapatan Daerah**.

Pada Tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp 627.759.083.489,70-. Pada tahun 2017 turun menjadi Rp. 588.294.266.533,75. Selanjutnya pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 591.049.611.191,00-. Pada tahun 2019 kembali turun menjadi Rp 589.100.221.270,00-. pada tahun 2020 naik menjadi Rp 607.967.818.946-. dan tahun 2021 naik menjadi Rp.618.544.953.635,00. Grafik Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**. berikut ini:

Gambar 3.1
Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 (Ribu)

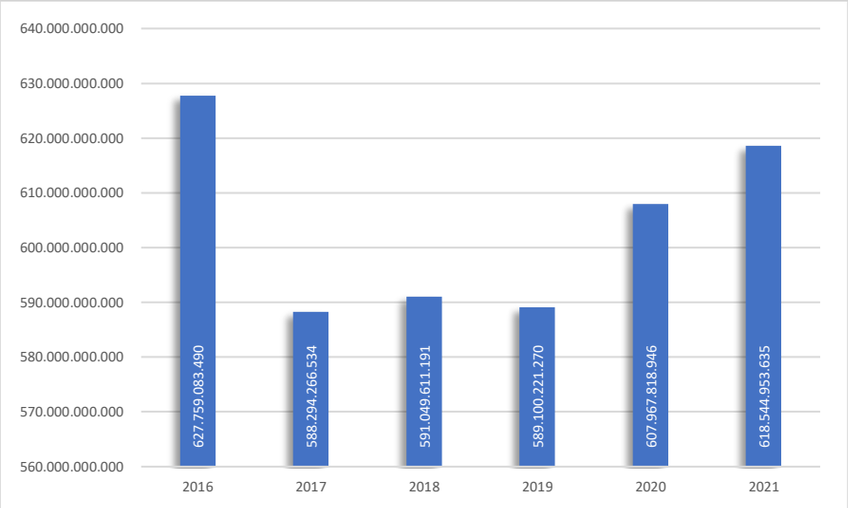

Sumber: LRA Kab.Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Berdasarkan data perhitungan di atas masing-masing sumber pendapatan daerah dalam APBD selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif turun dan naik. Penurunan PAD pada tahun 2017-sampai 2021 jika dibandingkan dari tahun 2016 disebabkan pajak rokok dari provinsi dianggarkan pada pos pajak daerah, sedangkan tahun 2017 diklasifikasikan menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah, PAD mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 15,3%. Hal ini dapat dipahami dikarenakan adanya Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19. Untuk pendapatan transfer sepanjang 2016 sampai 2020 terjadi dua kali penurunan yakni pada tahun 2017 dan tahun 2019. Kondisi perkembangan PAD dan Dana Transfer yang berkorelasi dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah secara menyeluruh. Besaran dari Pendapatan total didominasi oleh pendapatan transfer dibandingkan PAD dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2016 besaran PAD adalah sebesar 2,89% terhadap total pendapatan dan tahun 2021 turun menjadi 2,09% terhadap total pendapatan. Secara rinci persentase dari masing-masing pendapatan disajikan dalam **Gambar 3.2** di bawah ini

Gambar 3.2
Grafik Proporsi Komponen Pemerimaan Daerah Tahun 2016-2021 (%)

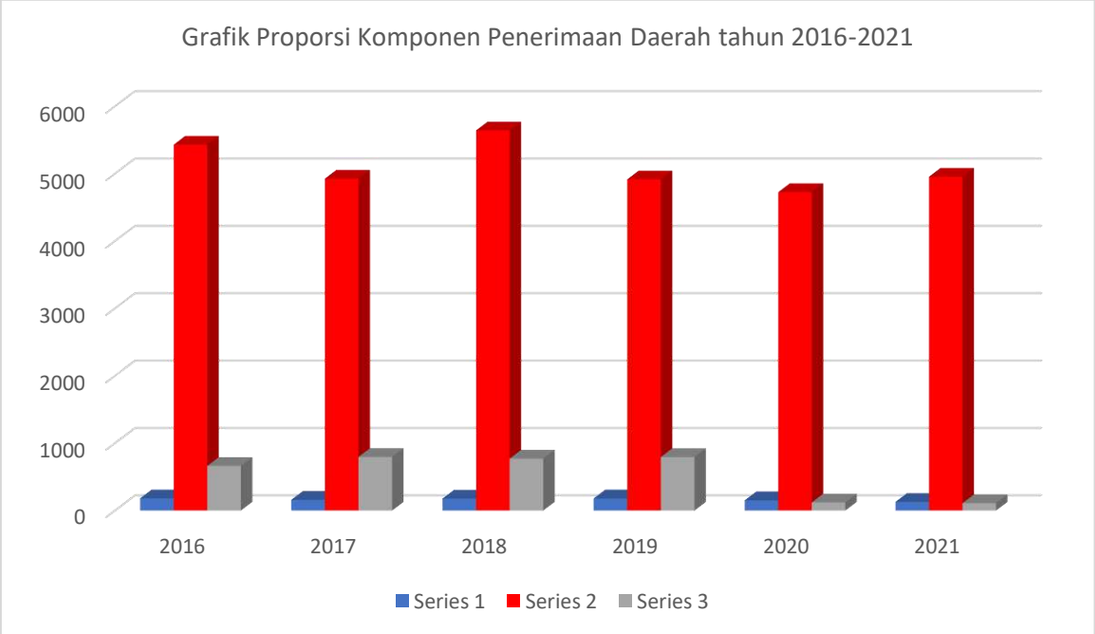

Sumber: LRA Kab.Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih tergantung pada dana perimbangan. Hal ini juga kondisi pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga kemandirian fiskal daerah belum dapat diwujudkan.

Grafik pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan terlihat pada **Gambar 3.3** berikut ini :

Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan,Tahun 2016-2021 (%)

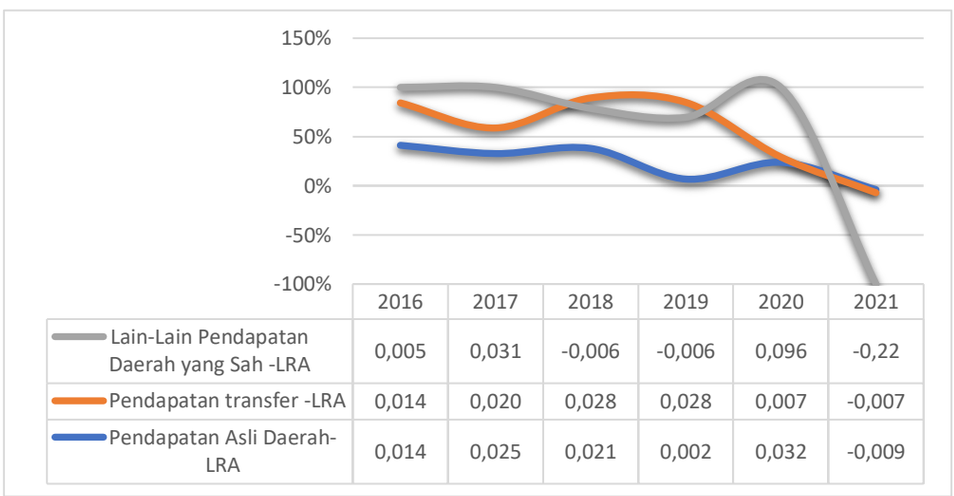

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah -LRA	0,005	0,031	-0,006	-0,006	0,096	-0,22
Pendapatan transfer -LRA	0,014	0,020	0,028	0,028	0,007	-0,007
Pendapatan Asli Daerah-LRA	0,014	0,025	0,021	0,002	0,032	-0,009

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Secara umum pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 klasifikasi pendapatan daerah terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari:
   - Pajak daerah
   - Retribusi daerah
   - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   - Lain-lain PAD yang sah

b) Pendapatan Transfer, terdiri dari:
   - Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
     1. Dana Perimbangan
     2. Dana Insentif Daerah
     3. Dana Otonomi Khusus
     4. Dana Keistimewaan dan
     5. Dana Desa
   - Transfer Antar Daerah, terdiri dari:
     1. Pendapatan Bagi Hasli dan
     2. Bantuan Keuangan

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari :
   - Hibah
   - Dana darurat dan/ atau
   - Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2020 disajikan pada **Tabel 3**.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 (T-C-2)

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021(Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN-LRA	627.759.083.489,70	588.294.266.533,75	591.049.611.191,00	589.100.221.270,00	607.967.818.946,00	618.544.953.635,30	-0,30%
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	18.191.944.707,70	16.075.013.061,75	17.840.935.776,00	18.049.669.248,00	15.300.486.463,00	12.932.184.087,30	-6,60%
	Pajak daerah	8.432.636.644,00	4.669.445.524,00	4.623.215.882,00	5.542.813.864,00	4.627.599.666,00	4.134.069.207,00	-13,29%
	Retribusi daerah	1.811.913.500,00	798.905.781,00	717.393.050,00	736.844.310,00	2.409.881.940,00	2.424.316.352,00	6,00%
	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	50.223.541,00	336.058.655,00	526.605.981,00	626.846.731,00	354.053.346,00	408.003.932,00	52,04%
	Lain-lain PAD yang sah	7.897.171.022,70	5.775.163.742,75	11.973.720.863,00	11.143.164.343,00	7.908.951.511,00	5.965.794.596,30	-5,45%
4.2.	Pendapatan transfer	543.193.737.381,00	492.607.526.629,00	564.261.115.415,00	491.575.229.022,00	472.613.723.348,00	495.555.278.734.00	-275%
	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	13.880.207.036,00	16.361.414.188,00	107.304.858.281,00	41.129.387.675,00	19.684.351.373,00		7,24%
	Dana alokasi umum	351.325.965.000,00	348.334.434.000,00	349.643.086.000,00	364.595.503.000,00	332.263.730.000,00	495.555.278.734,00	-1,11%
	Dana alokasi khusus	177.987.565.345,00	127.911.678.441,00	107.313.171.134,00	85.850.338.347,00	120.665.641.975,00	120.351.844.000,00	-7,48%
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.373.401.401,00	79.611.726.843,00	77.140.283.000,00	79.475.323.000,00	120.053.609.135,00	110.057.490.814,00	12,58%
	Hibah-LRA	5.000.000.000,00	0,00	8.947.560.000,00	10.722.640.000,00	12.068.740.000,00		19,27%
	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	6.102.046.201,00	7.982.929.843,00	13.496.490.495,00	14.031.200.625,00	8.235.362.135,00	16.193.370.250,00	6,18%
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	55.271.355.200,00	(9.121.800.000,00)	67.560.601.000,00	0,00	28.717.447.000,00		-12,27%
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya-LRA	0,00	0,00	829.255.500,00	0,00	250.000.000,00		0,00%
	Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.782.060.000,00	12.713.578.764,00	0,00%

3.3.1.2 Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas, diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 besarnya belanja sebesar Rp. 627.759.083.489,00,-. Besar belanja daerah di tahun 2017 sebesar Rp. 588.294.266.533,75,- dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 591.049.611.191,00,-. Ditahun 2019 belanja turun menjadi Rp 589.100.221.270,00. Dan pada tahun 2020 belanja naik sebesar Rp. 607.967.818.946,00,-.dan tahun 2021 turun menjadi Rp. 618.544.953.635,00 ,-. Apabila dikaitkan dengan Tabel 3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka belanja lebih kecil dari total pendapatan sehingga selalu terjadi surplus. Selengkapnya grafik perkembangan belanja daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Gambar 3.4** berikut :

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 (Ribu)

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2020

Dari sisi komponen belanja, belanja tidak langsung rerata mengalami penurunan sebesar 0,22 %, sedangkan belanja langsung mengalami penurunan rerata sebesar juga 6,96% per tahun. Pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dari pertumbuhan belanja tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan semakin kecil untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Sebagian besar pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2021 mengalami peningkatan, kecuali belanja bagi hasil. Pos belanja bagi hasil mengalami penurunan rerata sebesar 3,98% per tahun. Untuk belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan disebabkan pada tahun 2020 banyak alokasi anggaran belanja langsung yang direfocusing dan dialihkan ke belanja tidak terduga dalam rangka penangan covid-19.

Secara rinci realisasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA**	**619.845.879.836,00**	**571.894.919.083,68**	**525.633.954.529,00**	**473.737.253.495,00**	**607.860.912.371,00**	**565.546.802.191,00**	**-0,22%**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**240.747.698.985,00**	**257.017.425.590,00**	**166.059.236.654,00**	**171.411.060.791,00**	**330.111.986.032,00**	**301.263.176.556,00**	**4,59%**
	Belanja Pegawai	158.984.192.472,00	150.572.631.169,00	159.063.936.654,00	168.076.757.791,00	169.448.079.811,00	177.067.093.919,00	2,18%
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	1.085.000.000,00	1.136.000.000.,00	4.098.800.000,00	1.370.600.000,00	27.776.026.297,00	5.960.887.200,00	40,60%
	Belanja Bantuan Sosial	2.347.660.000,00	2.736.300.000,00	2.896.500.000,00	1.846.700.000,00	939.000.000,00	6.045.521.800,00	20,83%
	Belanja Bagi Hasil	697.591.681,00	651.243.480,00	0.00	0.00	465.118.451,00	569.335.831,00	-3,98%
	Belanja Bantuan Keuangan	77.096.272.332,00	101.046.489.491,00	0.00	0.00	110.772.281.000,00	110.709.835.000,00	7,51%
	Belanja Tidak teduga	536.982.500,00	874.761.450,00	0.00	117.003.000,00	20.711.480.473,00	910.502.806,00	11,14%
5.2	**Belanja Langsung**	**379.098.180.851,00**	**314.877.493.493,68**	**359.574.717.875,00**	**302.326.192.704,00**	**277.748.926.339,00**	**264.283.625.635,00**	**-6,96%**
	Belanja Pegawai	33.906.042.025,00	9.431.294.420,00	0.00	0.00	3.381.130.000,00	0,00	-100,00%
	Belanja Barang dan Jasa	120.778.550.949,00	145.528.227.758,00	209.253.888.423,00	209.115.595.149,00	154.648.950.455,00	151.722.010.775,00	467%
	Belanja Modal	224.413.587.877,00	159.917.971.315,68	150.320.829.452,00	93.210.597.555,00	102.604.837.943,00	112.561.614.860,00	-1289%

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Klasifikasi Belanja Daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 menjadi 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal: 3) Belanja Tidak terduga dan 4) Belanja Transfer. Berikut belanja daerah untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 **Tabel 3.3**

Tabel 3.3
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2020 Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA**	**619.845.879.836,00**	**571.894.919.083,68**	**525.633.954.529,00**	**473.737.253.495,00**	**607.860.912.371,00**	**565.546.802.191,00**	**-0,22%**
5.1	**Belanja Opersional**	**317.101.445.446,00**	**309.404.453.347,00**	**375.313.125.077,00**	**380.409.642.413,00**	**366.932.575.409,00**	**340.795.513.694,00**	**1,95%**
5.1.1	Belanja Pegawai	192.890.234.497,00	160.003.925.589,00	159.063.936.654,00	168.076.757.791,00	173.250.257.811,00	177.067.093.919,00	2,05%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.778.550.949,00	145.528.227.758,00	209.253.888.423,00	186.810.406.020,00	164.967.291.301,00	151.722.010.775,00	0,84%
5.1.5	Belanja Hibah	1.085.000.000,00	1.136.000.000,00	4.098.800.000,00	9.902.834.912,00	27.776.026.297,00	5.960.887.200,00	39,31%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.347.660.000,00	2.736.300.000,00	2.896.500.000,00	15.619.643.690,00	939.000.000,00	6.045.521.800,00	17,18%
5.2	**Belanja Modal**	**224.413.587.877,00**	**159.917.971.315,68**	**150.320.829.452,00**	**93.210.597.555,00**	**108.979.457.038,00**	**112.561.614.860,00**	**-6,78%**
5.2.1	Belanja Modal Tanah				638.545.000,00	87.521.500,00	2.173.570.500,00	27,76%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				18.807.122.512,00	26.842.143.452,00	31.459.683.505,00	10,84%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				25.854.664.401,00	38.764.665.379,00	39.952.355.315,00	9,09%
5.2.4	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan				46.983.703.366,00	42.564.546.818,00	38.238.220.540,00	-4,04%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				926.562.276,00	720.579.889,00	737.785.000,00	-4,45%
5.3	**Belanja Tidak terduga**	**536.982.500,00**	**874.761.450,00**	**0,00**	**117.003.000,00**	**20.711.480.473,00**	**151.722.010.775,00**	-46,47%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1	Belanja Tidak terduga	536.982.500,00	874.761.450,00	0,00	117.003.000,00	20.711.480.473,00	151.722.010.775,00	-46,47%
5.4	**Transfer**	**77.793.864.013,00**	**101.697.732.971,00**	**0,00**	**0,00**	**111.237.399.451,00**	**111.279.170.831,00**	1,82%
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	697.591.681,00	651.243.480,00	0,00	0,00	465.118.451,00	569.335.831,00	-2,65%
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	77.096.272.332,00	101.046.489.491,00	0,00	0,00	110.772.281.000,00	110.709.835.000,00	1,84%

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Gambar 3.5** berikut ini

Gambar 3.5
Grafik Proporsi Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung. Periode Tahun 2016-2021

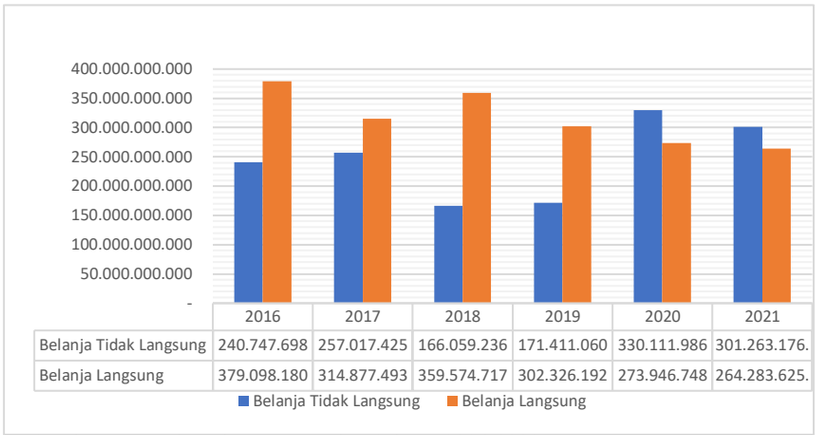

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Dilihat dari proporsinya. belanja daerah selama kurun waktu tahun 2016-2021 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Proporsi belanja Langsung terhadap total belanja daerah fluktuatif dari sebesar 61.2% pada tahun 2016 dan turun menjadi 45.1% di tahun 2020 dan tahun 2021 naik menjadi 53.27 persen. Angka proporsi tertinggi belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2018 sebesar 68.4%. Kecenderungan peningkatan proporsi belanja langung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Secara rinci proforsi proporsi realisasi belanja terhadap belanja daerah dapat dilihat pada pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2016-2021

No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
5	BELANJA						
5.1	Belanja Opersional	51.16	54.10	71.40	80.30	60.36	60.26
5.1.1	Belanja Pegawai	31,12	27,98	30,26	35,48	28,50	31,31
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,49	25,45	39,81	39,43	27,14	26,83
5.1.3	Belanja Hibah	0,18	0,20	0,78	2,09	4,57	1,05
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,38	0,48	0,55	3,30	0,15	1,07
5.2	Belanja Modal	36,20	27,96	28,60	19,68	17,93	19,90
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,13	0,01	0,38
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	3,97	4,42	5,56
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5,46	6,38	7,06
5.2.4	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	9,92	11,60	11,22
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,20	0,42	0,42

No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
5.3	Belanja Tidak terduga	0,09	0,15	0,00	0,02	3,41	0,16
5..3.1	Belanja Tidak terduga	0,09	0,15	0,00	0,02	3,41	0,16
5.4	Belanja Transfer	12,55	17,78	0,00	0,00	18,30	19,68
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,11	0,11	0,00	0,00	0,08	0,10
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	12,44	17,67	0,00	0,00	18,22	19,58

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021. Klasifikasi Belanja Daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja langsung. merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta. rumah tangga. dan luar negeri oleh karena itu. semakin tinggi angka rasionya. semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya. semakin rendah angkanya. semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam **Gambar 3.6** di bawah ini.

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Periode Tahun 2016-2021

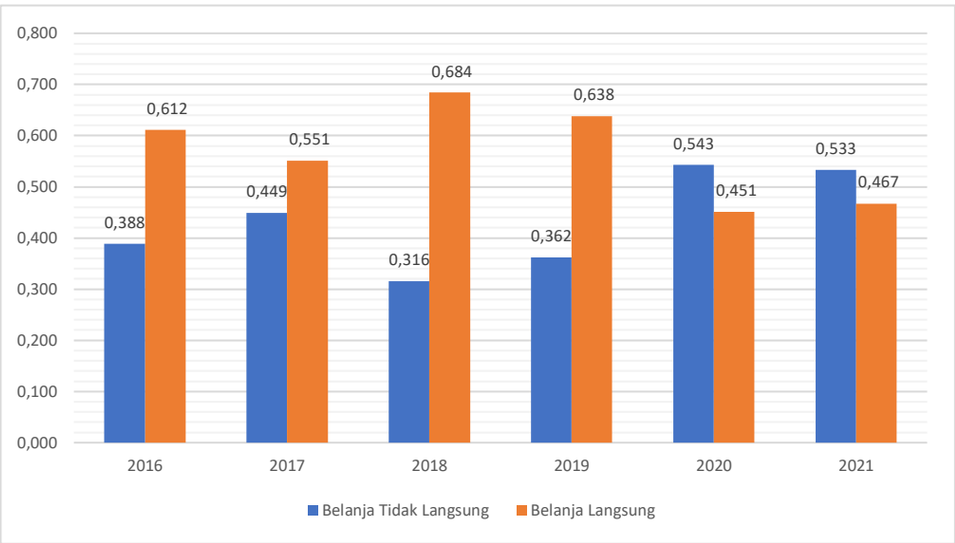

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menggambarkan belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. seperti: belanja gaji dan tunjangan; tambahan penghasilan; Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH; pemungutan dan insentif pemungutan; honorarium; uang lembur; belanja terkait dengan pengembangan SDM. kesejahteraan. dan

perlengkapan Aparatur; perjalanan dinas. serta Belanja Modal (Kantor. Mobil Dinas. Meubelair. peralatan dan perlengkapan).

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2017 mengalami penurunan walaupun menuju tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah belanja kebutuhan aparatur tercatat sebanyak Rp.192.890.234.497.00.- dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2018. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka Rp. 177.067.093.919.00.-. Tahun 2017 sebagai capaian terbaik dalam lima tahun terakhir terkait penurunan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Tabel 3.4 (TC-4)

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
1	Tahun anggaran 2016	192.890.234.497,00	642.222.764.007,00	30%
2	Tahun anggaran 2017	160.003.925.589,00	571.894.919.083,68	28%
3	Tahun anggaran 2018	159.063.936.654,00	525.633.954.529,00	30%
4	Tahun anggaran 2019	168.076.757.791,00	473.737.253.495,00	35%
5	Tahun anggaran 2020	173.250.257.811,00	607.860.912.371,00	29%
6	Tahun anggaran 2021	177.067.093.919,00	565.546.802.191,00	31%

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2016 hingga 20201 mengalami fluktuasi. dimana kondisi pada tahun 2019 menunjukkan terjadinya proporsi tertinggi dalam lima tahun terakhir. yakni sebesar 35%. Dan pada tahun 2017 mencapai kondisi terbaik dengan proporsi sebesar 28%. Sementara rata-rata Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2016 hingga 2021 adalah sebesar 31%.

3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah. baik penerimaan maupun pengeluaran. yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan

untuk pembayaran kembali pokok pinjaman. pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 penerimaan pembiayaan daerah turun dari sebesar Rp 56.358.877.153.30.- pada tahun 2016 dan menjadi Rp 29.533.818.191.87.- pada tahun 2021. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp 22.376.884.171.-.. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) turun dari sebesar Rp 41.895.196.636.- pada tahun 2016 menjadi Rp 29.533.818.191.87 pada tahun 2021. Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 3.6.**

Tabel 3.6
Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3	**PEMBIAYAAN**							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	56.358.877.153,30	42.066.017.737,40	58.986.047.128,47	23.703.540331,47	29.417.521.194,47	29.533.818.191,87	-12,12
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	22.376.884.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		41.895.196.636,00	59.023.736.784,47	23.699.714.677,47	29.417.521.194,47	29.524.427.769,47	29.533.818.191,87	-2,77

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja. maka terjadi surplus. kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Selengkapnya grafik selisih pendapatan dan belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Gambar 3.7** berikut:

Gambar 3.7
Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Periode Tahun 2016-2021 (Rp)

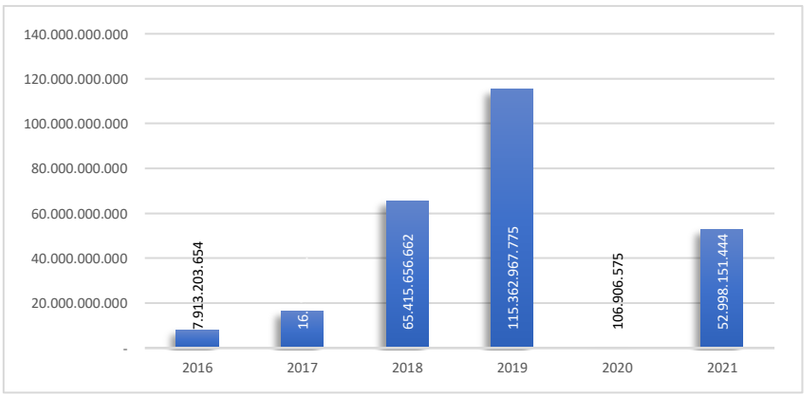

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Pelampauan pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian. mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp 56.358.877.153.30.-. Dan ditahun 2021 sebesar Rp. 29.533.818.191.87.-. Grafik besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Gambar 3.8.**

Gambar 3.8

Grafik Selisih Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021 (Rp)

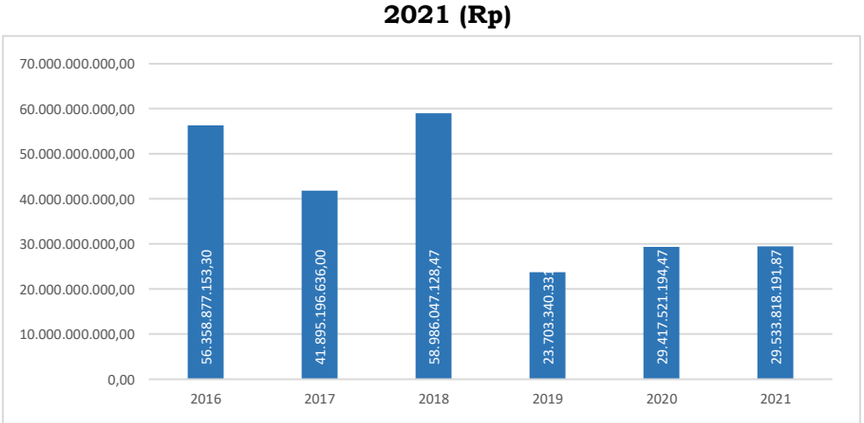

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selaan 2016-2021

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah. yang pada dasarnya mengidikasikan kurang efisien dan efektivnya perencanaan kegiatan. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja menunjukkan fluktuasi naik dari tahun 2016 sampai 2018 dan turun di tahun 2019 dan 2021. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang optimal dari tahun 2020. Grafik Rasio SiLPA terhadap belanja tahun 2016-2021 dapat dilihat terlihat pada **Gambar 3.9** di bawah ini:

Gambar 3.9

Grafik Rasio SiLPA terhadap Belanja (%) Tahun 2016-2021

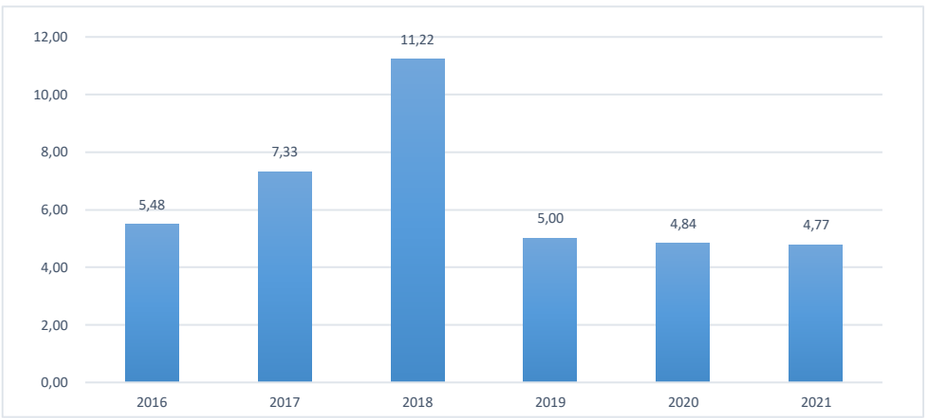

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan. yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa rasio kemampuan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendanai belanja daerah selama lima tahun terakhir.

Dari hasil perhitungan diatas. diketahui bahwa terjadi penurunan atas rasio kemampuan mendanai Belanjda daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak adanya COVID yang mengakibatkan turunnya PAD sebesar 15.3% dari tahun sebelumnya. Grafik rasio kemampuan mendanai belanja daerah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Gambar 3.10** berikut:

Gambar 3.10
Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%) Tahun 2016-2021

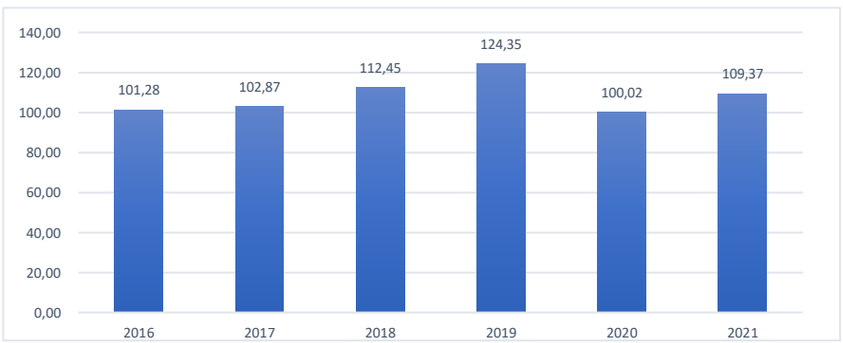

Sumber: LRA Kab. Bolaang Mongodow Selatan 2016-2021

3.3.2 Neraca Daerah

Gambaran tentang posisi keuangan daerah berupa asset. kewajiban dan ekuitas dana tertuang dalam neraca daerah. Laporan neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah. Neraca daerah mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah. tidak hanya

dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku. tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Gambaran neraca daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terlihat pada **Tabel 3.7** berikut:

Tabel 3.7

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 2016-2021 (T-C-3)

No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021	Pertumbuhan
1	**ASET**	**1.160.796.741.812,54**	**1.050.760.492.525,67**	**1.091.126.480.125,28**	**1.122.678.222.710,57**	**1.138.371.831.281,85**	**1.201.464.157.390,54**	**0,49%**
1.1.	**Aset Lancar**	**49.420.982.082,00**	**69.696.902.416,93**	**52.834.476.478,69**	**84.696.900.846,18**	**56.326.518.941,66**	**114.924.485.176,46**	**3,32%**
1.1.1.	Kas	43.270.181.793,00	60.099.451.351,47	24.633.316.021,47	31.899.388.918,47	31.611.012.725,47	83.745.666.960,17	7,55%
1.1.2.	Invetasi jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.	Piutang	6.144.442.533,00	4.342.028.233,00	5.752.579.745,00	12.683.188.048,00	6.683.241.468,00	9.674.987.876,00	2,12%
1.1.4.	Piutang Lain-Lain	6.357.756,00	135.873.200,00	0,00	2.116.200.719,17	1.474.955.007,35	650.431.199,00	29,27%
1.1.5.	Penyisihan piutang	0,00	-744.721.397,20	-882.463.682,03	-942.282.431,74	-1.427.809.606,46	-980.374.582,00	24,23%
1.1.6.	Beban dibayar dimuka	0,00	261.866.757,00	442.012.369,00	106.714.674,00	177.654.416,00	87.472.602,00	12,13%
1.1.7.	Persediaan	0,00	5.602.404.272,66	22.889.032.025,25	38.833.690.918,28	17.807.464.931,30	19.890.149.713,00	47,03%
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**1.001.000.000,00**	**3.387.203.931,00**	**3.487.034.10000**	**3.487.034.100,00**	**3.487.034.100,00**	**3.478.034.100,00**	**36,62 %**
1.3.	**Aset Tetap**	**1.067.199.190.824,29**	**936.260.371.172,12**	**1.002.946.255.78062**	**1.000.284.275.446,78**	**1.040.984.165.520,03**	**1.041.416.133.169,02**	**19,00 %**
1.3.1	Tanah	9.860.525.850,00	18.053.970.525,00	18.739.557.525,00	20.246.551.095,00	20.246.551.095,00	19.986.676.795,00	19,71%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	138.158.176.683,83	143.556.861.291,24	170.637.014.559,74	189.408.619.446,26	220.705.636.925,26	254.353.306.879,06	12,42%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	260.833.772.762,12	307.343.496.657,66	348.184.673.507,66	370.731.868.917,66	401.483.222.146,66	446.338.369.554,43	44,10%
1.3.4	Jalan. Jaringan dan Instalasi	635.378.995.945.00	740.681.256.786,91	817.082.254.786,91	871.252.711.502,91	915.309.767.170,91	942.503.229.190,91	48,90%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.290.004.780.00	12.372.724.096,00	13.032.569.726,00	13.054.938.296,00	13.063.489.514,00	13.066.323.914,00	8,90%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	13.677.714.803.34	24.811.612.112,00	40.876.038.502,00	44.759.793.016,49	68.120.606.545,20	55.334.322.533,00	49,39%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0.00	-310.559.550.296,69	-405.605.852.826,69	-509.170.206.827,54	- 597.945.107.877,00	- 690.166.095.697,38	49,10%
1.4.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.	Aset lainnya	43.175.568.906,25	41.416.015.005,62	31.858.713.765,97	34.210.012.317,61	37.574.112.720,16	41.636.504.945.06	3.41%
1.5. 1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00	0.00%

No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021	Pertumbuhan
1.5. 2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.551.276.108,19	6.386.066.333,80	5.596.039.719,04	6.230.323.508,18	6.828.740.940,73	6.877.919.293,43	5.31%
1.5. 3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5. 4	Aset Tidak Berwujud	73.750.000,00	18.225.873.700,00	20.475.843.450,00	22.639.727.950,00	25.226.957.450,00	28.019.445.807,20	9,79%
1.5. 5	Aset Lain lain	37.550.542.798,06	16.804.074.971,82	5.786.830.596,93	5.339.960.859,43	5.518.414.329,43	6.739.139.844,06	38,08%
2	**KEWAJIBAN**	**10.982.269.586,44**	**6.625.825.446,44**	**2.722.804.892,44**	**6.276.376.685,44**	**4.200.899.000,64**	**3.677.089.265,44**	**21,36 %**
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**10.982.269.586,44**	**6.625.825.446,44**	**2.722.804.892,44**	**6.276.376.685,44**	**4.200.899.000,64**	**3.677.089.265,44**	**21,36 %**
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.220.532.246,00	1.075.714.567,00	933.172.344,00	**2.481.867.724,00**	2.086.584.956,00	1.231.697.324,00	14,35%
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	49.145.205,00	29.708.027,00	29.662.000,00	29.662.000,00	128.234.329,00	15,49%
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	691.811.406,00	408.382.547,00	1.227.172.053,00	301.494.112,00	1.946.431.546,00	24,18%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.761.737.340,44	4.809.154.268,44	1.351.541.974,44	2.537.674.908,44	1.783.157.932,64	388.726.066,44	34,62%
2.2	**Kewajiban Jangka panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	**EKUITAS DANA**	**1.149.814.472.226,10**	**1.044.134.667.079,23**	**1.088.403.675.232,84**	**1.116.401.846.025,13**	**1.134.170.932.281,21**	**1.197.787.068.125,10**	**0,34%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.160.796.741.812,54**	**1.050.760.492.525,67**	**1.091.126.480.125,28**	**1.122.678.222.710,57**	**1.138.371.831.281,85**	**1.201.464.157.390,54**	**0,49%**

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2016-2021

Berdasarkan neraca daerah tersebut di atas. dapat diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan beberapa hal yaitu rasio lancar. rasio cair (quick rasio). rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal. Uraian masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

b. Rasio Cair

Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar. dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah. kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan. bagian lancar pinjaman. bagian lancar TPTGR. piutang pajak. piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} = \frac{\text{(Aset Lancar – Persedian)}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban=kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang. baik jangka pendek maupun jangka panjang. dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga. Hutang Luar Negeri. Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio hutang

terhadap modal dihitung dengan membandingkan total hutang. baik jangka pendek maupun jangka panjang. dengan jumlah modal. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga. Hutang Luar Negeri. Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

Tabel 3.8
Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015-2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	**RASIO LIKUIDITAS**							
1.	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek	2.5530	3.9400	9.0705	9.0470	5.0825	7.5248	22.7750
2	Rasio Cair ((Aset LancarPersediaan)/Hutang Jangka Pendek)	3.1114	4.5001	10.5190	19.4044	13.4946	13.4082	31.2542
B	**Rasio Solvabilitas**							
1.	Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) (Total Kewajiban/Total Aset)	0.0236	0.0095	0.0063	0.0025	0.0056	0.0037	0.0031
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0.0242	0.0096	0.0063	0.0025	0.0056	0.0037	0.0031

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2016-2021

Dari **Tabel 3.8** di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) meningkat dari tahun 2015 sebesar 2.55 menjadi 22.77 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik.
b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) selama lima tahun mengalami peningkatan. yaitu pada tahun 2015 sebesar 3.11 menjadi sebesar 31.25 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya. rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0.8:1 karena apabila kurang dari itu. pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cenderung rendah sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. yaitu sebesar 0.024 pada tahun 2015 dan menjadi 0.0031 pada tahun 2021. Rasio ini memperlihatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva yang dimiliki. Tingkat rasio yang

rendah berarti kondisi keuangan semakin aman (*solvable*). Dengan Debt ratio sebesar 0.0031 di tahun 2021 menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam keadaan yang sehat. yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah cenderung rendah.

d. Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cenderung rendah sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. yaitu sebesar 0.024 pada tahun 2015 menjadi 0.0031 pada tahun 2021. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semakin kecil rasio ini berarti kondisi keuangan semakin baik karena modal untuk menjamin utang lancar masih cukup besar. Batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Dapat dikatakan bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri. bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.

3.4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016-2021

3.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya. semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Grafik Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2016-2021 seperti diperlihatkan oleh **Gambar 3.11** berikut ini.

Gambar 3.11
Grafik Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Tahun 2016-2021 (%)

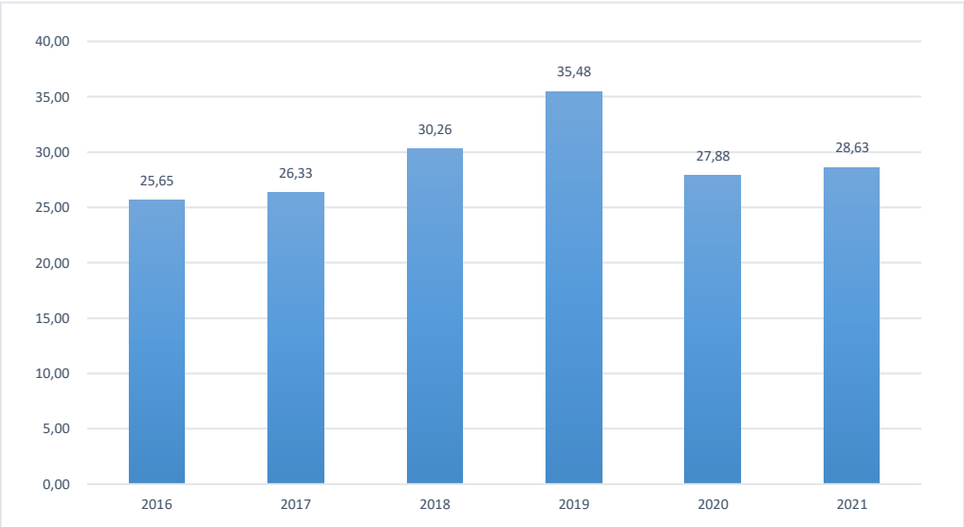

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2016-2021

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja langsung terhadap total belanja daerah. Belanja langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja langsung. merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta. rumah tangga. dan luar negeri. oleh karena itu. semakin tinggi angka rasionya. semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya. semakin rendah angkanya. semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada **Tabel 3.9** berikut:

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	192.890.234.497.00	160.003.925.589.00	159.063.936.654.00	168.076.757.791.00	173.250.257.811.00	177.067.093.919
2	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	642.222.764.007.00	571.894.919.083.68	525.633.954.529.00	473.737.253.495.00	607.860.912.371.00	565.546.802.191
3	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	30%	28%	30%	35%	29%	31%

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Belanja modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. di samping pengaruh dari sektor swasta. rumah tangga. dan luar negeri. Realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu. semakin tinggi angka rasionya. diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya. semakin rendah angkanya. semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Grafik proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2020 terlihat pada **Gambar 3.12** berikut:

Gambar 3.12
Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Tahun 2016-2021 (%)

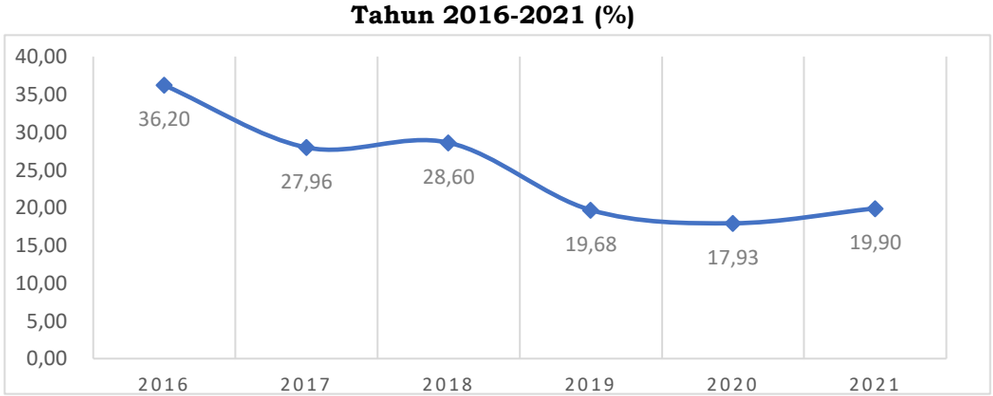

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan (data diolah)

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Peter Heller dalam tulisan yang dipublikasikan IMF memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilitasi ekonomi negara (daerah). Dari definisi di atas tampak bahwa ruang fiskal adalah “sisa” setelah rencana pengeluaran pemerintah dirinci dan diputuskan. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

3.4.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.10** dan **Tabel 3.11.**

Tabel 3.10. (T-C-5)
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Realisasi pendapatan daerah	627.759.083.489.70	588.294.266.533.75	591.049.611.191.00	589.100.221.270.00	607.967.818.946.00	618.544.953.635.30
	Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	619.845.879.836.00	571.894.919.083.68	525.633.954.529.00	473.737.253.495.00	607.860.912.371.00	565.546.802.191.00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.376.884.171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Defisit riil	14.463.680.517.00	16.399.347.450	65.415.656.662.00	115.362.967.775	106.906.575	52.998.151.444

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan (data diolah)

Tabel 3.11 (T-C-6)
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SiLPA	5	7	11	5	5	5
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan (data diolah)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap

total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian. besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat

earmark dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 – 2021 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2018. dengan kontribusi sebesar 11%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya meningkat dari than 2016 sampai 2018. Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12
Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah SiLPA	**41.895.196.636,00**	**59.023.736.784,47**	**23.699.714.677,47**	**29.417.521.194,47**	**29.524.427.769,47**	**82.531.969.636,17**
2	Pelampauan penerimaan PAD	1.010.672.022,70	11.247.218.297,75	1.107.596.022,12	1.534.968.963,00	1.068.174.723,00	1.276.695.349,30
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	3.798.314.985,00	5.452.678.454,00	-	62.522.560,00	-	28.184.817.943,00
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	4.976.400.000,00	-	-	2.335.040.000,00	405.440.000,00	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	32.109.809.628,30	42.323.840.032,72	22.592.118.655,35	25.484.989.671,47	28.050.813.046,47	53.070.456.343,87
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	

Sumber: BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan (data diolah)

Tabel 3.13 (T-C-7)
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2021

Tahun	Silpa	Total Belanja	Rasio Silpa terhadap Total belanja
2016	33.981.992.982.30	619.845.879.836.00	5%
2017	41.895.196.636.00	571.894.919.083.68	7%
2018	58.986.047.128.47	525.633.954.529.00	11%
2019	23.703.340.331.47	473.737.253.495.00	5%
2020	29.417.521.194.47	607.860.912.371.00	5%
2021	29.533.818.191.87	565.546.802.191.00	5%

Sumber: Neraca Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan (data diolah)

3.5 KERANGKA PENDANAAN

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2021. pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan pendapatan. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait distribusi vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksin COVID-19 disertai dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global.
2. Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditahun 2021 adalah 15,48% dar tahun 2020. Penurunan berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 8,33 persen dari tahun sebelumnya yang mengalami 19.75% (2020). Besaran dari Pendapatan total didominasi oleh pendapatan transfer dibandingkan PAD dan pendapatan lainnya. Meskipun PAD mengalami penururan sebesar 15.48% dari tahun 2020 hal ini dikarenakan Pandemic COVID- 19 dan masih di angka relative wajar.
3. Pendapatan Pajak Daerah. asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi yang ada dan kemampuan obyek pajak. Masih terdapat potensi pendapatan dari pos pajak daerah yang dapat dioptimalisasikan pemungutannya. Peningkatan pajak daerah juga dilakukan melalui intensifikasi dengan penerapan aturan (Perda tentang pajak daerah) secara optimal. Kenaikan pajak juga diprediksi dari intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Selain itu perlu dilakukan akselerasi peningkatan aktivitas perekonomian. sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat. sehingga kemampuan membayar pajak *(ability to pay*) masyarakat meningkat.
4. Pendapatan Retribusi diperkirakan akan mengalami kenaikan berdasarkan asumsi dari penerimaan retribusi daerah selama periode tahun 2018-2021. Asumsi tersebut didasarkan pada potensi rertribusi dari beberapa jenis (retribusi pasar).
5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diharapkan bisa ditingkatkan dengan melihat potensi yang diperoleh dari penyertaan modal. bukan dari BUMD. Untuk selanjutnya diperlukan kajian dan perencanaan dan peningkatan pendapatan dari BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
6. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami fluktuatif naik turun dengan demkian asumsi tetap dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2021.
7. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan menurun tetapi diperhitungkan relatif rendah (moderat).
8. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik diasumsikan naik dengan adanya upaya pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat sebagai

upaya berkelnajutan Pemerintah utnk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil

9. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2021
10. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus meningkat sebesar 10% per tahun.
11. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2021.
12. Belanja daerah diproyeksikan meningkat pada tahun 2021. dengan kebijakan: Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dipertahankan untuk Belanja Tidak Langsung pada kisaran sama atau lebih kecil dari 60% dari Total Belanja dan Belanja Langsung lebih besar atau sama dengan 40% dari total Belanja.

Tabel 3.14 (T-C-8)
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022-2026

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
	Persentase pertambahan pertahun	**-0.24%**	**(0.15)**	**5.60%**	**7.00%**	**7.00%**	1%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**554.077.290.829.00**	**547.920.916.920.00**	**578.604.488.267.52**	**619.106.802.446.25**	**662.444.278.617.48**	**-2%**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**16.091.024.893.00**	**9.337.879.667.00**	**9.860.800.928.35**	**10.551.056.993.34**	**11.289.630.982.87**	**-2%**
4 . 1 . 01	**Pajak Daerah**	**5.613.047.111.00**	**5.025.086.647.00**	**5.306.491.499.23**	**5.677.945.904.18**	**6.075.402.117.47**	**-8%**
4 . 1 . 01 . 06	Pajak Hotel	39.900.000.00	39.900.000.00	42.134.400.00	45.083.808.00	48.239.674.56	-12%
4 . 1 . 01 . 06 . 07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	27.600.000.00	27.600.000.00	29.145.600.00	31.185.792.00	33.368.797.44	-14%
4 . 1 . 01 . 06 . 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	12.300.000.00	12.300.000.00	12.988.800.00	13.898.016.00	14.870.877.12	-9%
4 . 1 . 01 . 07	Pajak Restoran	3.083.989.456.00	2.469.778.992.00	2.608.086.615.55	2.790.652.678.64	2.985.998.366.15	-15%
4 . 1 . 01 . 07 . 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	75.356.528.00	121.200.000.00	127.987.200.00	136.946.304.00	146.532.545.28	-15%
4 . 1 . 01 . 07 . 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.008.632.928.00	2.348.578.992.00	2.480.099.415.55	2.653.706.374.64	2.839.465.820.87	-16%
4 . 1 . 01 . 08	Pajak Hiburan	3.600.000.00	3.600.000.00	3.801.600.00	4.067.712.00	4.352.451.84	-3%
4 . 1 . 01 . 08 . 05	Pajak Diskotik. Karaoke. Klub Malam. dan Sejenisnya	3.600.000.00	3.600.000.00	3.801.600.00	4.067.712.00	4.352.451.84	-3%
4 . 1 . 01 . 08 . 10	Pajak Pertandingan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4 . 1 . 01 . 09	Pajak Reklame	124.377.000.00	124.377.000.00	131.342.112.00	140.536.059.84	150.373.584.03	-8%
4 . 1 . 01 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	124.377.000.00	124.377.000.00	131.342.112.00	140.536.059.84	150.373.584.03	-8%
4 . 1 . 01 . 10	Pajak Penerangan Jalan	907.280.655.00	907.280.655.00	958.088.371.68	1.025.154.557.70	1.096.915.376.74	-3%

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
4 . 1 . 01 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	907.280.655.00	907.280.655.00	958.088.371.68	1.025.154.557.70	1.096.915.376.74	-3%
4 . 1 . 01 . 13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.00	5.000.000.00	5.280.000.00	5.649.600.00	6.045.072.00	-3%
4 . 1 . 01 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.00	5.000.000.00	5.280.000.00	5.649.600.00	6.045.072.00	-3%
4 . 1 . 01 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	415.150.000.00	415.150.000.00	438.398.400.00	469.086.288.00	501.922.328.16	-3%
4 . 1 . 01 . 14 . 04	Pajak Batu Kapur	110.500.000.00	110.500.000.00	116.688.000.00	124.856.160.00	133.596.091.20	-3%
4 . 1 . 01 . 14 . 23	Pajak Pasir dan Kerikil	237.850.000.00	237.850.000.00	251.169.600.00	268.751.472.00	287.564.075.04	-3%
4 . 1 . 01 . 14 . 24	Pajak Pasir Kuarsa	21.500.000.00	21.500.000.00	22.704.000.00	24.293.280.00	25.993.809.60	-3%
4 . 1 . 01 . 14 . 28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	45.300.000.00	45.300.000.00	47.836.800.00	51.185.376.00	54.768.352.32	-3%
4 . 1 . 01 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.003.750.000.00	1.030.000.000.00	1.087.680.000.00	1.163.817.600.00	1.245.284.832.00	-3%
4 . 1 . 01 . 15 . 01	PBBP2	1.003.750.000.00	1.030.000.000.00	1.087.680.000.00	1.163.817.600.00	1.245.284.832.00	-3%
4 . 1 . 01 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.00	30.000.000.00	31.680.000.00	33.897.600.00	36.270.432.00	-13%
4 . 1 . 01 . 16 . 01	BPHTB-Pemindahan Hak	20.000.000.00	20.000.000.00	21.120.000.00	22.598.400.00	24.180.288.00	-10%
4 . 1 . 01 . 16 . 02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000.00	10.000.000.00	10.560.000.00	11.299.200.00	12.090.144.00	-23%
4 . 1 . 02	**Retribusi Daerah**	**3.584.877.000.00**	**1.906.340.500.00**	**2.013.095.568.00**	**2.154.012.257.76**	**2.304.793.115.80**	**-4%**
4 . 1 . 02 . 01	Retribusi Jasa Umum	3.469.877.000.00	1.791.340.500.00	1.891.655.568.00	2.024.071.457.76	2.165.756.459.80	-6%
4 . 1 . 02 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.289.925.000.00	1.611.388.500.00	1.701.626.256.00	1.820.740.093.92	1.948.191.900.49	-6%
4 . 1 . 02 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Pasar	179.952.000.00	179.952.000.00	190.029.312.00	203.331.363.84	217.564.559.31	-11%
4 . 1 . 02 . 02	Retribusi Jasa Usaha	115.000.000.00	115.000.000.00	121.440.000.00	129.940.800.00	139.036.656.00	2%
4 . 1 . 02 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000.00	10.000.000.00	10.560.000.00	11.299.200.00	12.090.144.00	15%
4 . 1 . 02 . 02 . 03	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000.00	100.000.000.00	105.600.000.00	112.992.000.00	120.901.440.00	-23%
4 . 1 . 02 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	-	-	-	20%
4 . 1 . 02 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000.00	5.000.000.00	5.280.000.00	5.649.600.00	6.045.072.00	0%

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
4 . 1 . 02 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 1 . 02 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 1 . 03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**352.465.370.00**	**371.756.013.00**	**392.574.349.73**	**420.054.554.21**	**449.458.373.00**	**-2%**
4 . 1 . 03 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	352.465.370.00	371.756.013.00	392.574.349.73	420.054.554.21	449.458.373.00	**-2%**
4 . 1 . 03 . 01 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	352.465.370.00	371.756.013.00	392.574.349.73	420.054.554.21	449.458.373.00	**-2%**
4 . 1 . 04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**6.540.635.412.00**	**2.034.696.507.00**	**2.148.639.511.39**	**2.299.044.277.19**	**2.459.977.376.59**	**4%**
4 . 1 . 04 . 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	236.916.000.00	236.916.000.00	250.183.296.00	267.696.126.72	286.434.855.59	9%
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin						20%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan						20%
4 . 1 . 04 . 03 . 01	Hasil Sewa BMD	96.516.000.00	96.516.000.00	101.920.896.00	109.055.358.72	116.689.233.83	-4%
4 . 1 . 04 . 03 . 02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	140.400.000.00	140.400.000.00	148.262.400.00	158.640.768.00	169.745.621.76	0%
4 . 1 . 04 . 05	Jasa Giro	1.047.780.507.00	797.780.507.00	842.456.215.39	901.428.150.47	964.528.121.00	-7%
4 . 1 . 04 . 05 . 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	990.000.000.00	740.000.000.00	781.440.000.00	836.140.800.00	894.670.656.00	-7%
4 . 1 . 04 . 05 . 02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	57.780.507.00	57.780.507.00	61.016.215.39	65.287.350.47	69.857.465.00	-60%
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS						20%
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP						20%
4 . 1 . 04 . 07	Pendapatan Bunga	2.208.630.232.00	1.000.000.000.00	1.056.000.000.00	1.129.920.000.00	1.209.014.400.00	9%
4 . 1 . 04 . 07 . 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.208.630.232.00	1.000.000.000.00	1.056.000.000.00	1.129.920.000.00	1.209.014.400.00	9%

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
4 . 1 . 04 . 08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.305.058.575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134%
4 . 1 . 04 . 08 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.305.058.575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134%
4 . 1 . 04 . 09	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	2.152.257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40%
4 . 1 . 04 . 09 . 01	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	2.152.257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40%
4 . 1 . 04 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	361.680.579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1001%
4 . 1 . 04 . 11 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	361.680.579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1001%
4 . 1 . 04 . 12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.274.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16%
4 . 1 . 04 . 12 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	623.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 1 . 04 . 12 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.641.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29%
4 . 1 . 04 . 12 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 1 . 04 . 12 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40%
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)						20%
4 . 1 . 04 . 15	Pendapatan dari Pengembalian	376.143.247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4 . 1 . 04 . 15 . 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.174.509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143%
4 . 1 . 04 . 15 . 04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	307.673.738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6%
4 . 1 . 04 . 15 . 07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	18.295.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51%
4 . 1 . 04 . 18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada	3.943.700.804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)						
4 . 1 . 04 . 18 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.943.700.804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**534.120.639.421.00**	**524.645.612.582.00**	**554.025.766.886.59**	**592.807.570.568.65**	**634.304.100.508.46**	**-2%**
4 . 2 . 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	508.526.945.509.00	514.424.489.789.00	543.232.261.217.18	581.258.519.502.39	621.946.615.867.55	-2%
4 . 2 . 01 . 01	Dana Perimbangan	443.656.419.509.00	439.553.963.789.00	464.168.985.761.18	496.660.814.764.47	531.427.071.797.98	-2%
4 . 2 . 01 . 01 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	40.256.867.000.00	41.031.366.789.00	43.329.123.329.18	46.362.161.962.23	49.607.513.299.58	-15%
4 . 2 . 01 . 01 . 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	328.243.271.281.00	328.616.753.000.00	347.019.291.168.00	371.310.641.549.76	397.302.386.458.24	-3%
4 . 2 . 01 . 01 . 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.151.940.000.00	38.151.940.000.00	40.288.448.640.00	43.108.640.044.80	46.126.244.847.94	8%
4 . 2 . 01 . 01 . 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	37.004.341.228.00	31.753.904.000.00	33.532.122.624.00	35.879.371.207.68	38.390.927.192.22	-3%
4 . 2 . 01 . 02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.442.219.000.00	16.442.219.000.00	17.362.983.264.00	18.578.392.092.48	19.878.879.538.95	-27%
4 . 2 . 01 . 02 . 01	DID	6.442.219.000.00	16.442.219.000.00	17.362.983.264.00	18.578.392.092.48	19.878.879.538.95	-27%
4 . 2 . 01 . 05	Dana Desa	58.428.307.000.00	58.428.307.000.00	61.700.292.192.00	66.019.312.645.44	70.640.664.530.62	0%
4 . 2 . 01 . 05 . 01	Dana Desa	58.428.307.000.00	58.428.307.000.00	61.700.292.192.00	66.019.312.645.44	70.640.664.530.62	0%
4 . 2 . 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.593.693.912.00	10.221.122.793.00	10.793.505.669.41	11.549.051.066.27	12.357.484.640.91	3%
4 . 2 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	25.593.693.912.00	10.221.122.793.00	10.793.505.669.41	11.549.051.066.27	12.357.484.640.91	-4%
4 . 2 . 02 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.593.693.912.00	10.221.122.793.00	10.793.505.669.41	11.549.051.066.27	12.357.484.640.91	-4%
4 . 2 . 02 . 02	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 2 . 02 . 02 . 02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.865.626.515.00**	**13.937.424.671.00**	**14.717.920.452.58**	**15.748.174.884.26**	**16.850.547.126.15**	**-41%**
4 . 3 . 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.865.626.515.00	13.937.424.671.00	14.717.920.452.58	15.748.174.884.26	16.850.547.126.15	-41%

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
4 . 3 . 03 . 01	Lain-lain Pendapatan	3.865.626.515.00	13.937.424.671.00	14.717.920.452.58	15.748.174.884.26	16.850.547.126.15	-41%
4 . 3 . 03 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0.00	10.343.530.000.00	10.922.767.680.00	11.687.361.417.60	12.505.476.716.83	17%
4 . 3 . 03 . 01 . 02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.865.626.515.00	3.593.894.671.00	3.795.152.772.58	4.060.813.466.66	4.345.070.409.32	12%
5	**BELANJA DAERAH**	**629.290.957.789.00**	**547.920.916.920.00**	**578.604.488.267.52**	**619.106.802.446.25**	**662.444.278.617.48**	**-1%**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**448.973.839.726.00**	**375.059.577.839.00**	**396.062.914.197.98**	**423.787.318.191.84**	**453.452.430.465.27**	**-3%**
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	227.933.033.727.00	194.830.086.733.00	205.740.571.590.05	220.142.411.601.35	235.552.380.413.45	-3%
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	200.693.795.726.00	171.373.102.557.00	180.969.996.300.19	193.637.896.041.21	207.192.548.764.09	-3%
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	16.649.673.768.00	4.302.571.434.00	4.543.515.434.30	4.861.561.514.71	5.201.870.820.73	-21%
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	3.697.336.505.00	4.553.817.115.00	4.808.830.873.44	5.145.449.034.58	5.505.630.467.00	1%
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**73.747.933.619.00**	**71.574.758.473.00**	**75.582.944.947.49**	**80.873.751.093.81**	**86.534.913.670.38**	**5%**
5 . 2 . 01	Belanja Modal Tanah	612.000.000.00	100.000.000.00	105.600.000.00	112.992.000.00	120.901.440.00	28%
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.917.370.828.00	18.136.492.202.00	19.152.135.765.31	20.492.785.268.88	21.927.280.237.71	8%
5 . 2 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.873.589.828.00	12.692.446.590.00	13.403.223.599.04	14.341.449.250.97	15.345.350.698.54	11%
5 . 2 . 04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	37.392.918.362.00	39.831.768.891.00	42.062.347.948.90	45.006.712.305.32	48.157.182.166.69	-3%
5 . 2 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	952.054.601.00	814.050.790.00	859.637.634.24	919.812.268.64	984.199.127.44	-5%
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.566.197.324.00**	**2.918.918.408.00**	**3.082.377.838.85**	**3.298.144.287.57**	**3.529.014.387.70**	**4%**
5 . 3 . 01	**Belanja Tidak Terduga**	**7.566.197.324.00**	**2.918.918.408.00**	**3.082.377.838.85**	**3.298.144.287.57**	**3.529.014.387.70**	**4%**
5 . 3 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	7.566.197.324.00	2.918.918.408.00	3.082.377.838.85	3.298.144.287.57	3.529.014.387.70	4%
5 . 3 . 01 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	7.566.197.324.00	2.918.918.408.00	3.082.377.838.85	3.298.144.287.57	3.529.014.387.70	4%
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**99.002.987.120.00**	**98.367.662.200.00**	**103.876.251.283.20**	**111.147.588.873.02**	**118.927.920.094.14**	**-1%**
5 . 4 . 01	**Belanja Bagi Hasil**	**630.324.920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	22%
5 . 4 . 01 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	630.324.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22%

KODE REKENING	U R A I A N	2022	2023	2024	2025	2026	Rata rata
5 . 4 . 01 . 01 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	630.324.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22%
5 . 4 . 02	**Belanja Bantuan Keuangan**	**98.372.662.200.00**	**98.367.662.200.00**	**103.876.251.283.20**	**111.147.588.873.02**	**118.927.920.094.14**	**-1%**
5 . 4 . 02 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.372.662.200	98.367.662.200	103.876.251.283	111.147.588.873	118.927.920.094	**-1%**
5 . 4 . 02 . 05 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.372.662.200	98.367.662.200	103.876.251.283.20	111.147.588.873.02	118.927.920.094.14	**-1%**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(75.213.666.960.0)**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-11%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**83.745.666.960.00**	**20.000.000.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-2%
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.745.666.960.00	20.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	-2%
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**8.500.000.000.00**	**7.500.000.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37%**
6 . 2 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00	0.00	0.00	0.00	35%
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
	PEMBIAYAAN NETTO	**75.245.666.960**	**12.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**6%**

Sumber: BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2022

Tabel 3.15 (T-C-9)
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
A	**Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan**	**637.822.957.789.00**	**567.920.916.920.00**	**578.604.488.267.52**	**619.106.802.446.25**	**662.444.278.617.48**
	Pendapatan	554.077.290.829.00	547.920.916.920.00	578.604.488.267.52	619.106.802.446.25	662.444.278.617.48
	Penerimaan Pembiayaan	83.745.666.960.00	20.000.000.000.00	0	0	0
	Dikurangi:					
B	**Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**	**502.374.763.072.00**	**437.777.947.763.00**	**462.293.512.837.73**	**494.654.058.736.37**	**529.279.842.847.92**
	Belanja pegawai	227.933.033.727.00	194.830.086.733.00	205.740.571.590.05	220.142.411.601.35	235.552.380.413.45
	Belanja Barang dan Jasa	200.693.795.726.00	171.373.102.557.00	180.969.996.300.19	193.637.896.041.21	207.192.548.764.09
	Belanja Modal	73.747.933.619.00	71.574.758.473.00	75.582.944.947.49	80.873.751.093.81	86.534.913.670.38
C	**Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)**	**135.448.194.717.00**	**130.142.969.157.00**	**116.310.975.429.79**	**124.452.743.709.88**	**133.164.435.769.57**

Tabel 3.16 (T-C-10)

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	135.448.194.717.00	130.142.969.157.00	116.310.975.429.79	124.452.743.709.88	133.164.435.769.57
2	Prioritas I					
3	Prioritas II					

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diidentifikasi 8 (delapan) permasalahan utama pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu : (1) Penanggulangan Kemiskinan yang belum optimal, (2) pengembangan potensi unggulan yang belum optimal, (3) Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, (4) Belum Optimal Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, (5) Belum Meratanya pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan, (6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; (7) Masih rendahnya pengendalian pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, (8) Kondusif dan kerukunan antar umat beragama masih perlu kewaspadaan untuk dipertahankan yang dijabarkan di bawah ini.

4.1.1 Permasalahan Utama

1. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dari berbagai aspek sosial ekonomi. Salah satunya adalah dengan melihat potret kemiskinan. Selama 5 tahun terakhir (2017- 2021) program pembangunan ekonomi terus didorong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun upaya tersebut belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten ini secara optimal. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dalam 5 tahun terakhir penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih tetap berada pada posisi peringkat 15 dari 15 Kabupaten/Kota.

Perbandingan antar kabupaten/kota menunjukkan disparitas yang besar. Ketimpangan tersebut terjadi akibat tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu mencapai 12,85 persen.

Adanya variasi tingkat kemiskinan antar daerah menunjukkan bahwa tidak ada strategi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan kemiskinan mau tidak mau harus disesuaikan dengan tantangan spesifik di setiap kabupaten/kota. Disparitas kemiskinan antar daerah bukan hanya terjadi dalam angka, tetapi juga dalam hal tantangan yang dihadapi. Daerah miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga masih dijumpai di Kabupaten ini. Persentase penduduk miskin tahun 2021 disajikan dalam **Gambar 4.1** berikut:

Gambar 4.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

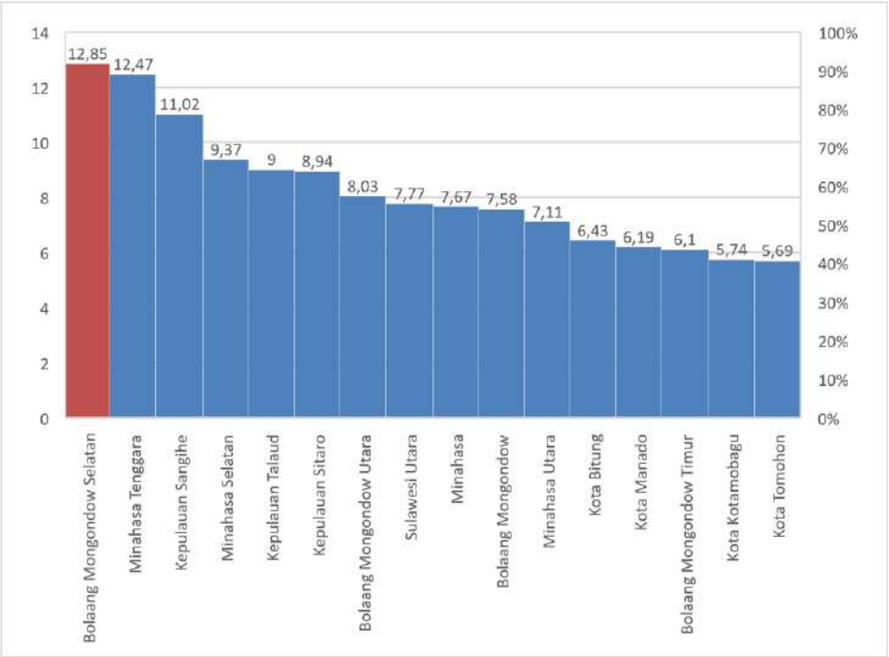

Sumber: BPS Provinsi Sulut

Di tahun 2021 angka PMKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan sebesar 17,15% dibanding dengan di tahun 2020 yaitu dari sebesar 15.323 turun menjadi 12.695. perkembangan PMKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Gambar 4.2

Perkembangan PMKS 2016-2021

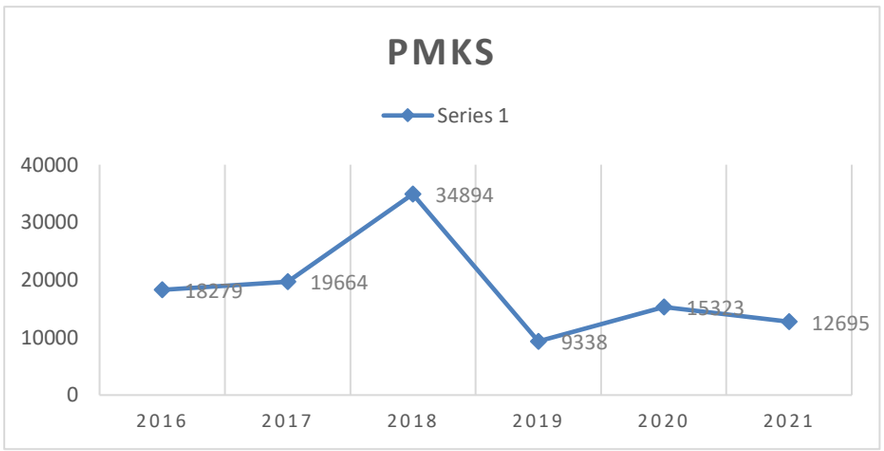

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow Selatan,2022

Dari kondisi di atas, pemerintah daerah perlu melakukan penguatan berbagai upaya yang telah berjalan selama ini dan lebih dari itu diperlukan upaya khusus untuk menurunkan angka kemiskinan. Ditambah lagi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per september tahun 2022 yang akan memicu kenaikan inflasi dan meningkatkan kemiskinan tak kecuali di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, secara progresif pemerintah daerah harus mengoptimalkan dan mensinergikan berbagai kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan sistem pemantauan terpadu terhadap berbagai program tersebut dengan target pencapaian output yang terukur, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dalam implementasi kebijakan/program.

Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow juga terbaca **naiknya** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021. Perkembangan TPT di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bergerak berfluktuatif selama periode 2016-2021. Tahun 2021 terjadi kenaikan TPT dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 1.292 jiwa yang belum terserap dipasar kerja. Peningkatan TPT lebih karena meningkatnya jumlah usia kerja (15 tahun) serta banyak lulusan Sekolah Dasar sederajat serta SMA sederajat yang belum terserap lapangan pekerjaan.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, kondisi TPT Kabupaten Bolaang Momgondow Selatan berada di peringkat 13 tertinggi se Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan perlu keseriusan dalam mengurangi pengangguran dengan membuka banyak pelatihan melalui program yang mampu mengakselerasi penurunan angka TPT.

Tabel 4.1
Perkembangan TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	TPT					TPAK				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	4.88	3.58	4.18	4.87	4.85	64.10	64.77	62.84	64.01	62.06
Minahasa	6.91	7.35	5.58	6.30	6.14	60.83	66.11	63.33	62.34	59.41
Kepulauan Sangihe	5.11	3.71	4.01	4.91	4.72	64.46	63.37	62.27	64.56	63.60
Kepulauan Talaud	3.50	2.23	2.68	2.64	2.30	68.32	67.88	71.20	80.97	79.19
Minahasa Selatan	7.38	5.93	4.06	5.01	4.90	62.42	64.76	70.22	67.09	63.04
Minahasa Utara	9.48	6.72	4.84	7.88	8.12	60.85	60.16	62.38	61.64	61.99
Bolaang Mongondow Utara	4.71	5.08	4.42	5.48	5.23	61.68	59.38	64.12	64.75	64.43
Kepulauan Sitaro	2.86	2.82	2.65	3.31	3.39	56.65	65.99	63.47	65.14	63.09
Minahasa Tenggara	5.72	4.82	3.03	3.31	3.39	60.90	62.06	67.58	64.34	64.87
Bolaang Mongondow Selatan	6.34	4.54	4.59	4.39	4.60	61.52	61.20	58.84	63.51	59.05
Bolaang Mongondow Timur	7.32	8.18	6.07	6.13	5.99	59.58	64.11	66.82	66.94	65.07
Kota Manado	9.35	10.38	10.12	13.88	12.17	59.03	59.55	62.63	58.63	59.08
Kota Bitung	9.85	11.21	9.49	10.23	9.96	56.55	62.85	61.88	61.73	62.22
Kota Tomohon	8.94	8.22	7.48	8.99	8.84	61.66	60.69	62.68	59.59	57.90
Kota Kotamobagu	5.71	5.73	5.62	7.44	7.32	57.96	64.87	63.50	66.48	64.77
Sulawesi Utara	7.18	6.86	6.01	7.37	7.06	60.85	63.01	63.94	63.42	62.15

Sumber: BPS Sulut

2. Pengembangan Potensi Unggulan Belum Optimal

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Bolaang Mongondow Selatan dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata sekitar 38,14 persen perekonomian disumbang oleh lapangan usaha ini. Hal ini juga di dukung kondisi geografis Bolaang Mongondow Selatan yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan menjadikan lapangan usaha ini sebagai sumber pendapatan terbesar masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.

PDRB Perkpita adalah salah satu indikator untuk mengukur pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Berdasarkan BPS Provinsi Sulut tahun 2022, PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 mengalami kenaikan namun dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, Bolaang Mongondow Selatan berada pada Peringkat ke 14 yang diikuti oleh Kabuapten Talaud, sebagaimana disajikan dalam **Tabel 4.2** Berikut:

Tabel 4.2
PDRB Perkapita atas Dasar harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita atas Dasar harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	27127091.68	29573605.68	32589983.00	33803941.74	35812240.86
Minahasa	43231747.14	46618205.36	50475838.42	50227622.15	53401847.35
Kepulauan Sangihe	28070561.34	30051865.60	32312838.24	31532430.54	34354080.84
Kepulauan Talaud	21171436.21	22368834.85	24050651.49	24009445.51	25497999.79
Minahasa Selatan	35306689.18	37942739.10	41058836.28	37238583.06	40133976.36
Minahasa Utara	56967771.89	62394205.27	68401954.19	64039257.39	69243397.69
Bolaang Mongondow Utara	26815885.23	28763647.35	31135324.48	31039754.05	32574297.15
Kepulauan Sitaro	29569477.48	32617244.36	35460462.18	34116169.81	36417142.29
Minahasa Tenggara	41295857.87	44336431.69	48138435.69	44899615.69	48032738.95
Bolaang Mongondow Selatan	26917589.86	29183079.84	31713225.71	30951108.54	32559550.55
Bolaang Mongondow Timur	34309530.09	36745633.77	40066657.41	35154348.61	36086475.98
Kota Manado	72330266.16	79189663.66	86699325.56	81089250.81	87235510.43
Kota Bitung	66299823.75	70295101.44	74898782.83	76091584.11	82216200.61
Kota Tomohon	34646976.02	37236186.30	40388644.32	43477867.64	45478195.36
Kota Kotamobagu	24105201.14	26423968.94	28875597.86	30694107.61	32394796.46
Sulawesi Utara	44744201.14	48105405.25	52173022.80	50521126.89	54043183.60

Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2022

3. Masih Rendahnya Daya Saing dan Kualitas SDM

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempati posisi terakhir dalam pencapaian pembangunan manusia di Sulawesi Utara dengan nilai IPM sebesar 65,42. Walaupun masih di posisi yang sama dengan tahun lalu, namun pertumbuhan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup tinggi dan sudah masuk kategori IPM "Sedang".

Namun Tidak berhenti sampai disitu saja, pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan agar mampu mendekati capaian wilayah lainnya. Karena faktanya jika dibandingkan dengan IPM se-Provinsi Sulawesi Utara, IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada peringkat 15 dari 15 Kab/Kota seperti tergambar dalam **Gambar 4.3.**

Gambar 4.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

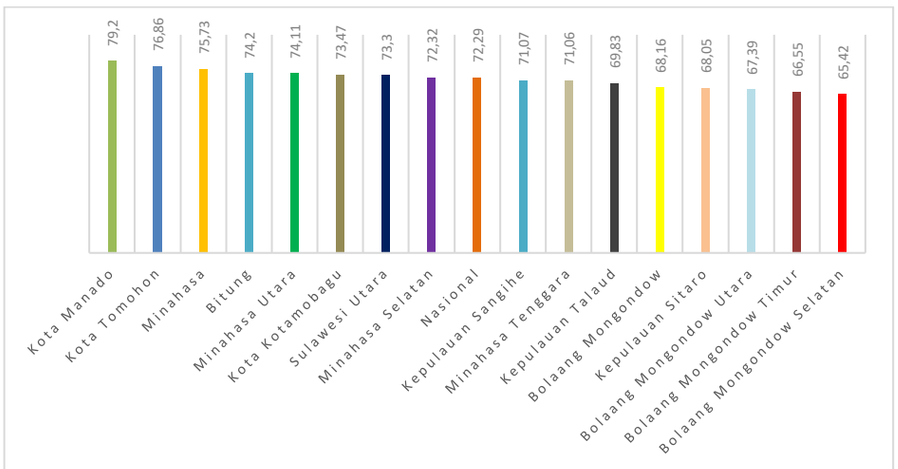

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Kondisi ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas pemerintah ketika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dihadapkan ketimpangan antar dimensi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana terlihat di bawah ini.

Dimensi Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah pengetahuan, dan yang menjadi alat ukur pengetahuan ini salah satunya dalah rata-rata lama sekolah, berdasarkan rilis BPS angka rata-rata lama sekolah Bolaang Mongondow Selatan adalah 8,15, yang artinya penduduk Bolaang Mongondow Selatan yang berusia 15 tahun keatas berpendidikan rata-rata kelas 2 SMP.

Dengan angka ini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di angka 13 dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

Dimensi Umur Harapan Hidup

Kualitas kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pembentuk IPM diukur menggunakan Angka Harapan Hidup, tahun 2021 angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 64,49 dan berada di peringkat 15 dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Kasus kematian bayi tercatat 3 kasus kematian sepanjang tahun 2021, dengan intervensi lebih dalam penegahakan kematian bayi ini diharapkan umur harapan hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat meningkat.

Dimensi Rata-Rata pengeluaran Per Kapita

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah rata-rata pengeluaran per Kapita berdasarkan rilis BPS, rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 adalah sebesar 8.939.000, dengan angka ini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada di urutan ke 13 dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

4. Belum Meratanya pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sampai dengan saat ini dikategorikan dalam kondisi cukup baik meskipun dibeberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Proforsi kondisi jalan dalam konidis rusak berat masih relatif tinggi, tahun 2021, 26,08 persen atau sepanjang 149,986 km; sementara dari 576 km jalan yang menjdi kewenagan kabupaten hanya 262,245 km merupakan jalan beraspal selebihnya permukaan terdiri dari kerikil dan tanah. Perbaikan kondisi jalan perlu dilakukan terutama jalan dengan kondisi rusak berat.

Infrastruktur dasar liannya yang menjadi pemasalahan adalah 39,81 persen penduduk belum mampu mengakses air minum bersih, 54,1 persen rumah tangga belum mampu mengakses sanitasi layak, 27,32 persen penduduk yang belum memiliki kategori belum layak huni, atau sebanyak 5.360 rumah tinggal belum layak untuk dihuni dan Lingkungan kumuh yang masih tingggi, saat ini 19,17 masih dalam kawasan kumuh;

Pembangunan komunikasi dan informasi belum merata di seluruh desa, kecamatan, tuntutan pada keterbukaan informasi, Penerapan *e-government* di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Belum terbangunnya data center; Konsolidasi distribusi *bandwitch* di lingkungan

Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi isu strategis yang segera dapat diselesaikan dalam pembangunan 2021-2026.

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussines prosess*) dan sumber daya aparatur. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah sebesar 53,20 poin dengan kategori CC. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
	Pemenuhan	20,00	11,71	10,04
	Hasil Antara Area Perubahan	20,00	3,57	4,10
	Reform	30,00	9,48	10,02
B	Total Komponen Pengungkit	60,00	24,75	24,16
	Komponen Hasil	10,00	7,34	7,48
	Akuntabilitas Pelayanan Publik	10,00	7,63	8,89
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,69	8,90
	Kinerja Organisasi	10,00	5,40	3,77
	Total Komponen Hasil	40,00	26,97	29,04
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	51,72	53,20

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020, KemenPAN & RB

Indeks RB Kab. Bolsel pada tahun 2021 adalah 53,20 dengan kategori **CC** artinya nilai ini masuk kategori cukup (memadai), namun masih perlu perbaikan yang tidak mendasar. Indeks RB ini masih dibawah Indeks RB Prov Sulut dengan kategori **B**

Komponen Hasil	Skala	2020
Opini BPK	0-100	WTP
Nilai SAKIP	0-100	64,05
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	88,90
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	88,98
Survei Internal Organisasi	0-100	83,84

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021, KemenPAN & RB

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah nilai ini masuk kategori cukup (memadai), namun masih perlu perbaikan yang tidak mendasar. Meskipun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah mulai dikoordinasikan dengan baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), namun belum secara komprehensif menyentuh seluruh Perangkat Daerah (PD). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja reformasi birokrasi yang belum fokus dan selaras antara tingkat Pemda dan PD. Dari **Tabel 4.3** terlihat komponen pengungkit yang sangat rendah pada komponen area perubahan dengan skor 4.10 poin sehingga hal ini perlu menjadi fokus pemerintah Kabupaten Boloang Mongondow Selatan. Sementara tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh nilai 64,05 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi

penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah Baik.

Dari sisi pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi Kemen PAN RB tahun 2021 kualitas pelayanan publik pada PD belum merata dilaksanakan seluruh PD seperti pada pemanfaataan inovasi budaya pelayanan prima, selain itu inovasi yang dibangun pada PD belum sepenuhnya berdasarkan pada permasalahan yang ada dan belum sesuai dengan kebutuhan dan stakeholder atau masyarakat penggunan layanan; sehinggga inovasi yang dilakukan belum terlihat memberikan dampak bagi pelayanan publik. Hasil survei kepuasan masyarakat belum dijadikan acuan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik pada masyarakat.

6. Masih rendahnya pengendalian pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.

Kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2018 bervariasi sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2018, BPBD mencatat ada 1 kejadian Bencana Alam yang terjadi dan tidak menelan korban jiwa. Banjir bandang yang kembali menerjang wilayah Bolaang Mongondow Selatan terjadi pada agustus 2020. Banjir ini menghanyutkan sedikitnya 29 unit rumah. Selain itu, sebanyak 64 rumah dan dua jembatan rusak berat. Penyebabnya sampai saat ini masih dalam proses analisis, dari sisi curah hujan mencapai 198 mm/hari (sangat lebat) kapasitas pengaliran sangat kecil, tanah jenuh air, debit puncak cepat tercapai, sehingga tidak mampu ditampung badan sungai. Topografi dominan curam/sangar curam, jarak antara hulu dan hilir relatif pendek, bentuk DAS memanjang memiliki karakteristik debit puncak datang cepat dan penurunan cepat.

Melihat kondisi ini, penguatan kapasitas adaptasi dari perubahan iklim di desa menjadi hal yang krusial dan mendesak. Upaya menekan dampak bencana terkait iklim pendekatan berbasis masyarakat pada tingkat desa perlu diterapkan secara maksimal sebagai aksi yang masif dan sistematis. Untuk itu ke depan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menbagun *resilience* desa dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Desa sebagai garda terdepan dalam merespons ancaman dan dampak dari bencana iklim, dan membuka peluang terwujudnya desa yang tangguh, selain tentunya sebagai pihak yang selama ini menjadi korban dari *climate disaster/climate catastroph*.

Bencana banjir juga masih terjadi hinggga tahun 2021, selama 2021 terjadi 14 bencana banjir yang melanda 4 kecamatan diantaranya Bolaang Uki, Pinolosian, Pinolosian Tengah dan kecamatan Pinolosian Timur. Data

BPS Prov. Sulut jumlah penduduk yang berdampak dan mengungsi akibat kejadian banjir sebanyak 8.540 jiwa pada tahun 2021.

Gambar 4.4
Urgensi Pembangunan Berketahanan Iklim

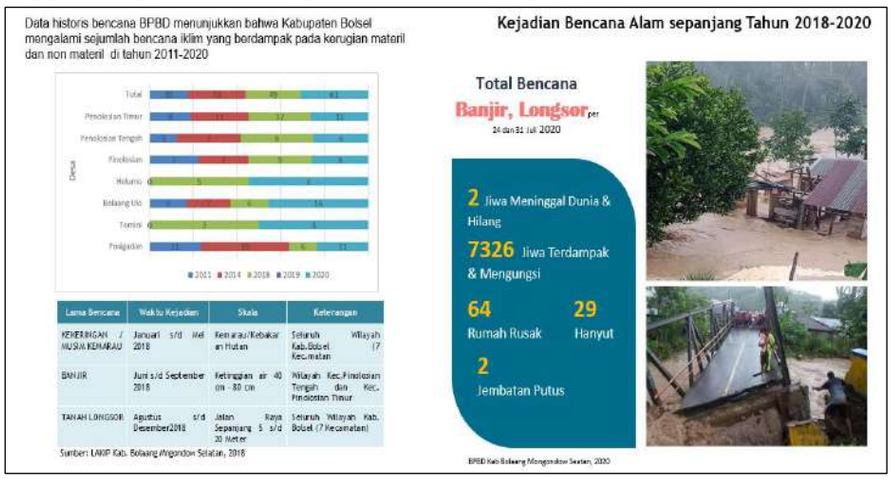

Lama Bencana	Waktu Kejadian	Skala	Keterangan
KEKERINGAN / MUSIM KEMARAU	Januari s/d Mei 2018	Kemarau/Kebakaran Hutan	Seluruh Wilayah Kab.Bolsel (7 Kec.meten
BANJIR	Juni s/d September 2018	Ketinggian air 40 cm - 80 cm	Wilayah Kec.Pinolosian Tengah dan Kec. Pinolosian Timur
TANAH LONGSOR	Agustus s/d Desember2018	Jalan Raya Sepanjang 5 s/d 20 Meter	Seluruh Wilayah Kab. Bolsel (7 Kecamatan)

Sumber: LAKIP Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2018

7. Kondusif dan kerukunan antar umat beragama masih perlu kewaspadaan untuk dipertahankan

Daerah yang kondusif adalah daerah yang mampu mengendalikan dan memitigasi potensi gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat. Kondisi daerah yang kondusif sangat vital sebagai prakondisi ketenangan proses ekonomi dan sosial. Daerah yang rentan stabilitasnya akan sulit menarik investor, akibatnya akan mengurangi potensi sumber daya modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan juga berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, sehingga mengganggu produktivitas masyarakat.

Bencana merupakan salah satu jenis gangguan yang membuat daerah tidak kondusif untuk beragam aktivitas masyarakat. Bencana mencakup jenis bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Bolaang Mongondow Selatan adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Bencana sosial merujuk pada kejadian yang berisiko menimbulkan korban karena tindak kejahatan (pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual dsb). Bencana sosial dapat disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, SARA. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat

Konduksivitas wilayah dilihat salah satunya adalah komflik social yang terukur dari Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan (Pencurian, Penganiayaan, Pelecehan Seksual dsb). Data BPS Sulut 2021 menunjukan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan

(Pencurian, Penganiayaan, Pelecehan seksual) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

- Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan (pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual dsb) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara sebesar 0,59 dengan peringkat 8 dari kab/kota dan hampir mendekati Sulawesi Utara;
- persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan (pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual dsb) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara sebesar 0,67 persen, dengan peringkat 8 dari kab/kota dan hampir mendekati Sulawesi Utara;
- persentase penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan (pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual dsb) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara Sebesar 0,50, Dengan Peringkat 6 Dari Kab/Kota Dan Hampir Mendekati Sulawesi Utara.

Tabel 4.4.

Perbandingan Penduduk Korban Kejahatan se Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan (Pencurian, Penganiayaan, Pelecehan Seksual dsb) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Persen)		
	2018	2020	2021
Bolaang Mongondow	1.12	0.40	0.29
Minahasa	1.64	0.88	0.50
Kepulauan Sangihe	0.85	0.40	0.15
Kepulauan Talaud	1.41	0.44	0.90
Minahasa Selatan	0.76	1.12	0.55
Minahasa Utara	1.15	0.62	0.32
Bolaang Mongondow Utara	0.63	0.41	0.79
Kepulauan Sitaro	0.82	0.26	0.21
Minahasa Tenggara	1.83	1.00	0.25
Bolaang Mongondow Selatan	0.77	0.38	0.59
Bolaang Mongondow Timur	0.92	1.15	0.37
Kota Manado	1.21	1.05	0.77
Kota Bitung	1.84	0.87	1.53
Kota Tomohon	1.64	1.28	0.80
Kota Kotamobagu	0.61	0.39	1.10
Sulawesi Utara	1.23	0.78	0.63

Sumber: BPS Sulut

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan utama pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah masih rendahnya mutu pendidikan, belum meratanya akses pendidikan, belum optimalnya tata kelola pendidikan serta angka kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, dan pengawas yang rendah. Meskipun setiap tahunnya terjadi peningkatan Indeks Pendidikan namun faktanya permasalahan bidang pendidikan masih menjadi prioritas pemerintahan pada periode ini. Adapun permasalahan bidang pendidikan secara rinci bidang pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

a. Belum meratanya distribusi guru, khususnya daerah terpencil;
b. Rendahnya jumlah tenaga pendidik untuk PAUD;
c. Masih terdapat 9,6 persen penduduk pada kelompok umur 6-12 tahun (APS 7-12 tahun) tidak bersekolah dan 3,6 persen penduduk yang usia 13-15 tahun (APS 13-15);
d. Rendahnya APM baik untuk SD/MI/Sederajat maupun SMP/MTs/sederajat
e. Belum maksimalnya sinkronisasi data kependidikan dengan data kependudukan;
f. Rendahnya rata-rata lama sekolah;
g. Masih tingginya anak sekolah (SD/SMP) yang memilih bersekolah di luar Kab Bolsel;
h. Akses jaringan komunikasi untuk transaksi dapodik dan pelaksanaan ujian; dan
i. Masih terbatasnya ketersediaan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana dan prasarana, koleksi, SDM dan aspek perpustakaan lainnya.

2. Bidang Kesehatan

a. Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
b. Masih adanya kasus kematian bayi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hal ini berdampak secara langsung pada capaian Angka Harapan Hidup;
c. Layanan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan Kesehatan belum mencapai target;
d. Masih tingginya balita yang berstatus gizi buruk;

e. Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di masyarakat;
f. Belum tingginya kepedulian masyarakat dalam vaksinasi Covid 19;
g. Masih adanya tenaga Kesehatan yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
h. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, saat ini hanya 5 puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dari 8 puskesmas;
i. Masih terbatasnya pemenuhan dokter spesialis, Rasio Dokter spesialis terhadap jumlah penduduk saat ini adalah 8/72000 penduduk tahun 2021;
j. Tidak tersedianya rumah sakit di Kabupaten dengan pelayanan kesehatan jiwa, hal ini menyebabkan akses untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan masalah gangguan jiwa mendapat kendala karena pasien yang ada harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Manado.
k. Rendahnya cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) dan desa UCI (Universal Child Immunization). cakupan desa UCI masih rendah tahun 2021 hanya 31 desa dari 81 desa
l. Sediaan Farmasi/Ketersediaan obat dan vaksin, Belum optimalnya koordinasi perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan. Perencanaan yang tidak optimal akan menyebabkan bervariasinya ketersediaan obat dan vaksin di fasyankes baik fasyankes primer maupun lanjutan. Tahun 2021 capaian sediaan Farmasi/Ketersediaan obat dan vaksin sebesar 96%;
m. Tingkat fatalitas kasus (case fatality rate) terhadap penyakit DBD masih tinggi pada tahun 2021 terdapat 26 kasus DBD;
n. Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan Lintas Sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya, tahun 2021 jumlah rumah tangga yang ber-PHBS sebesar 72,15 % atau 14.228/19.719.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi kondisi jalan dalam konidis rusak berat masih relatif tinggi, tahun 2021, 26,08 persen atau sepanjang 149,986 km; sementara dari 576 km jalan yang menjdi kewenagan kabupaten hanya 262,245 km merupakan jalan beraspal selebihnya permukaan terdiri dari kerikil dan tanah;

b. Masih rendahnya irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi dalam konidisi baik saat ini hanya 57 persen (atau 2.755 ha) dari 4.769 ha;
c. Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal, tahun 2021 cakupan layanan air minum hanya 60,19 persen. Artinya masih terdapat 39,81 persen penduduk belum mampu mengakses air minum bersih untuk kebutuhan anggota keluarga;
d. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih belum maksimal, sebanyak 54,1 persen rumah tangga belum mampu mengakses sanitasi layak;
e. Cakupan pelayanan persampahan masih belumu maksimal, Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per hari adalah sebesar 7.975,25 m^3, dari jumlah tersebut yang ditangani oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 5.662,43 m^3. Tercatat pada tahun 2021 sebanyak 29 persen dari 7.975,25 m^3 sampah belum tertangani secara maksimal.
f. Masih adanya drainase dalam kondisi buruk/rusak; dan
g. Belum adanya rencana tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

4. Bidang Perumahan dan Pemukiman

a. Pemenuhan rumah layak huni yang belum optimal, masih ditemukan sebanyak 27,32 persen penduduk yang belum memiliki kategori belum layak huni, atau sebanyak 5.360 rumah tinggal belum layak untuk dihuni;
b. Lingkungan kumuh yang masih tingggi, saat ini 19,17 masih dalam kawasan kumuh;
c. Cakupan Lingkungan yang belum sehat dan aman yang di dukung oleh PSU (Persen) saat ini masih terdapat sebesar 19,77 persen;
d. Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100 persen.

5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. Rendahnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
c. Belum optimalnya mekanisme koordinasi dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum sehingga ketaatan terhadap tata ruang serta lingkungan menjadi salah satu acuan dalam penegakan hukum;
d. Kurangnya kemampuan SDM yang berfungsi sebagai inteligen daerah

e. Kurangnya personil dalam pelaksanaan tugas pokok bidang kebencanaan;
f. Sistem koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) belum berjalan sebagaimana mestinya;
g. Sarana dan prasarana yang belum memadai terutama kelengkapan peralatan operasional di lapangan;
h. Luasnya wilayah dan intensitas bencana (banjir, longsor).

6. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 sebesar 12.695 jiwa dari 70.529 jiwa jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan atau sebesar 17,99 persen. Hal ini disebabkan oleh:

a. Masih terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di hadapi;
b. Masih terdapatnya keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan program PKH;
c. Belum optimalnya dukungan penganggaran dalam penanganan kemiskinan dalam menciptakan usaha produktif;
d. Minimnya upaya pelatihan usaha produktif bagi masyarakat PMKS sehingga mengakibatkan jumlah PMKS mandiri juga rendah, saat ini PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya hanya 45 persen;
a. Jumlah kepesertaan JKN belum mencapai 100 persen, saat ini masih ada 4,03 persen belum memiliki JKN;
b. Belum terintegrasi pola pendampingan keluarga miskin yang dilakukan oleh kabupaten; dan
c. Kualitas data PMKS yang belum optimal dan perlu peningkatan kualitas data.

4.1.2.2 Urusan Pemerintah Wajib Yang Bukan Layanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 59,04 persen tahun 2021 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi sebesar 4,6 persen. Akar permasalahan TPAK yang masih rendah, antara lain:

a. Tingkat keinginan untuk berkerja masyarakat rendah;

b. Data bidang tenaga kerja dan BPS yang belum terintegrasi sehingga menimbulkan perbedaan data terkait jumlah penduduk;
c. Lapangan kerja terbatas dan penyediaan informasi pasar kerja;
d. Kompetensi angkatan kerja rendah (SD dan SMP), hal ini dilihat kualitas pekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2021 yakni sebanyak 48,3 persen dari total 26.788 penduduk yang bekerja masih memiliki pendidikan ≤ Sekolah Dasar/SD;
e. Rendahnya upaya pendidikan dan pelatihan terhadap serapan tenaga kerja, tiap tahun hanya dilaksanakan 1 program pelatihan.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak tahun 2021 mencapai 16 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14 kasus;
b. Minimnya upaya pemberdayaan perempuan, tahun 2021 jumlah kelompok perempuan ada 10 kelompok, saat ini hanya tinggal 5 kelompok;
c. Kurangnya pelatihan keterampilan terhadap kelompok wanita sehingga tingkat keterampilan kelompok masyarakat masih rendahnya;
d. Belum tersosialisasinya PUG dengan baik kepada masyarakat;
e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait UU perlindungan anak dan perempuan.
f. Belum optimalnya penguatan indeks pemberdayaan gender (IDG);
g. Belum terakomodirnya program yang mendukung pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Perangkat Daerah terkait sangat mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) karena Kabupaten Layak Anak erat kaitannya dengan beberapa Perangkat Daerah lainnya. Masalah lain yang juga sangat berpengaruh adalah alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) maupun kegiatan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur.

3. Bidang Pangan

a. Tingkat keanekaragaman konsumsi pangan masih rendah dibandingkan dengan target nasional yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021 sebesar 74 poin
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan;
c. Logistik pangan yang belum optimal;

d. kurang optimalnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
e. Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan pangan belum optimal, ditunjukkan dengan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) masih rendah, hal ini berpengaruh terhadap prevalensi *stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

4. Bidang pertanahan

Belum optimalnya koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan luas lahan yang bersertifikat. Pada tahun 2021 luas lahan bersertifikat masih 69,25 persen, ini artinya masih terdapat 30,75 persen lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang belum memiliki sertifikat lahan.

5. Bidang Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya adaptasi, mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana;
b. Belum maksimalnya ketersediaan unit pengelolaan sampah, termasuk truk pengangkut sampah;
c. Pengelolaan sampah yang belum optimal, Tercatat pada tahun 2021 sebanyak 29 persen dari 7.975,25 m^3 sampah belum tertangani.
d. Kurang-nya tenaga pengangkut sampah (kontrak) yang mengurusi sampah pada enam kecamatan, sampai saat ini personil yang tersedia hanya di kecamatan Bolaang Uki.

6. Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP;
b. Masih adanya bayi yang belum memiliki akta kelahiran;
c. Ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM, menyebabkan administrasi kependudukan terhambat terutama dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok;
d. Kompetensi SDM masih yang masih rendah dalam hal memberikan pelayanan yang merata;
e. Tidak meratanya aksesibilitas jaringan komunikasi data dalam melakukan perekaman data kependudukan;
f. Peralatan perekaman/pencetakan yang rusak dan tidak layak operasi;
g. Logistik perekaman dan pencetakan (blangko KTP elektronik) yang masih tersentralisasi;

h. Kurangnya Pengetahuan tentang isu kependudukan;

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pembangunan desa;
b. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan desa dan dilaksanakan bersifat parsial/sektoral;
c. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan;
d. BUMDes belum berjalan secara optimal, dari 81 desa hanya 33 desa yang memiliki BUMDes;
e. Lemahnya pengelolaan profil desa sebagai bahan penyusunan perencanaan;
f. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
g. Belum optimalnya pembangunan desa diantaranya pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

a. Masih tingginya jumlah penduduk pra sejahtera;
b. Masih kurangnya kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
c. Belum adanya grand disign kependudukan dalam pemerataan penduduk dalam pencapaian keluarga sejahtera;
d. Kurangnya jumlah Penyuluh KB diwilayah dimana rasio standar untuk pembinaan Wilayah Yakni 1 PLKB Membina 2 desa sebagai lini lapangan yang harusnya ini menjadi acuan sehingga memaksimalkan jalanya program bidang keluarga berencana menjadi lebih baik sehingga dapat menurunkan TFR dab ASFR serta menekan angka unmet need di Kabupaten Bolaang Mongongondow Selatan;

9. Bidang Perhubungan

a. Masih rendahnya ketersediaan sarana transportasi umum, khususnya transportasi lokal antar kota;
b. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang disiplin berlalulintas khususnya di kawasan ibukota yang ini masih tingginya tingkat kecelakaan sebesar 7,1 persen tahun 2021;
c. Rendahnya jumlah moda transportasi umum dari dan menuju Kabupaten serta belum adanya pelayanan lokal;

d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan transportasi;
e. Masih terbatasnya/kurangnya rambu-rambu lalu lintas jalan/pengaman jalan;
f. Masih kurangnya tenaga teknis yang melakukan pengujian kelayakan transportasi darat maupun transportasi laut;
g. Belum tersediaanya alat uji kendaraan

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;
b. Belum optimalnya capaian nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
c. Belum optimalnya implementasi sistem satu data;
d. Belum terintegrasinya sistem informasi pemerintah daerah (dashboard information sistem PEMDA) perangkat daerah;
e. Belum optimalnya pemanfaatan *e-Goverment* dalam memberikan informasi pelayanan bagi masyarakat;
f. Koordinasi dan distribusi bandwitch di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih rendah;
g. Rendahnya komitmen dan *leadership* dari semua tingkatan dijajaran pemerintahan, khususnya tingkat pimpinan OPD dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim;
b. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif yaitu sebesar 85,42 persen;
c. Minimnya SDM Pengelola Koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi;
d. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum adanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil;
e. Terbatasnya kemampuan modal dan pengelolaan UMKM;
f. Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri;

g. Masih kurangnya daya saing produk UKM dalam pemasaran;
h. Masih minimnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di daerah perdesaan.

12. Bidang Penanaman Modal

a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, khususnya jaringan internet yang menimbulkan proses pelayanan tertunda;
b. Keterbatasan SDM bidang penanaman modal;
c. Masih sangat terbatasnya event/pameran produksi yang dilakukan di daerah;
d. Pelayanan penanaman Modal Belum Memenuhi Standar Target;
e. Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
f. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam mengurus Perizinan masih cukup Rendah;
g. Sarana penunjang promosi investasi belum memadai.

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih rendah hanya 54,04%;
c. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
d. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 30,95 persen;
e. Peningkatan pelatihan organisasi berupa diklat manajemen organisasi dan kewirausahaan.

14. Kebudayaan

a. Belum tersedianya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017;
b. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal yang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul; dan
c. Sistem pendokumentasian terhadap nilai budaya masih rendah.

15. Bidang Statistik

a. Belum optimalnya sistem satu data yang disebabkan masih kurangnya tim teknis yang mengelola database;

b. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola bidang statistik; dan
c. Rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral.

16. Bidang Persandian

a. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah;
b. Kurangnya dukungan anggaran yang menimbulkan kesenjangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;
c. Belum teroperasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah; dan
d. Belum tersedianya SDM bidang persandian untuk keamanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi baik aspek kepemimpinan manajerial, kompetensi teknis.

17. Bidang perpustakaan

a. Belum optimalnya sistem tata kelola perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa dalam mendukung pengentasan buta huruf, membudayakan gemar membaca serta peningkatan pengetahuan masyarakat;
b. Masih kurangnya tenaga pustakawan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dibidang perpustakaan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan;
c. Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling.

18. Bidang Kearsipan

a. Belum optimalnya sistem tata kelola kearsipan daerah dalam mendukung penataan kearsipan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mendukung pembangunan daerah;
b. Masih kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia bidang kearsipan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan.

4.1.3 Urusan Pilihan

1. **Bidang Perikanan**
   a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
   b. Masih minimnya kapasitas alat tangkap dan penguasaan teknologi alat tangkap;
   c. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan dalam pemanfaatan lokasi perairan;
   d. Pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir;
   e. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan; dan
   f. Pelabuhan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll).

2. **Bidang Pariwisata**
   a. Akses yang jauh ke lokasi wisata;
   b. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif;
   c. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya;
   d. Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
   e. Masih rendahnya kualitas SDM di bidang pariwisata
   f. Terbatasnya atraksi destinasi wisata yang menekan lama kunjungan wisatawan;
   g. Masih minimnya pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata;
   h. Pengelolaan kawasan wisata yang belum optimal; dan
   i. Masih minimnya pelaku wisatawan.

3. **Bidang Pertanian**
   a. Laju Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang terus bergerak fluktuatif serta terkesan kecil;
   b. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan nilai tambah petani;
   c. Masih lemahnya peran Lembaga petani dalam meningkatkan produktifitas;
   d. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
   e. Ketersediaan data pertanian yang belum memadai; dan
   f. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air.

4. Bidang Perdagangan

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB belum maksimal dan cenderung mengalami penurunan 2015-2019 dengan *share* 8,84 persen tahun 2015 menjadi 8,27 persen pada tahun 2020;
b. Masih terbatasnya dana untuk pengembangan sarana perdagangan
c. Permodalan yang di miliki pelaku usaha relatif terbatas;
d. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kwalitas maupun kuantitas
e. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan maupun komoditas non pangan;
f. Pemasaran produk unggulan yang belum maksimal.

5. Bidang Industri

a. Rendahnya pengembangan produk IKM;
b. Masih terbatasnya industri pengolahan dan rumah tangga;
c. Masih kurangnya pembinaan dalam pengembangan industri kecil dan rumah tangga;
d. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi;
e. Masih rendahnya share sektor industri terhadap pembentukan PDRB, data tahun 2021 kontribusi sektor ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,74 persen;
f. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
g. Sentra-sentra produksi Industri Kecil menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama.

6. Transmigrasi

a. Lokasi transmigrasi tidak termuat secara spesifik dalam RTRW, sementara rekomendasi provinsi harus terakomodir dalam RTRW;
b. Belum optimalmya perencanaan, pembangunan, pemukiman kawasan trasmigrasi.

4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah

1. Sekretaria Daerah

a. Semua OPD belum menerapkan peta proses bisnis dan peta lintas fungsi yang komprehensif yang menggambarkan alur kinerja dan keterkaitan antar unit kerja PD;

b. Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemda dan PD belum disusun secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
c. Masih rendahnya perangkat daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
d. SOP dan Standar Pelayanan perlu dievaluasi;
e. Agen perubahan yang dibentuk, pada PD, namum demikian agen-agen belum memiliki rencana perubahan yang terukur, sehingga upaya sebagai katalisator perububahan untuk mengggerakkan organisasi melakukan perubahan belum terlihat secara nyata;
f. Rencana aksi pelaksanaan RB belum sepenunhya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi;
g. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada PD belum merata dilaksanakan seluruh PD seperti pada pemanfaataan inovasi budaya pelayanan prima, selain itu inovasi yang dibangun pada PD belum sepenuhnya berdasarkan pada permasalahan yang ada dan belum sesuai dengan kebutuhan dan stakeholder atau masyarakat penggunan layanan; sehinggga inovasi yang dilakukan belum terlihat memberikan dampak bagi pelayanan publik;
h. Hasil survei kepuasan masyarakat belum dijadikan acuan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik pada masyarakat.

2. Sekretariat DPRD

a. Tingkat partisipasi konstituen dalam pembentukan Perda;
b. Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
c. Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Sekretariat DPRD;

4.1.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Bidang Perencanaan

a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
b. Pencapaian sasaran kinerja masih belum sepenuhnya didukung dengan pemilihan program dan kegiatan yang relevan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini dikarenakan evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program;

c. Penjenjangan (cascading) kinerja pada beberapa Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya komprehensif, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya, sehingga efisiensi dan efektivitas program, kegiatan, dan anggaran belum optimal;
d. Pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah belum memperhatikan adanya mekanisme *crosscutting* lintas PD. Masing-masing PD melaksanakan program dan kegiatan tiap organisasi tanpa memperhatikan aspek kolaborasi dengan PD lain;
e. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah, serta belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Hal ini cenderung disebabkan oleh indikator kinerja daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum dirumuskan dan ditata jenjang kinerjanya dengan baik;
f. Sebagai penguatan akuntabilitas kinerja telah memiliki sistem atau aplikasi monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja yakni *Simda Integratred,* Namum aplikasi belum optimal karena sepenuhnya monitoring dan evaluasi diisi oleh PD;
g. Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban secara administratif. Analisis capaian kinerja belum menggambarkan secara komprehensif penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada PD dan Pemerintah Daerah;

2. Bidang Keuangan

a. Pendataan aset yang belum tersertifikasi;
b. Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (ATISISBADA) dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
d. Belum memadainya pasokan Listrik di perkantoran mempengaruhi performa perangkat Hardware (seperti Server & Komputer PC), sehingga menyebabkan terhambatnya penerapan pelayanan system aplikasi yang saat ini dimiliki;
e. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi berkala kepada WP/WR sehingga Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan serta membayar Pajak khususnya untuk pajak yang bersifat Self assessment (Restoran, Penginapan, dll);
f. Belum ada pemutakhiran Database Wajib Pajak khususnya PBB-P2 untuk dilakukan pendataan serta penilaian massal yang berkaitan dengan ZNT dan NJOP berdasarkan kondisi terkini;

g. Belum adanya basis data WR khususnya Retribusi Pelayanan Pasar;
h. *Profiling* basis data WP masih dalam tahap pemutakhiran dan migrasi ke dalam sistem/aplikasi Simpatda;
i. Tidak optimalnya perhitungan target pendapatan Pajak PBB-P2 serta rendahnya capaian penerimaan pajak BPHTB;
j. Belum tersedianya Kartu NPWPD yang memiliki fasilitas QR-code guna mempermudah proses pembayaran Pajak Daerah;
k. Transaksi pembayaran belum terkoneksi secara online *Host to host* dengan pihak Bank sehingga data realisasi belum dapat ditampilkan secara realtime; Informasi capaian realisasi penerimaan PDRD belum dapat disajikan secara elektronik kepada masyarakat;
l. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, efisiensi dalam pengembangan informasi.

3. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Rumusan pola mekanisme hubungan dan koordinasi antar kelompok jabatan fungsional dengan JPT sebagai hasil penyederhaan birokrasi belum terlihat;
b. Penataan sistem manajemen SDM belu berjalan optimal, masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu belum sepenuhnya terinisiasi terhadap pengelolaan kinerja inidvidu, pengelolaan komptensi dan pengeloaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas aparatur;
c. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;
d. Kompetensi yang dimiliki pegawai belum sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat;
b. Belum adanya rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan. Inovasi daerah juga belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan litbang daerah.

4.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

a. Evaluasi terhadap capaian kinerja pegawai belum dilaksanakan secara berkala, dan menyeluruh serta belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*;
b. Upaya penguatan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi *whistleblowing system*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, serta penerapan SPIP berjalan berjalan secara efektif pada PD;
c. Peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* belum berjalan secara optimal, karena belum terdapat perbaikan signifikan pada penguatan integritas dan pencapaian kinerja PD;
d. Evaluasi akuntabilitas kinerja PD oleh lnspektorat masih belum mampu memicu perbaikan kualitas penerapan AKIP di PD;
e. Upaya percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara masif dan intensif pada unit kerja yang memberikan layanan utama dan strategis, sehingga belum mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.1.7 Unsur Kewilayahan

a. Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;
b. Belum optimalnya akses internet beberapa kecamatan mengakibatkan terhambatnya pelayanan dan jalur komunikasi berbasis internet dalam rangka kegiatan pelaporan;
c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan;
d. Kompetensi sumber daya aparatur yang terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.

4.1.8 Urusan Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kesadaran pendidikan politik masyarakat masih rendah;
b. Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;
c. Potensi konflik terhadap ketenteraman dan ketertiban;
d. Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan Perda masih rendah;

e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya.

4.2 ISU STRATEGIS

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Kondisi Ekonomi Global dan Regional

KETIDAKPASTIAN GLOBAL KE DEPAN. Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, diantaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa dan yang terbaru perang Rusia dan Ukraina.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara.

Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas alam terbesar kedua, dan pengekspor batu bara terbesar ketiga. Selain itu, Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global sebagai pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat dan pengekspor gandum terbesar kelima. Kedua negara ini merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara defisit seperti Asia Tenggara dimana lebih dari 37 persen impor migas ke Asia Tenggara. Secara absolut perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada Asia Tenggara.

“Dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat. Ini memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. IMF bahkan menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun 2022 dan tahun 2023 akan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen. IMF juga memprediksi inflasi negara maju tahun

2022 akan naik hingga 6,6 persen dan negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5 persen.

Perlambatan tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi yang diperkirakan melambat di sejumlah negara, seperti negara di Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan India. Perang Rusia dan Ukraina terutama berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global. Dari sisi harga komoditas, kenaikan harga yang tinggi telah terlihat utamanya pada komoditas energi dan pangan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan inflasi yang tinggi di tingkat global. Sementara itu, pada pasar keuangan, perang antara Rusia dan Ukraina juga akan berdampak pada persepsi risiko global dan tertahannya arus modal asing ke negara emerging markets.

4.2.1.2 Pasca PANDEMI COVID-19 Dan Ancaman RESESI GLOBAL.

Sejak ditetapkan sebagai pandemi Covid-19 pada tanggal 11 maret 2020 oleh Badan Kesehatan dunia, virus corona telah menyebar k eseluruh dunia. Menurut Wordometers, hingga 17 agustus 2021 lebih dari 2000 negara di dunia telah terjangkit covid-19 dengan total kasus 200,09 juta dan korban meninggal dunia sebanyak 4,39 juta jiwa.

Tak hanya berdampak pada krisis kesehatan, pandemi covid-19 juga menyebabkan perekonomian sebagaian besar perekonomian tumbuh negatif bahkan resesi. Hanya sebagian kecil negara-negara di dunia ayng masih bisa bertahan dan tumbuh ekonominya pada tahun 2020, seperi cina, vietnam dan taiwan. Sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.5
Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Aspek Sosial & Ekonomi Global

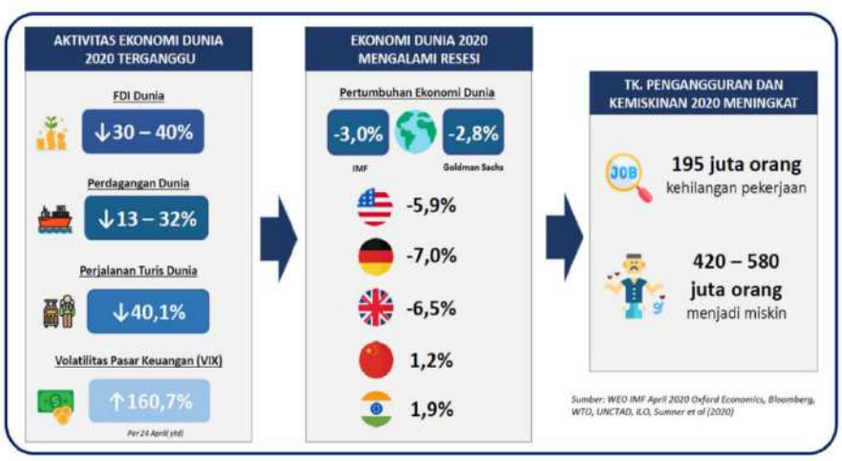

Setelah terpuruk akibat pembatasan mobilitas/wilayah untuk menekan penyebaran covid-19 tahun 2021, negara-negara di dunia berharap bisa bangkit kembali. Beragam kebijakan dikeluarkan dan kerjasama antar negara

diselenggarakan agar kinerja ekonomi bisa kembali pulih. Adapun Indonesia pada tahun 2021 mengalokasikan dana anggaran penanganan dan program pemulihan ekonomi nasiolanl (PEN) sebesar 744,75 triliun.

Berbagai lembaga internasional memproyeksikan tahun 2021 ini akan menjadi tahun pemulihan. Selain dari basis perkembangan ekonomi 2020 yang sangat rendah sehinggga menghasilkan *techinical rebound*, pemulihan pada 2021 di dukung oleh berbagai faktor seperti vaksinasi yang dilakukan secara global serta kebijakan akomodatif yang terus dijalankan.

Ekonomi dunia berhasil tumbuh tinggi selama 2021, yaitu 5,7%. Sayangnya itu hanya ditopang oleh dua negara besar, yaitu Amerika Serikat (AS) dan China. Sementara banyak negara berkembang terpuruk. Masalahnya ekonomi global yang tumbuh tinggi bertumpu pada dua negara besar yaitu AS dan China yang menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ekonomi ini berlanjut di 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 4,4%, tapi ketidakseimbangan masih berlanjut. Sementara ekonomi Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69 persen, atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya adalah kemampuan penanganan penyebaran kasus covid-19, seperti vaksinasi. Negara maju dengan sumber daya besar mampu mempercepat vaksinasi, berbeda dengan negara berkembang yang mengandalkan impor. Negara berkembang tidak punya cukup banyak dana untuk melakukan stimulus mendorong perekonomian, yang tentunya berbeda dengan negara maju. Apabila tidak ada komunikasi yang bagus, maka kebijakan ekonomi pada negara maju akan berdampak negatif terhadap sederet negara berkembang. Terutama yang belum pulih dari covid, beban utang tinggi dan alami lonjakan inflasiIndonesia ingin mengambil peran dalam kondisi ini. Sehingga dalam pertemuan G20 yang akan berlangsung di Bali tahun 2022, konsep yang diusung adalah *recover together recover stronger*.

Namum tahun 2023, global diramal akan terjadi resesi. inflasi tinggi, krisis energi dan normalisasi kebijakan suku bunga global sebagai motor resesi global. AS diperkirakan bahwa AS akan mengalami resesi ringan pada pertengahan 2023. Ekonomi AS bakal susut 1,7% tahun ini dan 0,5% pada 2023. Zona Euro akan berkontraksi sebesar 0,1% pada 2023 akibat dampak krisis gas alam, sementara pemulihan China dibatasi oleh pembatasan pandemi Covid-19 dan kemerosotan sektor properti yang berkepanjangan.

Indonesia, risiko perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh lonjakan inflasi akibat perang Ukraina dan Rusia. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut

direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat pada tahun 2022. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga mempengaruhi inflasi dan berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Namun, dampaknya baru akan terasa tahun depan. Saat itu, ketika dunia mengalami perlambatan, permintaan ekspor terhadap komoditas Indonesia pun akan menurun. Padahal pada kuartal II, pendorong kinerja ekonomi Indonesia adalah konsumsi dan ekspor.

4.2.1.3 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil diantara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara cermat dan terintegrasi.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan *Roadmap* dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Untuk menyambut hal tersebut, agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah, melalui peningkatan kualitas produksi barang dan jasa produk unggulan daerah serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal. Hal ini wajib dilakukan agar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN secara produktif dan tidak hanya menjadi masyarakat konsumtif yang menjadi target pasar negara ASEAN lainnya.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus

mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecildan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebutakan menguntungkan dari sisi pembangunan dimana banyaknya penduduk yangbekerja maka akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktifsaat ini mendominasi total populasi pendudukdi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Jika terjadi tidak ada persiapan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menyambut “Bonus Demografi” tersebut maka pada tahun 2020-2030 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hanya akan dibanjiri oleh generasi muda yang tidak memiliki kualitas dan tidak memiliki pekerjaan. Wilayah dengan angka generasi muda menganggur yang tinggi berpotensi melahirkan kabupaten yang rawan sosial, rawan ekonomi dan rawan keamanan.

4.2.2.2 *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Pemerintah Indonesia menyatakan terus berupaya untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan yang berat yaitu pandemi COVID-19. Meskipun demikian pemerintah memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai

momentum dalam mempercepat pencapaian SDG khususnya bidang pendidikan.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan diantaranya dengan membagikan kuota internet secara gratis kepada pelajar, guru dan orang tua untuk menjamin terlaksananya program pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Indonesia juga menyiapkan kurikulum 'darurat' yang digunakan secara mudah oleh pelajar dan orang tua, untuk melakukan pembelajaran di rumah. Rincian dampak pandemi COVID-19 pada pencapaian SDGs berdasarkan pilar pembangunan SDGs disajikan dalam **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5
Dampak Pandemi COVID-19pada Pencapaian
Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia

Pilar Pembangunan SDGs	Dampak COVID-19 Terhadap Pembangunan SDGs	
Pilar Pembangunan Sosial	Kelompok penduduk miskin dan rentan diprioritaskan untuk dibantu, dengan tetap memperhatikan ketahanan kelas menengah: - 42% konsumsi nasional ditopang oleh kelas menengah - 53 % pajak nasional dibayarkan oleh kelas menengah	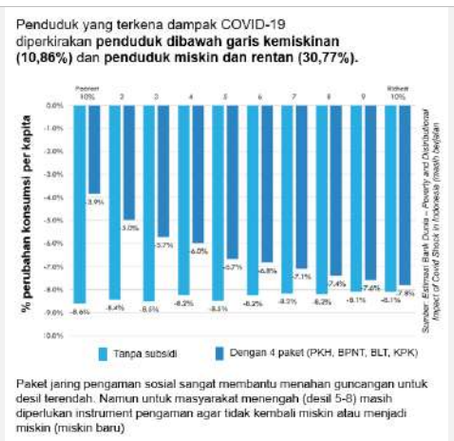
	Krisis Ekonomi, Finansial dan Pandemi COVID-19 berpotensi mempengaruhi ketersediaan bahan pangan. Kondisi pangan global relatif tidak aman akibat perubahan iklim • Bila sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas (*lockdown*), kelompok miskin meningkat dan PHK meningkat sehingga akses pangan ikut menurun • Produksi beras dunia tahun ini diproyeksikan menurun sekitar 0,6% atau 3,0 juta ton. • Ekspor beras dunia tahun ini diproyeksikan menurun sekitar 1,7%. • Harga bulanan beras dunia naik sejak Februari 2020 pada kisaran 4,2%-14,5% (MoM). • Pola panen bulanan fluktuatif (bulan surplus: Mar-Sep; bulan defisit: Jan-Feb dan Okt-Des) dan pola	

Pilar Pembangunan SDGs	Dampak COVID-19 Terhadap Pembangunan SDGs	
	tanam/panen sangat bergantung pada alam (curah hujan)	
Pilar Ekonomi 	- Ekonomi dunia mengalami kontraksi dan menyebabkan aktivitas ekonomi melambat, sehingga permintaan energi turun dan menurunkan harga komoditas. - Pembangunan energi berkelanjutan akan menghadapi kompetisi di tengah kondisi harga sumber energi fosil yang murah. - Pengangguran terjadi pada pemutusan hubungan kerja dan angkatan kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja, sehingga bauran pra kerja dan bantuan sosial perlu diperkuat	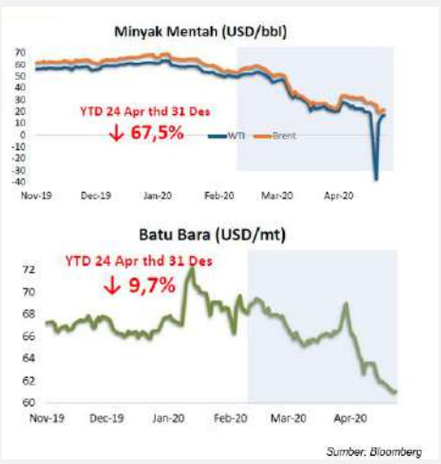
 	- Kesenjangan meningkat akibat berdampaknya sektor informal akibat pandemi - Sektor pariwisata mengalami gejolak pertama dan mempunyai *multiplier effect* pada rantai nilainya - Penerimaan pajak mengalami penurunan drastis, sehingga celah fiskal terbatas defisit perlu diperlebar	
Pilar Pembangunan Lingkungan	- Selama masa pandemi COVID-19, diperkirakan pertumbuhan emisi GRK menurun akibat menurunnya akivitas ekonomi dan penggunaan bahan bakar fosil - Peningkatan kualitas udara perkotaan dan	

Pilar Pembangunan SDGs	Dampak COVID-19 Terhadap Pembangunan SDGs	
	kualitas air di sejumlah negara	
	- Menurunnya penggunaan trasnsportasi publik yang diproyeksikan terus berlangsung hingga “new normal” - Meningkatnya sampah plastik medis dan non medis dari penggunaan plastik sekali pakai dan peralatan medis. - Menurunnya kegiatan dan aksi mitigasi perubahan iklim dalam upaya penurunan emisi GRK	
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 	Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada penyelenggaraan proses hukum dan peradilan dengan pembatasan fasilitas pelayanan umum Beberapa upaya yang telah dilakukan perubahan proses penanganan erkara di persidangan Antisipasi tindak	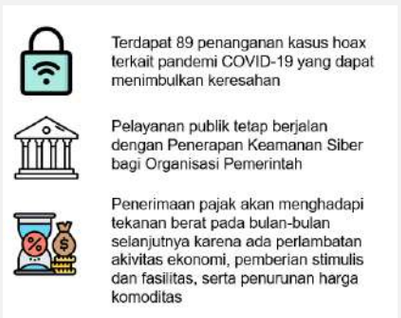

Sementara pencapaian target SDGs di Kabupeten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan KLHS RPJMD diperoleh bahwa indikator TPB SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) dan perlu dipertahankan. Namun masih ada indikator Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC). Pandemi COVID-19 juga mempergaruhi pencapaian target SDGs di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meskipun tidak berdampak siginfikan seperti di daerah perkotaan diantaranya:

a. Penurunan ketahanan pangan, mempengaruhi penurunan indikator skor pola pangan harapan;
b. Penurunan akses pangan dan kualitas konsumsi yang mempengaruhi pemenuhan gizi, dengan indikator prevalensi *undernourishment*;
c. Berpotensi meningkat prevalensi rawan pangan, *stunting* pada balita dan baduta, malnutrisi, *underweight*;
d. Penurunan nilai tambah petani;
e. Penurunan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas;
f. Penurunan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan;
g. Penurunan pelayanan masalah kesehatan karena fokus pada percepatan penanganan COVID-19 selain TB, malaria, kematian ibu dan bayi, HIV, kusta;

h. Penjualan eceran terkontraksi pada penjualan sandang, bahan bakar kendaraan, peralatan informasi dan telekomunikasi serta barang budaya dan rekreasi;
i. Struktur tenaga kerja di Bolaang Mongondow Selatan, terutama pada beberapa subsektor informal seperti: industri, penyediaan akomodasi (penginapan, hotel), Pekerja industri pariwisata, UMKM, transportasi, perdagangan;
j. Kemampuan membaca dan berhitung menurun karena pembelajaran *online* dipersiapkan secara mendadak;
k. Penurunan kualitas standar sekolah akibat *refocussing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19.

4.2.2.3 Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim UNFCCC COP 21 Paris Pada Tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerja sama internasional. Selain itu juga, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-BangsaMengenai Perubahan Iklim).

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK) adalah sekumpulan kebijakan perencanaan pembangunan terintegrasi dan strategi investasi rendah karbon untuk RPJMN 2020-2024 dan *Roadmap* SDGs 2030 yang mendorong Indonesia menurunkan intensitas emisi dan emisi GRK. Daya dukung dan daya tampung SDA dan LH menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan target PRK. Pemerintah menargetkan melalui RPJMN 2020-2024 capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) sebesar 27,3 % dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 %.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi GRK atau NDC sebesar 26 persen tahun 2020 dan kemudian 29 persen pada tahun 2030 seperti dituangkan dalam NDC Indonesia. Untuk itu telah dikeluarkan Perpres Nomor 61 tahun 2011 tentang RAN-GRK sebagai perangkat hukum dan kebijakan. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada target *unconditiona*l (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO_2e pada target *conditiona*l (CM2).

Gambar 4.9
Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon serta Ketahanan Iklim

Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim menjadi agenda nasional yang telah memiliki target, sektor dan lokasi yang jelas dalam RPJMN 2020-2024. Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim sebagai bagian sentral dari goal 13 (Perubahan Iklim) dalam SDGs, dan merupakan salah satu *platform* untuk mewujudkan target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Keterkaitan isu Pembangunan Rendah Karbon dan isu strategis tercermin dari Indeks Lingkungan Hidup Dearah (IKLHD). Tercatat IKLHD tahun 2020 masih masuk kategori baik atau sebesar 58,33. PRK ini didukun keberadaan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas kawasan hutan yaitu 134.403,65 Ha yang terdiri dari: Konservasi Suaka Alam (KSA)= 44.218,80 Ha, Hutan Lindung (HL) = 5.682,45 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT)= 33.150,69 Ha, Hutan Produksi (HP) = 21.351,71 Ha, Areal Penggunaan Lain (APL)= 45.716,63 Ha.

4.2.2.4 Telaahan Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 4.7.

Visi Misi RPJMD

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Sulawesi dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagaimana ditampilkan dalam **Gambar 4.10** di bawah ini.

Gambar 4.8
Arah Kebijakan Pengembangaan Wilayah Sulawesi

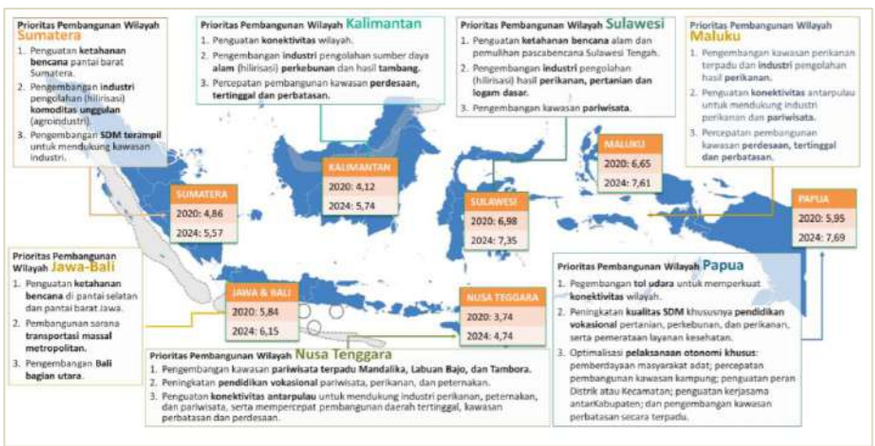

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai bagaian kawasan dalam koridor Sulawesi lokasi diarahkan sebagai berikut:

a. Memperkuat Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang KTI (Kawasan Indonesia Timur);
b. Pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, maritim (kelautan);
c. Hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang;
d. Pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan wilayah.

4.2.2.5 Penelaahan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2005-2025). Arah pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan ***Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai kabupaten pesisir yang berbudaya, sejahtera secara ekonomi dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.*** Sesuai dengan RPJPD 2005-2025, prioritas pembangunan jangka menengah 2021-2026 adalah pemantapan pembangunan masyarakat pesisir yang sejahtera secara ekonomi dan harmoni secara sosial yang berorientasi pada kelestarian lingkungan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan daerah di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan dengan tahapan antara lain:

1. Pembangunan SDM aparat dan masyarakat yang berorientasi kepesisiran yang berkarakter dan berdaya saing;
2. Penyediaan infrastruktur yang menyebar secara kuantitasnya merata dan terjamin kualitasnya;
3. Peningkatan optimasi pembangunan yang berbasis pada kaidah keberhasilan ekonomi, keselarasan sosial dan berorientasi kepada kelestarian lingkunagan;
4. Pemantapan pembangunan masyarakat pesisir yang sejahtera secara ekonomi dan harmoni secara sosial yang beorientasi pada kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pencapaian dalam 3 periode pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah banyak melaksanakan pembangunan diantaranya peningkatan sumber daya aparatur dan upaya pemenuhan infrastruktur dasar untuk masyarakat. Dalam mewujudkan Bolaang Mongondow Selatan Sebagai kabupaten pesisir berbudaya dan sejahtera beberapa isu strategis yang berkembang dalam tahapan pelaksanaan ini

1. Pemerintah belum fokus dalam menterjemahkan secara opersional upaya mewujudkan pembangunan Bolaang Mongondow Selatan menjadi kabupaten pesisir, berbudaya dan sejahtera; Jika melihat pelaksanaan pembangunan sepanjang dua periode ini, kebijakan pembangunan masih berbasis darat dibandingkan berbasis pesisir. Sementara jika berpijak seluruh tahapan kabijakan yang tertuang dalam RPJD 2005-2025, seluruh tahapan kebijakan berorientasi pesisir dan Laut;

2. Belum tersedianya infrastruktur secara merata upaya mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang sejahtera tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur secara merata. Hal ini mengakibatkan rendahnya pergerakan distribusi barang dan jasa khususnya di daerah perdesaan;
3. Belum optimalnya kegiatan ekonomi Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki; Perikanan dan dan kelautan merupakan salah satu potensi unggulan di Kabupaten ini, namun dalam 3 tahapan periode dalam RPJPD yang telah dilalui, kontribusi sub kategori ini belum optimal memberikan share terhadap pembentukan PDRB;
4. Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), walaupun angka partisipasi sekolah telah tumbuh secara signfikan, capaian pembelajaran siswa masih di bawah tingkat provinsi hingga mengurangi daya saing dalam pengembangan ekonomi.

4.2.2.6 Isu Strategis dan Telaah Kebijakan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara saat ini juga sedang melakukan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Periode 2021-2026. Berdasarkan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-20216, isu-isu strategis dalam lima tahun mendatang, yaitu:

a. Perwujudan Sulut sebagai Super Hub di Indonesia Timur;
b. Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan;
c. Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
e. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
f. Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
g. Perwujudan kedaulatan pangan;
h. Optimalisasi sumber daya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
i. Optimalisasi pendapatan daerah;
j. Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak;
k. Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
l. Penguatan kepariwisataan terutama Manado – Likupang yang menjadi bagian dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan penetapan KEK Pariwisata Likupang;
m. Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;
n. Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
o. Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;

p. Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan;
q. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
r. Perencanaan pembangunan rendah karbon/ Low Carbon Development Indonesia (LCDI);
s. Transformasi Digital;
t. Peningkatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai budaya.

Berdasarkan isu strategis di atas, beberapa isu strategis sejalan dengan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diantaranya:

a. Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
c. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
d. Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
e. Optimalisasi sumber daya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
f. Optimalisasi pendapatan daerah;
g. Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak;

Periode 2021-2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil visi "**Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik"** dengan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Manusia Sulawesi Utara;
2. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian perikanan dan jasa;
3. Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas;
4. Pembangunan daerah yang berkelanjutan lingkungan;
5. Pemerintahan yang baik dan bersih, didukung oleh sinergitas antar daerah.

Dalam pencapaian visi dan Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah provinsi telah menentapkan 10 (sepuluh) program prioritas diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektual yang mumpuni;
2. Meningkatkan solidaritas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik;
3. Melanjutkan dan meningkatkan program operasi daerah selesaikan kemiskinan yang terbukti efektif dan berhasil;

4. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti berhasil dan jadi *role model* nasional, serta dukungan bagi UMKM, ekonomi kreatif, pelaku usaha dan sektor rill;
5. Penambahan cakupan asuransi untuk petani, peternak, dan pelayan untuk memproteksi bila gagal panen serta ikut memfasilitasi ekspor komoditas unggulan pertanian kelautan;
6. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan *multiplayer effect* dan lapangan kerja yang luas;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah untuk interkonektivitas orang dan barang juga menunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta dukungan fasilitas pertunjukan untuk seni budaya dan olahraga;
8. Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit uum daerah di tiap kebupaten/kota, serta peningkatan kapasitas tenaga daerah;
9. Iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
10. Percepatan transformasi digital, dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan.

4.2.2.7 Penelahaan Kebijakan RTRW Tahun 2021-2033

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026. Penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bertujuan untuk "Mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai "**Pintu Gerbang Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini yang Berbasis Pembangunan Kelautan, Perikanan, Pariwisata dan Perkebunan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat**."

Tujuan kebijakan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini telah sejalan dengan salah prioritas pembangunan dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu program peningkatan sektor perikanan dan peningkatan sektor pariwisata disamping sektor pertanian secara umum. Pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sepanjang tahun 2016-2020. Namun disisi lain pariwisasta belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat dari rendahnya PAD yang diterima dari sub sektor ini. Untuk itu

pada periode tahun 2021-2026 pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu mendorong pengembangan pariwisata. Hal ini mengingat potensi dan karakteristik wilayah yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri atas:

1. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agroindustri, khususnya komoditas unggulan dan andalan dalam bidang kelautan, perikanan, pariwisata dan perkebunan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi;
2. Peningkatan dan pelestarian fungsi kawasan hutan dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, terkendali serta berkelanjutan;
4. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kabupaten;
5. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada saat penyusunan RPJMD ini disusun, sedang dilakukan penyusunan perubahan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2013-2033. Penelaahan tata ruang yang dilakukan dalam dokumen RPJMD ini belum mengadaptasi rencana perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033.

4.2.2.8 Isu Strategis Pengembangan Wilayah dan Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Secara administratif Kabupaten Bolaang Mongondow selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di sebelah utara, Sebelah Timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sebelah Selatan dengan Teluk Tomini serta sebelah Barat Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sementara dalam kluster pengembangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan satu dari dua kabupaten yang masuk kluster wilayah Bolaang Mongondow Raya selain Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango. Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kedua kabupaten tersebut terletak hutan lindung “Dumoga Bone Nani Wartabone” yang terletak memanjang punggung peninsula pulau Sulawesi. Isu strategis dalam pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:

1. Belum jelasnya tapal batas wilayah dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Infrastruktur jalan yang belum terkoneksi secara maksimal antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Bolaang Mongondow Utara;
3. Belum maksimalnya pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata antara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan wilayah yang berbatasan;
4. Masih maraknya aktivitas pengeboman ikan diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Indentifikasi keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah lain disajikan dalam **Tabel 4.6** berikut:

Tabel 4.6
Telaahan RPJMD Daerah Lain

No	RPJMD Kab/Kota/Periode	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	**Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022**	visi pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan *"Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur"* dengan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumber daya lokal. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan bebas KKN.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

No	RPJMD Kab/Kota/Periode	Kebijakan Terkait	Keterangan
		5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur	tahun 2017 - 2022
2	**Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026**	Visi pembangunan kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2021-2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Yang Aman, Berbudaya dan Sejahtera Melalui Sinergitas Pembangunan Perdesaan dengan Misi sebgai berikut: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang aman, baik dan bersih 2. Meningkatkan budaya dan periwisata yang berkearipan lokal 3. Meningkatkan masyarakat sejahtera yang berwawasan lingkungan	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondowt Timur Tahun 2021 -2026
3	**Bolaang Mongondow Utara 2018-2023**	Visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2023 adalah “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing” dengan misi sebagai berkut: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya; 2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*); 3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan

No	RPJMD Kab/Kota/Periode	Kebijakan Terkait	Keterangan
		4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.	Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 -2023
4	**Kabupaten Bone Bolango 2021-2026**	Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango "**Bone Bolango Maju Dan Bermartabat"** dengan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan sejahtera 2. Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan yang berbasis pelestarian sumber daya alam 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 -2026

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas sinergitas perencanaan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan secara geografis dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan adanya keselarasan dan keterpaduan tujuan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pengembangan potensi lokal masing-masing daerah. Bolaang Mongondow Selatan yang ingin mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Yang Berdasarkan Pancasila.

4.2.2.9 Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Bolaang Mongondow Selatan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026. Dengan harapan pembangunan lima tahun ke depan diiringi dengan adanya pengendalian lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi, dan pembangunan di Bolaang Mongondow Selatan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 terfokus pada 8 (delapan) isu prioritas sebagai tujuan dari TPB sebagai berikut :

1. TPB 1 – Tanpa Kemiskinan
2. TPB 3 – Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera
3. TPB 4 – Kualitas Pendidikan
4. TPB 5 – Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5. TPB 6 – Air Minum dan Sanitasi Layak
6. TPB 8 – Pekerjaan Ekonomi dan Pekerjaan Yang Layak
7. TPB 16 – keadilan untuk semua dan kelembagaan yang efektif dan akuntabel
8. TPB 17 – Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan capaian target dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) terdapat beberapa skenario yang berkaitan dengan upaya pencapaian target TPB. Berikut strategi, arah kebijakan dan program prioritas untuk mewujudkan isu prioritas TPB dan menjadi rekomendasi KLSH.

Tabel 4.7.
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam mewujudkan TPB

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menurun Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Strategi : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bantuan permodalan Arah Kebijakan :	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		✓Peningkatan produktivitas dan kompetensi angakatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar ✓Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka pemerataan pendapatan; ✓Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas; ✓Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan, konsumsi pangan yang beragam serta stabilitas harga pangan; dan ✓Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran	
	Meningkat Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif; ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Meningkat Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		Arah Kebijakan : ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif; ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	
	Meningkat Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif; ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Meningkat Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Strategi : Membangun infrastruktur untuk perunurnan kemiskinan Arah Kebijakan : Pemenuhan infrastruktur dasar berupa air bersih, air limbah dan perumahan layak huni dalam menurunkan angka kemiskinan	Program Pengembangan Infrastruktur
	Meningkat Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Strategi : Membangun infrastruktur untuk perunurnan kemiskinan Arah Kebijakan : Pemenuhan infrastruktur dasar berupa air bersih, air limbah dan	Program Pengembangan Infrastruktur

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		perumahan layak huni dalam menurunkan angka kemiskinan	
	Meningkat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
	Meningkat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
	Meningkat Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh	Strategi :	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
	pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Mengembangkan system pemerintahan yang berbasis kinerja dan menguatkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat Arah Kebijakan : ✓ Penguatan perencanaan, keuangan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel; ✓ Penguatan aparatur sipil negara yang professional; ✓ Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektorik.	
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkat Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif; ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Meningkat Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan :	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif; ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	
	Meningkat Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif; ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Menurun Prevalensi tekanan darah tinggi	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa; ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif;	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh	
	Meningkat Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Strategi : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bantuan permodalan Arah Kebijakan : Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas.	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan
	Menurun Total Fertility Rate (TFR).	Strategi : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bantuan permodalan Arah Kebijakan : Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
	Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	
	Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
	Meningkat Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	
	Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK)	Strategi : Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Arah Kebijakan : ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat; ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan; ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menurun Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi	Strategi : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bantuan permodalan Arah Kebijakan : Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
	Meningkat Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Strategi : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bantuan permodalan Arah Kebijakan : Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Meningkat Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Strategi : Membangun infrastruktur untuk perunurnan kemiskinan Arah Kebijakan : Pemenuhan infrastruktur dasar berupa air bersih, air limbah dan perumahan layak huni dalam menurunkan angka kemiskinan	Program Pengembangan Infrastruktur
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkat Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Strategi : Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor UMKM yang disertai dengan penguatan investasi, akses pasar dan mampu menyerap tenaga kerja Arah Kebijakan : Peningkatan promosi pariwisata Bolaang Mongondow Selatan pasca pandemi covid 19	Program Peningkatan Sektor Unggulan Daerah
	Meningkat Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Strategi : Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor UMKM yang disertai dengan penguatan investasi, akses pasar dan mampu menyerap tenaga kerja Arah Kebijakan : Peningkatan promosi pariwisata Bolaang Mongondow Selatan pasca pandemi covid 19	Program Peningkatan Sektor Unggulan Daerah

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
	Meningkat Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Strategi : Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor UMKM yang disertai dengan penguatan investasi, akses pasar dan mampu menyerap tenaga kerja Arah Kebijakan : ✓ Penguatan kualitas dan daya saing produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas; ✓ Meningkatkan system distribusi barang dan pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen	Program Peningkatan Sektor Unggulan Daerah
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Strategi : Mengembangkan system pemerintahan yang berbasis kinerja dan menguatkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat Arah Kebijakan : ✓ Penguatan perencanaan, keuangan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel; ✓ Penguatan aparatur sipil negara yang professional; ✓ Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektorik.	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkat Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Strategi : Mengembangkan system pemerintahan yang berbasis kinerja dan menguatkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat Arah Kebijakan : ✓ Penguatan perencanaan, keuangan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel;	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi

Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Daerah
1	2	3	4
		✓ Penguatan aparatur sipil negara yang professional; ✓ Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektorik.	
	Di atas 12% Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Strategi : Mengembangkan system pemerintahan yang berbasis kinerja dan menguatkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat Arah Kebijakan : ✓ Penguatan perencanaan, keuangan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel; ✓ Penguatan aparatur sipil negara yang professional; ✓ Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektorik.	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi suatu peluang di masa mendatang. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Sulawesi Utara, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Berikut merupakan isu strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

1. Tingkat kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan keadaan dimana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan dan Kesehatan. Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi penyakit kronis yang entah kapan akan menunjukkan penyembuhannya. BPS (2021) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada angka 12,85 persen.

Selain itu berdasarkan estimasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemiskinan ekstrem di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan menunjukan angka 1,87% atau sekitar 930an jiwa, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, diharapkan di tahun 2024 tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini menjadi 0.

Kemiskinan tidak bisa dipahami menjadi satu dimensi atau satu indikator saja, kemiskinan sangat kompleks sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu diperlukan adanya pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan lapagan kerja maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini jadi sangat penting dikarenakan pengangguran merupakan salah satu penyebab dapat menimbulkan adanya kesenjangan pendapatan masyarakat, sehingga dengan semakin berkurangnya pengangguran maka tingkat kemiskinan tersebut akan berkurang.

Penguatan ketahanan pangan daerah diperlukan dalam menjamin ketersediaan pangan daerah, dengan terpenuhinya pangan daerah selain itu diperlukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk bagi penduduk yang rentan miskin dan penduduk miskin untuk menekan angka kemiskinan itu sendiri.

Pasca pemerintah mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) september 2022 hampir bisa dipastikan akan berdampak secara ekonomi dan sosial masyarakat, yang membuat akan sulitnya pemerintah untuk menurunkan bahkan menekan dampaknya. Kenaikan BBM secara ekonomi akan berdampak kepada kenaikan inflasi dan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berpotensi terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Salah satunya dapat dilakukan untuk menekan atau penurunan kemiskinan adalah penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan dan mengerakkan UMKM lebih produktif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memiliki ciri yaitu apabila perekonomian Bolaang Mongondow Selatan berkembang maka tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan di Bolaang Mongondow Selatan akan semakin berkurang Tingkat Pengangguran, Pemerataan Pendapatan, serta Ketahanan Pangan Daerah yang berdampak pada penurunan PMKS.

Pengembangan sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah contoh pertumbuhan yang inklusif. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan mampu menekan atau menurunkan pengangguran di Bolaang Mongondow Selatan.Untuk merespon hal ini Pemda

diharapkan untuk tidak ragu menggunakan anggaran dalam mengendalikan dampak inflasi. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus mampu menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi dan transpotasi. Selain itu juga pemda mampu mengintesifkan jaring pengaman sosial, anggaran desa, bantuan sosial, dan realokasi dana alokasi umum, maupun bantuan sosial dari pemerintah pusat.

2. Pemulihan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Keberadaan sektor unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini perlu dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur perkonomian daerah, karena keberadaan sektor tersebut menjadi penggerak perkembangan ekonomi daerah, yang meluputi : Pertanian, Perikanan dan Sektor UMKM.

Keberadaan sektor pertanian dan perikanan perlu mendapat perhatian lebih, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih ditopang kuat oleh adanya sektor pertanian dan perikanan, dimana kontribusi di sektor itu memiliki kontribusi sebesar 38,14%. Bahkan saat pandemi *Covid 19* melanda di tahun 2020 perekonomian kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tetap berada di tren positif disaat Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi utara maupun nasional tumbuh negatif. Peran yang diberikan sektor pertanian cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir namun mengalami penurunan di tahun 2021 serta laju pertumbuhannya juga cukup kecil di tahun 2021 yang hanya berada di angka 1,87 angka ini terbilang cukup kecil dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Kondisi yang dialami sektor pertanian ini memerlukan intervensi lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dimana kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti penurunan produktifitas yang disebabkan oleh adanya penurunan produktifitas tanah atau penurunan porduktifitas lahan yang disebabkan karena penggunaan pupuk on-organik, selain itu keadaan cuaca yang memaksa komuditas unggulan daerah seperti cengkeh yang tidak berproduksi secara optimal, bencana banjir, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana air dan lahan yang belum memadai. Penurunan produksi perikanan tangkap yang disebabkan karena terjadinya cuaca ekstrem serta kelembagaan petani / nelayan saat ini masih terdapat banyak kelemahan.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selain turut terkena dampak pandemi Covid 19 yang harus segera ditangani juga memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dalam beberapa

tahun mendatang, karena keberadaan UMKM dengan jumlah yang banyak juga turut memiliki peran yang besar dalam rangka mendukung perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian keberadaan UMKM perlu didorong terus untuk tumbuh. Masih minimnya diversifikasi usaha mikro perlu ditingkatkan untuk memperkuat struktur perekonomian dan mendukung keberlangsungnya usaha yang dimiliki oleh UMKM, selain itu masih belum optimalnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi, belum optimalnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar, belum maksimalnya kemampuan SDM usaha mikro, belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan, lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan usaha mikro, belum maksimalnya pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah, kurangnya keakuratan data UMKM, serta minimnya jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha juga masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dan secara bertahap diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM

3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Pembangunan infrastruktur sebagai modal pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar desa, kecamatan, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan kronik berhasil dientaskan.

Salah satu hal mendasar dan mendesak dalam pembangunan insfrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah pemenuhan akses sanitasi, air bersih. Pembangunan infrastruktu ini merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejak 2016-2021. Namum hasilnya, masayarakat belum sepenuhnya memperoleh akses maupun layanan terhadap infrastruktur dasar berupa Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Seperti yang termuat dalam Bab II, rincian isu strategis terkait pemenuhan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kondisi jalan dan Irigasi Kewenangan Kabupaten

Proforsi kondisi jalan dalam kondisi rusak berat masih relatif tinggi sebesar 26,08 persen atau sepanjang 149,986 km dan Masih rendahnya

irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi dalam kondisi baik saat ini hanya 57 persen (atau 2.755 ha) dari 4.769 ha

b) Peningkatan Akses terhadap Air Minum

39,81 persen penduduk belum mampu mengakses air minum bersih untuk kebutuhan anggota keluarga.

c) Peningkatan Akses terhadap sanitasi layak

54,1 persen rumah tangga belum mampu mengakses sanitasi layak;

d) Peningkatan ketersediaan layak huni

27,32 persen penduduk yang belum memiliki kategori belum layak huni, atau sebanyak 5.360 rumah tinggal belum layak untuk dihuni;

e) Lingkungan kumuh yang masih tingggi, saat ini 19,17 masih dalam kawasan kumuh;

Sejalan dengan pemenuhan infrastruktur dasar, prioritas lainnya adalah meningkatkan kualiatas infrastruktur penunjang perekonomian. Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian diyakini bisa meningkatkan daya saing daerah karena biaya logistik serta transportasi akan lebih murah akibat konektivitas yang tinggi. Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata.

4. Pembangunan SDM yang berkarakter dan Berbudaya Serta Berdaya Saing

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian budaya ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis pembangunan SDM adalah sebagai berikut:

a) Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti yang termuat dalam Bab II dokumen ini, tingkat partisipasi dalam PAUD masih cukup rendah. Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu disini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan lagi.

b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga

Indikasi dampak pembangunan kesehatan yang baik dapat diukur dari dimensi umur panjang dan hidup sehat. Kualitas sumber daya manusia dari aspek kesehatan dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun ke tahun selalu berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Utara. Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang menekan angka kematian pada bayi selain itu pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat.

c) Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Indikasi ini dapat diukur dari tingkat partisipasi pemuda dlam kegiatan ekonomi mandiri dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kempudaan dan organisasi sosial kemasyarakat serta prestasi oleh raga yang masih rendah. Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk era digital, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu sendiri. Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

d) Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, belum berjalan optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting

untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Indikasi ini dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Kabupaten Layak Anak.

e) Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

Keanekaragaman budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut ke depan harus selalu dilestarikan dalam rangka meningkatkan entitas/jati diri wilayah atau masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu perlu mendapatkan akses aktualisasi dalam bentuk penyelenggaraan event baik tingkat lokal maupun skala yang lebih tinggi agar nilai-nilai bisa dipertahankan dan dipromosikan untuk mendatangkan nilai ekonomis dan kesejahteraan lainnya.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi fokus utama masalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, banyak tuntutan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan publik yang harus cepat, prima dan responsif, masih banyak tugas yang harus diselesaikan terkait layanan pemerintah, diantanya masih banyak pelayanan yang belum sesuai dengan SOP pelayanan.

Selain itu Pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (*artificial intelligence*). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya. Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas harus di dukung melalui pendekatan paradigma mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai *network government* dan *collaborative governance*. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih terjadi berbagai permasalahan yang harus diperhatikan, nilai indeks reformasi birokrasi yang belum baik sebagaimana target dalam SDG's, adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan

inskonsistensi perencanaan dan penganggaran di daerah. Manajemen pemerintahan dituntut dinamis dan adaftif untuk menyikapi perubahan, birokrasi harus merespon kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah daerah juga dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026 telah memperhatikan isu-isu strategis, maka penting untuk melinierkan isu strategis pada Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, segaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7.
Isu Strategis terhadap Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026
Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri Dan Berwawasan Lingkungan
Pemulihan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan	Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat
Pembangunan SDM yang berkarakter dan Berbudaya Serta Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian Dan Berbudaya Serta Berdaya Saing
Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Inovasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026. Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila"

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Bersatu: Adalah semangat penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga mencerminkan motivasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Bersatunya pemerintah daerah, politisi, masyarakat dan elemen pemangku kepentingan lainnya ditunjukkan dari percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan Indeks reformasi birokrasi, terpelihara kerukunan antar umat beragama serta terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdaulat: adalah penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan bertanggungjawab dan berkuasa penuh untuk membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah dilakukan dengan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur baik ekonomi dan sosial. Berdaulat diukur terpenuhinya akses masyarakat terhadap

infrastruktur dan kepuasan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan terhadap layanan infrastruktur serta meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa yang tercermin dari peningkatan Indeks Desa Membangun.

Mandiri: adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Memaksimalkan semua potensi keunggulan daerah yang dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Produksi dan produktivitas daerah terus dioptimalkan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mandiri terukur dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dan pemerataan pendapatan, serta tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang baik.

Sejahtera: Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menurunkan angka kemiskinan, pengangguran serta penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing serta mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19.

Berkepribadian: sebagai pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki keunggulan yang berbasis kearifan lokal dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati. Berkepribadian terukur dalam hal ini tercermin dari tingkat kerukunan umat beragama Dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas perwujudan visi digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Perumusan Visi Jangka Menengah Pembangunan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun Tahun 2021-2026

Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
▪ Tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan Indeks reformasi birokrasi ▪ Terpelihara kerukunan antar umat beragama dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Beragama ▪ Terjaganya ketenteraman dan	BERSATU	*"Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Bersatu, Berdaulat,*

Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
ketertiban umum dengan meningkatnya Indeks Rasa Aman		*Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Yang Berdasarkan Pancasila"*
▪ Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas dengan mengukur dan indeks kepuasan masyarakat Bolaang Mongondow Selatanl terhadap layanan infrastruktur ▪ Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa yang tercermin dari peningkatan Indeks Desa Membangun	BERDAULAT	
▪ Peningkatan pertumbuhan ekonomi ▪ Pemerataan pendapatan, ▪ Kemandirian desa ▪ Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	MANDIRI	
▪ Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing serta mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca-pandemi COVID-19.	SEJAHTERA	
▪ Penguatan kearifan lokal dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis yang diukur melalui peningkatan Indeks Pemajuan Budaya	BERKEPRIBADIAN	

5.2. MISI

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk visi pembangunan jangka menengah. Misi Pembangunan Daerah meruapakan penjabaran misi yang dibawa oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pikada. Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 misi untun mewujudkan Visi pembangunannya, yaitu :

1. **Meningkatkan Nilai-Nilai Religius Dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama Yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila;**

Kerukunan antar umat beragama merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai pancasila. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui misi I (satu) ingin mendorong masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang semakin religius, toleran antar sesama umat beragama. Selain peningkatan nilai-nilai religius, Bolaang Mongondow Selatan juga kaya akan tradisi dan budaya bersatu menjaga toleransi umat beragama.

Nilai-nilai religius juga akan termanifestasi dengan terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pemerintah Bolaang Mongondow Selatan, dengan mengedepankan kearifan lokal yang menjadi pemersatu *multiculture* masyarakat Bolaang Mongondow Selatan. Ketertiban dan keamanan di Bolaang Mongondow Selatan tercermin juga dari rasa aman terhadap bencana dengan meningkatkan ketangguhan daerah dan upaya menekan dampak bencana berbasis masyarakat pada tingkat desa.

2. **Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat;**

Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar desa, kecamatan, kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Melalui misi kedua ini dilaksanakan melalui perluasan infrastruktur dasar, penguatan infrastruktur desa dan ketahanan bencana, peningkatan konektivitas antar kecamatan serta perluasan teknologi dan komunikasi. Pembangunan kewilayahan yang berdaulat dititikberatkan pada peran kecamatan untuk mampu mewujudkan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar desa.

3. **Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri Dan Berwawasan Lingkungan;**

Potensi unggulan Bolaang Mongondow Selatan sangat besar untuk dikembangkan melalui pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk juga industri rumah tangga. Sektor pariwisata dan jasa terus didorong dengan kreativitas masyarakat untuk menjadikan Bolaang Mongondow Selatan menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui misi ketiga ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ingin merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja dalam

upaya menurunkan tingkat pengangguran dengan tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, dan tetap menjaga ketahanan pangan, selain itu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diharapkan mampu mengendalikan angka kelahiran pada penduduk miskin dan rentan miskin. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi hijau yang berfokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dengan dampak sosial yang lebih baik, serta berkurangnya dampak buruk terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Bolaang Mongondow Selatan.

4. **Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Inovasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih;**

   Salah satu wujud reformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

   Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui misi keempat ingin menjawab kebutuhan masyarakat melalui transformasi digital dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Transformasi digital tersebut dapat dimanfaatkan publik secara lebih efektif dalam upaya pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintah.

5. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian Dan Berbudaya Serta Berdaya Saing.**

   Misi 5 (lima) ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga serta pembangunan budaya karakter masyarakat. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan sistem pendidikan bermutu guna memperteguh akhlak, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat.

   Dengan demikian, akan terwujud sumber daya yang berkepribadian dan mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal. Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada pembangunan budaya dan karakter masyarakat.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terpilih menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Dalam hal ini tujuan dan sasaran merupakan dampak *(impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sehingga, syarat utama penentuan penentuan tujuan dan sasaran measurable yang dipresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan Bupati dan Indikator Kinerja Daerah atau Indikator Kinerja Sasaran RPJMD.

Mengacu pada visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai Berikut :

5.3.1. Misi 1: Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila

Misi ini memiliki tujuan untuk membawa Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Religius, Toleran antar Sesama Umat Beragama serta Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman dengan sasaran, yaitu:

1) Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Daerah.

Gambar 5.1. Cascading Pencapaian Misi 1

MISI 1	Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila			
TUJUAN	Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Religius, Toleran Antar Sesama Umat Beragama serta Menjaga Ketertiban dan Ketentraman *Indikator : "Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama"*			
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Daerah			
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka Kriminalitas	Indeks Resiko Bencana	Indeks Gotong Royong
PROGRAM PRIORITAS	Program Menjaga Toleransi, Keagamaan dan Keamanan Warga			
PROGRAM PMDN 90	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang semakin religius, toleran antar umat beragama untuk menjaga kemanan dan ketertiban daerah yang diharapkan pada peningkatan investasi daerah yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta

penurunan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan sasaran yaitu, meningkatnya toleransi antar umat beragama dan semangat gotong royong untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Daerah, sasaran ini utamanya meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui peningkatan jati diri bangsa yaitu gotong royong serta menjaga ketertiban dan keamanan daerah, hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor dengan jaminan keamanan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

5.3.2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dalam Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan dengan sasaran antara lain:

1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah; dan
2) Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Gambar 5.2. Cascading Pencapaian Misi 2

MISI 2	**Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat**	
TUJUAN	**Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan** *Indikator : "Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur"*	**Meningkatkan Pembangunan Wilayah dalam Mewujudkan Kemajuan dan Kemandirian Desa** *Indikator : "Indeks Desa Membangun"*
SASARAN RPJMD	**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perkonomian Daerah**	**Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa**
	Ratio Konektifitas Indeks Aksesibilitas Jalan Cakupan Daerah yang Tercover Jaringan	Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Mandiri
PROGRAM PRIORITAS	Program Pembangunan Infrastruktur	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan
PROGRAM PMDN 90	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Administrasi Pemerintah Desa
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Aplikasi Informatika	
	Program Pengelolaan SDA	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Program Pengembangan Perumahan	

Rumusan dari tujuan **"Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan"** diatas menerjemahkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam menunjang peningkatan perekonomian serta percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran, yaitu, meningkatkan kualitas pembangunan infrasktruktur penunjang kegiatan sosial dan perekonomian daerah.

Rumusan dari tujuan **"Meningkatnya Pembangunan Wilayah dalam Mewujudkan Kemajuan dan Kemandirian Desa"** diatas menerjemahkan pembangunan dari desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa

yang berdampak pada pengurangan kemiskinan melalui kemajuan dan kemandirian desa. Untuk mecapai tujuan dimaksud ditetapkan sasaran meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.

Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa, dengan meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kemiskinan.

5.3.3. Misi 3: Meningkatkan Kapasitas Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan

Misi ini memiliki tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, Menyebar, dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan dan Berwawasan Lingkugan yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan dengan sasaran antar lain :

1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan; dan
3) Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS.

Gambar 5.3. Cascading Pencapaian Misi 3

MISI 3	Meningkatkan Kapasitas Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan					
TUJUAN	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Menyebar, Inklusif Berbasis Potensi Unggulan dan Berwawasan Lingkungan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan *Indikator : 1. "Pertumbuhan Ekonomi", 2. "Persentase Penduduk Miskin"*					
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Daerah yang berdampak pada Penurunan PMKS			
	• Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan • Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tingkat Pengangguran Terbuka	• Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks Ketahanan Pangan	Persentase Penurunan PMKS
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Sektor Unggulan Daerah	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan
PROGRAM PMDN 90	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Peyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Rehabilitasi Sosial

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa pembangunan harus bersinergi dengan lingkungan dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi inklusif diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan antar wilayah serta efektif menanggulangi kemiskinan. Untuk menccapai tujuan diatas, dirumuskan sasaran yaitu pertama, meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor unggulan, kedua, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan

berkelanjutan, ketiga, menurunnya tingkat pengangguran, pemerataan pendapatan, serta ketahanan pangan daerah untuk penurunanan PMKS.

Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan, pertumbuhan dan daya saing dari sektor unggulan menjadi fokus Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam meningkatkan perekonomian. Pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi roda ekonomi utama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena berdampak pada seluruh sektor perekonomian masyarakat. Selain itu potensi unggulan lainnya yaitu sektor UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diharapkan dapat melengkapi dan menopang sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa pembangunan ekonomi di daerah tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan yang berdampak pada Penurunan PMKS, masalah kemiskinan menjadi perhatian khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk ditanggulangi, kemiskinan disebabkan belum meratanya pendapatan masyarakat. Dalam menurunkan kemiskinan fokus kabupaten dibagi menjadi, Pertama : pengurangan pengangguran melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan, kolaborasi bagi para nelayan untuk dapat mempunyai kegiatan lain selain nelayan, penciptaan wirausaha baru dan atau peningkatan wirausaraha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kedua : mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terutama pada menekan angka kelahiran pada penduduk rentan miskin dan penduduk miskin, ketiga : memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang miskin absolut yang secara fisik sudah tidak berdaya.

5.3.4. Misi 4: Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini bertujuan untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*) dengan sasaran, yaitu :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Gambar 5.4. Cascading Pencapaian Misi 4

MISI 4	**Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Inovasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih**		
TUJUAN	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih** (*Good Governance and Clean Governance*) *Indikator : "Indeks Reformasi Birokrasi"*		
SASARAN RPJMD	**Meningkatnya Akuntabiltias Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik**		
	Nilai SAKIP	Opini BPK Terhadap LKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi		
PROGRAM PMDN 90	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Administrasi Umum
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Program Pendaftaran Penduduk
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Program Pencatatan Sipil

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan reformasi birokrasi, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik dalam peningkatan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Sasaran dari misi keempat, yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik**, yang artinya tata Kelola pemerintahan yang baik diharapkan fokus pada 2 area : pertama, layanan publik yang berkualitas, kedua, peningkatan kinerja pemerintah daerah.

5.3.5. Misi 5: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian dan Berbudaya serta Berdaya Saing

Misi ini bertujuan untuk Terwujudnya Sumber Daya Manusia Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing dengan sasaran, Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendikan dan Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga.

Gambar 5.5. Cascading Pencapaian Misi 5

MISI 5	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian dan Berbudaya Serta Berdaya Saing**			
TUJUAN	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing** *Indikator : "Indeks Pembangunan Manusia"*			
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat serta Keberdayaan Keluarga			
	Indeks Pendidikan	- Angka Harapan Hidup - Prevalensi Stunting	Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender	Kabupaten Layak Anak
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
PROGRAM PMDN 90	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Program Perlindungan Khusus Anak

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran pertama, meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan, Kesehatan masyarakat dan keberdayaan keluarga.

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga, sasaran ini diharapkan meningkatkan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan untuk menikmati umur panjang, sehat serta melakukan kegiatan yang produktif, selain itu untuk meningkatkan nilai pembangunan manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memberikan upaya pemerataan dan perbaikan kualitas Pendidikan, serta peran perempuan dalam pemerataan Pendidikan dan Kesehatan diperlukan untuk memberdayakan keluarga serta memberi perhatian dalam perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.2.** di bawah ini :

Tabel 5.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Yang Berdasarkan Pancasila"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila	Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Religius, Toleran antar Sesama Umat Beragama serta Menjaga Ketertiban dan Ketentraman	**Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama**		**Indeks**	**n/a**	**2,51**	**2,75**	**2,85**	**3,00**	**3,25**	**3,25**
		Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	n/a	2,51	2,75	2,85	3,00	3,25	3,25
			Angka Kriminalitas (per 100.000 Penduduk)	Angka	340,16	300	300	300	300	300	300
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	149,60 (Tinggi)	149,00	148,50	148,25	148,05	147,90	147,90
			Indeks Gotong Royong	Indeks	n/a	2,4	2,6	2,8	3,00	3,20	3,2
Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berdaulat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dalam Menjamin Pembangunan yang	**Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur**		**Indeks**	**n/a**	**2,70**	**2,80**	**2,90**	**3,00**	**3,05**	**3,05**
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang	Ratio Konektivitas	Ratio	30,43	30,45	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46
			Indeks Aksisibilitas Jalan	Indeks	20	20	20	20	20	20	20

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Berkelanjutan	Kegiatan Sosial dan Perekenomian Daerah	Cakupan Wilayah (Desa) yang tercover Jaringan	%	65,43	66,67	69,14	74,07	76,54	77,78	77,78
	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Dalam Mewujudkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	**Indeks Desa Membangun**		**Indeks**	**0,6988**	**0,7020**	**0,7110**	**0,7200**	**0,7300**	**0,7486**	**0,7486**
		Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju	Desa	31	32	33	34	35	36	36
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	2	4	5	6	7	7
Meningkatan Kapasitas Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Menyebar, Inklusif berbasis Potensi Unggulan dan Berwawasan Lingkungan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	**Pertumbuhan Ekonomi**		**%**	**3,74**	**3,50-5,61**	**4,50-5,61**	**5,50-6,98**	**5,75-7,20**	**5,75-7,60**	**5,75-7,60**
		Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB	%	38,14	38,69	38,76	38,79	39,18	39,21	39,21
			Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	0	0,15	0,32	0,45	0,55	0,71	0,71
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,60	80,00	80,00	80,00	81,00	81.00	81,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Penduduk Miskin		**%**	**12,85**	**12,30-11,37**	**11,84-10,96**	**11,40-10,56**	**10,98-10,16**	**10,57-9,79**	**10,57-9,79**
		Tingkat Kemiskinan Ekstrim		**%**	**n/a**	**2,53**	**1,26**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Menurunnya Tingkat Pengangguran, dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Pangan Daerah yang berdampak pada Penurunan PMKS	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT)	Angka	4,60	4,16-3,74	3,95-3,57	3,76-3,38	3,57-3,20	3,39-3,05	3,39-3,05
			Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,35	1,35
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,72	77,49	77,84	78,16	78,52	78,79	78,79
			Persentase Penurunan PMKS	%	17,15	1,72	3,46	5,88	8,68	10,68	10,68
Meningkatkan Pelayanan Publik Berabasis Teknologi Informasi dan Inovasi melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Governance*)	**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Indeks**	**53,20**	**71,00**	**72,00**	**73,00**	**74,00**	**75,00**	**75,00**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai SAKIP	Predikat	(B) 64,56	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,90 (Baik)	85	85	85	85	85	85

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian dan Berbudaya serta Berdaya Saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing	**Indeks Pembangunan Manusia**		**Indeks**	**65,42**	**65,50-66,19**	**65,73-66,66**	**66,20-67,31**	**66,67-67,60**	**67,14-68,80**	**67,14-68,80**
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga	Indeks Pendidikan	Indeks	61,33	61,39	61,45	61,51	61,57	61,63	61,63
			Angka Usia Harapan Hidup	Angka	64,49	65,66	66,10	66,35	66,64	67,10	67,10
			Pravelansi Stunting	%	6,50	6,25	6,00	5,80	5,00	4,85	4,85
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	80,09	80,50	81,00	82,0	82,50	83,00	83,00
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	71,50	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	75,50
			Kabupaten Layak Anak	Prediklat	n/a	Inisasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagiamana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang dilasanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah Langkah yang berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Perumusan strategi pembangunan daerah dapat dirauikan sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Yang Berdasarkan Pancasila		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila		
Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Religius, Toleran antar Sesama Umat Beragama serta Menjaga Ketertiban dan Ketentraman	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah	✓ Penguatan nilai-nilai keagamaan dan gotong royong ditengah masyarakat untuk menjaga kondusifitas daerah
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berdaulat		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dalam Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kelancaran Kegiatan Sosial dan Perekonomian Daerah	✓ Membangun infrastruktur untuk perekembangan perekonomian ✓ Membangun infrastruktur untuk penurunan angka kemiskinan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Yang Berdasarkan Pancasila		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	✓ Mendorong pembangunan desa serta tumbuh dan berkembangnya investasi di desa melaui bumdes
Misi 3 : Meningkatan Kapasitas Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Menyebar, Inklusif berbasis Potensi Unggulan dan Berwawasan Lingkungan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan	✓ Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor UMKM yang disertai dengan penguatan investasi, akses pasar dan mampu menyerap tenaga kerja
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	✓ Memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam proses pembangunan
	Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS	✓ Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan akses pangan serta bantuan permodalan
Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan Publik Berabasis Teknologi Informasi dan Inovasi melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Governance*)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	✓ Mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis kinerja dan menguatkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat
Misi 5 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian dan Berbudaya serta Berdaya Saing		

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Yang Berdasarkan Pancasila		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga	✓ Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipai isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. Perumahan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

1. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan gotong royong ditengah masyarakat untuk menjaga keamanan daerah, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Fasilitasi forum keagamaan dalam menjaga kekurukan;
   - ✓ Penegakan perda dan edukasi masyarakat; dan
   - ✓ Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana;

2. Membangun infrastruktur untuk perekembangan perekonomian, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Membangun konektivitas perhubungan;
   - ✓ Peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat; dan
   - ✓ Peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang menunjang perkekomian.

3. Membangun infrastruktur untuk penurunan kemiskinan, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Pemenuhan infrastruktur dasar berupa air bersih, air limbah dan perumahan layak huni dalam menurunkan angka kemiskinan.

4. Mendorong pembangunan desa serta tumbuh dan berkembangnya investasi di desa melaui bumdes, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan BUMDES yang berfokus pada pertanian, perikanan dan UMKM.

5. Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta sektor UMKM yang disertai dengan penguatan investasi, akses pasar dan mampu menyerap tenaga kerja, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Bantuan penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
   - ✓ Peningkatan infrastruktur irigasi;
   - ✓ Penguatan kelompok tani dan nelayan dalam pengelolaan dan produksi;
   - ✓ Bantuan asuransi bagi petani dan nelayan;
   - ✓ Penguatan kualitas dan daya saing produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas;
   - ✓ Meningkatkan system distribusi barang dan pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen;
   - ✓ Peningkatan promosi pariwisata Bolaang Mongondow Selatan pasca pandemi covid 19;

6. Memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam proses pembangunan, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan penebangan liar;
   - ✓ Mengurangi pencemaran air dengan pengawasan lingkungan hidup; dan
   - ✓ Pengelolaan persampahan.

7. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bantuan permodalan, dengan arah kebijakan:
   - ✓ Peningkatan produktivitas dan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar;
   - ✓ Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka pemerataan pendapatan;
   - ✓ Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas;
   - ✓ Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan, konsumsi pangan yang beragam serta stabilitas harga pangan; dan
   - ✓ Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran;

8. Mengembangkan system pemerintahan yang berbasis kinerja dan menguatkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat , dengan arah kebijakan :
   - ✓ Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan dengan jemput bola sampai ke desa;
   - ✓ Mempermudah dan mempercepat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
   - ✓ Penguatan perencanaan, keuangan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel;
   - ✓ Penguatan aparatur sipil negara yang professional;
   - ✓ Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektorik;
   - ✓ Penguatan data statistik sektoral dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan; dan
   - ✓ Penguatan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

9. Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, peningkatan Kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, dengan arah kebijakan :
   - ✓ Peningkatan kualias Pendidikan serta pemberian beasiswa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat;
   - ✓ Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan profesionaisme pendidik dan tenaga kependidikan;
   - ✓ Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh desa;
   - ✓ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya promotive dan preventif;
   - ✓ Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh;
   - ✓ Penguatan literasi sekolah dan masyarakat; dan
   - ✓ Peningkatan kesempatan bagi perempuan dan bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di atas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan fokus pembangunan akan memberikan arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Tema pembangunan lima tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat disajikan pada tabel 6.2. berikut ini.

Tabel 6.2.
Tema Pembangunan Kab Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2021-2026

TEMA PEMBANGUNAN				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi melalui penguatan ketahanan sosial, ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktu	Peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta sdm yang berkualitas	Peningkatan kesejahteraan masyrakat dengan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan kemandirian dengan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan	Peningkatan kedaulatan. Kemandirian dan kesejahteraan melalui ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan

1. **Arah Kebijakan Tahun 2022** difokuskan pada *percepatan* **pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui penguatan ketahanan sosial, ketahanan pangan dan peningkatan daya infrastruktur,** dengan harapan pada akhir tahun 2022 pandemic COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Oleh karena itu tahun pertama perencanaan dalam RPJMD ini diprioritaskan pada:
   a. Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemic COVID-19
   b. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan Kesehatan;
   c. Menurunkan angka kemiskinan;
   d. Meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan;
   e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
   f. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis lingkungan.

2. **Arah Kebijakan Tahun 2023**: difokuskan pada **peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas**, diprioritaskan pada:
   a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
   b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
   c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
   d. Pengelolaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
   e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
   f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

3. **Arah Kebijakan Tahun 2024**, di fokuskan pada **peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan**.Tahun ini akan dilaksanakan salah satu agenda nasional, yakni Pemilihan Umum

(Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik untuk melaksanakan agendanasional dimaksudyang diprioritaskan pada:

a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b. Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
c. Pengelolaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
d. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi;
e. Pemantapan tata kelola pemerintahan serta ketertiban dan keamanan; dan
f. Stabilitas politik daerah terjamin.

4. **Arah Kebijakan Tahun 2025** difokuskan pada **peningkatan kemandirian dengan ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan**, yang diprioritaskan pada:
   a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
   b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
   c. Pemantapan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi;
   d. Pengelolaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
   e. Penguatan daya saing UMKM dan koperasi;
   f. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

5. **Arah Kebijakan Tahun 2026** difokuskan pada pencapaian visi yaitu dengan peningkatan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan melalui ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir periode 2021 – 2026. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.Dengan demikian yang diprioritaskan pada:
   a. Pemantapan penanggulangan kemiskinan;
   b. Perwujudan kualitas dan daya saing SDM;
   c. Pemantapan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
   d. Pengelolaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
   e. Penguatan kapasitas UMKM dan koperasi;
   f. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan.

6.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan dengan pendekatan Holistic-Tematik dan Integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten, juga mengacu pada kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang.

Pengintegrasian RTRW ke dalam RPJMD dilakukan denganmemuat program/kegiatan yang mengakomodir penyusunan Rencana RinciTata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW (Rencana Kawasan StrategisKabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang), Program Perwujudan StrukturRuang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan Program PerwujudanPola Ruang (kawasan lindung dan budi daya).

Pendekatan kewilayahan yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dengan pendekatan spasial adalah sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya bidang perkebunan, perikanan dan sektor pariwisata dengan memanfaatkan peluang pasar lokal dan regional. Pertanian berbasis potensi lokal diarahkan untuk hilirisasi produk turunan perkebunan, perikanan yang dilakukan melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Komoditi kelapa, cabe, pisang dan lemon yang saat ini menjadi fokus pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan disamping komoditas utama padi, kedelai dan jagung.

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Bolaang Mongondow Selatan berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi dan akan mempengaruhi proses pembangunan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Bolaang Mongondow Selatan diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusif masyarakat sebagai penerima manfaat.

Strategi pembangunan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan difokuskan untuk percepatan dan penguatan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan konektivitas jalan, otonomi daerah, serta mitigasi dan penurunan risiko bencana serta ketahanan iklim, sebagai berikut:

1. Percepatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar meliputi peningkatan kualitas SDM berupa akses dan kualitas layanan kesehatan dan penurunan prevalensi *stunting*, pendidikan dengan fokus pada pemberantasan buta huruf dan Membangun sistem pendidikan berbasis *boarding school*; Pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola kecamatan dan pembangunan desa secara terintegrasi dengan membangun sistem pelayanan satu data;

2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan fokus pada pengembangan produk lokal berbasis komoditi unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital khususnya untuk bidang perkebunan, perikanan dan pariwisata;
3. Otonomi daerah dilakukan dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah), penerapan SPM, peningkatan kerjasama daerah otonom (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Timur dan Bone Bolango), kemudahan perizinan investasi.
4. Penguatan dan pengembangan peran kecamatan sebagai sebagai pusat data dan informasi, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal
5. Pembangunan desa meliputi peningkatan aparatur desa untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan tata kelola aset desa. Selain itu juga peningkatan peran BUMDes.
6. Penanggulangan risiko bencana dan ketahanan iklim melalui peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses, optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana, optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana oleh masyarakat, serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal masyarakat.

Strategi pengembangan wilayah ini telah sejalan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari :

1. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agroindustri, khususnyaKomoditas unggulan dan andalan dalam bidang kelautan, perikanan, pariwisata dan perkebunan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi.
2. Peningkatan dan pelestarian fungsi kawasan hutan dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, terkendali serta berkelanjutan;
4. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kabupaten; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam perumusan rencana pembangunan, maka penyelarasan prioritaspembangunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktuyang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan strukturruang dan pola ruang Bolaang Mongondow Selatan.

Fokus dan rencana pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2026 yaitu diarahkan meliputi: 1) perkebunan yang difokuskan pada pengembangan komoditi unggulan seperti cabe, pisang dan lemon cui; 2) perikanan dengan optimalisasi produksi perikanan tangkap dengan komoditi unggulan ikan tuna dan perikanan budidaya dengan menggunakan sistem bioflok; 3) Wisata alam dan minat khusus yang difokuskan ekowisata mangrove dan diving.Dengan strategi adanya keterkaitan fungsional antarwilayahpengembangan yang ditujukan untuk

meningkatkan sinergitas dan integrasipengembangan wilayah khususnya dalamkluster Bolaang Mongondow.

6.3.1. Strategi Pengembangan Wilayah Bolaang Mongondow Selatan Dalam Kluster Pengembangan Bolaang Mongondow Raya

Sebagai kabupaten yang berada dalam kluster wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Raya, berdasarkan strategi pembangunan wilayah dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatanterfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota Gorontalo. Sementara dari pengembangan potensi diarahkan untuk pengembanganperikanan, pariwisata dan perkebunan.

Bolaang Mongondow Selatan relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T) adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian tengah, yang didukung dengan pusat logistik "*Dry Port*" Kotamobagu dan industri KIMONG di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara wilayah Kota Kotamobagu. Industri KIMONG di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow akan memberikan efek limpahan aktivitas ekonomi (*spillover effect*) bagi pengembangan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seperti serapan tenaga kerja dan bersamaan dilakukannya pengembangan objek wisata serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Strategi pengembangan wilayah Bolaang Mongondow Selatan dalan kluster pengembangan Bolaang Mongondow Raya adalah sebagai berikut:

1. Molibagu merupakan Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi;
2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku beras, jagung, kentang, wortel, dan pengolahan buah nenas dan pisang; hilirisasi industri pengolahan gula aren dan gula semut; hilirisasi industri pengolahan kopi dan kakao; hilirisasi dan pengembangan industri mikro dan kecil produk makanan lokal dan minuman;
3. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Torosik;
4. Peningkatan TPI Molibagu; dan
5. Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung Berapi Ambang, Agro Wisata); Bahari (Pantai, *Spots Diving, Snorkeling*), dan Budaya.

Strategi pembangunan kluster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
    a. Peningkatankualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
    b. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
    c. Pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal;
    d. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan;
    e. Percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
    f. Pelaksanaan pembangunan afirmatif.
2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui:
    a. Pengembangan komoditas unggulan kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
    b. Pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
    c. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
    d. Revitalisasi kawasan transmigrasi;
    e. Pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan;
    f. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan *Dry Port*(DP);
    g. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
    h. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan bolaang mongondow raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
    i. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan kluster kawasan.

3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain :
    a. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
    b. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
    c. Percepatan penerapan spm pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
    d. Peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
    a. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
    b. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
    a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
    b. Peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya;
    c. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
    d. Peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
    e. Peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
7. Pembangunan desa terpadu yang mencakup:
    a. Peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;
    b. Penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa,
    c. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
    d. Transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa (BUMDes);
    e. Perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan

f. Pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran keterkaitan pembangunan Kluster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada **Gambar 6.3** berikut ini.

Gambar 6.3
Kluster Pengembangan Wilayah Bolaang Mongondow Raya

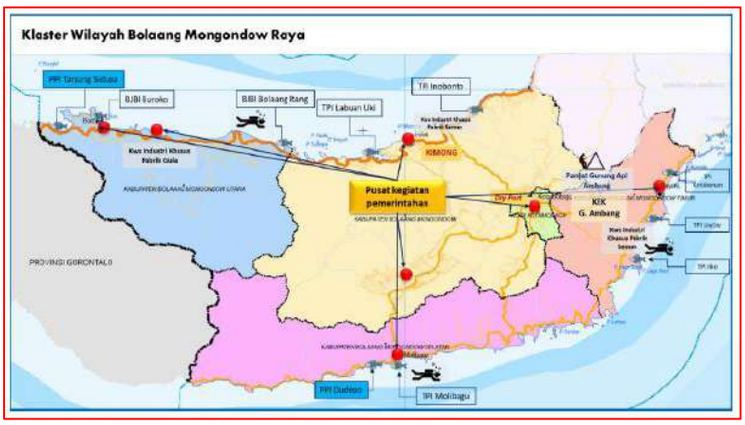

Sumber: Ranhir RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026

6.3.2 StrategiPengembangan Wilayah Daerah Berbatasan (Boltim, Bolmut Bolmong dan Bone-Bolango)

1) **Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas,** yang dilakukan antara lain:
   a. Pengembangan jalan dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Bolaang Mongondow Utara melalui jalur Kecamatan Posigadan;
   b. Pembangunan jalur kereta api (Gorontalo-Bone Bolango- Bolaang Mongondow Selatan-Boltim-Mitra-Bitung).

2) **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Tomini Berbasis Pedesaan**

   Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan merupakan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. KEK Teluk Tomini digagas sebagai akselerasi upaya penurunan kemiskinan dan kondisi IPM di 11 kabupaten/kota yang terletak di wilayah Teluk Tomini di antaranya: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato, Parigi Moutong, Banggai, Poso dan Tojo Una-Una. Kondisi kemiskinan ini diharapkan melalui intervensi melalui pendekatan spasial (kawasan). Untuk itu sebagai kabupaten dalam wilayah pengelolaan KEK Tomini Berbasis Pedesaan Kabuputen Bolaang Mongondow Selatan memiliki strategi:
   a. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar kabupaten dalam satu kawasan pengelolaan dalam upaya pemasaran produk unggulan;

b. Memperkuat pengembangan pariwisata dengan membangun jalur wisata dengan rute melewati wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan

c. Memperkuat kerjasama daerah dalam pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan jasa keuangan lainnya.

6.4. STRATEGI PENANGGULANGAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID 19

6.4.1. Pemulihan Ekonomi

a. Hilirasasi Produk Sektor Pertanian dan Perikanan

Sektor Pertanian dan Perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana di tahun 2021 menyumbang 38,18 PDRB namun laju pertumbuhannya sendiri hanya 1,87%, untuk itu pemerintah perlu mendorong dan memperkuat sektor pertanian dan perikanan dengan memanfaatkan potensi lokal. Hilirisasi produk turunan perkebunan dan perikanan yang dilakukan antara lain:

1) Pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dengan fokus pengembangan komoditi kelapa, cabe, pisang dan lemon yang saat ini menjadi fokus pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan disamping komoditas utama padi, kedelai dan jagung;
2) Hilirasi produk perikanan dilakukan dengan pengolahan ikan tuna loin dan ikan asap sebagai produk perikanan unggulan daerah, dengan memberi bantuan berupa freezer untuk menjaga mutu hasil pengolahan. Peningkatan pemasaran dengan memberikan kemudahan akses informasi *uptudate* pasar secara digital kepada masyarakat pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan;
3) Upaya hilirasi produk ini dilakukan dengan dengan meningkatkan produksi perkebunan dan perikanan melalui pemberian sarana dan prasarana produksi seperti penyediaan bibit unggul, pengendalian hama, pupuk, pengolahan lahan dan pemasaran hasil produksi;
4) Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan bagi nelayan kecil, berupa Alat Penangkapan Ikan (API) seperti: perahu ukuran ≤ 5 Gross Ton, jaring insang, long line, bottom long line, trammel net, dan bubu, serta alat bantu penangkapan seperti: mesin ketinting, mesin tempel 15 PK, rumpon.

b. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM

UMKM diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di daerah dan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan, oleh karena itu peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM difokuskan pengembangan kapasitas UMKM serta kualitas

produk, sehingga produk dapat bersaing di pasar regional maupun pasar internasional, strategi dalam menaikan kelas UMKM antara lain :

1) Fasilitasi terhadap akses permodalan dan askes pasar;
2) Peningkatan kapasitas sumber daya UMKM melalui sosialisasi, Pendidikan dan pelatihan;

c. Pemulihan Ekonomi dari Desa

Semangat umanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan pedesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarkat desa, dengan mendorong pembangunan desa maju dan mandiri yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Peningkatan status desa menjadi maju dan mandiri diharapkan dapat menjadi sumber-sumber ekonomi yang produktif, strategi pemulihan ekonomi dari desa antara lain :

1) Pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa;
2) Peningkatan Bumdes dengan pemanfaatan potensi unggulan daerah serta sektor UMKM; dan
3) Pembangunan infastruktur desa berbasis padat karya, yang diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur jalan sebagai penunjang perkenomian serta banyak menyerap tenaga kerja.

d. Pemulihan Investasi

Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunanperekonomian suatu daerah. Menurunnya realisasi penanamanmodal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19, strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan

1) Realisasi investasi baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor;
2) Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat dan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

6.4.2. Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pangan dan pertanianrelatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun tetap ada resikodari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknyapermintaan. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya-

upayamenjaga ketahanan pangan masyarakat yang mencakupketersediaan pangan berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokaldilakukan dengan:

1) Mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan melalui penyediaan sarana dan prasaranaproduksi, penggunaan teknologi yang bersifat *sustainable*, danpemberdayaan masyarakat bersifat padat karya;
2) Meningkatkan distribusi dan komoditas pangan antar daerah;
3) Penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis berupa pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Pekarangan Pangan Lestari ini selain meningkatkan konsumsi makanan yg bergizi juga menambah penghasilan keluarga bila hasil panen dijual.

6.4.2. Kesehatan Masyarakat

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19 memerlukan penanganan secara serius. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan Sumber DayaManusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan dalampenanganan penyebaran COVID-19. Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki tujuan utama yaitu: Mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang sehat dan Panjang umur, dengan strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan akses sarana prasarana Kesehatan sampai ke tingkat desa;
2) Meningkatkan cakupan vaksinasi Covid 19;
3) Pemberdayaan Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat yaitu dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif yaitu memberikan informasi kesehatan melalui media promosi;
4) Meningkatkan kualtias SDM Kesehatan melaui Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

6.4.4. Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dan memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat Bolaang Mongondow Selatan, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan. Selain melalui

programpemulihan ekonomi juga dilakukan program perlindungan sosial yang komprehensif bagi masyarakat yang terkena dampak, diantaranya :

1) Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
2) Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan usaha mikro (pembiayaan, pemasaran produk) dengan lembaga lain yang menunjang seperti perbankan;
3) Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskindilakukan dengan SPP gratis, beasiswa siswa miskin, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6.5. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kenaikan harga BBM mendorong inflasi yang berdampak pada banyak hal, diantaranya (1) penurunan daya beli masyarakat, (2) kenaikan harga-harga pokok yang memberatkan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Fakta bahwa penduduk miskin berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 sebesar 12,85% yang berada jauh diatas rata-rata provinsi serta masih berada di peringkat 15 dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara selain itu estimasi kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021 berada di angka 1,87, diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangannya pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi yang tepat. Permasalahan yang sering terjadi di perangkat daerah adalah pemahaman terhadap isu penanggulangan kemiskinan ini hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu, Selain itu permasalahan data masyarakat miskin yang juga belum sinkron.

Pendekatan penanggulangan kemiskinan dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

1) Kluster 1, Sangat miskin - kemiskinan yang sangat kronis atau turun menurun;
2) Kluster 2, mikin – kemikisnan yang mengikuti pola sklus ekonomi secara keseluruhan; dan
3) Kluster 3, hampir miskin;

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dibagi 2 (dua) strategi besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami

kemiskinan sementara, kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan meberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut dituangkan dalam program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada pengurangan penduduk miskin :

1) Penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin;
2) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui angka kelahiran total;
3) Pengembangan system jaminan sosial;
4) Pemerataan dan peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat;
5) Peningkatan akses infrastruktur sosial, diantaranya akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni;
6) Pengembangan budaya usaha melalui peningkatan akses permodalan, pengembangan ketrampilan usaha;
7) Peningkatan kesempatan kerja, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja;
8) Pengembangan sektor pertanian dan/atau perkebunan sebagai lapangan pekerjaan tambahan bagi nelayan;
9) Pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial dari pemerintah daerah hingga tingkat desa; dan
10) Pemberian bantuan sosial bagi penerima yang tepat sasaran.

6.6 STRATEGI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meningkatkan perhatian dan anggaran untuk mempercepat penurunan angka bayi pendek (*stunting*). Kondisi prevalensi *stunting* tahun 2021 tercatat sebesar 14,47%. Tingginya angka ini merupakan permasahan bagi Pemerintah Daerah dalam pencegahan *stunting*, diantaranya :

1) Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*;
2) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatanterkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
3) Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
4) Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5) Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka strategi percepatan pencegahan stunting dilakukan antara lain:

1) Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan; untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah;
2) Memperbaiki disain dan pengelolaan program; untuk memastikan sasaran prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
3) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah sampai desa; untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program;
4) Akses pangan yang bergizi; dengan memastikan keterjangkauan dan keteresediaan pangan bergizi, dan mendorong cakupan dan kualitas program fortifikasi pangan utama yang sudah berjalan (garam, tepung terigu, minyak goreng);
5) Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai yang bergizi untuk keluarga kurang mampu; agar dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran prioritas dari keluarga kurang mampu;
6) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga; dengan mempercepat diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
7) Peningkatan sistem pendataan; yang dapat memantau secara akurat dan berkala data prevalensi stunting di tingkat desa/kecamatan;
8) Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan; dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
9) Pengembangan kapasitas penyelenggara; dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien; dan
10) Percepatan siklus pembelajaran, dengan meningkatkan mekanisme berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan inovasi.

Selain itu, salah satu inovasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang cukup tinggi adalah dengan pembangunan system informasi penanganan stunting terintegrasi melalui **S**istem **I**nformasi **P**enanganan Stun**TI**ng **TER**integrasi di Kabupaten **BOL**aang Mongondow **SEL**atan ***"Si PINTER BOLSEL"***. System ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan stunting terintegrasi secara digital, cepat, mudah, efektif dan efesien dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan seluruh steakholder yang berdampak pada penurunan angka pravelansi stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

6.7. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, lintas sektor dan berskala besar serta memiliki urgensi yang tinggi. program prioritas daerah diharapkan dapat langsung menyentuh kepada masyarakat diantaranya sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik, program prioritas tersebut merupakan penerjemahan visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya program prioritas tersebut diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 6.3.
Integrasi program prioritas dan program nomenklatur

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan
	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
Program Menjaga Toleransi, Keagamaan dan Keamanan Warga	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan kesenian tradisional	
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Seluruh Kecamatan
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
Program Pengembangan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Program pengembangan permukiman	
	Program penataan bangunan Gedung	
	Program penyelenggaraan jalan	
	Program penyelenggaran penataan ruang	
	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukinan dan Pertanahan
	Program kawasan permukiman	
	Program perumahan dan kawasan kumuh	
	Program peningkatan sarana prasarana dan utilitas umum (PSU)	
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Program Percepatan Penguarangan Kemiskinan	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial	
	Program perlindungan dan jaminan sosial	
	Program penanganan bencana	
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program penempatan tenaga kerja	
	Program hubungan industrial	
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
	Program penanganan kerawanan pangan	
	Program pengawasan keamanan pangan	
Program Peningkatan Sektor Unggulan Daerah	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
	Program pengembangan UMKM	
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program promosi penanaman modal	
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
	Program pengelolaan perikanan budidaya	
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian
	Program penyediaan dan epngembangan prasarana pertanian	
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
	Program penyuluhan pertanian	
Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusahakan lingkungan hidup	
	Program keanekaragaman hayati (kehati)	
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	
	Program pengelolaan persampahan	
	Program pendaftaran penduduk	

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
	Program pengelolaan profil kependudukan	
	Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program aplikasi informatika	
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	
	Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan arsip	Dinas perpustakaan
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	
	Program perizinan penggunaan arsip	
	Program administrasi umum	Sekretariat Daerah
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
	Program perekonomian dan pembangunan	
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Sekretariat DPRD
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	

Program Prioritas Daerah	Sinkronisasi Program PMDN 90	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
	Program penelitian dan pengembangan daerah	
	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	
	Program pengelolaan pendapatan daerah	
	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan sumber daya manusia	
	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat Daerah
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Seluruh Kecamatan
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

.

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Misi 1 : **Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila**																
			Tujuan 1 : **Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Religius, Toleran antar Sesama Umat Beragama serta Menjaga Ketertiban dan Ketentraman**	**Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama**	Indeks	**n/a**	**2,51**		**2,75**		**2,85**		**3,00**		**3,25**		**3,25**		
			Sasaran 1 : **Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah**	**Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama**	**Indeks**	**n/a**	**2,51**		**2,75**		**2,85**		**3,00**		**3,25**		**3,25**		
				Angka Kriminalitas	**Angka**	**340,16 /**	**300/ 100.00**		**300/ 100.00**		**300/ 100.00**		**300/ 100.00**		**300/ 100.00**		**300/ 100.00**		
				Indeks Resiko Bencana	**Indeks**	**149,60 (Tinggi)**	**149**		**148,5**		**148,25**		**148**		**147,9**		**147,9**		
				Indeks Gotong Royong	**Indeks**	**n/a**	**2,40**		**2,60**		**2,80**		**3,00**		**3,20**		**3,20**		
1	**5**	02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan	%	100	100	2.142.637.500	100	2.185.490.250	100	2.229.200.055	100	2.273.784.056	100	2.319.259.737	100	11.150.371.598	Satuan Polisi Pamong Praja
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penanganan Perda	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	'04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	513.005.000	15	582.378.570	15	534.321.537	15	545.007.967	15	555.908.127	15	2.730.621.201	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	393.606.885	100	1.302.759.801	100	1.328.814.997	100	1.355.391.297	100	1.382.499.123	100	5.763.072.103	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		100	-	
4	1	02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Ratio Rumah Ibadah per Satuan Penduduk	Angka		70	5.436.133.400	70	3.636.591.825	70	4.736.280.351	70	4.831.526.854	70	4.897.785.682	70	23.538.318.112	Sekretariat Daerah
8	1	02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Angka Potensi Konflik Sara di Masyarakat	Kejadian	0	0	81.588.950	0	231.142.820	0	298.036.430	0	306.163.252	0	314.696.415	0	1.231.627.867	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politik	%	97,39	0	339.790.950	0	386.794.805	98,5	418.339.050	0	426.272.225	0	428.548.336	98,5	1.999.745.366	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	n/a	6	437.130.350	4	334.884.805	5	1.056.000.000	4	1.056.000.000	4	1.056.000.000	23	3.940.015.155	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Angka Potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di Masyarakat	Kejadian	n/a	5	35.724.300	5	142.911.410	5	200.557.579	5	203.141.689	5	204.717.138	25	787.052.116	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	Kejadian	n/a	5	113.595.100	5	137.736.550	5	216.136.981	5	218.432.328	5	220.842.443	25	906.743.402	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
2	10	04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100			100	39.991.500	100	60.000.000	100	61.200.000	100	62.424.000	100	223.615.500	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	10	05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN UNTUK PEMBANGUNAN**	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	%	100			100	14.977.000	100	45.000.000	100	45.900.000	100	46.818.000	100	152.695.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah serta ganti rugi program kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	n/a			100	154.631.148	100	200.000.000	100	204.000.000	100	208.080.000	100	766.711.148	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase permasalahan tanah kosong yang diselesaikan	%	n/a			100	99.997.000	100	325.000.000	100	331.500.000	100	338.130.000	100	1.094.627.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase tanah tidur yang dimanfaatkan	%	n/a					3	52.125.780	3	53.168.296	3	54.231.662	9	159.525.737	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase luas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	%	57,69	60	80.000.000			65	300.000.000	67	306.000.000	71	312.120.000	71	998.120.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Bolaang Uki
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Helumo
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Tomini
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Posigadan
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Pinolosian
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Pinolosian Tengah
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian	n/a					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Pinolosian Timur

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Misi 2 : **Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Berdaulat**																
			Tujuan 2 : **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dalam Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur**	**Indeks**	**n/a**	**2,70**		**2,80**		**2,90**		**3,00**		**3,05**		**3,05**		
			Sasaran 2 : **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perekenomian Daerah**	**Ratio Konektivitas**	**Ratio**	**30,43**	**30,45**		**30,46**		**30,46**		**30,46**		**30,46**		**30,46**		
				Indeks Aksisibilitas Jalan	**Indeks**	**20**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		
				Cakupan Wilayah (Desa) yang Tercover Jaringan	**%**	**65,43**	**66,67**		**69,14**		**74,07**		**76,54**		**77,78**		**77,78**		
1	03	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Ketersediaan Air Baku	%	n/a	65	1.623.685.000	67	3.295.789.240	70	3.361.705.025	71	3.428.939.125	72	3.497.517.908	72	15.207.636.298	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan Layanan Irigasi	%	68,23	70		71,5		72		73		75		75		
1	03	03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan SPAM dan jaringannya dalam kondisi baik	%	100	100	9.807.677.260	100	2.969.992.000	100	3.029.391.840	100	3.939.756.281	100	4.981.971.670	100	24.728.789.051	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	45,9	100	7.195.461.900	100	1.790.000.000	100	1.825.800.000	100	1.862.316.000	100	1.899.562.320	100	14.573.140.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan IPAL yang terbangun dalam kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	03	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun dalam kondisi baik	Meter	3800	3977	297.591.000	3977	400.000.000	4377	408.000.000	4777	1.420.000.000	5177	1.420.000.000	5477		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Panjang Drainase / Gorong-Gorong yang direhab dalam kondisi baik	Meter	n/a	0		1000		2500		4000		5177		5177		
1	03	07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase jalan pemukiman dalam kondisi baik	%	n/a	0	-	0	-	53	1.540.000.000	55	1.540.000.000	60	1.540.000.000	60	4.620.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Gedung Milik Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	150.000.000	100	1.696.600.000	100	4.120.000.000	100	1.120.000.000	100	120.000.000	100	7.206.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase Kepatuhan IMB/TDG	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	03	09	**PROGRAM PENATAAN BANGUANAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Kepatuhan IMB/TDG	%	100	100	299.955.150	100	880.000.000	100	875.000.000	100	1.125.000.000	100	875.000.000	100	4.054.955.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Km	259,69	269,4	26.686.522.800	282,45	33.849.531.556	293,45	29.040.001.750	305,95	31.230.000.000	319,95	31.854.600.000	319,95	152.660.656.106	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Ratio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	55		-	65	965.206.000	70	1.650.000.000	75	1.683.000.000	80	1.650.000.000	80	5.948.206.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	**PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG**	Persentase wilayah yang tersusun tata ruangnya	%	0	77	693.316.800	77	2.549.997.511	77	2.950.000.000	77	3.009.000.000	77	2.950.000.000	77	12.152.314.311	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Jumlah Pelanggaran tata ruang	Kali	n/a	1		1		1		1		1		1		
1	04	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	2.174.867.590	100	1.202.551.000	100	1.226.602.020	100	1.251.134.060	100	1.276.156.742	100	7.131.311.412	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah darerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	%	0	100		100		100		100		100		100		
1	04	03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	13,11		-	17	24.997.300	20	225.000.000	23	229.500.000	26	234.090.000	26	713.587.300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	04	'04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN KUMUH**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	13,11		-	17	2.112.500.000	20	2.154.750.000	23	2.114.353.154	26	2.112.713.453	26	8.494.316.607	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	04	05	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	%	51,62		-	56,05	755.303.663	59,81	1.000.000.000	64,39	1.020.000.000	67,41	1.000.000.000	67,41	3.775.303.663	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	15	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang dibangun dalam Kondisi Baik	%	54,3	55	1.188.338.000	57,5	2.078.174.713	60	2.079.738.207	61	2.091.332.971	63	2.133.159.630	63	9.570.743.522	Dinas Perhubungan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji KIR	Unit	742	500		500		500		500		500		2500		
				Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan	%	58,4	60		62,5		65		67,5		70		70		
2	15	03	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYARAN**	Persentase Layanan Angkutan Penyeberangan	%				75	25.000.000	75	52.948.107	75	54.007.069	75	55.087.211	75	187.042.387	
			Tujuan 3 : **Meningkatnya Pembangunan Wilayah Dalam Mewujudkan Kemajuan dan Kemandirian Desa**	**Indeks Desa Membangun**	**Indeks**	**0,6988**	**0,702**		**0,711**		**0,72**		**0,7486**		**0,7486**		**0,7486**		
			Sasaran 3 :	**Jumlah Desa Maju**	**Desa**	**31**	**32**		**33**		**34**		**35**		**36**		**36**		
			Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	**Jumlah Desa Mandiri**	**Desa**	**1**	**2**		**4**		**5**		**6**		**7**		**7**		
2	13	02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	%	n/a			100	25.000.000	100	25.000.000	100	26.000.000	100	36.000.000	100	112.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa	Desa	0			2	29.988.400	2	30.588.168	2	31.199.931	2	31.823.930	8	123.600.429	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	'04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Desa	Angka	n/a	85	474.525.100	85	406.243.265	85	414.368.130	85	422.655.493	85	431.108.603	85	2.148.900.591	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	n/a	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Desa yang menyusun APBDes Tepat Waktu	%	n/a	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Desa yang menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	n/a	85		85		85		85		85		85		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**13**	05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga PMD Aktif	%	100	100	47.936.400	100	110.151.972	100	112.355.011	100	114.602.112	100	116.894.154	100	501.939.649	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK Desa Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Poyandu Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		
			Misi 3 : **Meningkatkan Kapasitas Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan**																
			Tujuan 4 : **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Menyebar, Inklusif berbasis Potensi Unggulan dan Berwawasan Lingkungan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**3,74**	**3,50 – 5,61**		**4,50 – 5,61**		**5,50 – 6,98**		**5,75 – 7,20**		**5,75 – 7,60**		**5,75 – 7,60**		
				Persentase Penduduk Miskin	**%**	**12,85**	**12,30 – 11,37**		**11,84 – 10,96**		**11,40 – 10,56**		**10,98 – 10,16**		**10,57 – 9,79**		**10,57 – 9,79**		
				Tingkat Kemiskinan Ekstrim	**%**	**1,38**	**2,53**		**1,26**		**0**		**0**		**0**		**0**		
			Sasaran 4 : **Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan**	**Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB**	**%**	**38,14**	**38,69**		**38,76**		**38,79**		**39,18**		**39,21**		**39,21**		
				Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	**%**	**0**	**0,15**		**0,32**		**0,45**		**0,55**		**0,71**		**0,71**		
2	**17**	03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	14,43			40	35.824.615	50	36.541.107	60	37.271.929	70	38.017.368	70	147.655.020	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**17**	05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	n/a	19,34	49.997.700	22	49.999.708	25,77	48.400.000	30	53.240.000	35	58.564.000	35	260.201.408	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**17**	06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	n/a	10	42.355.000	10	42.780.650	15	48.400.000	17	53.240.000	20	58.564.000	20	245.339.650	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Ratio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	%	n/a	99,00	129.637.300	50,00	513.505.691	50,00	514.250.000	50,00	465.020.045	50,00	474.320.446	50,00	2.096.733.482	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase Usaha Mikro	%	95,03	95,05		94,88		94,81		94,73		94,65		94,65		
				Persentase Usaha Kecil	%	4,46	4,52		4,59		4,66		4,73		4,80		4,80		
				Persentase Usaha Menengah	%	0,51	0,52		0,53		0,53		0,54		0,55		0,55		
2	17	08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro	%	95,03	95,05	102.974.000	94,88	149.999.850	94,81	152.999.847	94,73	156.059.844	94,65	159.181.041	94,57	721.214.582	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase Usaha Kecil	%	4,46	4,52		4,59		4,66		4,73		4,80		4,87		
				Persentase Usaha Menengah	%	0,51	0,52		0,53		0,53		0,54		0,55		0,56		
2	18	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investasi	%	81,2 Milyart	5	26.065.300	6	26.949.430	7	27.488.419	8	28.038.187	9	28.598.951	9	137.140.286	Dinas PMPTSP
2	18	03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Minat Investasi	%	n/a			6	28.380.000	7	28.947.600	8	29.526.552	9	30.117.083	9	116.971.235	Dinas PMPTSP
2	18	05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ penanam modal	%	100	100	388.650.348	100	388.472.070	100	396.241.511	100	404.166.342	100	412.249.668	100	1.989.779.939	Dinas PMPTSP
2	18	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	%	n/a	80	24.271.100	82	24.262.000	85	24.747.240	87	25.242.185	90	25.747.028	90	124.269.553	Dinas PMPTSP
3	25	02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	14.246	20000	505.374.050	22000	4.243.108.250	24000	3.363.656.120	26000	2.491.441.886	26000	2.571.445.000	26000	13.175.025.306	Dinas Perikanan
3	25	03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,06	43,5	617.952.911	44,5	1.702.707.259	45,5	2.361.550.000	46,5	3.131.775.000	46,5	2.966.570.566	46,5	10.780.555.736	Dinas Perikanan
3	25	05	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Pohlaksar Naik Kelas	Kelompok	n/a	1	56.856.100	1	204.789.750	1	457.775.000	1	591.881.250	1	708.926.500	1	2.020.228.600	Dinas Perikanan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	26	02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Lama kunjungan wisatawan	Hari	0	1,39	296.989.072	1,44	2.695.704.000	1,51	2.250.234.022	1,6	2.295.238.702	1,6	2.594.356.635	1,6	10.132.522.431	Dinas Pariwisata
3	26	03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan wisatawan	%	n/a	1	926.883.000	1	579.107.200	1	540.224.500	2	567.236.249	3	595.793.490	3	3.209.244.439	Dinas Pariwisata
3	26	'04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Naik Kelas	Unit	n/a					1	39.752.526	1	75.801.184	1	100.000.000	3	215.553.710	Dinas Pariwisata
3	26	05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah Produk Unggulan Ekraf	Produk	n/a	3	289.256.000	3	204.508.000	3	695.266.477	3	593.898.551	3	248.217.541	3	2.031.146.569	Dinas Pariwisata
				Jumlah Pelaku Usaha Ekraf	Org	n/a	50		50		50		50		50		50		
3	27	02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul	%	n/a	40	769.152.188	70	705.832.325	70	719.948.972	70	734.347.951	70	749.034.910	70	3.678.316.345	Dinas Pertanian
				Persentase penyediaan sarana pertanian dibanding kebutuhan	%	n/a			80		80		85		90		90		
3	27	03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN EPNGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Penyediaan Prasana Pertanian	%	n/a	100	206.400.200	100	397.848.540	100	405.805.511	100	413.921.621	100	422.200.053	100	1.846.175.925	Dinas Pertanian
				Luas Lahan Sawah	Ha	1.087	1.087		1.087		1.087		1.087		1.087		1.087		
				Luas Lahan Kering	Ha	10.884	10.884		10.884		10.884		10.884		10.884		10.884		
				Luas Lahan Perkebunan	Ha	23.267	23.267		23.267		23.267		23.267		23.267		23.267		
3	27	'04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Angka Kejadian Penyakit	Angka	0	1	144.015.600	1	121.940.250	1	138.300.066	1	138.300.066	1	138.300.066	1	680.856.048	Dinas Pertanian
3	27	05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	n/a			100	95.880.375	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	995.880.375	Dinas Pertanian
3	27	07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	98,55	100	828.196.285	100	1.505.411.778	100	1.237.694.601	100	1.188.695.085	100	1.137.890.386	100	5.897.888.135	Dinas Pertanian

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	030	03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	100	100	513.389.500	100	285.987.585	100	291.707.337	100	297.541.483	100	303.492.313	100	1.692.118.218	Dinas Perindustrian
3	030	04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	54,07	55	19.387.000	56	54.990.000	57	56.089.800	58	57.211.596	59	58.355.828	60	246.034.224	Dinas Perindustrian
3	030	05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Jumlah Produk Bolsel yang di Eksport	Produk	0	0	44.436.000	1	76.938.000	1	78.476.760	1	80.046.295	1	81.647.221	1	361.544.276	Dinas Perindustrian
3	030	06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	%	10	15	87.815.000	20	45.461.780	25	46.371.016	30	47.298.436	35	48.244.405	35	275.190.636	Dinas Perindustrian
3	030	07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase produk unggulan yang mengikuti promosi/pameran	%	n/a	1	19.822.000	1	32.736.000	1	33.390.720	1	34.058.534	1	34.739.705	5	154.746.959	Dinas Perindustrian
3	031	02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	%	n/a	5	466.985.200	5	542.013.585	5	514.220.129	5	485.484.466	5	455.783.889	25	2.464.487.269	Dinas Perindustrian
3	031	03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan instansi terkait	%	100			100	174.995.660	100	178.495.573	100	182.065.485	100	185.706.794	100	721.263.512	Dinas Perindustrian
			Sasaran 5 : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**79,6**	**80**		**80**		**80**		**80,5**		**81**		**81**		
2	11	02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	65	100	236.984.450	100	107.977.000	100	110.136.540	100	112.339.271	100	114.586.056	100	682.023.317	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAHAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Sungai dengan Indeks Pencemaran Air "Ringan"	%	61,66	60	48.758.300	55	51.881.635	50	52.919.268	50	53.977.653	50	55.057.206	50	262.594.062	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luasan Kaawasan Hijau	%	93,04	93		93,5		94		94,5		95		95		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**11**	04	**PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Cakupan Lahan Kritis yang direhabilitasi	%	n/a		-		81.037.404		82.658.152		84.311.315		85.997.541		334.004.412	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Jumlah Kasus Pencemaran Limbah B3	Kasus	0	0	15.360.950	0	15.358.900	0	15.666.078	0	15.979.400	0	16.298.988	0	78.664.315	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	**11**	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	100	100	25.324.000	100	22.624.000	100	23.076.480	100	23.538.010	100	24.008.770	100	118.571.259	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang diakui keberadaannya sesuai Peraturan dan Per-UU	%	0			100	30.000.000	100	30.600.000	100	31.212.000	100	31.836.240	100	123.648.240	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Masyarkat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan/penyuluhan lingkungan hidup	%	0			1	19.148.340	1	19.531.307	1	19.921.933	1	20.320.372	5	78.921.951	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kali	0	1	104.660.450	1	163.546.850	1	166.817.787	1	170.154.143	1	173.557.226	1	778.736.455	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	36.523.800	100	47.422.000	100	48.370.440	100	49.337.849	100	50.324.606	100	231.978.695	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	71	86	1.641.777.237	87	2.245.596.450	88	2.233.879.303	89	2.221.361.522	90	2.208.021.432	90	10.550.635.945	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sasaran 6 :	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Angka**	**4,6**	**4,16 – 3,74**		**3,95 – 3,57**		**3,76 – 3,38**		**3,57 – 3,20**		**3,39 – 3,05**		**3,39 – 3,05**		
			Menurunnya Tingkat Pengangguran, Pemerataan Pendapatan serta Ketahanan Pangan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS	**Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk**	**%**	**1,41**	**1,4**		**1,39**		**1,38**		**1,37**		**1,36**		**1,36**		
				Indeks Ketahanan Pangan	**Indeks**	**76,72**	**77,49**		**77,84**		**78,16**		**78,52**		**78,79**		**78,79**		
				Persentase Penurunan PMKS	**%**	**17,15**	**1,72**		**3,46**		**5,88**		**8,68**		**10,68**		**10,68**		
1	**6**	02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Jumlah PSKS	Orang	250	250	852.092.915	250	864.084.336	250	881.366.023	250	898.993.343	250	916.973.210	250	4.413.509.827	Dinas Sosial
1	**6**	03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentasi penanganan tindak kekerasan bagi warga Negara migran cakupan daerah	%	0%					100	57.881.250	100	59.038.875	100	59.038.875	100	175.959.000	Dinas Sosial
1	**6**	'04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	70	75	204.742.815	75	332.944.200	75	339.603.084	75	346.395.146	75	353.323.049	75	1.577.008.293	Dinas Sosial
1	**6**	05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentae Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	n/a	100	100	935.239.780	100	1.411.938.820	100	1.320.814.931	100	1.285.135.000	100	1.249.301.286	100	6.202.429.816	Dinas Sosial
1	**6**	06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Cakupan Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	100	100	517.766.035	100	517.948.085	100	528.307.047	100	538.873.188	100	549.650.651	100	2.652.545.006	Dinas Sosial
2	**7**	02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Rencana Kerja	%	na									50	33.000.000	50	33.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Lulusan Pelatihan yang memiliki Kompetensi	%	100	90	133.583.260	90	349.996.890	90	356.996.828	90	364.136.764	90	371.419.500	90	1.576.133.242	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persetnase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	10,86	11		12		13		14		15		15		
2	**7**	'04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	4	5		5	35.000.000	5	35.700.000	5	36.414.000	5	37.142.280	20	144.256.280	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja	Kali	n/a	1		1	1.456.560.000	1	1.485.691.200	1	1.515.405.024	1	1.451.906.060	1	5.909.562.284	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100	100		100		100		100		100		100		Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	9	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Skor PPh Ketersediaan	Angka	n/a			89	58.231.410	89	59.396.038	89	60.583.959	89	61.795.638	89	240.007.045	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPh Konsumsi	Angka	83,9	84,25	127.546.975	85	1.313.387.406	86	1.339.655.154	87	1.318.017.661	87,5	1.322.283.065	87,5	5.420.890.261	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Jumlah Wilayah Rentan Pangan	%	0	0	166.281.000	0	250.058.470	0	255.059.639	0	210.000.000	0	210.000.000	0	1.091.399.109	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Jumlah Keracunan Pangan	%	n/a	1	21.900.605	1	126.301.010	1	128.827.030	1	200.000.000	1	200.000.000	5	677.028.645	Dinas Ketahanan Pangan
2	14	02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam KB Mandiri	%	n/a	35	916.442.100	37,5	886.599.050	40	904.331.031	42,5	922.417.652	45	940.866.005	45	4.570.655.837	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	14	03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Cakupan peserta KB Aktif	%	57,16	60	2.567.932.315	62	2.619.290.961	63	2.671.676.781	65	2.725.110.316	67	2.779.612.522	67	13.363.622.895	Dinas PP, KB, PP dan PA
				Jumlah Kampung KB	Kampung	21	22		25		30		32		35		35		
2	14	04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Kelompok Tribina	%	n/a	15	457.720.000	20	457.720.000	25	466.874.400	30	476.211.888	35	485.736.126	35	2.344.262.414	Dinas PP, KB, PP dan PA
3	32	02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	1	1	39.999.820	1	39.999.820	1	40.799.816	1	41.615.813	1	42.448.129	1	204.863.398	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Misi 4 : **Meningkatkan Pelayanan Publik Berabasis Teknologi Informasi dan Inovasi melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**																
			Tujuan 5 : **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Governance*)**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**53,2**	**71**		**72**		**73**		**74**		**75**		**75**		
			Sasaran 8 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**64,56**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
				Opini BPK Terhadap LKPD	**Opini**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,9**	**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		
2	**12**	02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan Penerbitan KTP-el	%	100	100	319.155.000	100	325.538.100	100	332.048.862	100	338.689.839	100	345.463.636	100	1.660.895.437	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan KIA	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Penerapan Buku Pokok Pemakaman	%	0	100		100		100		100		100		100		
2	**12**	03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	100	100	-	100	63.989.000	100	65.268.780	100	66.574.156	100	67.905.639	100	263.737.574	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	**12**	'04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	PD	6	0	-	7	20.033.036	7	20.433.697	7	20.842.371	7	21.259.218	7	82.568.321	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	PD	6	0	-	7	25.490.050	7	25.999.851	7	26.519.848	7	27.050.245	7	105.059.994	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**16**	02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	4.097.517.350	100	4.630.633.190	100	3.962.590.117	100	3.919.330.085	100	3.872.514.342	100	20.482.585.084	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16	03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	63,64	65	852.976.600	70	2.867.570.340	75	1.037.861.007	80	1.089.754.057	88	1.144.241.760	88	6.992.403.765	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	18	04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Kesesuaian Penyelesaian dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	%	100	100	134.159.925	100	142.709.475	100	145.563.665	100	148.474.938	100	151.444.437	100	722.352.439	Dinas PMPTSP
2	20	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase ketersediaan metadata statistik sektoral	%	n/a	80	82.182.750	80	183.826.405	80	187.502.933	80	191.252.992	80	195.078.052	80	839.843.131	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase pemenuhan data kebutuhan pembangunan daerah	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
2	21	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	36,56	36,6	130.004.000	36,7	166.203.750	36,8	183.298.943	36,9	192.463.890	37	202.087.085	37	874.057.668	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Kegiatan Strategis yang telah diamankan melalui keamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
2	24	02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	67	67	227.681.340	70	141.728.301	75	144.562.867	80	147.454.124	85	150.403.207	85	811.829.839	Dinas Perpustakaan
2	24	03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	67			70	75.000.000	75	49.765.770	80	50.761.085	85	51.776.307	85	227.303.163	Dinas Perpustakaan
2	24	'04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	n/a			60	41.976.200	65	42.815.724	70	43.672.038	75	44.545.479	75	173.009.442	Dinas Perpustakaan
4	1	1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	Persentase perangkat daerah dengan nilai Indeks RB BB	%	n/a	71	4.040.184.164	72	3.748.608.787	73	3.946.510.861	74	4.143.836.272	75	4.351.027.349	75	20.230.167.434	Sekretariat Daerah
				Persentase PD yang nilai SAKIP-nya BB	%	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Persentase PD dengan nilai IKM diatas 80	%	100	85		85		85		85		85		85		
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan pimpinan dan tamu tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
4	1	02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD	%	100	100	5.436.133.400	100	3.636.591.825	100	4.736.280.351	100	4.831.526.854	100	4.897.785.682	100	23.538.318.112	Sekretariat Daerah
				Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kunci	%		75		75		75		75		80		80		
				Persentase Rata-rata Capaian Indikator SPM	%		75		75		75		75		80		80		
				Persentase Capaian Aksi HAM	%		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Peraturan Yang tidak Harmonis/Sinkron/ Bersifat Menghambat yang di Revisi	%		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kebijakan yang diterbitkan sesuai Program Legislasi Daerah	%		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Peraturan Perundgan-Undagnan yang di dokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Policy Brief di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat akan Kebutuhan	%	n/a	80		80		80		80		80		80		
				Ratio Rumah Ibadah per Satuan Penduduk	Angka		70		70		70		70		70		70		
4	1	03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Tingkat Kematangan UKPJ	Angka		Level 3	911.912.200	Level 3	599.632.900	Level 3	1.960.312.992	Level 3	1.977.017.202	Level 3	1.994.556.627	Level 3	7.443.431.921	Sekretariat Daerah
				Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke dalam tahun berikutnya, yang ditandatangani pada Kuartal Pertama	%		25		25		25		25		25		25		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Ratio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Angka		90		90		90		90		90		90		
				Persersentase Ketepatan Waktu Penyampaian laporan EPRA	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Policy Brief di Bidang Perekonomian dan SDA akan Kebutuhan	%	n/a	80		80		80		80		80		80		
4	**2**	1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**					5.410.917.640		5.519.135.993		5.629.518.713		5.742.109.087		5.856.951.269		28.158.632.701	Sekretariat DPRD
4	**2**	02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Terselenggaranya Rapat dan Risalah Perseidangan yang Berkualitas	%	n/a	90	6.361.437.219	90	6.488.665.963	90	6.618.439.283	90	6.750.808.068	90	6.885.824.230	90	33.105.174.763	Sekretariat DPRD
				Persentase Aspirasi yang ditindaklanjuti	%	n/a	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Publikasi Kegiatan DPRD	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Kegiatan DPRD yang difasilitasi	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
5	**1**	02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam perencanaan pembangunan	%	n/a	90	1.824.516.670	90	1.944.972.060	90	1.869.280.655	90	1.790.929.512	90	1.709.853.980	90	9.139.552.877	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100		100		
5	**1**	03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	n/a	85	2.204.349.545	85	2.248.436.536	85	2.293.405.267	90	2.339.273.372	90	2.386.058.839	90	11.471.523.559	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan	%	n/a	85		85		85		90		90		90		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan	%	n/a	85		85		85		90		90		90		
5	2	02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Perda APBD Tepat Waktu	%	100	100	104.427.524.685	100	108.729.848.617	100	110.326.038.481	100	110.886.598.177	100	##############	100	545.585.235.808	Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan Daerah
				Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase PD yang menyusun RKA, DPA, DPPA Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Penerbitan SP2D	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
5	2	3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Laporan Barang Miliki Daerah tepat waktu	%	100	100	635.179.265	100	1.325.995.929	100	1.352.515.848	100	1.379.566.165	100	1.407.157.488	100	6.100.414.694	Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan Daerah
				Persentase Barang Milik Daerah yang Tersertifikasi	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
				Persentase BMD yang dimanfaatkan secara efektif dan efesien	%	100	100		100		100		100		100		100		
5	2	04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	100,36	100	1.212.543.075	100	1.064.988.720	100	1.086.288.494	100	1.108.014.264	100	1.130.174.550	100	5.602.009.103	Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan Daerah
				Jumlah Wajib Pajak Baru	WP	n/a	5		5		5		5		5		25		
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107,67	100		100		100		100		100		100		
5	3	02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase penerbitan SK secara tepat waktu	%	n/a	80	1.018.905.400	82,88	1.059.459.900	82,89	1.626.480.384	82,9	1.687.807.503	82,91	1.778.780.455	82,91	7.171.433.642	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	n/a	75		75		75		75		75		75		
				Persentase ASN yang berkinerja Baik	%	n/a	85		85		85		85		85		85		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	%	n/a	3		4		6		7		10		10		
5	4	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang melaksanakan peningkatan Kualitas SDM Aparatur	%	n/a	10	848.060.800	20	2.321.322.180	25	1.338.861.000	30	1.343.521.000	35	1.398.285.500	35	7.250.050.480	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	5	02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	%	n/a	80	402.490.355	80	855.676.950	80	872.790.489	80	890.246.299	80	908.051.225	80	3.929.255.318	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Penurunan Temuan Berulang Pemeriksaan Keuangan	%	12,45	0	3.293.259.600	0	3.640.446.660	0	3.749.775.579	0	3.860.060.977	0	3.971.309.683	0	18.514.852.499	Inspektorat Daerah
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	87,55	87		87,6		88,5		88,8		89		89		
6	1	03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Temuan Berulang	%	0	0	670.636.400	0	684.049.128	0	697.730.111	0	711.684.713	0	725.918.407	0	3.490.018.758	Inspektorat Daerah
				Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penyampaian LHKPN / LHKASN	%	100	100		100		100		100		100		100		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	19.352.950	82,5	42.905.125	82,5	27.858.589	85	29.251.518	85	30.714.094	85	150.082.275	Kecamatan Bolaang Uki
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	9.421.500	21	58.825.064	22,5	65.956.273	25	69.254.087	25	72.716.791	25	276.173.715	Kecamatan Bolaang Uki
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	19.695.000	90	59.363.025	90	44.076.873	90	46.280.717	90	48.594.752	90	218.010.367	Kecamatan Bolaang Uki
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	9.903.550	82,5	14.997.900	82,5	28.817.593	85	30.258.472	85	31.771.396	85	115.748.911	Kecamatan Helumo
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20		21	8.436.220	22,5	33.012.612	25	43.663.243	25	44.346.405	25	129.458.480	Kecamatan Helumo
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	7.500.000	90	48.144.600	90	41.983.557	90	43.061.605	90	45.214.686	90	185.904.448	Kecamatan Helumo
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	22.740.380	82,5	25.470.750	82,5	24.768.097	85	26.006.502	85	27.306.827	85	126.292.555	Kecamatan Tomini
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	9.737.865	21	9.999.967	22,5	72.620.204	25	51.101.987	25	28.845.651	25	172.305.674	Kecamatan Tomini
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	28.355.780	90	79.087.054	90	40.271.933	90	42.285.529	90	44.399.806	90	234.400.101	Kecamatan Tomini
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	25.000.000	82,5	29.225.000	82,5	27.562.500	85	28.940.625	85	30.387.656	85	141.115.781	Kecamatan Posigadan
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	12.000.000	21	60.185.785	22,5	70.922.817	25	74.445.535	25	78.167.812	25	295.721.949	Kecamatan Posigadan
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	27.000.000	90	51.000.000	90	36.652.593	90	37.314.093	90	39.179.798	90	191.146.484	Kecamatan Posigadan
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	23.435.000	82,5	38.946.150	82,5	35.506.522	85	37.281.848	85	39.145.940	85	174.315.460	Kecamatan Pinolosian

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	9.647.000	21	9.647.000	22,5	26.029.606	25	13.663.243	25	14.346.405	25	73.333.254	Kecamatan Pinolosian
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	39.267.750	90	77.557.660	90	45.398.206	90	47.668.116	90	50.051.522	90	259.943.254	Kecamatan Pinolosian
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	10.219.750	82,5	18.974.300	82,5	25.546.920	85	25.546.920	85	16.634.515	85	96.922.405	Kecamatan Pinolosian Tengah
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	637.000	21	2.999.500	22,5	10.813.074	25	17.077.582	25	17.419.134	25	48.946.290	Kecamatan Pinolosian Tengah
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	4.732.250	90	32.313.000	90	44.892.205	90	46.716.799	90	27.594.484	90	156.248.738	Kecamatan Pinolosian Tengah
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	31.662.900	82,5	29.999.242	82,5	20.447.997	85	21.470.397	85	22.543.917	85	126.124.452	Kecamatan Pinolosian Timur
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	5.977.850	21	9.999.975	22,5	41.079.524	25	16.283.367	25	8.268.874	25	81.609.590	Kecamatan Pinolosian Timur
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	9.642.000	90	79.298.661	90	36.483.234	90	38.307.396	90	40.222.766	90	203.954.057	Kecamatan Pinolosian Timur
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90	-	
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor	82,37	85	79.378.402.912	85	79.962.494.606	85	81.637.435.743	85	82.071.933.936	85	82.713.372.615	85	405.763.639.811	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor	28,93	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor	70,65	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Skor	83,8	85	48.355.269.773	85	49.322.375.168	85	50.308.822.672	85	51.314.999.125	85	52.341.299.108	85	251.642.765.846	Dinas Kesehatan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Skor	32,82	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Skor	66,76	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Skor	91,34	85	7.060.595.160	85	7.010.728.718	85	7.150.943.292	85	7.293.962.158	85	7.439.841.401	85	35.956.070.730	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Skor	28,14	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Skor	71,86	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Skor	n/a	85	2.995.911.357	85	2.706.575.275	85	2.760.706.781	85	2.815.920.916	85	2.872.239.334	85	14.151.353.663	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Skor	82,8	85	3.085.567.526	85	3.021.226.089	85	3.081.650.611	85	3.143.283.623	85	3.206.149.295	85	15.537.877.144	Dinas Sosial
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Skor	22,35	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Sosial	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	76,96	85	3.139.795.765	85	3.202.591.680	85	3.266.643.514	85	3.271.674.733	85	3.276.203.560	85	16.156.909.253	Satuan Polisi Pamong Praja
				Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	25,59	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	61,35	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	83,61	85	2.914.718.808	85	3.618.660.301	85	3.641.819.306	85	3.641.819.306	85	3.688.044.930	85	17.505.062.651	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	26,49	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	69,91	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian	Skor	82,8	85	2.598.284.528	85	2.520.048.692	85	2.520.048.692	85	2.520.048.692	85	2.520.048.692	85	12.678.479.296	Dinas Perindustrian
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian	Skor	30,7	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perindustrian	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Skor	n/a	85	3.939.848.494	85	2.452.169.938	85	2.457.316.735	85	2.506.463.070	85	2.556.592.331	85	13.912.390.568	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor	83,01	85	3.739.588.195	85	3.814.379.959	85	3.846.759.922	85	3.879.348.408	85	3.912.145.197	85	19.192.221.681	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor	29,14	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata	Skor	77,43	85	2.917.622.993	85	2.799.766.180	85	2.855.761.504	85	2.912.876.734	85	2.971.134.268	85	14.457.161.679	Dinas Pariwisata
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Skor	24,76	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Skor	68,26	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	Skor	92,24	85	5.649.334.127	85	5.343.325.201	85	5.450.191.705	85	5.559.195.539	85	5.670.379.450	85	27.672.426.022	Dinas Pertanian
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	Skor	29,98	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Skor	70,96	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan	Skor	n/a	85	1.983.791.749	85	1.221.823.621	85	1.216.562.074	85	1.240.893.315	85	1.265.711.182	85	6.928.781.941	Dinas Ketahanan Pangan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu	Skor	86,19	85	3.036.401.135	85	3.107.783.177	85	3.132.753.279	85	3.157.850.927	85	3.183.074.955	85	15.617.863.472	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu	Skor	30,68	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu	Skor	72,61	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	85,56	85	3.091.551.899	85	3.153.382.937	85	3.216.450.596	85	3.280.779.608	85	3.346.395.200	85	16.088.560.239	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	29,12	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	69,16	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup	Skor	87,6	85	2.659.774.546	85	2.878.315.016	85	2.935.881.316	85	2.994.598.943	85	3.054.490.921	85	14.523.060.742	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Skor	25,38	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Skor	60,15	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Skor	79,11	85	2.783.437.647	85	3.627.014.608	85	3.629.554.900	85	3.674.523.586	85	3.689.815.422	85	17.404.346.163	Dinas Perhubungan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Skor	26,59	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Skor	70,81	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor	90,64	85	2.412.598.796	85	2.379.202.575	85	2.398.644.099	85	2.418.193.028	85	2.437.848.696	85	12.046.487.193	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor	25,41	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor	71,71	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga	Skor	92,72	85	2.338.697.144	85	2.362.084.115	85	2.409.325.798	85	2.457.512.314	85	2.506.662.560	85	12.074.281.931	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga	Skor	27,7	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Skor	63,31	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan	Skor	97,5	85	2.782.371.744	85	2.838.019.179	85	2.894.779.562	85	2.952.675.154	85	3.011.728.657	85	14.479.574.296	Dinas Perikanan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	Skor	32,92	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Skor	72,61	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan	Skor	82,34	85	2.327.596.531	85	2.374.148.462	85	2.421.631.431	85	2.443.062.488	85	2.464.652.150	85	12.031.091.062	Dinas Perpustakaan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan	Skor	30,33	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Skor	69,16	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PP, KB, PP dan PA	Skor	84,38	85	3.195.064.983	85	3.258.966.283	85	3.238.808.122	85	3.217.393.423	85	3.194.688.522	85	16.104.921.332	Dinas PP, KB, PP dan PA
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PP, KB, PP dan PA	Skor	30,1	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas PP, KB, PP dan PA	Skor	65,56	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Skor	85,26	85	31.815.601.255	85	24.755.934.678	85	22.425.071.668	85	22.446.477.302	85	22.489.476.549	85	123.932.561.452	Sekretariat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Skor	22,7	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	60,15	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Skor	83,2	85	10.613.318.939	85	10.388.698.768	85	10.372.507.736	85	10.353.753.233	85	10.332.361.594	85	52.060.640.270	Sekretariat DPRD
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Skor	28,93	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Skor	69,16	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor	89,36	85	6.284.312.892	85	6.409.999.150	85	6.538.199.133	85	6.668.963.115	85	6.802.342.378	85	32.703.816.668	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor	29,08	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor	72,61	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Skor	84,66	85	26.103.390.364	85	19.773.121.753	85	20.168.584.188	85	20.571.955.872	85	20.983.394.989	85	107.600.447.166	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Skor	32,56	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Skor	87,36	85	3.955.771.553	85	3.717.312.369	85	4.445.658.652	85	4.493.800.105	85	4.738.479.011	85	21.351.021.690	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Skor	31,42	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Skor	71,86	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah	Skor	91,86	85	7.976.494.381	85	6.809.447.122	85	6.945.636.064	85	7.084.548.786	85	7.226.239.761	85	36.042.366.115	Inspektorat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Skor	28,61	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor	71,86	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor	88,5	85	1.230.898.575	85	1.450.346.729	85	1.273.095.922	85	1.338.882.500	85	1.357.118.908	85	6.650.342.634	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor	30,57	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor	66,01	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bolaang Uki	Skor	85,43	85	2.221.474.351	85	2.175.985.056	85	2.562.234.955	85	2.690.346.703	85	2.824.864.038	85	12.474.905.102	Kecamatan Bolaang Uki
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Bolaang Uki	Skor	30,37	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Bolaang Uki	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Helumo	Skor	84,04	85	1.888.613.266	85	2.260.241.029	85	2.298.426.943	85	2.309.279.792	85	2.329.193.257	85	11.085.754.287	Kecamatan Helumo
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Helumo	Skor	27,84	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Helumo	Skor	70,71	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tomini	Skor	96,32	85	1.650.732.096	85	1.925.766.475	85	1.964.281.805	85	2.003.567.441	85	2.043.638.789	85	9.587.986.605	Kecamatan Tomini
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tomini	Skor	25,92	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Tomini	Skor	70,81	71				73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Posigadan	Skor	82,46	85	2.233.576.518	85	2.317.064.270	85	2.807.195.695	85	2.947.555.480	85	3.094.933.254	85	13.400.325.217	Kecamatan Posigadan
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Posigadan	Skor	24,49	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Posigadan	Skor	68,26	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian	Skor	84,66	85	2.037.870.797	85	2.047.798.398	85	2.088.754.365	85	2.119.032.379	85	2.136.278.175	85	10.429.734.114	Kecamatan Pinolosian
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian	Skor	28,74	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian	Skor	69,31	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian Tengah	Skor	86,74	85	1.983.670.252	85	2.275.108.726	85	2.221.173.372	85	2.334.399.403	85	2.386.329.978	85	11.200.681.731	Kecamatan Pinolosian Tengah
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian Tengah	Skor	20,85	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian Tengah	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian Timur	Skor	82,9	85	2.250.628.360	85	2.248.010.148	85	2.292.970.350	85	2.338.829.757	85	2.368.004.270	85	11.498.442.885	Kecamatan Pinolosian Timur
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian Timur	Skor	24,38	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian Timur	Skor	71,56	71		72		73		74		75		75		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Misi 5 : **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian dan Berbudaya serta Berdaya Saing**																
			Tujuan 6 : **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**65,42**	**65,27-66,19**		**65,73-66,66**		**66,20-67,31**		**66,67-67,60**		**67,14-68,80**		**67,14-68,80**		
			Sasaran 9 : **Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga**	**Indeks Pendidikan**	**Indeks**	**61,33**	**61,39**		**61,45**		**61,51**		**61,57**		**61,63**		**61,63**		
				Angka Usia Harapan Hidup	**Angka**	**64,49**	**65,66**		**66,1**		**66,35**		**66,64**		**67,1**		**67,1**		
				Pravelansi Stunting	**%**	**6,5**	**6,25**		**6**		**5,8**		**4,85**		**4,85**		**4,85**		
				Indeks Pembangunan Gender	**Indeks**	**80,09**	**80,5**		**81**		**82**		**82,5**		**85**		**85**		
				Indeks Pemberdayaan Gender	**Indeks**	**71,5**	**71,5**		**72,5**		**73,5**		**74,5**		**75,5**		**75,5**		
				Kabupaten Layak Anak	**Status**	**n/a**	**Inisasi**		**Pratama**		**Pratama**		**Madya**		**Madya**		**Madya**		
1	**1**	02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	%	86,46	94,5	33.714.052.076	97	34.051.192.597	98	34.732.216.449	99	35.426.860.778	100	36.135.397.993	100	174.059.719.892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	%	81,54	83,59		84		85,6		86		90		90		
				Ratio Perbandingan APS Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Terendah Dengan APS Anak Usia 5-6 Tahun Dengan Kuintil Tertinggi	%	1 : 2,11	1 : 2,11		1 : 2		1 : 1,89		1 : 1,5		1 : 1,2		1 : 1,2		
				APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,27	60,1		61,12		62,3		64,45		65		65		
				Angka Partisipasi Murni(APM)(PAUD)	%	53,21	53,21		53,3		54,1		54,6		55		55		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	86,44	88,9		92		93		94		96		96		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,5	77,3		83		85		87		89		89		
				Angka partisipasi Kasar (APK) 7 - 12 Tahun	%	99	99		99,4		99,6		99,8		100		100		
				Angka partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun	%	90	90		94		96		98		100		100		
				Persentase Prestasi Peserta didik dalam Program Minat dan Bakat	%	0,26	0,26		0,65		0,71		0,78		0,84		0,84		
				Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	1,44	1,44		3,5		4		5		6		6		
				Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	1,37	1,37		3		4,5		5		5,5		5,5		
				Nilai Perbedaan Skor Literasi antara Peserta Didik Laki-Laki dan Perempuan (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	5,31	5,31		4,31		3,31		2,31		1		1		
				Nilai Perbedaan Skor Literasi kelompok peserta didik dari Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan tinggi (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	0,09	0,09		0,07		0,05		0,04		0,03		0,03		
				Persentase Lulusan Program Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas / Penilik	%	0,09	0,09		2,89		2,89		4,44		5,55		5,55		
				Persentase Pertumbuhan pendidik PAUD dengan Peniddikan Minimal S-1/D-IV	%	24,77	24,77		24,77		24,77		24,77		54,98		54,98		
				Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Skor	2,01	2,01		4		6		8		10		10		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	1.023.600.000	100	54.945.000	100	56.043.900	100	57.164.778	100	58.308.074	100	1.250.061.752	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Kecukupan Formasi Guru ASN untuk sekolah yang diselenggaraan oleh PEMDA sesuai dengan kebutuhan	%	n/a			100	200.000.000	100	204.000.000	100	208.080.000	100	228.888.000	100	840.968.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Ratio Pengawas Sekolah untuk PAUD	Angka	n/a			1 : 80		2: 80		3 : 80		4 : 80		4 : 80		
				Indeks Distribusi Guru	Skor	n/a			63		63		63		63		63		
1	2	02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	95,62	100	51.762.156.049	100	50.788.447.195	100	51.804.216.139	100	52.840.300.462	100	53.897.106.471	100	261.092.226.315	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	86	100		100		100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,23	100		100		100		100		100		100		
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	69,3	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	81,27	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,02	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,81	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,59	100		100		100		100		100		100		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,9	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	66,3	70		73		75		80		85		85		
				Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 1	%	41,11	50,55		55		58		60		65		65		
				Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 2	%	38,9	45		48,9		50		53		60		60		
				Cakupan Penanganan KLB <24 Jam	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
1	**2**	03	**PROGRAM PENINGKATAN KEPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar	%	70	75	7.059.813.741	78	7.201.010.016	80	6.162.192.592	85	5.181.017.845	90	4.174.440.314	90	29.778.474.508	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar	%	50	50		60		65		70		80		80		
1	**2**	'04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Cakupan Pemenuhan Obat-obatan	%	96	100	-	100	25.220.000	100	126.419.000	100	139.060.900	100	145.968.790	100	436.668.690	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pemenuhan Vaksin	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	**2**	05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS	%	72,7	73	6.964.700	74	104.500.000	75	114.317.500	75	125.749.250	78	138.324.175	78	489.855.625	Dinas Kesehatan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**8**	02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Desa yang memahami PPRG	%	0,03	6,17	37.720.700	8,64	87.838.000	12,35	89.594.760	14,81	91.386.655	18,52	93.214.388	18,52	399.754.504	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	79.158.300	100	81.322.706	100	82.949.160	100	84.608.143	100	86.300.306	100	414.338.616	Dinas PP, KB, PP dan PA
				Cakupan layanan korban kekerasan perempuan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	**8**	'04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Pengangguran Perempuan yang mendapatkan pelatihan	%	n/a	2	827.524.825	3	844.075.322	5	860.956.828	7	878.175.964	10	895.739.484	10	4.306.472.423	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase pengelolaan sistem gender dan anak	%	n/a					100	50.000.000	100	51.000.000	100	52.020.000	100	153.020.000	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah Forum Anak yang terbentuk	Forum	n/a	1	88.711.350	1	98.632.500	1	100.605.150	1	102.617.253	1	104.669.598	5	495.235.851	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Korban Kekerasan Terhadap anak yang mendapatkan layanan Komprehensif	%	100	100	113.309.800	100	149.303.800	100	152.289.876	100	155.335.674	100	158.442.387	100	728.681.537	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**22**	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Warisan Budaya yang dikembangkan	%	100	100	47.272.000	100	1.567.582.960	100	242.550.000	100	254.677.500	100	267.411.375	100	2.379.493.835	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	n/a			0	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	12.000.000	3	282.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	52.697.000	100	155.374.200	100	234.675.000	100	246.408.750	100	258.729.187	100	947.884.137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Museum yang dimanfaatkan sebagai objek wisata edukasi	%	n/a					100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**23**	02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Org	4679	5474	39.774.500	6274	40.569.990	7174	41.381.390	8074	42.209.018	8974	43.053.198	35970	206.988.095	Dinas Perpustakaan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daearh	Indikator KInejra (Tujuan / *Impact/outcome*)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendananaan												Perangkat Dareah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Buku	7972	8150		8255		8577		8901		9123		9123		
2	**19**	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan	%	n/a		1.249.255.300		1.261.747.853		1.286.982.810		1.312.722.466		1.338.976.916		6.449.685.345	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Pemuda terampil	%	n/a													
2	**19**	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolsel	Event	1	1	1.656.493.650	1	1.503.996.398	1	1.480.048.042	1	1.455.080.436	1	1.429.067.793	5	7.524.686.319	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	'04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi	%	n/a	-		10	275.000.000	10	280.500.000	10	286.110.000	10	291.832.200	40	1.133.442.200	Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan program pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dituangkan melalui program sesuai urusan pada setiap perangkat daerah mempertimbangkan gambaran keuangan daerah secara utuh. Hal tersebut dilakukan agar dapat dialokasikan kedalam program pada setiap urusan berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kerangka pendanaan pada Bab III, diperoleh besaran kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama periode 2021-2026. Proyeksi peningkatan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperhatikan asumsi meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sumber-sumber utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru.

Dari sisi kebutuhan belanja pembangunan daerah juga di proyeksikan meningkat sejalan dengan peningkatan sisi pendapatan. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memingkatkan kapasitas ekonomi daerah daerah dengan berorientasi pada pemulihan dampakpandemi COVID-19. pembangunan kewilayahan melalui pemerataan infrastruktur dasar dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan belanja daerah tahun 2021-2026 berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan *pravelasi stunting*, sebagai tujuan besar Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Kapasitas rill keuangan daerah merupakan alokasi belanja program untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas rill Kabupaten Mongondow Selatan dihitung dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Berdasarkan kapasitas rill keuangan daerah, selanjutnya disusun kerangka pendanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai acuan pengalokasian belanja program perangkat daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

KODE	U R A I A N	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
	KAPASITAS RIIL DAERAH	**135.448.194.717,00**	**130.142.969.157,00**	**116.310.975.429,79**	**124.452.743.709,88**	**133.164.435.769,57**
5	**BELANJA DAERAH**	**629.290.957.789,00**	**547.920.916.920,00**	**578.604.488.267,52**	**619.106.802.446,25**	**662.444.278.617,49**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**448.973.839.726,00**	**375.059.577.839,00**	**396.062.914.197,98**	**423.787.318.191,85**	**453.452.430.465,27**
5.1.01	Belanja Pegawai	227.933.033.727,00	194.830.086.733,00	205.740.571.590,05	220.142.411.601,35	235.552.380.413,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.693.795.726,00	171.373.102.557,00	180.969.996.300,19	193.637.896.041,21	207.192.548.764,09
5.1.05	Belanja Hibah	16.649.673.768,00	4.302.571.434,00	4.543.515.434,30	4.861.561.514,71	5.201.870.820,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.697.336.505,00	4.553.817.115,00	4.808.830.873,44	5.145.449.034,58	5.505.630.467,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**73.747.933.619,00**	**71.574.758.473,00**	**75.582.944.947,49**	**80.873.751.093,81**	**86.534.913.670,38**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	612.000.000,00	100.000.000,00	105.600.000,00	112.992.000,00	120.901.440,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.917.370.828,00	18.136.492.202,00	19.152.135.765,31	20.492.785.268,88	21.927.280.237,71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.873.589.828,00	12.692.446.590,00	13.403.223.599,04	14.341.449.250,97	15.345.350.698,54
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	37.392.918.362,00	39.831.768.891,00	42.062.347.948,90	45.006.712.305,32	48.157.182.166,69
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	952.054.601,00	814.050.790,00	859.637.634,24	919.812.268,64	984.199.127,44
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.566.197.324,00**	**2.918.918.408,00**	**3.082.377.838,85**	**3.298.144.287,57**	**3.529.014.387,70**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.566.197.324,00	2.918.918.408,00	3.082.377.838,85	3.298.144.287,57	3.529.014.387,70
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.566.197.324,00	2.918.918.408,00	3.082.377.838,85	3.298.144.287,57	3.529.014.387,70
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.566.197.324,00	2.918.918.408,00	3.082.377.838,85	3.298.144.287,57	3.529.014.387,70

KODE	U R A I A N	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**99.002.987.120,00**	**98.367.662.200,00**	**103.876.251.283,20**	**111.147.588.873,02**	**118.927.920.094,14**
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	**630.324.920,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	630.324.920,00	-	-	-	-
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	630.324.920,00	-	-	-	-
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	**98.372.662.200,00**	**98.367.662.200,00**	**103.876.251.283,20**	**111.147.588.873,02**	**118.927.920.094,14**
5.4.01.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.372.662.200,00	98.367.662.200,00	103.876.251.283,20	111.147.588.873,02	118.927.920.094,14
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**98.372.662.200,00**	**98.367.662.200,00**	**103.876.251.283,20**	**111.147.588.873,02**	**118.927.920.094,14**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**- 75.213.666.960,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	-	-	-	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.745.666.960,00	20.000.000.000,00	-	-	-
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**8.500.000.000.00**	**7.500.000.000.00**			
6 . 2 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	**-**	**-**	**-**
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	**-**	**-**	**-**
	PEMBIAYAAN NETTO	**75.245.666.960,00**	**12.500.000.000,00**			

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
1	1		PENDIDIKAN																
1	1	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	%	86,46	94,5	33.714.052.076	97	34.051.192.597	98	34.732.216.449	99	35.426.860.778	100	36.135.397.993	100	174.059.719.892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	%	81,54	83,59		84		85,6		86		90		90		
				Ratio Perbandingan APS Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Terendah Dengan APS Anak Usia 5-6 Tahun Dengan Kuintil Tertinggi	%	1 : 2,11	1 : 2,11		1 : 2		1 : 1,89		1 : 1,5		1 : 1,2		1 : 1,2		
				APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,27	60,1		61,12		62,3		64,45		65		65		
				Angka Partisipasi Murni(APM)(PAUD)	%	53,21	53,21		53,3		54,1		54,6		55		55		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	86,44	88,9		92		93		94		96		96		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,5	77,3		83		85		87		89		89		
				Angka partisipasi Kasar (APK) 7 - 12 Tahun	%	99	99		99,4		99,6		99,8		100		100		
				Angka partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun	%	90	90		94		96		98		100		100		
				Persentase Prestasi Peserta didik dalam Program Minat dan Bakat	%	0,26	0,26		0,65		0,71		0,78		0,84		0,84		
				Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	1,44	1,44		3,5		4		5		6		6		
				Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	1,37	1,37		3		4,5		5		5,5		5,5		
				Nilai Perbedaan Skor Literasi antara Peserta Didik Laki-Laki dan Perempuan (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	5,31	5,31		4,31		3,31		2,31		1		1		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Nilai Perbedaan Skor Literasi kelompok peserta didik dari Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan tinggi (SD/MI/SMP/MTs/ Kesetaraan)	Skor	0,09	0,09		0,07		0,05		0,04		0,03		0,03		
				Persentase Lulusan Program Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas / Penilik	%	0,09	0,09		2,89		2,89		4,44		5,55		5,55		
				Persentase Pertumbuhan pendidik PAUD dengan Peniddikan Minimal S-1/D-IV	%	24,77	24,77		24,77		24,77		24,77		54,98		54,98		
				Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Skor	2,01	2,01		4		6		8		10		10		
1	1	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	1.023.600.000	100	54.945.000	100	56.043.900	100	57.164.778	100	58.308.074	100	1.250.061.752	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Kecukupan Formasi Guru ASN untuk sekolah yang diselenggaraan oleh PEMDA sesuai dengan kebutuhan	%	n/a			100	200.000.000	100	204.000.000	100	208.080.000	100	228.888.000	100	840.968.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Ratio Pengawas Sekolah untuk PAUD	Angka	n/a			1 : 80		2: 80		3 : 80		4 : 80		4 : 80		
				Indeks Distribusi Guru	Skor	n/a			63		63		63		63		63		
1	2		**KESEHATAN**																
1	2	02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	95,62	100	51.762.156.049	100	50.788.447.195	100	51.804.216.139	100	52.840.300.462	100	53.897.106.471	100	261.092.226.315	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	86	100		100		100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,23	100		100		100		100		100		100		
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	69,3	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	81,27	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,02	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,81	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,59	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,9	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	66,3	70		73		75		80		85		85		
				Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 1	%	41,11	50,55		55		58		60		65		65		
				Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 2	%	38,9	45		48,9		50		53		60		60		
				Cakupan Penanganan KLB <24 Jam	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
1	2	03	**PROGRAM PENINGKATAN KEPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar	%	70	75	7.059.813.741	78	7.201.010.016	80	6.162.192.592	85	5.181.017.845	90	4.174.440.314	90	29.778.474.508	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar	%	50	50		60		65		70		80		80		
1	2	'04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Cakupan Pemenuhan Obat-obatan	%	96	100	-	100	25.220.000	100	126.419.000	100	139.060.900	100	145.968.790	100	436.668.690	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pemenuhan Vaksin	%	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
1	2	05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS	%	72,7	73	6.964.700	74	104.500.000	75	114.317.500	75	125.749.250	78	138.324.175	78	489.855.625	Dinas Kesehatan
1	03		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																
1	03	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Ketersediaan Air Baku	%	n/a	65	1.623.685.000	67	3.295.789.240	70	3.361.705.025	71	3.428.939.125	72	3.497.517.908	72	15.207.636.298	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan Layanan Irigasi	%	68,23	70		71,5		72		73		75		75		
1	03	03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan SPAM dan jaringannya dalam kondisi baik	%	100	100	9.807.677.260	100	2.969.992.000	100	3.029.391.840	100	3.939.756.281	100	4.981.971.670	100	24.728.789.051	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	45,9	100	7.195.461.900	100	1.790.000.000	100	1.825.800.000	100	1.862.316.000	100	1.899.562.320	100	14.573.140.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan IPAL yang terbangun dalam kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	03	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun dalam kondisi baik	Meter	3800	3977	297.591.000	3977	400.000.000	4377	408.000.000	4777	1.420.000.000	5177	1.420.000.000	5477		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Panjang Drainase / Gorong-Gorong yang direhab dalam kondisi baik	Meter	n/a	0		1000		2500		4000		5177		5177		
1	03	07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase jalan pemukiman dalam kondisi baik	%	n/a	0	-	0	-	53	1.540.000.000	55	1.540.000.000	60	1.540.000.000	60	4.620.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Gedung Milik Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	150.000.000	100	1.696.600.000	100	4.120.000.000	100	1.120.000.000	100	120.000.000	100	7.206.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase Kepatuhan IMB/TDG	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	03	09	**PROGRAM PENATAAN BANGUANAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Kepatuhan IMB/TDG	%	100	100	299.955.150	100	880.000.000	100	875.000.000	100	1.125.000.000	100	875.000.000	100	4.054.955.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	259,69	269,4	26.686.522.800	282,45	33.849.531.556	293,45	29.040.001.750	305,95	31.230.000.000	319,95	31.854.600.000	319,95	152.660.656.106	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Ratio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	55		-	65	965.206.000	70	1.650.000.000	75	1.683.000.000	80	1.650.000.000	80	5.948.206.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	1'02	**PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG**	Persentase wilayah yang tersusun tata ruangnya	%	0	77	693.316.800	77	2.549.997.511	77	2.950.000.000	77	3.009.000.000	77	2.950.000.000	77	12.152.314.311	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Jumlah Pelanggaran tata ruang	Kali	n/a	1		1		1		1		1		1		Ruang
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	2.174.867.590	100	1.202.551.000	100	1.226.602.020	100	1.251.134.060	100	1.276.156.742	100	7.131.311.412	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah darerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	%	0	100		100		100		100		100		100		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	13,11		-	17	24.997.300	20	225.000.000	23	229.500.000	26	234.090.000	26	713.587.300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	04	'04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	13,11		-	17	2.112.500.000	20	2.154.750.000	23	2.114.353.154	26	2.112.713.453	26	8.494.316.607	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU	%	51,62		-	56,05	755.303.663	59,81	1.000.000.000	64,39	1.020.000.000	67,41	1.000.000.000	67,41	3.775.303.663	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	5	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan	%	100	100	2.142.637.500	100	2.185.490.250	100	2.229.200.055	100	2.273.784.056	100	2.319.259.737	100	11.150.371.598	Satuan Polisi Pamong Praja
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penanganan Perda	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	5	'04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	513.005.000	15	582.378.570	15	534.321.537	15	545.007.967	15	555.908.127	15	2.730.621.201	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*03*	*04*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*1'03*	*1'04*	*15*	*16*	*17*	
1	5	03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	393.606.885	100	1.302.759.801	100	1.328.814.997	100	1.355.391.297	100	1.382.499.123	100	5.763.072.103	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		100	-	
1	6		**SOSIAL**																
1	6	02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Jumlah PSKS	Orang	250	250	852.092.915	250	864.084.336	250	881.366.023	250	898.993.343	250	916.973.210	250	4.413.509.827	Dinas Sosial
1	6	03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentasi penanganan tindak kekerasan bagi warga Negara migran cakupan daerah	%	0%					100	57.881.250	100	59.038.875	100	59.038.875	100	175.959.000	Dinas Sosial
1	6	'04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	70	75	204.742.815	75	332.944.200	75	339.603.084	75	346.395.146	75	353.323.049	75	1.577.008.293	Dinas Sosial
1	6	05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentae Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	n/a	100	100	935.239.780	100	1.411.938.820	100	1.320.814.931	100	1.285.135.000	100	1.249.301.286	100	6.202.429.816	Dinas Sosial
1	6	06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Cakupan Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	100	100	517.766.035	100	517.948.085	100	528.307.047	100	538.873.188	100	549.650.651	100	2.652.545.006	Dinas Sosial
2			**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**																
2	7		**TENAGA KERJA**																
2	7	02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Rencana Kerja	%	na									50	33.000.000	50	33.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Lulusan Pelatihan yang memiliki Kompetensi	%	100	90	133.583.260	90	349.996.890	90	356.996.828	90	364.136.764	90	371.419.500	90	1.576.133.242	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persetnase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	10,86	11		12		13		14		15		15		
2	7	'04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	4	5		5	35.000.000	5	35.700.000	5	36.414.000	5	37.142.280	20	144.256.280	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja	Kali	n/a	1		1	1.456.560.000	1	1.485.691.200	1	1.515.405.024	1	1.451.906.060	1	5.909.562.284	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100	100		100		100		100		100		100		Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	**8**		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																
2	**8**	02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Desa yang memahami PPRG	%	0,03	6,17	37.720.700	8,64	87.838.000	12,35	89.594.760	14,81	91.386.655	18,52	93.214.388	18,52	399.754.504	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	79.158.300	100	81.322.706	100	82.949.160	100	84.608.143	100	86.300.306	100	414.338.616	Dinas PP, KB, PP dan PA
				Cakupan layanan korban kekerasan perempuan	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	**8**	'04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Pengangguran Perempuan yang mendapatkan pelatihan	%	n/a	2	827.524.825	3	844.075.322	5	860.956.828	7	878.175.964	10	895.739.484	10	4.306.472.423	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase pengelolaan sistem gender dan anak	%	n/a					100	50.000.000	100	51.000.000	100	52.020.000	100	153.020.000	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah Forum Anak yang terbentuk	Forum	n/a	1	88.711.350	1	98.632.500	1	100.605.150	1	102.617.253	1	104.669.598	5	495.235.851	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**8**	07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Korban Kekerasan Terhadap anak yang mendapatkan layanan Komprehensif	%	100	100	113.309.800	100	149.303.800	100	152.289.876	100	155.335.674	100	158.442.387	100	728.681.537	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	**9**		**PANGAN**																
2	**9**	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Skor PPh Ketersediaan	Angka	n/a			89	58.231.410	89	59.396.038	89	60.583.959	89	61.795.638	89	240.007.045	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPh Konsumsi	Angka	83,9	84,25	127.546.975	85	1.313.387.406	86	1.339.655.154	87	1.318.017.661	87,5	1.322.283.065	87,5	5.420.890.261	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
2	9	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Wilayah Rentan Pangan	%	0	0	166.281.000	0	250.058.470	0	255.059.639	0	210.000.000	0	210.000.000	0	1.091.399.109	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Keracunan Pangan	%	n/a	1	21.900.605	1	126.301.010	1	128.827.030	1	200.000.000	1	200.000.000	5	677.028.645	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		PERTANAHAN																
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100			100	39.991.500	100	60.000.000	100	61.200.000	100	62.424.000	100	223.615.500	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	%	100			100	14.977.000	100	45.000.000	100	45.900.000	100	46.818.000	100	152.695.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah serta ganti rugi program kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	n/a			100	154.631.148	100	200.000.000	100	204.000.000	100	208.080.000	100	766.711.148	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase permasalahan tanah kosong yang diselesaikan	%	n/a			100	99.997.000	100	325.000.000	100	331.500.000	100	338.130.000	100	1.094.627.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tanah tidur yang dimanfaatkan	%	n/a					3	52.125.780	3	53.168.296	3	54.231.662	9	159.525.737	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	%	57,69	60	80.000.000			65	300.000.000	67	306.000.000	71	312.120.000	71	998.120.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	11		LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	65	100	236.984.450	100	107.977.000	100	110.136.540	100	112.339.271	100	114.586.056	100	682.023.317	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAHAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Sungai dengan Indeks Pencemaran Air "Ringan"	%	61,66	60	48.758.300	55	51.881.635	50	52.919.268	50	53.977.653	50	55.057.206	50	262.594.062	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luasan Kaawasan Hijau	%	93,04	93		93,5		94		94,5		95		95		
2	11	04	PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Lahan Kritis yang direhabilitasi	%	n/a		-		81.037.404		82.658.152		84.311.315		85.997.541		334.004.412	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
2	11	05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Jumlah Kasus Pencemaran Limbah B3	Kasus	0	0	15.360.950	0	15.358.900	0	15.666.078	0	15.979.400	0	16.298.988	0	78.664.315	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	11	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	100	100	25.324.000	100	22.624.000	100	23.076.480	100	23.538.010	100	24.008.770	100	118.571.259	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang diakui keberadaannya sesuai Peraturan dan Per-UU	%	0			100	30.000.000	100	30.600.000	100	31.212.000	100	31.836.240	100	123.648.240	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Masyarkat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan/penyuluhan lingkungan hidup	%	0			1	19.148.340	1	19.531.307	1	19.921.933	1	20.320.372	5	78.921.951	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kali	0	1	104.660.450	1	163.546.850	1	166.817.787	1	170.154.143	1	173.557.226	1	778.736.455	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	36.523.800	100	47.422.000	100	48.370.440	100	49.337.849	100	50.324.606	100	231.978.695	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	71	86	1.641.777.237	87	2.245.596.450	88	2.233.879.303	89	2.221.361.522	90	2.208.021.432	90	10.550.635.945	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**																
2	12	02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan Penerbitan KTP-el	%	100	100	319.155.000	100	325.538.100	100	332.048.862	100	338.689.839	100	345.463.636	100	1.660.895.437	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan KIA	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Penerapan Buku Pokok Pemakaman	%	0	100		100		100		100		100		100		
2	12	03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	100	100	-	100	63.989.000	100	65.268.780	100	66.574.156	100	67.905.639	100	263.737.574	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100	100		100		100		100		100		100		dan Pencatatan Sipil
2	12	'04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	PD	6	0	-	7	20.033.036	7	20.433.697	7	20.842.371	7	21.259.218	7	82.568.321	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	PD	6	0	-	7	25.490.050	7	25.999.851	7	26.519.848	7	27.050.245	7	105.059.994	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																
2	13	02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	%	n/a			100	25.000.000	100	25.000.000	100	26.000.000	100	36.000.000	100	112.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa	Desa	0			2	29.988.400	2	30.588.168	2	31.199.931	2	31.823.930	8	123.600.429	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	'04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Desa	Angka	n/a	85	474.525.100	85	406.243.265	85	414.368.130	85	422.655.493	85	431.108.603	85	2.148.900.591	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	n/a	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Desa yang menyusun APBDes Tepat Waktu	%	n/a	85		85		85		85		85		85		
				Persentase Desa yang menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	n/a	85		85		85		85		85		85		
2	13	05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga PMD Aktif	%	100	100	47.936.400	100	110.151.972	100	112.355.011	100	114.602.112	100	116.894.154	100	501.939.649	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK Desa Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Poyandu Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	14		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																
2	14	02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam KB Mandiri	%	n/a	35	916.442.100	37,5	886.599.050	40	904.331.031	42,5	922.417.652	45	940.866.005	45	4.570.655.837	Dinas PP, KB, PP dan PA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	57,16	60	2.567.932.315	62	2.619.290.961	63	2.671.676.781	65	2.725.110.316	67	2.779.612.522	67	13.363.622.895	Dinas PP, KB, PP dan PA
				Jumlah Kampung KB	Kampung	21	22		25		30		32		35		35		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Tribina	%	n/a	15	457.720.000	20	457.720.000	25	466.874.400	30	476.211.888	35	485.736.126	35	2.344.262.414	Dinas PP, KB, PP dan PA
2	15		PERHUBUNGAN																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang dibangun dalam Kondisi Baik	%	54,3	55	1.188.338.000	57,5	2.078.174.713	60	2.079.738.207	61	2.091.332.971	63	2.133.159.630	63	9.570.743.522	Dinas Perhubungan
				Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji KIR	Unit	742	500		500		500		500		500		2500		
				Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan	%	58,4	60		62,5		65		67,5		70		70		
2	15	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYARAN	Persentase Layanan Angkutan Penyeberangan	%				75	25.000.000	75	52.948.107	75	54.007.069	75	55.087.211	75	187.042.387	
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota	%	100	100	4.097.517.350	100	4.630.633.190	100	3.962.590.117	100	3.919.330.085	100	3.872.514.342	100	20.482.585.084	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	63,64	65	852.976.600	70	2.867.570.340	75	1.037.861.007	80	1.089.754.057	88	1.144.241.760	88	6.992.403.765	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	14,43			40	35.824.615	50	36.541.107	60	37.271.929	70	38.017.368	70	147.655.020	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	n/a	19,34	49.997.700	22	49.999.708	25,77	48.400.000	30	53.240.000	35	58.564.000	35	260.201.408	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
2	17	06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	n/a	10	42.355.000	10	42.780.650	15	48.400.000	17	53.240.000	20	58.564.000	20	245.339.650	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Ratio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	%	n/a	99,00	129.637.300	50,00	513.505.691	50,00	514.250.000	50,00	465.020.045	50,00	474.320.446	50,00	2.096.733.482	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase Usaha Mikro	%	95,03	95,05		94,88		94,81		94,73		94,65		94,57		
				Persentase Usaha Kecil	%	4,46	4,52		4,59		4,66		4,73		4,80		4,87		
				Persentase Usaha Menengah	%	0,51	0,52		0,53		0,53		0,54		0,55		0,56		
2	17	08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro	%	95,03	95,05	102.974.000	94,88	149.999.850	94,81	152.999.847	94,73	156.059.844	94,65	159.181.041	94,57	721.214.582	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase Usaha Kecil	%	4,46	4,52		4,59		4,66		4,73		4,80		4,87		
				Persentase Usaha Menengah	%	0,51	0,52		0,53		0,53		0,54		0,55		0,56		
2	18		**PENANAMAM MODAL**																
2	18	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investasi	%	81,2 Milyart	5	26.065.300	6	26.949.430	7	27.488.419	8	28.038.187	9	28.598.951	9	137.140.286	Dinas PMPTSP
2	18	03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Minat Investasi	%	n/a			6	28.380.000	7	28.947.600	8	29.526.552	9	30.117.083	9	116.971.235	Dinas PMPTSP
2	18	04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Kesesuaian Penyelesaian dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	%	100	100	134.159.925	100	142.709.475	100	145.563.665	100	148.474.938	100	151.444.437	100	722.352.439	Dinas PMPTSP
2	18	05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ penanam modal	%	100	100	388.650.348	100	388.472.070	100	396.241.511	100	404.166.342	100	412.249.668	100	1.989.779.939	Dinas PMPTSP
2	18	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	%	n/a	80	24.271.100	82	24.262.000	85	24.747.240	87	25.242.185	90	25.747.028	90	124.269.553	Dinas PMPTSP
2	19		**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
2	19	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan	%	n/a		1.249.255.300		1.261.747.853		1.286.982.810		1.312.722.466		1.338.976.916		6.449.685.345	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Pemuda terampil	%	n/a													
2	19	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolsel	Event	1	1	1.656.493.650	1	1.503.996.398	1	1.480.048.042	1	1.455.080.436	1	1.429.067.793	5	7.524.686.319	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	'04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi	%	n/a	-		10	275.000.000	10	280.500.000	10	286.110.000	10	291.832.200	40	1.133.442.200	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	20		**STATISTIK**																
2	20	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase ketersediaan metadata statistik sektoral	%	n/a	80	82.182.750	80	183.826.405	80	187.502.933	80	191.252.992	80	195.078.052	80	839.843.131	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase pemenuhan data kebutuhan pembangunan daerah	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
2	21		**PERSANDIAN**																
2	21	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	36,56	36,6	130.004.000	36,7	166.203.750	36,8	183.298.943	36,9	192.463.890	37	202.087.085	37	874.057.668	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Kegiatan Strategis yang telah diamankan melalui keamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
2	22		**KEBUDAYAAN**																
2	22	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Warisan Budaya yang dikembangkan	%	100	100	47.272.000	100	1.567.582.960	100	242.550.000	100	254.677.500	100	267.411.375	100	2.379.493.835	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	n/a			0	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	12.000.000	3	282.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	52.697.000	100	155.374.200	100	234.675.000	100	246.408.750	100	258.729.187	100	947.884.137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
2	22	06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Museum yang dimanfaatkan sebagai objek wisata edukasi	%	n/a					100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		**PERPUSTAKAAN**																
2	23	02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Org	4679	5474	39.774.500	6274	40.569.990	7174	41.381.390	8074	42.209.018	8974	43.053.198	35970	206.988.095	Dinas Perpustakaan
				Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Buku	7972	8150		8255		8577		8901		9123		9123		
2	24		**KEARSIPAN**																
2	24	02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	67	67	227.681.340	70	141.728.301	75	144.562.867	80	147.454.124	85	150.403.207	85	811.829.839	Dinas Perpustakaan
2	24	03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	67			70	75.000.000	75	49.765.770	80	50.761.085	85	51.776.307	85	227.303.163	Dinas Perpustakaan
2	24	'04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	n/a			60	41.976.200	65	42.815.724	70	43.672.038	75	44.545.479	75	173.009.442	Dinas Perpustakaan
3			**URUSAN PILIHAN**																
3	25		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**																
3	25	02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	14.246	20000	505.374.050	22000	4.243.108.250	24000	3.363.656.120	26000	2.491.441.886	26000	2.571.445.000	26000	13.175.025.306	Dinas Perikanan
3	25	03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,06	43,5	617.952.911	44,5	1.702.707.259	45,5	2.361.550.000	46,5	3.131.775.000	46,5	2.966.570.566	46,5	10.780.555.736	Dinas Perikanan
3	25	05	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Pohlaksar Naik Kelas	Kelompok	n/a	1	56.856.100	1	204.789.750	1	457.775.000	1	591.881.250	1	708.926.500	1	2.020.228.600	Dinas Perikanan
3	26		**PARIWISATA**																
3	26	02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Lama kunjungan wisatawan	Hari	0	1,39	296.989.072	1,44	2.695.704.000	1,51	2.250.234.022	1,6	2.295.238.702	1,6	2.594.356.635	1,6	10.132.522.431	Dinas Pariwisata
3	26	03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan wisatawan	%	n/a	1	926.883.000	1	579.107.200	1	540.224.500	2	567.236.249	3	595.793.490	3	3.209.244.439	Dinas Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
3	26	'04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Naik Kelas	Unit	n/a					1	39.752.526	1	75.801.184	1	100.000.000	3	215.553.710	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Unggulan Ekraf	Produk	n/a	3	289.256.000	3	204.508.000	3	695.266.477	3	593.898.551	3	248.217.541	3	2.031.146.569	Dinas Pariwisata
				Jumlah Pelaku Usaha Ekraf	Org	n/a	50		50		50		50		50		50		
3	27		PERTANIAN																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul	%	n/a	40	769.152.188	70	705.832.325	70	719.948.972	70	734.347.951	70	749.034.910	70	3.678.316.345	Dinas Pertanian
				Persentase penyediaan sarana pertanian dibanding kebutuhan	%	n/a			80		80		85		90		90		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN EPNGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasana Pertanian	%	n/a	100	206.400.200	100	397.848.540	100	405.805.511	100	413.921.621	100	422.200.053	100	1.846.175.925	Dinas Pertanian
				Luas Lahan Sawah	Ha	1.087	1.087		1.087		1.087		1.087		1.087		1.087		
				Luas Lahan Kering	Ha	10.884	10.884		10.884		10.884		10.884		10.884		10.884		
				Luas Lahan Perkebunan	Ha	23.267	23.267		23.267		23.267		23.267		23.267		23.267		
3	27	'04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kejadian Penyakit	Angka	0	1	144.015.600	1	121.940.250	1	138.300.066	1	138.300.066	1	138.300.066	1	680.856.048	Dinas Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	n/a			100	95.880.375	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	995.880.375	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	98,55	100	828.196.285	100	1.505.411.778	100	1.237.694.601	100	1.188.695.085	100	1.137.890.386	100	5.897.888.135	Dinas Pertanian
3	030		PERDAGANGAN																
3	030	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	100	100	513.389.500	100	285.987.585	100	291.707.337	100	297.541.483	100	303.492.313	100	1.692.118.218	Dinas Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
3	030	04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	54,07	55	19.387.000	56	54.990.000	57	56.089.800	58	57.211.596	59	58.355.828	60	246.034.224	Dinas Perindustrian
3	030	05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Jumlah Produk Bolsel yang di Eksport	Produk	0	0	44.436.000	1	76.938.000	1	78.476.760	1	80.046.295	1	81.647.221	1	361.544.276	Dinas Perindustrian
3	030	06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah	%	10	15	87.815.000	20	45.461.780	25	46.371.016	30	47.298.436	35	48.244.405	35	275.190.636	Dinas Perindustrian
3	030	07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase produk unggulan yang mengikuti promosi/pameran	%	n/a	1	19.822.000	1	32.736.000	1	33.390.720	1	34.058.534	1	34.739.705	5	154.746.959	Dinas Perindustrian
3	031		**PERINDUSTRIAN**																
3	031	02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	%	n/a	5	466.985.200	5	542.013.585	5	514.220.129	5	485.484.466	5	455.783.889	25	2.464.487.269	Dinas Perindustrian
3	031	03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan instansi terkait	%	100			100	174.995.660	100	178.495.573	100	182.065.485	100	185.706.794	100	721.263.512	Dinas Perindustrian
3	032		**TRANSMIGRASI**																
3	032	02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	1	1	39.999.820	1	39.999.820	1	40.799.816	1	41.615.813	1	42.448.129	1	204.863.398	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**																
4	1		**SEKRETARIAT DAERAH**																
4	1	1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	Persentase perangkat daerah dengan nilai Indeks RB BB	%	n/a	71	4.040.184.164	72	3.748.608.787	73	3.946.510.861	74	4.143.836.272	75	4.351.027.349	75	20.230.167.434	Sekretariat Daerah
				Persentase PD yang nilai SAKIP-nya BB	%	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Persentase PD dengan nilai IKM diatas 80	%	100	85		85		85		85		85		85		
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan pimpinan dan tamu tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
4	1	02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD	%	100	100	5.436.133.400	100	3.636.591.825	100	4.736.280.351	100	4.831.526.854	100	4.897.785.682	100	23.538.318.112	Sekretariat Daerah
				Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kunci	%	n/a	75		75		75		75		80		80		
				Persentase Rata-rata Capaian Indikator SPM	%	n/a	75		75		75		75		80		80		
				Persentase Capaian Aksi HAM	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Peraturan Yang tidak Harmonis/Sinkron/ Bersifat Menghambat yang di Revisi	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Kebijakan yang diterbitkan sesuai Program Legislasi Daerah	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Peraturan Perundgan-Undagnan yang di dokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Policy Brief di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat akan Kebutuhan	%	n/a	80		80		80		80		80		80		
				Ratio Rumah Ibadah per Satuan Penduduk	Angka	n/a	70		70		70		70		70		70		
4	1	03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Tingkat Kematangan UKPJ	Angka	n/a	Level 3	911.912.200	Level 3	599.632.900	Level 3	1.960.312.992	Level 3	1.977.017.202	Level 3	1.994.556.627	Level 3	7.443.431.921	Sekretariat Daerah
				Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke dalam tahun berikutnya, yang ditandatangani pada Kuartal Pertama	%	n/a	25		25		25		25		25		25		
				Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Ratio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Angka	n/a	90		90		90		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Persersentase Ketepatan Waktu Penyampaian laporan EPRA	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Policy Brief di Bidang Perekonomian dan SDA akan Kebutuhan	%	n/a	80		80		80		80		80		80		
4	2		SEKRETARIAT DPRD																
4	2	1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA					5.410.917.640		5.519.135.993		5.629.518.713		5.742.109.087		5.856.951.269		28.158.632.701	Sekretariat DPRD
4	2	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Rapat dan Risalah Perseidangan yang Berkualitas	%	n/a	90	6.361.437.219	90	6.488.665.963	90	6.618.439.283	90	6.750.808.068	90	6.885.824.230	90	33.105.174.763	Sekretariat DPRD
				Persentase Aspirasi yang ditindaklanjuti	%	n/a	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Publikasi Kegiatan DPRD	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Kegiatan DPRD yang difasilitasi	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
5			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	1		PERENCANAAN																
5	1	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam perencanaan pembangunan	%	n/a	90	1.824.516.670	90	1.944.972.060	90	1.869.280.655	90	1.790.929.512	90	1.709.853.980	90	9.139.552.877	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		100		100		
5	1	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	n/a	85	2.204.349.545	85	2.248.436.536	85	2.293.405.267	90	2.339.273.372	90	2.386.058.839	90	11.471.523.559	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian	%	n/a	85		85		85		90		90		90		
				Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan	%	n/a	85		85		85		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
5	2		KEUANGAN																
5	2	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda APBD Tepat Waktu	%	100	100	##############	100	##############	100	##############	100	##############	100	##############	100	545.585.235.808	Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan
				Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase PD yang menyusun RKA, DPA, DPPA Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Penerbitan SP2D	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Miliki Daerah tepat waktu	%	100	100	635.179.265	100	1.325.995.929	100	1.352.515.848	100	1.379.566.165	100	1.407.157.488	100	6.100.414.694	Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan Daerah
				Persentase Barang Milik Daerah yang Tersertifikasi	%	n/a	100		100		100		100		100		100		
				Persentase BMD yang dimanfaatkan secara efektif dan efesien	%	100	100		100		100		100		100		100		
5	2	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	100,36	100	1.212.543.075	100	1.064.988.720	100	1.086.288.494	100	1.108.014.264	100	1.130.174.550	100	5.602.009.103	Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan Daerah
				Jumlah Wajib Pajak Baru	WP	n/a	5		5		5		5		5		25		
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107,67	100		100		100		100		100		100		
5	3		KEPEGAWAIAN																
5	3	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerbitan SK secara tepat waktu	%	n/a	80	1.018.905.400	82,88	1.059.459.900	82,89	1.626.480.384	82,9	1.687.807.503	82,91	1.778.780.455	82,91	7.171.433.642	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	n/a	75		75		75		75		75		75		
				Persentase ASN yang berkinerja Baik	%	n/a	85		85		85		85		85		85		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	%	n/a	3		4		6		7		10		10		
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5	4	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang melaksanakan peningkatan Kualitas SDM Aparatur	%	n/a	10	848.060.800	20	2.321.322.180	25	1.338.861.000	30	1.343.521.000	35	1.398.285.500	35	7.250.050.480	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	5	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	%	n/a	80	402.490.355	80	855.676.950	80	872.790.489	80	890.246.299	80	908.051.225	80	3.929.255.318	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH																
6	1		INSPEKTORAT																
6	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Temuan Berulang Pemeriksaan Keuangan	%	12,45	0	3.293.259.600	0	3.640.446.660	0	3.749.775.579	0	3.860.060.977	0	3.971.309.683	0	18.514.852.499	Inspektorat Daerah
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	87,55	87		87,6		88,5		88,8		89		89		
6	1	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Temuan Berulang	%	0	0	670.636.400	0	684.049.128	0	697.730.111	0	711.684.713	0	725.918.407	0	3.490.018.758	Inspektorat Daerah
				Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penyampaian LHKPN / LHKASN	%	100	100		100		100		100		100		100		
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1		KECAMATAN																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	19.352.950	82,5	42.905.125	82,5	27.858.589	85	29.251.518	85	30.714.094	85	150.082.275	Kecamatan Bolaang Uki
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	9.421.500	21	58.825.064	22,5	65.956.273	25	69.254.087	25	72.716.791	25	276.173.715	Kecamatan Bolaang Uki
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Bolaang Uki
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	19.695.000	90	59.363.025	90	44.076.873	90	46.280.717	90	48.594.752	90	218.010.367	Kecamatan Bolaang Uki
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	9.903.550	82,5	14.997.900	82,5	28.817.593	85	30.258.472	85	31.771.396	85	115.748.911	Kecamatan Helumo
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20		21	8.436.220	22,5	33.012.612	25	43.663.243	25	44.346.405	25	129.458.480	Kecamatan Helumo
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Helumo
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	7.500.000	90	48.144.600	90	41.983.557	90	43.061.605	90	45.214.686	90	185.904.448	Kecamatan Helumo
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	22.740.380	82,5	25.470.750	82,5	24.768.097	85	26.006.502	85	27.306.827	85	126.292.555	Kecamatan Tomini
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	9.737.865	21	9.999.967	22,5	72.620.204	25	51.101.987	25	28.845.651	25	172.305.674	Kecamatan Tomini
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Tomini
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	28.355.780	90	79.087.054	90	40.271.933	90	42.285.529	90	44.399.806	90	234.400.101	Kecamatan Tomini
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	25.000.000	82,5	29.225.000	82,5	27.562.500	85	28.940.625	85	30.387.656	85	141.115.781	Kecamatan Posigadan
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	12.000.000	21	60.185.785	22,5	70.922.817	25	74.445.535	25	78.167.812	25	295.721.949	Kecamatan Posigadan
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Posigadan
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	27.000.000	90	51.000.000	90	36.652.593	90	37.314.093	90	39.179.798	90	191.146.484	Kecamatan Posigadan
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	23.435.000	82,5	38.946.150	82,5	35.506.522	85	37.281.848	85	39.145.940	85	174.315.460	Kecamatan Pinolosian
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	9.647.000	21	9.647.000	22,5	26.029.606	25	13.663.243	25	14.346.405	25	73.333.254	Kecamatan Pinolosian
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Pinolosian
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	39.267.750	90	77.557.660	90	45.398.206	90	47.668.116	90	50.051.522	90	259.943.254	Kecamatan Pinolosian
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	10.219.750	82,5	18.974.300	82,5	25.546.920	85	25.546.920	85	16.634.515	85	96.922.405	Kecamatan Pinolosian Tengah
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	637.000	21	2.999.500	22,5	10.813.074	25	17.077.582	25	17.419.134	25	48.946.290	Kecamatan Pinolosian Tengah
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Pinolosian Tengah
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	4.732.250	90	32.313.000	90	44.892.205	90	46.716.799	90	27.594.484	90	156.248.738	Kecamatan Pinolosian Tengah
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
7	1	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	80	31.662.900	82,5	29.999.242	82,5	20.447.997	85	21.470.397	85	22.543.917	85	126.124.452	Kecamatan Pinolosian Timur
7	1	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	%	n/a	20	5.977.850	21	9.999.975	22,5	41.079.524	25	16.283.367	25	8.268.874	25	81.609.590	Kecamatan Pinolosian Timur
7	1	04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kejadian						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kecamatan Pinolosian Timur
7	1	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90	9.642.000	90	79.298.661	90	36.483.234	90	38.307.396	90	40.222.766	90	203.954.057	Kecamatan Pinolosian Timur
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	n/a	90		90		90		90		90		90	-	
8			**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																
8	1		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**																
8	1	02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Angka Potensi Konflik Sara di Masyarakat	Kejadian	0	0	81.588.950	0	231.142.820	0	298.036.430	0	306.163.252	0	314.696.415	0	1.231.627.867	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politik	%	97,39	0	339.790.950	0	386.794.805	98,5	418.339.050	0	426.272.225	0	428.548.336	98,5	1.999.745.366	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	n/a	6	437.130.350	4	334.884.805	5	1.056.000.000	4	1.056.000.000	4	1.056.000.000	23	3.940.015.155	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Angka Potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di Masyarakat	Kejadian	n/a	5	35.724.300	5	142.911.410	5	200.557.579	5	203.141.689	5	204.717.138	25	787.052.116	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	Kejadian	n/a	5	113.595.100	5	137.736.550	5	216.136.981	5	218.432.328	5	220.842.443	25	906.743.402	Badan Ksatuan Bangsa dan Politik
x	xx		**RUTIN PERANGKAT DAERAH**																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor	82,37	85	79.378.402.912	85	79.962.494.606	85	81.637.435.743	85	82.071.933.936	85	82.713.372.615	85	405.763.639.811	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor	28,93	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor	70,65	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Skor	83,8	85	48.355.269.773	85	49.322.375.168	85	50.308.822.672	85	51.314.999.125	85	52.341.299.108	85	251.642.765.846	Dinas Kesehatan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Skor	32,82	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Skor	66,76	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Skor	91,34	85	7.060.595.160	85	7.010.728.718	85	7.150.943.292	85	7.293.962.158	85	7.439.841.401	85	35.956.070.730	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Skor	28,14	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Skor	71,86	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Skor	n/a	85	2.995.911.357	85	2.706.575.275	85	2.760.706.781	85	2.815.920.916	85	2.872.239.334	85	14.151.353.663	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Skor	82,8	85	3.085.567.526	85	3.021.226.089	85	3.081.650.611	85	3.143.283.623	85	3.206.149.295	85	15.537.877.144	Dinas Sosial
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Skor	22,35	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Sosial	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	76,96	85	3.139.795.765	85	3.202.591.680	85	3.266.643.514	85	3.271.674.733	85	3.276.203.560	85	16.156.909.253	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	25,59	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Skor	61,35	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	83,61	85	2.914.718.808	85	3.618.660.301	85	3.641.819.306	85	3.641.819.306	85	3.688.044.930	85	17.505.062.651	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	26,49	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	69,91	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian	Skor	82,8	85	2.598.284.528	85	2.520.048.692	85	2.520.048.692	85	2.520.048.692	85	2.520.048.692	85	12.678.479.296	Dinas Perindustrian
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian	Skor	30,7	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perindustrian	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Skor	n/a	85	3.939.848.494	85	2.452.169.938	85	2.457.316.735	85	2.506.463.070	85	2.556.592.331	85	13.912.390.568	Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor	83,01	85	3.739.588.195	85	3.814.379.959	85	3.846.759.922	85	3.879.348.408	85	3.912.145.197	85	19.192.221.681	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor	29,14	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata	Skor	77,43	85	2.917.622.993	85	2.799.766.180	85	2.855.761.504	85	2.912.876.734	85	2.971.134.268	85	14.457.161.679	Dinas Pariwisata
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Skor	24,76	71		72		73		74		75		75		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Skor	68,26	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	Skor	92,24	85	5.649.334.127	85	5.343.325.201	85	5.450.191.705	85	5.559.195.539	85	5.670.379.450	85	27.672.426.022	Dinas Pertanian
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	Skor	29,98	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Skor	70,96	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan	Skor	n/a	85	1.983.791.749	85	1.221.823.621	85	1.216.562.074	85	1.240.893.315	85	1.265.711.182	85	6.928.781.941	Dinas Ketahanan Pangan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Skor	n/a	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu	Skor	86,19	85	3.036.401.135	85	3.107.783.177	85	3.132.753.279	85	3.157.850.927	85	3.183.074.955	85	15.617.863.472	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu	Skor	30,68	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu	Skor	72,61	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	85,56	85	3.091.551.899	85	3.153.382.937	85	3.216.450.596	85	3.280.779.608	85	3.346.395.200	85	16.088.560.239	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	29,12	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Skor	69,16	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup	Skor	87,6	85	2.659.774.546	85	2.878.315.016	85	2.935.881.316	85	2.994.598.943	85	3.054.490.921	85	14.523.060.742	Dinas Lingkungan Hidup
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Skor	25,38	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Skor	60,15	71		72		73		74		75		75		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Skor	79,11	85	2.783.437.647	85	3.627.014.608	85	3.629.554.900	85	3.674.523.586	85	3.689.815.422	85	17.404.346.163	Dinas Perhubungan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Skor	26,59	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Skor	70,81	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor	90,64	85	2.412.598.796	85	2.379.202.575	85	2.398.644.099	85	2.418.193.028	85	2.437.848.696	85	12.046.487.193	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor	25,41	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Skor	71,71	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga	Skor	92,72	85	2.338.697.144	85	2.362.084.115	85	2.409.325.798	85	2.457.512.314	85	2.506.662.560	85	12.074.281.931	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga	Skor	27,7	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Skor	63,31	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan	Skor	97,5	85	2.782.371.744	85	2.838.019.179	85	2.894.779.562	85	2.952.675.154	85	3.011.728.657	85	14.479.574.296	Dinas Perikanan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	Skor	32,92	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Skor	72,61	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan	Skor	82,34	85	2.327.596.531	85	2.374.148.462	85	2.421.631.431	85	2.443.062.488	85	2.464.652.150	85	12.031.091.062	Dinas Perpustakaan
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan	Skor	30,33	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Skor	69,16	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PP, KB, PP dan PA	Skor	84,38	85	3.195.064.983	85	3.258.966.283	85	3.238.808.122	85	3.217.393.423	85	3.194.688.522	85	16.104.921.332	Dinas PP, KB, PP dan PA
				Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PP, KB, PP dan PA	Skor	30,1	71		72		73		74		75		75		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
				Nilai SAKIP Dinas PP, KB, PP dan PA	Skor	65,56	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Skor	85,26	85	31.815.601.255	85	24.755.934.678	85	22.425.071.668	85	22.446.477.302	85	22.489.476.549	85	123.932.561.452	Sekretariat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Skor	22,7	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	60,15	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Skor	83,2	85	10.613.318.939	85	10.388.698.768	85	10.372.507.736	85	10.353.753.233	85	10.332.361.594	85	52.060.640.270	Sekretariat DPRD
				Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Skor	28,93	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Skor	69,16	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor	89,36	85	6.284.312.892	85	6.409.999.150	85	6.538.199.133	85	6.668.963.115	85	6.802.342.378	85	32.703.816.668	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor	29,08	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor	72,61	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Skor	84,66	85	26.103.390.364	85	19.773.121.753	85	20.168.584.188	85	20.571.955.872	85	20.983.394.989	85	107.600.447.166	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Skor	32,56	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Skor	87,36	85	3.955.771.553	85	3.717.312.369	85	4.445.658.652	85	4.493.800.105	85	4.738.479.011	85	21.351.021.690	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Skor	31,42	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Skor	71,86	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah	Skor	91,86	85	7.976.494.381	85	6.809.447.122	85	6.945.636.064	85	7.084.548.786	85	7.226.239.761	85	36.042.366.115	Inspektorat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Skor	28,61	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor	71,86	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor	88,5	85	1.230.898.575	85	1.450.346.729	85	1.273.095.922	85	1.338.882.500	85	1.357.118.908	85	6.650.342.634	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor	30,57	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor	66,01	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bolaang Uki	Skor	85,43	85	2.221.474.351	85	2.175.985.056	85	2.562.234.955	85	2.690.346.703	85	2.824.864.038	85	12.474.905.102	Kecamatan Bolaang Uki
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Bolaang Uki	Skor	30,37	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Bolaang Uki	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Helumo	Skor	84,04	85	1.888.613.266	85	2.260.241.029	85	2.298.426.943	85	2.309.279.792	85	2.329.193.257	85	11.085.754.287	Kecamatan Helumo
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Helumo	Skor	27,84	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Helumo	Skor	70,71	71		72		73		74		75		75		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator KInerja	Satu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	03	04	5	6	7	8	9	10	11	12	1'03	1'04	15	16	17	
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tomini	Skor	96,32	85	1.650.732.096	85	1.925.766.475	85	1.964.281.805	85	2.003.567.441	85	2.043.638.789	85	9.587.986.605	Kecamatan Tomini
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tomini	Skor	25,92	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Tomini	Skor	70,81	71				73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Posigadan	Skor	82,46	85	2.233.576.518	85	2.317.064.270	85	2.807.195.695	85	2.947.555.480	85	3.094.933.254	85	13.400.325.217	Kecamatan Posigadan
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Posigadan	Skor	24,49	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Posigadan	Skor	68,26	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian	Skor	84,66	85	2.037.870.797	85	2.047.798.398	85	2.088.754.365	85	2.119.032.379	85	2.136.278.175	85	10.429.734.114	Kecamatan Pinolosian
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian	Skor	28,74	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian	Skor	69,31	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian Tengah	Skor	86,74	85	1.983.670.252	85	2.275.108.726	85	2.221.173.372	85	2.334.399.403	85	2.386.329.978	85	11.200.681.731	Kecamatan Pinolosian Tengah
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian Tengah	Skor	20,85	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian Tengah	Skor	70,66	71		72		73		74		75		75		
x	xx	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian Timur	Skor	82,9	85	2.250.628.360	85	2.248.010.148	85	2.292.970.350	85	2.338.829.757	85	2.368.004.270	85	11.498.442.885	Kecamatan Pinolosian Timur
				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian Timur	Skor	24,38	71		72		73		74		75		75		
				Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian Timur	Skor	71,56	71		72		73		74		75		75		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Masyarkat yang semakin religius, toleran diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam menjemin pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur, meningkatkan pembangunan kewilayahan melalui kemajuan dan kemandirian desa diharapkan dapat meningkatkan indeks desa membangun. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menyebar, inklusif berbasis potensi unggulan serta berwawasan lingkungan dihrapkan dapat menekan angka kemiskinan. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan mampu mempercepat reformasi birorkasi serta pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam proses pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2026.

Sedangkan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut bersifat dampak (*impact*) yang langsung dirasakan oleh masyarakat, Adapun indikator Makro Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2026 disajikan dalam berikut :

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Makro Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,42	65,50-66,19	65,73-66,66	66,20-67,31	66,67-67,60	67,14-68,80	67,14-68,80
2	Persentase Penduduk Miskin	%	12,85	12,30-11,37	11,84-10,96	11,40-10,56	10,98-10,16	10,57-9,79	10,57-9,79
3	Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT)	%	4,60	4,16-3,74	3,95-3,57	3,76-3,38	3,57-3,20	3,39-3,05	3,39-3,05
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,74	3,75-5,61	4,50-5,61	5,50-6,98	5,75-7,20	5,75-7,60	5,75-7,60
5	Pendapatan per Kapita	Rp.	32.559.550,55	33.585.598,19 – 32.810.259,09	32.660.545,07 - 32.964.467,31	32.814.049,63 - 33.178.736,34	32.968.275,66 - 33.274.954,68	33.123.226,55 - 33.674.254,14	33.123.226,55 - 33.674.254,14
6	Indeks Gini	Poin	0,329	0,33-0,32	0,33-0,32	0,33-0,31	0,33-0,31	0,33-0,31	0,33-0,31

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka ditepkan IKU dan target kinerja dalam periode RPJMD 2021-2026 sebagiamana pada **Tabel 8.2.**

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2021)	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah	Indeks Toleransi	Indeks	n/a	2,51	2,75	2,85	3,00	3,25	3,25
		Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Angka	340,16	300	300	300	300	300	300
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	149,60 (Tinggi)	149,00	148,50	148,25	148,00	147,90	149,00
		Indeks Gotong Royong	Indeks	n/a	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	0,80
2	Meningkatnya Kualitas	Ratio Konektivitas	Ratio	30,43	30,45	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2021)	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perekenomian Daerah	Indeks Aksisibilitas Jalan	Indeks	20	20	20	20	20	20	20
		Cakupan Wilayah (Desa) yang tercover jaringan	%	65,43	66,67	69,14	74,07	76,54	77,78	77,78
3	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju	Desa	31	32	33	34	35	36	36
		Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	2	4	5	6	7	7
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB	%	38,14	38,69	38,76	38,79	39,18	39,21	39,21
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	0	0,15	0,32	0,45	0,55	0,71	0,71
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,60	80,00	80,00	80,00	80,50	81,00	81,00
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran, dan Menendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT)	Angka	4,60	4,16-3,74	3,95-3,57	3,76-3,38	3,57-3,20	3,39-3,05	3,39-3,05
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,35	1,35
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,72	77,49	77,84	78,16	78,48	78,79	78,79
		Persentase Penurunan PMKS	%	17,15	1,72	3,46	5,88	8,68	10,68	10,68
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai SAKIP	Predikat	(B) 64,56	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,90 (Baik)	85	85	85	85	85	85
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks	61,33	61,39	61,45	61,51	61,57	61,63	61,63
		Angka Usia Harapan Hidup	Angka	64,49	64,76	64,99	65,35	65,60	66,15	66,15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2021)	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga	Pravelansi Stunting	%	6,50	6,25	6,00	5,80	5,00	4,85	4,85
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	80,09	80,50	81,00	82,00	82,50	83,00	80,50
		Kabupaten Layak Anak	Status	n/a	Inisasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran kebersihan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator pogram outcome program pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) aspek kesejahteraan masyarakat, (2) aspek pelayanan umum dan (3) aspek daya saing daerah. Indikator kinerja daerah (IKD) terdiri dari beberapa indikator diantaranya indikator kinerja makro, indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penylenggaraan Pemerintah Daerah serta indikator-indikator kinerja lainnya yang merupakan aspek daya saing daerah.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan dareah maka ditetapkan indikator kinerja daerah (IKD) tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,74	3,75-5,61	4,50-5,61	5,50-6,98	5,75-7,20	5,75-7,60	5,75-7,60
1.2	Gini Ratio	Angka	0,329	0,33-0,32	0,33-0,32	0,33-0,31	0,33-0,31	0,33-0,31	0,33-0,31
1.3	Pendapata Per Kapita	Rp.	32.559.550,55	33.585.598,19 – 32.810.259,09	32.660.545,07 - 32.964.467,31	32.814.049,63 - 33.178.736,34	32.968.275,66 - 33.274.954,68	33.123.226,55 - 33.674.254,14	33.123.226,55 - 33.674.254,14
1.4	Angka Kemiskinan	%	12,85	12,3-11,37	11,84-10,96	11,40-10,56	10,98-10,16	10,57-9,79	10,57-9,79
1.5	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	%	1,38	2,53	1,26	0	0	0	0
1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,60	4,16-3,74	3,95-3,57	3,76-3,38	3,57-3,20	3,39-3,05	3,39-3,05
1.7.	**Pendidikan**								
1.7.1	Indeks Pendidikan	Indeks	61,33	61,39	61,45	61,51	61,57	61,63	61,63
1.7.2	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,15	8,16	8,17	8,18	8,19	8,20	8,20
1.7.3	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,30	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35	12,35
1.8	**Kesehatan**								
1.8.1	Angka Harapan Hidup	Angka	64,49	65,66	66,10	66,35	66,64	67,10	67,10
1.8.2	Pravelansi Stunting	%	6,50	6,25	6,00	5,80	5,00	4,85	4,85
1.8.2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	11,72	10	9	8	7	6	6
1.8.3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	293	200	200	200	200	200	200
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Urusan Wajib								
2.1	**Terkait Pelayanan Dasar**								
2.1.1	**Urusan Pendidikan**								
2.1.1.1	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	%	86,46	100	100	100	100	100	100
2.1.1.2	Persentase Warga Negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (%)	%	3,74	100	100	100	100	100	100
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	81,54	100	100	100	100	100	100
2.1.1.2	Persentase Warga Negara 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (%)	%	86,42	100	100	100	100	100	100
2.1.1.2	Persentase Warga Negara 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	%	86,61	100	100	100	100	100	100
2.1.2	**Urusan Kesehatan**								
2.1.2.1	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	95,62	100	100	100	100	100	100
2.1.2.2	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	86,00	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	99,23	100	100	100	100	100	100
2.1.2.4	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.5	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	69,30	100	100	100	100	100	100
2.1.2.6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	81,37	100	100	100	100	100	100
2.1.2.7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	99,02	100	100	100	100	100	100
2.1.2.8	Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	99,81	100	100	100	100	100	100
2.1.2.9	Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	99,59	100	100	100	100	100	100
2.1.2.10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.11	Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	%	99,90	100	100	100	100	100	100
2.1.2.12	Persentase warga negara dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human*	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)								
2.1.2.13	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	2,21	2,26	2,28	2,29	2,31	2,35	2,35
2.1.2.14	Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	0	100	100	100	100	100	100
2.1.3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
2.1.3.1	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	%	60,19	100	100	100	100	100	100
2.1.3.2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestic (%)	%	45,90	100	100	100	100	100	100
2.1.3.3	Ratio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3.4	Ratio luas Kawasan pekiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	%	0%						
2.1.3.5	Ratio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	68,23	70,00	72,50	75,00	77,50	79,00	79,00
2.1.3.6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	%	60,19	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten								
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestic	%	45,90	100	100	100	100	100	100
2.1.3.7	Ratio kepatuhan IMB	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3.8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Angka	45,16	46,93	49,12	51,03	53,21	55,64	55,64
2.1.3.9	Ratio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3.10	Ratio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**								
2.1.4.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.4.2	Persentase warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	%	-	100	100	100	100	100	100
2.1.4.3	Persentase Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	%	17,37						
2.1.4.4	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	25,44	25	23	20	17,5	15	15

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.1.4.5	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
2.1.5.1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.4	Persentase warga negara yang memperoleh memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.6	Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.1.5.9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100
2.1.5.10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100
2.1.5.11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5.12	Waktu tanggap (response time) penanganan kabakaran	Menit	14	15	15	15	15	15	15
2.1.6	**Urusan Sosial**								
2.1.6.1	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti (%)	%	-	100	100	100	100	100	100
2.1.6.2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti (%)	%	-	100	100	100	100	100	100
2.1.6.3	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti (%)	%	-	100	100	100	100	100	100
2.1.6.4	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti (%)	%	-	100	100	100	100	100	100
2.1.6.5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan	%	-	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana (%)								
2.1.6.6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	-	100	100	100	100	100	100
2.2	**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**								
2.2.1	**Urusan Tenaga Kerja**								
2.2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	24,27	25	27,5	30,00	32,50	35,00	35,00
2.2.1.3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Angka	12,58	15	15	15	15	15	15
2.2.1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.1.5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	8,70	10	10	10	10	10	10
2.2.2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.2.2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,03	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.2	Ratio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	6,47	5	5	5	5	5	5
2.2.2.3	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan	%	43,36	40	40	40	40	35	35
2.2.3	**Urusan Pangan**								
2.2.3.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	%	136,42	93	94	95	96	96	96
2.2.4	**Urusan Pertanahan**								
2.2.4.1	Persentae pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	82,45	83,5	85,00	87,5	88,00	88,00	88,00
2.2.4.5	Persentase izin lokasi tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.4.6	Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.5	**Urusan Lingkungan Hidup**								
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkugan Hidup Daerah	%	79,68 (Baik)	80,00	80,00	80,00	80,50	81,00	81,00
2.2.5.2	Persentaes pengelolaan sampah di wilayah	%	71,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
2.2.5.3	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha kegiatan terhadap ijin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang	%	0	0	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	diterbitkan oleh pemerintah daerah								
2.2.6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
2.2.6.1	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.6.2	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	41,83	75	85	90	95	100	100
2.2.6.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	99,48	100	100	100	100	100	100
2.2.6.4	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	18,18	21	21	21	21	21	21
2.2.7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
2.2.7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,32	2,67	4,94	7,41	8,64	8,64	8,64
2.2.8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2.2.8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,8	1,78	1,75	1,72	1,71	1,70	1,70
2.2.8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Pravalence Rate/mCPR)	%	56,99	60,00	62,5	65	67,5	70,00	70,00
2.2.8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet meet)	%	19,99	16	15	14	13	13	13
2.2.9	**Urusan Perhubungan**								
2.2.9.1	Ratio konektivitas kabupaten	Ratio	30,43	30.45	30.45	30.46	30.46	30.46	30,46
2.2.10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**								
2.2.10.1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan	%	63,64	65	70	75	80	88	88

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	akses internet yang disedikan oleh dinas Kominfo								
2.2.10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.10.4	Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	88,74	100	100	100	100	100	100
2.2.10.5	Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.11	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
2.2.11.1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	7,22	10	10	12,5	12,5	15	15
2.2.11.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	60	70	80	90	100	100
2.2.12	**Urusan Penanaman Modal**								
2.2.12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	81.213. 567.000	5	6	7	8	9	9
2.2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
2.2.13.1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	30,94	34	35	36	37	38	38
2.2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	54,04	59	60	61	62	63	63

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.2.13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	0	0	0	0	1	1
2.2.14	**Urusan Statistik**								
2.2.14.1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.14.2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.15	**Urusan Persandian**								
2.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	36,56	36,60	36,70	36,80	36,90	37,00	37,00
2.2.16	**Urusan Kebudayaan**								
2.2.16.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.17	**Urusan Perpustakaan**								
2.2.17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	49,31	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2.2.17.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	18	15,68	15,70	15,72	15,74	15,76	15,76
2.2.18	**Urusan Kearsipan**								
2.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Angka	75	75	75	75	75	75	75
2.2.18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	Angka	0,67	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								
2.3	**Urusan Pilihan**								
2.3.1	**Urusan Pertanian**								
2.3.1.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,24	5,41	5,42	5,45	5,46	5,47	5,47
2.3.1.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	**Kelautan dan Perikanan**								
2.3.2.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap)	Ton	14.247	20.000	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
2.3.2.1	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	Ton	43,65	43,5	44,5	45,5	46,5	46,5	46,5
2.3.3	**Pariwisata**								
2.3.3.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-52,83	1	1	1	2	3	3
2.3.3.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	%	882,21	1	1	1	2	3	3
2.3.3.3	Tingkat Hunian akomodasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2.3.3.4	Kontribusi sektor pariwisata PDRB harga berlaku	%	0	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
2.3.3.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
2.3.4	**Perdagangan**								
2.3.4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	IUTM/IUTS / SIUP Toko Swalayan)								
2.3.4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	53,68	55	56	57	58	59	59
2.3.4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	18,99	20,00	21,00	22,5	25,00	27,50	27,50
2.3.5	**Perindustrian**								
2.3.5.1	Persentase pertambahan industri kecil dan menengah	%	10,37	6	7	8	9	10	10
2.3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	n/a	100	100	100	100	100	100
2.3.5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
2.3.5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarka oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	%	n/a	0	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	jumlah izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten								
2.3.5.6	Jumlah informasi industri secara lengkap dan terkait	Dok	n/a	0	0	0	0	0	0
2.4	**Urusan Penunjang**								
2.4.1	**Perencanaan dan Keuangan**								
2.4.1.1	Ratio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	19,28	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72
2.4.1.2	Rasio PAD	%	0,56	0,8	0,9	0,10	0,11	0,12	0,12
2.4.1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Predi-kat	Level 2	level 3	level 3+	level 3+	level 3+	level 3+	Level 3+
2.4.1.4	Tingkat Kapabilitas APIP	Predikat	Level 3	Level 3	level 3+	level 3+	level 3+	level 3+	Level 3+
2.4.1.5	Ratio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	58,14%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2.4.1.6	Opini Laporan Keuangan	Predi-kat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.2	**Pengadaan**								
2.4.2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2.4.2.3	Ratio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	98,75	100	100	100	100	100	100
2.4.3	**Kepegawaian**								
2.4.3.1	Ratio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	30,39	32,50	33,00	35,05	36,50	37,00	37,00
2.4.3.2	Ratio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	30,07	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00	60,00
2.4.3.3	Ratio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	13,57	7,5	7,74	8,00	8,12	8,55	8,55
2.4.4	**Manajemen Keuangan**								
2.4.4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	89,65	95	95	95	95	95	95
2.4.4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107,67	100	100	100	100	100	100
2.4.4.3	Manajemen Aset	Angka	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.4.4.4	Ratio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	16,62	5	5	5	5	5	5
3	**ASPEK DAYA SAING PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**								
3.1	Nilai SAKIP	Angka	64,56 (B)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3.2	Nilai Perencanaan Kinerja pada Komponen SAKIP	Angka	22,31	22,35	22,75	22,92	23,00	23,01	23,01

No	Aspek/Fokus /Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3.3	Indek Perencanaan	Indeks	n/a	7,01	7,15	7,20	7,25	7,30	7,30
3.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	11,00	35,00	36,00	37,00	38,00	40,00	40,00
3.5	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	88,89	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	54,8	60,00	62,5	64,00	65,00	67,50	67,50
3.6	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks	29,4	32,5	37,5	40,00	45,00	50,00	50,00
3.7	Indeks Profesional Aparatur	Indkes	48,51	50	53	59	63	65	65
3.8	Persentase Keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
3.9	Persentase Tindak lanjut temuan pemeriksaan eksternal	%	86,82	100	100	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 disajikan sebagiamana dibawah ini :

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2026. Setelah berakhirnya PRJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 perlu disusun RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026-2031 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perkembangan kondisi nasional, provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akibat Pandemi COVID 19 ditambah lagi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak menunjukan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam terhadap aspek Kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, Kerjasama, transparansi dan inovasi serta penuh rasa tanggungjawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Bupati Bolaang Mongondow Selatan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
b. Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan tahun 2026;
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026;
d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 ini;
f. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi,

monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan

g. Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026.